

**NASIONALISASI PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO (PUSLIT
KOKA) JEMBER TAHUN 1957-1962**

Skripsi

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Sejarah dan mencapai gelar
Sarjana Sastra (S1)

Oleh:

**UJANG RUMANTO
NIM. 010110301083**

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah Subhanahu Wata'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang memelihara dan menjaga kami dengan cinta dan kasih sayang yang sempurna dan abadi;
2. Ayah Iskandar dan Ibu Suhemah yang selalu memberi doa, ridho dan mengasuh kami dengan penuh kesabaran dan kasih sayang;
3. Adik-adik-ku tercinta Nuraini Rismawati dan Ardiansyah Rasyidi, Bang Ari, Bang Agus dan Cinta yang selalu kunantikan canda tawa riang gembira dengan kalian;
4. Almamater-ku.

HALAMAN MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok... (Q.S. Al-Hasyr 59: 18)

Perhatikan perbedaan jalan, kemana kau tuju dan kemana jalan ini menuju (Syair Parsi)

Tidak ada kebijaksanaan yang lebih baik dari pada berhati-hati, tidak ada perasaan takut yang lebih baik dari pada menghindari hal-hal yang dilarang dan tidak ada kemuliaan yang lebih baik dari pada sopan santun (Abu Dzarr)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ujang Rumanto

NIM : 010110301083

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulisan ilmiah yang berjudul “Nasionalisasi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslit Koka) Jember Periode Tahun 1957-1962” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan hanya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran karya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,.....Februari 2008
Yang menyatakan,

Ujang Rumanto
NIM. 010110301083

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh panitian ujian Skripsi S1 Jurusan Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Jember.

Pada hari :
Tanggal :Februari 2008
Tempat : Fakultas Sastra
Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Edy Burhan Arifin, SU
NIP. 130 611 156

Anggota I,

Anggota II,

Dra. Latifatul Izzah, M. Hum.
NIP. 131 960 494

Drs. Nawivanto, M.A., Ph.D.
NIP. 131 975 316

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Sastra,

Prof. Dr. Samudji, MA.
NIP. 130 531 973

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesabaran dan keteguhan hati kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Penulis menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan-bantuan yang tak ternilai harganya kepada:

1. Dr. Samudji, MA, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember;
2. Dra. Siti Sumardiati, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Jember;
3. Drs. Edy Burhan Arifin, SU, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar dan bijaksana ketika memberikan bimbingan pada penulis. Kritik dan saran beliau menumbuhkan semangat pada penulis untuk menjadi lebih baik dalam menyusun skripsi;
4. Dra. Latifatul Izzah, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah bersedia meluangkan waktu di antara kesibukan-kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan arahan pada penulis hingga terselesainya skripsi ini;
5. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D., selaku Dosen Penguji, dan segenap Dosen Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember;
6. Segenap petugas Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember dan Perpustakaan Pusat Universitas Jember yang telah menyediakan cukup banyak buku, karya ilmiah dan literatur sebagai bahan acuan dan penuntun penulisan sehingga penulisan skripsi ini dapat terarahkan;
7. Dr. Sutanto Abdullah selaku kepala bidang penelitian di Lembaga Puslit Kopi dan Kakao di Kaliwining yang telah bersedia melonggarkan waktu dan fikiran di antara kesibukan-kesibukan beliau untuk menyediakan arsip dan literatur bagi penulis guna penulisan skripsi ini;
8. Bapak Agus Budi, Bapak Edi, Ibu Yani, Bapak Usman, Ibu Lis, Bapak Yusianto, Bapak Ignatius Hartana, Bapak Totok Suharsono, Bapak H. Jalim

dan segenap pegawai Lembaga Puslit Koka yang telah menyediakan waktu untuk menuangkan gagasan, pemikiran, pengarahan dan tuntunan demi penulisan skripsi ini;

9. Ayah Iskandar dan Ibu Suhemah dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan doa dan dorongannya demi terselesaikannya skripsi ini;

10. Teman-teman seperjuangan dalam iman, ilmu dan canda-tawa dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk kalian semua atas kebersamaannya selama ini.

Semoga tulisan ini berguna bagi kita semua. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat lebih banyak kekurangannya, maka kritik dan saran yang akan bermanfaat untuk lebih menyempurnakan skripsi ini, sangat penulis nantikan.

Jember,.....Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	x
DAFTAR ISTILAH	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tinjauan Pustaka	8
1.4 Pendekatan dan Teori	15
1.5 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	16
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.7 Sistematika Penulisan	19
Bab 2. MENJELANG NASIONALISASI PUSLIT KOKA	20
2.1 Awal Berdirinya <i>Besoekisch Proefstation</i>	20
2.1.1 Persaingan Perdagangan Internasional.....	23
2.1.2 Kebutuhan Akan Pengembangan dan Peningkatan Produksi	27
2.2 Berdirinya <i>Besoekisch Proefstation</i>	30
2.3 Beberapa Peristiwa Nasional Menuju Nasionalisasi Puslit Koka Tahun 1949-1957	39
2.3.1 Kegagalan Mosi Indonesia Pada Sidang Umum PBB	39

2.3.2 Reaksi Keras Presiden Soekarno.....	43
2.3.3 Lahirnya Keputusan Penguasa Militer/ Menteri Pertahanan No.1063/PMT/1957.....	45
Bab 3. NASIONALISASI PUSLIT KOKA JEMBER.....	49
3.1 Menuju Nasionalisasi.....	49
3.1.1 Kemunduran Puslit Koka Jember (CPV Jember).....	49
3.2 Nasionalisasi Puslit Koka.....	62
3.2.1 Nasionalisasi Perkebunan di Karesidenan Besuki	64
3.2.2 Proses Nasionalisasi Puslit Koka	69
3.2.3 Diangkatnya Ir. Ong An Pang.....	85
3.3 Dampak Nasionalisasi.....	98
3.3.1 Para Peneliti Belanda Meninggalkan Lembaga	98
3.3.2 Keinginan Pegawai Untuk Meninggalkan Lembaga.....	104
3.3.3 Masalah Kewarganegaraan Lauw Siek Liem Tahun 1962..	110
BAB 4. KESIMPULAN.....	122
DAFTAR PUSTAKA	126

LAMPIRAN-LAMPIRAN

	Hal
LAMPIRAN 1	: Surat Ijin Penelitian.....139
LAMPIRAN 2	: Peta Kebun-kebun Ex. Karesidenan Besuki.....140
LAMPIRAN 3	: Tabel Penyebaran Penanaman Komoditi Pertanian Ekspor Hindia Belanda dan Dunia Tahun 1817-1915.....141
LAMPIRAN 4	: Pendirian <i>Besoekisch Proefstation</i> atau <i>Opgericht</i> <i>Besoekisch Proefstation</i> tanggal 10 Desember 1910.....144
LAMPIRAN 5	: Laporan Hasil Rapat <i>Besoekisch Proefstation</i> Pada Tanggal 4 April 1912150
LAMPIRAN 6	: Laporan Hasil Rapat <i>Besoekisch Proefstation</i> Pada Tanggal 21 Februari 1913.....154
LAMPIRAN 7	: Laporan Keuangan <i>Besoekisch Proefstation</i> Tahun 1913.....157
LAMPIRAN 8	: <i>Mededeelingen van het Besoekisch Proefstation No. 5,</i> <i>Toespraak van den T. Ottolander, Tweeden Voorzitter van</i> <i>HeT Bestuur van het Besoekisch Proefstation</i>158
LAMPIRAN 9	: Laporan Hasil Rapat <i>Besoekisch Proefstation</i> Pada Tanggal 28 Februari 1914.....163
LAMPIRAN 10	: Surat Edaran Direktur CPV Jember J.C. van Schoonneveldt No. 19 Perihal kenaikan tunjangan kemahalan tambahan pegawai-pegawai bulanan CPV Jember, Jember 19 April 1951.....166
LAMPIRAN 11	: Bekendmaking van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, Zaterdag, 7 Djuli 1956.....167
LAMPIRAN 12	: Daftar Jumlah Pegawai CPV se-Indonesia, Jakarta-kota, 6 Desember 1957.....168
LAMPIRAN 13	: Surat mengenai <i>exit-permits</i> dari CPV Bogor kepada CPV

	LAMOJ Jember, 10 Desember 1957.....	169
LAMPIRAN 14	: Keputusan Penguasa Militer/ Menteri Pertahanan No. 1063/PMT/1957.....	170
LAMPIRAN 15	: Surat Edaran dari Direktur CPV Bogor J.T. Wassink Kepada Direktur CPV L.A.M.O.J. <i>Besoekisch Proefstation</i> di Jember Tentang Pengangkutan Para Pegawai Belanda dari CPV ke Negeri Belanda Tanggal 13 Desember 1957.....	172
LAMPIRAN 16	: Surat mengenai <i>Exit-Permits</i> dari Ong An Pang kepada segenap pegawai Belanda di CPV Jember.....	173
LAMPIRAN 17	: Tabel Perkembangan Tahun Biaya BPPB Jember dan Kebun-kebun Percobaannya sejak 1 Januari 1958 s/d 1 Januari 1968	174
LAMPIRAN 18	: Surat Pemberitahuan oleh Kementerian Perburuhan bahwa CPV telah diambilalih pemerintah tertanggal 19 Februari 1958.....	175
LAMPIRAN 19	: Instruksi Penguasa Perang Pusat No.Instr/Peperpu/089/1959, Jakarta, 25 Juli 1959.....	176
LAMPIRAN 20	: Surat Edaran Presiden/ Perdana Menteri RI No. 1 Tahun 1959, Bogor, 27 Juli 1959.....	178
LAMPIRAN 21	: Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat 1 Jawa Timur No. KP2-72/12/1959 tanggal 14 Desember 1959.....	179
LAMPIRAN 22	: Instruksi Dewan Pimpinan BANAS (Badan Nasionalisasi) No. K/077/BANAS/60 tanggal 2 Maret 1960.....	181
LAMPIRAN 23	: Daftar formasi pegawai BPPB Jember Tahun 1962.....	182
LAMPIRAN 24	: Foto-foto.....	185

DAFTAR ISTILAH

Nasionalisasi	: Proses, cara, perbuatan (hal) menjadikan sesuatu (terutama milik asing) menjadi milik bangsa atau negara, yang biasanya diikuti dengan penggantian yang merupakan kompensasi.
Proefstation	: Laboratorium tempat percobaan dalam lapangan pertanian
Tabaksonderneming	: Perusahaan perkebunan yang mengusahakan penanaman tembakau
Bergcultures	: Tanaman perkebunan yang ditanam di wilayah pegunungan atau dataran tinggi seperti kopi, kakao dan karet.
Ondernemer	: Pengusaha atau pemilik perkebunan
Verslag	: Laporan aktifitas kelembagaan yang telah dilakukan dalam periode satu tahun
Bestuur	: Para pengurus atau penyelenggara lembaga
Algemeen	: Bersifat umum
Proeftuin	: Kebun Percobaan sebagai lahan pembibitan dan praktek penanaman komoditi-komoditi perkebunan hasil penelitian

CPV Jember	: Pusat atau lembaga atau Balai tempat berkumpulnya aktifitas-aktifitas penelitian perkebunan berlokasi di Jember
Administratur	: Penyelenggara atau pengelola perkebunan
Nogosariestaat	: Wilayah Perkebunan yang berlokasi di desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
Sinder/ Ziender	: Kepala atau pimpinan Perkebunan
Erfpacht	: Jenis hak sewa tanah terhadap negara selama 75 tahun yang berlaku pada jaman kolonial Belanda.
Penguasa Perang	: Pemegang hak komando atas perang atau pengamanan negara
Syndicaat	: Gabungan pengusaha-pengusaha besar
Manifesto	: Pernyataan umum yang disampaikan seseorang dalam bentuk pidato atau tulisan
Mededeelingen	: Pengumuman atau pemberitaan
GRANAT	: Nama suatu gerakan massa di Jember pada saat bangsa Indonesia mengumumkan pernyataan merebut Irian Barat

Deportasi : Pengangkutan sejumlah orang asing ke luar negeri

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1945 hingga tahun 1961¹ arus pergolakan dan perubahan nasional terjadi begitu cepat. Bangsa Indonesia mengalami berbagai macam peristiwa penting sebagai proses menuju kemerdekaan yang seutuhnya. Salah satu peristiwa penting tersebut yakni nasionalisasi lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1957. Kebijakan nasionalisasi lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan Belanda menjadi hal penting bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Nasionalisasi tersebut tidak hanya bermakna pada terjadinya proses upaya pengalihan kepemilikan dari modal asing ke masyarakat pribumi atau merubah status hukum dari milik Belanda menjadi milik Indonesia, tetapi lebih dari itu bermakna sebagai upaya mewujudkan ide nasionalisasi. Nasionalisasi perusahaan dan lembaga-lembaga asing merupakan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah Indonesia guna menanggulangi berbagai masalah ekonomi. Nasionalisasi dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mensukseskannya, pemerintah melibatkan segenap kekuatan rakyat mulai dari para buruh hingga massa pendukung partai. Nasionalisasi berjalan secara radikal dan berani. Padahal ketika itu gerakan separatis daerah tengah gencar-gencarnya mencoba meruntuhkan bangunan kokoh nasionalisme.

Persoalan lembaga-lembaga asing di Indonesia merupakan persoalan yang cukup rumit karena berkaitan erat dengan kelangsungan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, persoalan lembaga-lembaga asing sangat rentan terhadap timbulnya perebutan asetnya antara penguasa pribumi dengan para pemilik lembaga. Membicarakan masalah penguasaan lembaga-lembaga asing, tentu tidak lepas dari pemerintah dan pemilik lembaga, karena kedua pihak memiliki keterikatan hubungan satu dengan lainnya atas lembaga terutama ketika keduanya

¹ Hingga tahun 1961 - selama tahun ini tengah berlangsung Demokrasi Terpimpin - masih terjadi pergolakan bangsa seperti gejolak di daerah dikarenakan penerapan Demokrasi Terpimpin. Pergolakan pada periode tahun 1945-1961 adalah relatif karena pada tahun berikutnya masih ada pergolakan lagi. Lihat dalam, I.G. Krisnadi, *Sejarah Indonesia Kontemporer*, (Jember: Universitas Jember, 2000), hlm. 35.

terlibat dalam suatu perselisihan. Pihak asing melakukan kolonisasi ekonomi sementara penguasa pribumi melakukan dekolonisasi ekonomi. Sejauh ini, keberadaan penguasa pribumi umumnya berada pada posisi lemah dan mudah dikelabui pemilik lembaga asing. Hal ini dapat terlihat bahwa masih ada diantara aset kekayaan atau sumber-sumber daya alam bangsa Indonesia yang pengelolaannya masih dikuasai bangsa asing hingga awal tahun 1950-an. Belanda masih menguasai perkebunan-perkebunan besar, pertambangan, air dan gas. Kenyataan lain menyebutkan bahwa bagian terbesar dari sektor-sektor ekonomi modern bangsa Indonesia masih dimiliki Belanda². Sektor ekonomi modern di Indonesia saat itu adalah industri-industri padat modal skala besar, sektor jasa-jasa modern seperti perbankan dan perdagangan besar dan jasa-jasa pelayanan publik seperti listrik, komunikasi dan transportasi³.

Disamping itu dalam jajaran birokrasi lembaga-lembaga penting negara⁴, banyak jabatan senior dan penting lainnya sejak awal tahun 1950-an masih diduduki orang-orang Belanda. Jumlah mereka kurang lebih 6.000 orang⁵. Misalnya, jabatan Gubernur Bank Java (Javasche Bank, cikal bakal Bank Indonesia) dan Kepala Direktorat Dewan Pengendalian Devisa, di kedua lembaga tersebut orang-orang Belanda masih tetap menjadi orang penting⁶. Bahkan dalam jajaran Dewan Direktur Bank Java, hanya terdapat satu direktur berkewarganegaraan Indonesia asli sedangkan yang lain masih orang Belanda. Di Departemen Keuangan pun masih ada pejabat Belanda.

² Benjamin Higgins, *Thought and Action: Indonesian Economic Studies and Policies in the 1950s*, Dalam Buletin berjudul: *Indonesian Economic Studies*, Vol. 26, No. 1, Tahun 1990, hlm 40. Lihat dalam, Thee Kian Wie, *Akar-akar Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, 2001, hlm. 2.

³ Awal tahun 1950-an, sektor-sektor ekonomi tersebut diperkirakan meliputi 25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan kurang lebih 10 persen dari angkatan kerja Indonesia, *Ibid*.

⁴ Lembaga penting negara adalah lembaga warisan kolonial Belanda yang begitu strategis apabila dikuasai bangsa Indonesia terutama saat-saat jatuhnya ekonomi bangsa pada tahun 1950-an. Lembaga-lembaga tersebut misalnya Bank Java, Dewan Pengendali Devisa dan Departemen Keuangan.

⁵ Thee, *loc.cit*.

⁶ Higgins, *loc.cit*.

Pengambilalihan atau penguasaan aset-aset penting perekonomian bangsa yang berakar pada masalah kolonialisme ekonomi bangsa Indonesia merupakan fenomena sekaligus kajian yang cukup penting di Indonesia. Keberadaan orang-orang asing di tengah tumbuhnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia, menjadi pemicu terhadap benturan kepentingan akibat kesenjangan yang lebar dalam hal gerakan dekolonisasi ekonomi bangsa oleh pemerintahan pribumi dibantu massa. Benturan kepentingan tersebut semakin meluas, terjadi secara radikal dan berani di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk mewujudkan keadaan tersebut, menurut R. Saksono Prawirohardjo, bangsa Indonesia sebelumnya harus berjuang terlebih dahulu melepaskan perasaan ragu-ragu dalam mengambilalih lembaga dan perusahaan-perusahaan milik bangsa asing⁷.

Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terdapat persoalan nasionalisasi lembaga milik Belanda yang penting untuk dikaji. Kondisi tersebut tentu tidak terlepas dari potensi Jember menyumbangkan devisa negara dari sektor perkebunan dan penelitian perkebunan, namun pemerintah daerah Jember masih belum optimal dalam menggali potensi yang ada. Di dalam wilayah kabupaten Jember, nasionalisasi yang menonjol adalah nasionalisasi perusahaan perkebunan dan lembaga penelitian perkebunan.

Kemajuan industri perkebunan ditentukan oleh keunggulan produk dan pemasaran produk komoditi perkebunan yang dihasilkan. Keunggulan produk komoditi perkebunan bergantung kepada kinerja penanaman dan manajemen penelitian perkebunan. Puslit Koka Jember merupakan salah satu lembaga penting bagi keunggulan tersebut karena di tempat tersebut dilakukan penelitian tanaman perkebunan. Begitu penting arti penelitian perkebunan di lembaga tersebut, maka sudah sewajarnya persoalan yang menyangkut penelitian dan penguasaan atasnya, menjadi hal yang penting bagi bangsa Indonesia demi pemulihan ekonomi bangsa.

Puslit Koka Jember didirikan oleh gabungan pengusaha perkebunan tembakau dengan pengusaha perkebunan tanaman gunung (karet, kopi dan kakao atau coklat) se-Karesidenan Besuki. Penelitian lembaga ini bertujuan agar

⁷ R. Saksono Prawirohardjo, Organisasi PPN Sepanjang Masa. Dalam *Warta PPN*, 1961, hlm. 368.

penyelesaian berbagai persoalan menyangkut tembakau, kopi, karet dan kakao dilakukan di lembaga dan pihak perkebunan langsung mempraktekkan temuan-temuan hasil penelitian. Tujuannya agar para pelaku bisnis perkebunan mampu unggul dan bertahan pada setiap dimensi persaingan. Mengingat keterbatasan yang ada, para pelaku bisnis perkebunan sangat mengharapkan bantuan institusi penelitian perkebunan untuk menghasilkan inovasi yang tepat.

Hampir semua pihak yang berkepentingan terhadap perkebunan dan lembaga penelitian perkebunan adalah orang Belanda, China dan Swiss. Mereka adalah peneliti, kepala kebun, pegawai lapangan, kepala kearsipan dan administratur. Hal tersebut mengandung arti bahwa permasalahan perkebunan dan penelitian perkebunan ketika dinasionalisasi hanya dapat diselesaikan oleh mereka. Nasionalisasi terhadap Puslit Koka adalah pengambilalihan terhadap kepemilikan atas lembaga antara pemerintah RI dengan Belanda. Nasionalisasi tersebut muncul akibat lahirnya Keputusan Penguasa Militer/ Menteri Pertahanan No. 1063/PMT/1957 tanggal 9 Desember 1957⁸. Sejak diberlakukannya keputusan Penguasa Militer tersebut tentang nasionalisasi perusahaan perkebunan beserta lembaga penyelidikan ilmiahnya, pihak perkebunan dan lembaga penelitiannya pergi ke luar negeri membawa serta ide pengembangan, Rencana Kerja Tembakau (RK Tembakau), konsep penelitian dan lain-lain. Konsekuensi dari kenyataan tersebut yakni lembaga penelitian perkebunan Jember akan terjebak ke dalam satu situasi lembaga yang penuh dengan masalah yang dapat menghambat munculnya inovasi-inovasi penting perkebunan. Disisi lain sejumlah modal atau dana yang seharusnya tersedia, dibawa pulang oleh mereka. Padahal jika dilihat dari perjalanan sejarah yang panjang lembaga ini, ketersediaan dana merupakan hal yang sangat penting dan sebagai sumber utama muncul tidaknya persoalan lain. Keterbatasan dana dapat menyebabkan munculnya beberapa persoalan yang akan menjadi bersifat kronis dan akhirnya tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Akibatnya timbul ide agar lembaga tersebut hendaknya dibubarkan saja.

⁸ Dikutip dari Brosur berjudul: *Keterangan Singkat Tentang Balai Penelitian Perkebunan Bogor*, 29 November 1974, hlm. 2.

Tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh penguasa militer berupa peringatan terhadap orang Belanda yang ada di lembaga agar segera pergi meninggalkan lembaga. Tindakan tersebut memaksa orang Belanda agar pergi dari lembaga. Sebagian besar para pegawai berkebangsaan Belanda langsung pergi dan ada beberapa diantaranya yang memilih menjadi warga negara Indonesia dan bertahan hidup di Jember hingga akhir hayatnya.

Akibat lain yang ditimbulkan dari pengambilalihan yang dilakukan tentara berdasarkan peringatan Penguasa Militer adalah pihak tentara selanjutnya tidak mampu melakukan sesuatu untuk melanjutkan proses-proses yang ada di lembaga terutama yang berhubungan dengan penelitian. Tentara hanya berpandangan bahwa Puslit Koka Jember harus dikuasai bangsa Indonesia. Lembaga Puslit Koka Jember sangat bergantung kepada siapa yang mendirikan dan sementara mereka telah pergi ke luar negeri. Disisi lain, pemerintah pun tidak mengerti perihal penelitian perkebunan. Dalam situasi seperti ini Presiden, militer, pihak perkebunan dan para pegawai Puslit Koka pribumi tidak bersedia melanjutkan estafet pengelolaan Puslit Koka Jember. Akibatnya lembaga menjadi vakum.

Situasi tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, namun pada tahun 1962 muncul Ir. Soenaryo yang berhasil memulihkan kembali keadaan dan penelitian kembali berjalan. Aksi nasionalisasi Puslit Koka Jember dilandasi oleh semangat merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Keterlibatan tentara dalam gerakan pengambilalihan Puslit Koka Jember, sesungguhnya didasari pada motif untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Ketidaktahuan tentara menyangkut persoalan penelitian perkebunan, melahirkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 247/Um/1957 tanggal 11 Desember 1957.

Skripsi ini berjudul " Nasionalisasi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslit Koka) Jember Periode Tahun 1957-1962". Adapun maksud dari judul skripsi adalah menjelaskan atau menggambarkan terjadinya peristiwa nasionalisasi pusat penelitian kopi dan kakao (puslit koka) Jember yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1957-1962. Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan, dalam skripsi ini perlu dijelaskan arti kata demi kata dari judul skripsi. Nasionalisasi adalah proses, cara, perbuatan (hal) menjadikan sesuatu

(terutama milik asing) menjadi milik bangsa atau negara, yang biasanya diikuti dengan penggantian yang merupakan kompensasi⁹. Pusat adalah pokok pangkal yang jadi tumpuan kegiatan¹⁰. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran¹¹. Kopi adalah pohon yang banyak tumbuh di Asia, Amerika Latin dan Afrika, buahnya digoreng dan ditumbuk halus-halus dijadikan bahan pencampuran minuman dan Kakao adalah pohon cokelat, yang bijinya dibuat bubuk untuk minuman dan sebagainya¹². Definisi judul secara lengkap: Nasionalisasi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslit Koka) Jember Periode Tahun 1957-1962 adalah proses menjadikan Lembaga Puslit Kopi dan kakao yang semula milik Belanda menjadi milik bangsa atau negara Indonesia diikuti dengan penggantian kepengurusannya yang merupakan kompensasi pada periode tahun 1957-1962.

Batasan temporal (waktu) atau periodisasi waktu yang penulis pilih adalah antara tahun 1957-1962 dengan alasan bahwa mulai tahun 1957 telah dikeluarkan Surat Keputusan Penguasa Militer/ Menteri Pertahanan No. 1063/PMT/57 tanggal 9 Desember 1957 tentang nasionalisasi perusahaan perkebunan/ pertanian termasuk diantaranya lembaga-lembaga penyelidikan ilmiah di lapangan pertanian. Keputusan ini adalah perangkat hukum yang paling awal mengenai nasionalisasi perusahaan perkebunan Belanda termasuk lembaga penelitian perkebunan.

Tahun 1962 sebagai batas akhir penulisan karena pada tahun tersebut Ir. Soenaryo diangkat menjadi Direktur Puslit Koka. *Moment* tersebut sekaligus mengakhiri dominasi kekuasaan asing atas lembaga Puslit Koka Jember. Tahun 1962 juga sebagai *momentum* perubahan lembaga menuju ke arah yang lebih baik dan merupakan titik awal perjuangan Soenaryo beserta staf dalam memajukan

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 684.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 801. Lihat pula dalam Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 48.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm. 300.

¹² Depdikbud, *op. cit.*, hlm. 432 dan 525.

penelitian perkebunan yang sejak tahun 1957 vakum dan berjalan tersendat-sendat. Aktifitas lembaga sejak tahun 1962 dari hari ke hari semakin menunjukkan kekuatan dengan tingkat kualitas penelitian yang semakin maju. Situasi lembaga pada saat itu mengalami puncak kemajuan, sehingga pemerintah menilai bahwa aktifitas yang dilakukan Ir. Soenaryo beserta staf semakin membawa lembaga kepada suatu perkembangan yang baik.

Scope spacial atau batasan wilayah tulisan ini dibatasi pada areal wilayah Jember Kota yang merupakan tempat terjadinya peristiwa serta yang menjadi topik kajian dalam skripsi ini. Pembatasan wilayah kajian dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas wilayah penelitian guna mendapatkan sumber yang dapat dipertranggungjawabkan.

Pemilihan judul ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain:

- 1) Studi historis peristiwa pengambilalihan lembaga-lembaga asing sebagai akibat dari upaya pemulihan ekonomi bangsa merupakan wacana yang menarik sebagai salah satu bentuk perwujudan dari semangat nasionalisme yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melalui keputusan penguasa militer yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terhadap Puslit Koka Jember. Keputusan penguasa militer tersebut dianggap pihak Puslit Koka Jember sebagai kebijakan yang begitu penting untuk dilakukan.
- 2) Peristiwa pengambilalihan lembaga-lembaga asing di Indonesia merupakan era yang penting bagi perjalanan sejarah keindonesiaan yang berkaitan erat dengan masalah ekonomi bangsa sehingga pemerintah turun tangan.
- 3) Sebagai kajian historis dalam rangka mengetahui penyebab dan langkah-langkah penting pihak Puslit Koka dalam memperjuangkan kelangsungan hidup lembaga pada tahun 1957-1962.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, muncul beberapa permasalahan yang akan dikupas dalam skripsi ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut.

1. Mengapa Puslit Koka dinasionalisasi pemerintah?

2. Langkah-langkah apa yang dilakukan pihak Puslit Koka Jember dalam menjalankan program nasionalisasi di lembaganya?
3. Dampak-dampak apa saja yang muncul pasca nasionalisasi Puslit Koka?

1.3 Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai nasionalisasi lembaga-lembaga asing di Indonesia pada umumnya dan di Karesidenan Besuki pada khususnya, belum banyak mendapat perhatian dari para ilmuwan dan penulis sejarah, apalagi mengenai lembaga penelitian perkebunan. Perhatian akan penulisan tentang Puslit Koka Jember hanya ditulis oleh pihak lembaga itu sendiri dan oleh beberapa pengamat penelitian perkebunan dan itupun ditulis masih dalam beberapa singgungan kecil. Pengamat penelitian perkebunan yang peduli terhadap penyelamatan sejarah lembaga penelitian di Indonesia adalah Hastjarjo Soemardjan dan Rahdi S. Pudjosunaryo, Sjarifudin Baharsjah, Soegijanto Padmo dan Edhie Djatmiko dan Edy Burhan Arifin.

Menurut Hastjarjo Soemardjan dan Rahdi S. Pudjosunaryo¹³, sejak program nasionalisasi dimulai, terjadi perubahan-perubahan mengenai pengelolaan dan penyandang dana bagi kegiatan penelitian perkebunan. Dari perjalanan sejarah yang panjang, dapat diketahui dua masalah utama institusi penelitian perkebunan yang saling berkaitan erat, yakni ketersediaan dana dan kemantapan status kepegawaian. Ketika program nasionalisasi di mulai, Puslit Koka Jember mengalami krisis dana terparah sepanjang perjalanannya. Dampak dari ini adalah para pegawai banyak yang pindah atau mengundurkan diri dari lembaga karena statusnya tidak jelas.

Hastjarjo Soemardjan dan Rahdi S. Pudjosunaryo masih belum detail dalam uraiannya menyangkut persoalan persaingan perdagangan hasil-hasil perkebunan, terjadinya serangan hama dan penyakit tanaman yang mampu menurunkan produksi, pendirian Balai Penelitian Perkebunan utamanya

¹³ Hastjarjo Soemardjan dan Rahdi S. Pudjosunaryo, *Problematika Pengelolaan Penelitian Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Perkebunan, 1998), hlm. 28.

Besoekisch Proefstation dan nasionalisasi lembaga-lembaga penelitian tersebut utamanya Puslit Koka Jember.

Sjarifudin Baharsjah menyebutkan bahwa Kebun Raya Bogor atau *s' Land Plantentuin* berdiri pada tahun 1817¹⁴. Kebun Raya Bogor sebagai salah satu Lembaga Penelitian tanaman teh, kina, kopi, tembakau dan karet, sesungguhnya tidak berdiri pada tahun tersebut. Para pemilik perkebunan pun ketika itu belum memiliki kesadaran akan pentingnya penelitian perkebunan.

Dalam pembahasan lain, Sjarifudin memaparkan bahwa hasil kesepakatan bersama antara pemerintah RI dengan Belanda dalam KMB tahun 1949, dalam hubungannya dengan penelitian pertanian adalah kedua belah pihak telah menyusun Rencana Kesejahteraan Istimewa (*Bijzonder Welvaartsplan 1949*) yang kemudian ditindak lanjuti pemerintah RI dan para pemilik perkebunan di Indonesia yakni:

1. Intensifikasi penanaman padi
2. Perbaikan pertanian lahan kering
3. Perluasan lahan guna penanaman cokelat
4. Menggiatkan pemberantasan hama dan penyakit tanaman pada padi dan kacang-kacangan¹⁵

Laporan dari keempat program nasional tersebut tidak ditulis dalam pembahasan Sjarifudin berikutnya.

Telah diketahui bahwa pada periode Revolusi Indonesia tahun 1950-1959, segenap bangsa Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi yang luar biasa. Pemerintah lebih mencurahkan perhatiannya terhadap masalah Irian Barat. Prestasi-prestasi sektor pertanian ketika itu hampir tidak ada. Hal-hal yang justru terjadi adalah ekspor kian menurun, pencurian tanaman perkebunan di Sumatera dan Kalimantan, sengketa lahan-lahan pertanian dan perkebunan, sektor penelitian

¹⁴ Sjarifudin Baharsjah, *Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Dalam, International Quality Publication, *Perekonomian Indonesia Memasuki Milenium ke Tiga*, (London: International Quality Publication, 1997), hlm. 190.

¹⁵ *Ibid.*

pertanian tersendat-sendat oleh karena para peneliti Belanda pergi ke luar negeri dan harga beras yang semakin mencekik leher.

Dalam pembahasan lain, Sjarifudin menyebutkan bahwa pada tahun 1949, perkebunan-perkebunan yang berada di bawah *Gouvernement Landbouw Bedrijven* (GLB), diambil alih pemerintah RI. Totalitas pengambilalihan terhadap perkebunan-perkebunan kemudian dilakukan pemerintah berdasarkan Keputusan Penguasa Militer No. 1063/PMT/1957 pada tanggal 9 Desember 1957 dan sebagai realisasi dari aksi TRIKORA. Keputusan penguasa militer tersebut selanjutnya telah disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 pada tanggal 16 April 1958. Uraian tersebut menjadi masukan penting dalam tulisan ini.

Soegijanto Padmo dan Edhie Djatmiko lebih memusatkan penelitiannya terhadap lembaga penelitian tembakau. Mereka menulis bahwa sejak berdirinya, lembaga penelitian tembakau memusatkan penelitiannya terhadap masalah teknis-agronomis, yakni persiapan di lahan dalam membuka tanah, pembibitan yang baik, jarak tanam, pemeliharaan tanaman, pemupukan, cara memanen, pengeringan, sortasi dan fermentasi¹⁶. Hal-hal tersebut yang menjadi keluhan utama para petani pribumi maupun Belanda sejak awal abad ke-20. Lembaga-lembaga penelitian yang selanjutnya didirikan untuk menangani masalah tersebut adalah *s' Land Plantentuin*, *Deli Proefstation*, *Tabaksproefstation* dan *Besoekisch Proefstation*.

Dalam paragraf lain, Soegijanto Padmo dan Edhie Djatmiko menulis bahwa lembaga penelitian tembakau telah ada sejak jaman kolonial Belanda. Keduanya masih belum menyebutkan secara detail nama-nama lembaga penelitian dimaksud dan kapan lembaga tersebut berdiri. Hal ini penting demi kesempurnaan tulisan.

Karya sejarah lainnya adalah tulisan dari Edy Burhan Arifin yang berjudul “Emas hijau di Jember: Asal Usul, Pertumbuhan dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980”. Edy Burhan Arifin membahas penyebab utama didirikannya *Besoekisch Proefstation*. Disebutkan

¹⁶ Soegijanto Padmo dan Edhie Djatmiko, *Tembakau: Kajian Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 65.

bahwa berdirinya *Besoekisch Proefstation* disebabkan oleh mutu tanaman tembakau yang rendah sehingga turun harganya di pasar dunia dan tidak mampu menghasilkan devisa yang besar. Untuk meningkatkan kualitas tanaman budi daya tembakau, didirikanlah *Besoekisch Proefstation*¹⁷. Edy Burhan memfokuskan tulisannya terhadap tembakau sehingga seolah-olah penyebab berdirinya *Besoekisch Proefstation* adalah mutlak karena munculnya permasalahan tembakau. Hal-hal seperti bagaimana perdagangan tembakau Jawa di pasar dunia, persaingannya dengan tembakau India, dengan komoditi teh dan karet misalnya, kemunduran kelompok para *Ondernemer Bergcultures*, gangguan jamur, virus dan lain-lain yang menyebabkan mutu daun tembakau menjadi rendah, belum diungkapkan padahal hal-hal tersebut penting¹⁸. Masih terdapat aspek penting lain sebagai penyebab berdirinya *Besoekisch Proefstation* misalnya keluhan kelompok *Onderneming Voor Bergcultures* terhadap perkebunan mereka dan lain-lain.

Karya tulis bidang perkebunan yang lain adalah skripsi dari Kunhendra Dilitomo¹⁹. Kunhendra menulis bahwa untuk meningkatkan cara penanaman yang baik dan benar maka pada tahun 1910 didirikanlah *Besoekisch Proefstation*. Berdirinya *Besoekisch Proefstation* tidak semata-mata disebabkan alasan di atas. Terdapat banyak aspek yang melatarbelakangi berdirinya *Besoekisch Proefstation*.

Sehubungan dengan kebijakan nasionalisasi, terdapat sebuah karya penting sebagai perintis penulisan peristiwa tersebut, yakni *Disertasi* oleh John O. Sutter. Sutter menemukan 9 tipe perubahan di dalam perusahaan dan lembaga-lembaga asing di Indonesia ketika bergulirnya aksi nasionalisasi, yakni:

¹⁷ Edy Burhan Arifin, "Emas hijau di Jember: Asal Usul, Pertumbuhan dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980", (*Tesis Pascasarjana Jurusan Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, 1989*), hlm. 81.

¹⁸ Salah satu sebab didirikannya *Proefstation* Gula Di Cirebon, Pasuruan dan lain-lain pada tahun 1886 adalah karena intensitas persaingan perdagangan di pasar yang meningkat serta sering terjadi serangan hama dan penyakit baru pada tanaman perkebunan yang diusahakannya. Alasan ini berarti bahwa berdirinya *Proefstation* tidak hanya selalu meliputi masalah kualitas yang rendah dari tanaman dimaksud. Lihat, Hastjarjo Soemardjan dan Rahdi S. Pudjosunaryo, *op.cit.*, hlm. 26.

¹⁹ Kunhendra Dilitomo, "Pelebunan PT. Perkebunan XXVII Jember menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Tahun 1996", (*Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Jember, 2004*).

1. Pengalihan(transfer) bekas perusahaan umum kolonial kepada pemerintah RI
2. Pendirian perusahaan baru milik negara
3. Pengalihan dari perusahaan asing swasta kepada pemerintah RI
4. Peningkatan kontrol pemerintah RI terhadap bisnis asing
5. Pengalihan dari perusahaan asing swasta beserta manajemen organisasinya kepada pemerintah RI
6. Mendirikan perusahaan baru pada sektor yang sebenarnya telah tertutup aksesnya bagi bangsa Indonesia
7. Menumbuhkan semangat keadilan terhadap hak milik atas badan-badan hukum yang telah didirikan asing
8. Peningkatan partisipasi dalam manajemen perusahaan-perusahaan asing
9. Pengembalian penguasaan atas tanah dari perusahaan asing kepada masyarakat Indonesia²⁰

Berdasarkan 9 tipe perubahan tersebut, Lindblad menambahkan beberapa hal lain yang tidak kalah penting, yakni Indonesianisasi tersebut akan secara khusus memberikan peluang bagi munculnya perusahaan swasta baru, upaya untuk meningkatkan partisipasi segenap bangsa Indonesia dalam memegang kunci sektor bisnis dan pengalihan dari perusahaan swasta asing kepada pemerintah RI²¹.

Sebenarnya telah terjadi banyak perubahan pada pemerintah dan lembaga atau perusahaan milik asing, mulai dari segi manajemen kebijakan, kebijakan pemerintah menyangkut persoalan teknis Indonesianisasi, latar belakang Indonesianisasi, aplikasi pengambilalihan di lapangan oleh militer dan pihak pegawai pada perusahaan bersangkutan, bahkan keluhan kedua pihak (pemerintah dan pengelola baru di lapangan dari kalangan pribumi) menyangkut persoalan

²⁰ John O. Sutter, "Indonesianisasi: A Historical Survey of the Rule of Politics in the Institutions of a Changing Economy from the Second World War to the Eve of the General Election, 1940-1955", (*Ph.D. Dissertation* Cornell University, Ithaca, New York, 1959), hlm. 2. Dalam, Thomas Lindblad, *The Importance of Indonesianisasi During the Transition from the 1930s to the 1960s*, (Leiden: Leiden University, 2002), hlm. 3.

²¹ Thomas Lindblad, *Ibid.*

orientasi, cara dan metode pengelolaan yang tepat guna pada bekas perusahaan asing yang bersangkutan dan lain-lain. Hal tersebut dilatar belakangi oleh beragamnya jenis, visi, misi dan manajemen perusahaan terkait yang di ambil alih, yang semuanya menuntut agar kebijakan-kebijakan yang di ambil selanjutnya adalah cocok bagi lembaga bersangkutan, sehingga pengalihan yang terjadi tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia seperti kritikan dari Sjafrudin Prawiranegara dan Mochammad Hatta. Sjafrudin Prawiranegara dan Mochammad Hatta memberikan isyarat bahwa tindakan nasionalisasi adalah tanpa rencana yang matang dan hanya merupakan tindakan sentimen belaka atas perilaku Belanda dalam masalah Irian Barat²². Tindakan pengambilalihan tersebut dapat mendatangkan akibat yang sangat parah bagi perekonomian Indonesia.

Dalam pembahasan lain, Lindblad menegaskan bahwa sejak tahun 1950, perusahaan Belanda di desak agar menyerahkan urusan manajemen perusahaannya kepada bangsa Indonesia. Kenyataan membuktikan bahwa langkah Indonesianisasi yang kemudian diterapkan, masih terlalu lamban²³. Padahal ketika itu, permasalahan ekonomi begitu mendesak untuk dapat segera diatasi. Hal ini membawa dampak semakin memburuknya kondisi penelitian perkebunan setelah Presiden Sukarno dan A.H. Nasution hampir menghilangkan fungsi Departemen Pertanian yang merupakan wakil utama pemerintah pusat dalam meng-akses salah satu sektor penting tersebut.

Terdapat beberapa karya tulis ilmiah lain yang secara spesifik mengangkat masalah nasionalisasi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karya tulis tersebut adalah skripsi dari Zakki Arfani²⁴. Skripsi yang berjudul Nasionalisasi Perkeretaapian di Bandung Tahun 1950-1963. Tulisan Zakky mengandung keunikan, yakni Perusahaan Kereta Api di Bandung merupakan satu-satunya

²² Herbert Feith dan Lance Castles (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. xIii-xIv. Dalam, Tri Chandra Aprianto, "Warisan Kolonial yang Belum (di)selesai(kan): Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan di Jember", 2001, hlm. 15.

²³ Thomas Lindblad, *Op.cit.*, hlm. 18.

²⁴ Zakki Arfani, "Nasionalisasi Perkeretaapian di Bandung Tahun 1950-1963", (*Skripsi* S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 2000).

perusahaan warisan Belanda yang tidak berhasil di kuasai Belanda saat terjadinya Agresi Militer Belanda I dan II pada tahun 1947-1948. Penyebabnya adalah kemenangan pemerintah RI dibantu berbagai pihak dalam mempertahankan perusahaan tersebut secara sungguh-sungguh. Hal ini sangat jauh berbeda dengan nasionalisasi Puslit Koka Jember.

Dalam pembicaraan mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan (termasuk perusahaan Kereta Api), perkebunan dan pabrik-pabrik gula yang terjadi pada November 1957, Zakky berpendapat bahwa nasionalisasi tersebut terjadi karena kemarahan bangsa Indonesia atas sikap Belanda yang tidak menganggap serius dan terkesan meremehkan kongres rakyat Indonesia di Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 10-16 Agustus 1955²⁵. Artinya, penyebab mutlak nasionalisasi perkebunan Belanda beserta lembaga penelitian perkebunan didalamnya yang terjadi pada November 1957 secara umum adalah karena sikap Belanda yang meremehkan kongres rakyat tersebut. Sesungguhnya terdapat penyebab penting lain yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1955-1957, misalnya kegagalan mosi Indonesia menyangkut persoalan Irian Barat dalam Sidang Umum PBB tanggal 29 November 1957 dan sebagainya.

Ong Hok Ham menulis bahwa perusahaan-perusahaan Belanda mulai diambil alih buruh yang kemudian diamankan militer yang meliputi Bank, perusahaan perdagangan, perkebunan dan lain-lain²⁶. Sesungguhnya terdapat hal lain tentang pengambilalihan perusahaan dan lembaga-lembaga di Indonesia yang dilakukan oleh pihak tertentu lain dan bukan buruh, berdasar atas pertimbangan manfaat perusahaan bersangkutan di masa yang akan datang dan pertimbangan tentang siapa pihak yang pantas untuk mengelolanya. Fenomena Indonesianisasi perkebunan dan kesuksesan-kesuksesan yang telah di raih para buruh PKI di perkebunan-perkebunan hingga tahun 1957 telah banyak mempengaruhi posisi-posisi penting dan strategis di perkebunan-perkebunan sehingga profesi strategis

²⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁶ Ong Hok Ham, *Sejarah Ekonomi Kontinuitas dan Perubahan I (1945-1965)*, Dalam, International Quality Publication, *op.cit.*, hlm. 46.

yang dipegang oleh orang pribumi tidak terbatas hanya pada jabatan mandor seperti yang dikatakan Ong Hok Ham.

Salah satu penyebab runtuhnya sektor perkebunan ketika bergulirnya nasionalisasi adalah korupsi. Terdapat kebijakan-kebijakan lain dalam petunjuk teknis nasionalisasi oleh pemerintah yang kelak menyebabkan peluang praktek korupsi di perkebunan menjadi besar. Dengan keterbatasan teknologi ketika itu, hal ini belum pernah terungkap. Hal ini belum menjadi pertimbangan Ong Hok Ham dalam pernyataannya yang berbunyi:

*Bahwa meskipun longgarnya disiplin keuangan dan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil, militer dan karyawan perusahaan-perusahaan negara, gaji kecil dan Inflasi tinggi, kasus-kasus korupsi yang besar tidak terjadi*²⁷.

Uraian Ong Hok Ham tentang demokrasi terpimpin dan sumber dana bagi PKI serta perkembangan etnis Tionghoa, menjadi literatur penting untuk memperbaiki tulisan ini.

Tri Chandra Aprianto²⁸ menyoroti tentang keikutsertaan massa rakyat petani dalam proses nasionalisasi perkebunan di Jember. Tri Chandra Aprianto menjelaskan bagaimana peranan massa petani dalam proses nasionalisasi perkebunan. Massa tani mudah tersusupi komunis. Hal ini belum banyak disinggung dalam penelitian Tri Chandra. PKI sejak tahun 1955 terus melebarkan sayapnya hingga berhasil mengambil hati kalangan buruh perkebunan di Jember. Hasil penelitian Tri Chandra Aprianto tersebut membantu penulis dalam membangun wacana sejarah tentang gerakan buruh di Puslit Koka.

1.4 Pendekatan dan Teori

Langkah yang sangat penting dalam penulisan sejarah adalah tersedianya suatu kerangka penulisan yang mencakup konsep dan teori yang akan dipakai dalam analisa penulisan. Guna mengungkap peristiwa sejarah yang terjadi, perlu

²⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

²⁸ Tri Chandra Aprianto, "Petani dan Nasionalisasi; Keikutsertaan Massa Rakyat Tani dalam Proses Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan di Jember", (*Laporan Akhir Penelitian Fakultas Sastra Universitas Jember*, 2004).

adanya suatu pendekatan sebagai analisa tingkah laku individu atau kelompok dalam suatu peristiwa dan suatu konsep teori sebagai alat analisa terhadap sebab-sebab peristiwa sejarah. Teori yang digunakan sangat penting untuk dipahami karena penulisan akan lebih terarah dan sebagai dasar bagi tulisan sejarah yang deskriptif analitis.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan Sosiologi Ekonomi. Pendekatan sosiologi ekonomi adalah pendekatan yang menggunakan kacamata sosiologis untuk menganalisa aktivitas-aktivitas atau perilaku-perilaku kompleks di dalam suatu lembaga atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup²⁹.

Mengenai Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan teori perilaku lembaga oleh Paul B. Horton dan Chester L. Hunt yang berbunyi:

*”Perilaku lembaga dipengaruhi oleh perbedaan kepribadian individu dalam arti tertentu dan oleh peran yang dilembagakan yang membatasi kebebasan seseorang untuk memilih.”*³⁰

Lembaga adalah proses sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang tersusun, terorganisir atau terstruktur untuk melaksanakan berbagai kegiatan pokok manusia dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat³¹. Pihak Belanda sebagai pengelola lembaga mengambil perilaku patuh ketika nasionalisasi dimulai di lembaganya. Pengganti pimpinan lembaga selanjutnya wajib menjalankan proses nasionalisasi, tetapi tetap dibatasi kebebasannya dalam mengambil kebijakan kelembagaan selama lembaga masih berada di bawah pengawasan pemerintah.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penulisan

²⁹ Neil J. Smelser, *Sosiologi Ekonomi*, (Bahana Aksa, 1987), hlm. 46 dan 63.

³⁰ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Terj. Aminudin Ram dan Tita Sobari, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 248.

³¹ *Ibid.*, hlm. 244 dan 263.

1.5.1 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang dilakukannya nasionalisasi Puslit Koka
2. Untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pihak Puslit Koka Jember dalam nasionalisasi lembaganya
3. Untuk mengetahui dampak apa saja yang muncul berkaitan dengan peristiwa nasionalisasi

1.5.2 Manfaat

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan referensi tambahan untuk menelusuri sejarah Iptek sektor perkebunan
2. Sebagai pengantar menuju penelitian sejarah lembaga-lembaga penelitian perkebunan lain di Indonesia
3. Sebagai acuan untuk menelusuri sejarah Biografi para peneliti bidang perkebunan Belanda

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini adalah metode penelitian sejarah kritis. Metode penelitian sejarah kritis adalah tata cara penulisan sejarah dengan cara mengkaji secara mendalam tentang faktor kausalitas, kondisional, pengumpulan dan penafsiran gejala/ peristiwa/ ide serta unsur-unsur yang merupakan komponen dari proses sejarah untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah, situasi sekarang dan meramalkan yang akan datang.³² Louis Gottschalk mengatakan bahwa metode penulisan sejarah dapat dibahas melalui empat tahap yaitu³³.

³² Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1982), hlm. 145. Lihat pula dalam, Winarno Surachmad, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 125.

³³ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1975), hlm. 35.

1. Mengumpulkan sumber (*Heuristik*) yaitu mengumpulkan objek yang berasal dari jaman itu baik bahan tercetak, tertulis dan lisan yang masih relevan. Sumber yang digunakan dalam tulisan ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data atau dokumen yang berasal dari orang pertama yang mengalami dan mengambil bagian dalam kejadian itu. Menurut bahannya, sumber primer dibedakan menjadi dua, yakni: sumber tertulis (dokumen) dan sumber tidak tertulis³⁴. Data seperti surat keputusan, surat dinas maupun pribadi, undangan, notulen rapat, surat kabar serta surat perintah yang terdapat tanda tangannya langsung dari saksi dapat disebut sumber primer. Sedangkan tidak tertulis adalah berupa foto dan ungkapan lisan saksi. Sumber sekunder merupakan sumber data dari orang kedua yang diceritakannya dan tidak sejaman dengan kejadian dimaksud.
2. Kritik sumber yaitu aktivitas penyeleksian data-data yang diperoleh, mana data yang sesuai dan mana yang tidak sesuai untuk dituangkan dalam tulisan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang otentik dan kredibel. Otentik berarti bahwa sumber ini benar-benar dikeluarkan oleh orang atau instansi yang terkait dengan peristiwa, sedangkan kredibel berarti seberapa jauh isi yang berada dalam sumber itu dapat dipercaya³⁵. Dari aktivitas ini dapat diketahui data yang benar-benar objektif dan yang subjektif. Data yang objektif sangat diharapkan oleh penulis, sehingga tulisan akan lebih mendekati kebenaran.
3. Interpretasi data yaitu aktifitas menghubungkan antar data/ fakta atau merangkaikan fakta-fakta yang berkesesuaian sehingga mempunyai makna dan hidup. Data yang saling berhubungan didasarkan kepada urutan waktu.
4. Historiografi yaitu menyusun kisah sejarah yang logis dan kronologis sesuai dengan urutan waktu. Tahap ini dapat disebut tahap kerja sejarah³⁶. Tema dan

³⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1999), hlm. 94-98.

³⁵ Ibrahim Alfian, "Sejarah dan Permasalahan Masa Kini", dalam Makalah berjudul: *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 12 Agustus 1988*, hlm. 7.

³⁶ Nugroho Notokusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan*, (Jakarta: Dephankam, 1971), hlm. 34-43.

Topik yang disajikan mudah dipahami dan dimengerti. Urutan bab per bab adalah kronologis dari waktu lampau menuju waktu sekarang.

Bentuk penulisan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah memaparkan tulisan peristiwa sejarah sehingga didalamnya terdapat hubungan sebab-akibat, kondisional, kemudian mereka ulang dan menafsirkan secara sistematis. Dalam menyusun tulisan sejarah digunakan hubungan sebab-akibat sehingga akan memenuhi kaidah 5W+H.

1.7 Sistematika Penulisan

Garis besar isi dalam skripsi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang jelas dan sistematis sehingga dapat dilihat isi dan tujuan penulisan ini.

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi enam bab yaitu.

Bab I berisi Pendahuluan. Pembahasan meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Dan Manfaat Penulisan, Metode Pendekatan dan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang semua terbagi ke dalam 7 sub bab.

Bab II memuat tentang menjelang nasionalisasi puslit koka. Pembahasan lebih ditekankan kepada penyebab umum nasionalisasi dengan mengenalkan Puslit Koka terlebih dahulu melalui awal berdirinya Puslit Koka atau *Besoekisch Proefstation* dan berdirinya *Besoekisch Proefstation*. Untuk mempertajam pengenalan dan sebagai gambaran umum kondisi bangsa Indonesia menjelang nasionalisasi, dalam bab 2 ini dibahas beberapa peristiwa nasional menuju nasionalisasi Puslit Koka tahun 1949-1957, yakni meliputi kegagalan mosi Indonesia pada sidang umum PBB, reaksi keras Presiden Sukarno dan lahirnya keputusan penguasa militer/ menteri pertahanan No. 1063/PMT/1957.

Bab III merupakan pembahasan yang memuat tentang nasionalisasi Puslit Koka Jember. Bab ini merupakan bahasan pokok yang memuat pembahasan tentang menuju nasionalisasi, nasionalisasi puslit koka dan dampak yang muncul setelah nasionalisasi Puslit Koka.

Bab IV merupakan bahasan akhir tulisan yang menutup tulisan. Akhir dari tulisan ini ditutup dengan pembuatan daftar pustaka.

BAB 2. MENJELANG NASIONALISASI PUSLIT KOKA

2.1 Awal Berdirinya *Besoekisch Proefstation*

Puslit Koka bukan merupakan satu-satunya lembaga yang berdiri secara tiba-tiba dan tidak terkait dengan pendirian *proefstation-proefstation* (lembaga-lembaga penelitian ilmiah bidang pertanian) sejenis sebelumnya dan oleh keadaan-keadaan umum bidang pertanian¹. Kondisi awal menjelang berdirinya *Besoekisch Proefstation*, sejak tahun 1886 telah berdiri sebanyak 13 buah lembaga penelitian bidang pertanian (*Proefstation*) di Pulau Jawa yang didirikan oleh para pengusaha pertikelir Belanda². Untuk Karesidenan Besuki, pada akhir abad ke-19 terdapat 2 kelompok pengusaha perkebunan partikelir (swasta) Belanda yaitu:

1. *Tabaksonderneming* yang terdiri atas 8 *Tabaksonderneming* (perkebunan tembakau)
2. *Onderneming voor Bergcultures* (perkebunan tanaman gunung) yang terdiri atas 44 *onderneming voor Bergcultures*. Tanaman gunung tersebut yakni kopi, karet dan kakao.³

Onderneming-onderneming tersebut tengah berada dalam masa kemunduran. Agar kemunduran tidak terus berjalan, perlu dibuat solusi yaitu pendirian lembaga penelitian. Lembaga ini membutuhkan tempat yang strategis yang tidak jauh letaknya dari *onderneming-onderneming*⁴. Maka agar terjalin koordinasi yang baik antara kedua kelompok pengusaha perkebunan partikelir tersebut, mereka bekerjasama mendirikan gedung penelitian perkebunan bernama *Besoekisch Proefstation* pada tahun 1910. Gedung penelitian *Besoekisch Proefstation* terletak di tengah kebun, artinya terletak di tengah perkebunan

¹ Keadaan-keadaan umum bidang pertanian misalnya keadaan perdagangan komoditi perkebunan lokal dan dunia dan kualitas komoditi bersangkutan.

² Hastjarjo Soemardjan dan Rahdi S. Pudjosunaryo, *Problematika Pengelolaan Penelitian Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Perkebunan, 1998), hlm. 28.

³ *Besoekisch Proefstation, Verslag Omtrent de Bestuurswerkzaamheden Over 1911*.

⁴ Wawancara dengan Bapak Ignatius Hartana di kediamannya Jl. PB. Sudirman Jember pada tanggal 10 Februari 2007 dan Bapak Totok Suharsono di kediamannya Jl. PB. Sudirman VIII Jember pada tanggal 11 Februari 2007.

tembakau, dan tanaman gunung (*Bergcultures*) yakni kopi, karet dan kakao. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut:

1. Agar para staf *Besoekisch Proefstation* dapat sering dan mudah berhubungan dengan pihak perkebunan. Pihak perkebunan atau *ondernemer* adalah pihak yang membutuhkan serta akan selalu memahami persoalan menyangkut komoditas yang ditanam.
2. Pihak staf *Besoekisch Proefstation* tidak akan pasif untuk menunggu permintaan dari *ondernemer*, sementara *ondernemer* dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya masalah-masalah di perkebunan, seperti masalah hama tertentu yang muncul pada setiap musim dan cuaca yang berbeda
3. Akan memudahkan komunikasi antara staf *Besoekisch Proefstation* dengan *ondernemer*⁵

Apabila *Besoekisch Proefstation* letaknya di Malang atau di tempat lainnya yang jauh dari perkebunan partikelir, maka pengawasan terhadap penelitian dan pengangkutan bibit hasil penelitian dan lain-lain akan membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama.

Besoekisch Proefstation didirikan di Jember Kota yang lokasinya berada di tengah-tengah perkebunan (*onderneming*). Lokasi kantor *Besoekisch Proefstation* berada di Jember Kota tepatnya di Jalan Jenderal Soedirman (sekarang). Wilayah Jember Kota dikelilingi oleh hutan-hutan karet, kopi, kakao dan dataran rendah yang ditanami tembakau.

Terdapat 2 jenis lahan di Karesidenan Besuki yakni lahan dataran rendah dan lahan dataran tinggi. Keduanya mayoritas dan merata diseluruh wilayah Karesidenan Besuki. Besuki terkenal di kalangan orang-orang Eropa sebagai wilayah yang cocok untuk tanaman Kopi *Robusta* ditanam di dataran rendah dan Kopi Arabika di tanaman di dataran tinggi pada ketinggian 400-500 m di atas permukaan laut. Tanaman tembakau juga cocok di tanam di wilayah dataran rendah. Tembakau hasil penelitian orang-orang Eropa yang cocok untuk daerah

⁵ BPPB Jember, *Simposium Tiga Abad Kopi*, (Jember: BPPB Jember, t.th.), hlm. 22. Lihat pula dalam, M. Yahmadi, "Memo", Surabaya, 6 Juni 2007.

Besuki disebut tembakau Besuki *Hibrida Na-Oogst*⁶ (*Na*= Sesudah; *Oogst*= Memetik). Tembakau Besuki *Hibrida Na-Oogst* diterima dan terkenal di pasaran dunia dengan sebutan Tembakau Jawa (*Java Tobacco*) dalam awal abad XX⁷. Oleh karena kondisi wilayah Besuki yang cocok untuk tanaman tembakau, kopi, karet dan kakao menjadi salah satu sebab para partikelir perkebunan Eropa memilih Besuki sebagai lahan bisnis bidang perkebunan yang dapat diandalkan.

Berdirinya *Besoekisch Proefstation* lebih disebabkan karena alasan umum bidang perkebunan di dunia. Pada awal abad XX sebagian besar wilayah Asia dan Afrika berada di bawah jajahan Eropa dan Amerika. Di negeri jajahan mereka meng-eksploitasi Sumber Daya Alam dan hasilnya menjadi penyumbang terbesar devisa negeri induk. Kebijakan-kebijakan sektor ekonomi menjadi hal terpenting para penjajah. Terjadilah persaingan dalam perdagangan internasional diantara mereka termasuk salah satunya adalah perdagangan komoditi hasil perkebunan. Komoditi perkebunan yang utama diperdagangkan di pasar dunia saat itu adalah tembakau, karet, kopi dan kakao, disamping komoditi-komoditi lainnya seperti teh dan karet. Setiap *onderneming* di dalam negara-negara tersebut berupaya agar menang dalam persaingan di pasar internasional. Masing-masing berupaya keras dengan melakukan berbagai macam cara guna meningkatkan kualitas tanaman yang diusahakannya. Di sisi lain pada perkebunan-perkebunan sering terjadi serangan hama dan penyakit tanaman yang mampu menurunkan produksi. *Onderneming-onderneming* dunia pada awal abad XX telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap penelitian dan pengembangan. *Onderneming-onderneming* di Hindia Belanda mengalami problematika yang serupa seperti yang terjadi pada *Onderneming-onderneming* lain di dunia. Oleh sebab itu, proses awal sebagai penyebab berdirinya *Besoekisch Proefstation* adalah tidak lepas dari kondisi-

⁶ Tembakau *Na-Oogst* penanamannya belakangan yaitu bulan Agustus setelah menanam padi lalu *Voor-Oogst* lalu *Na-Oogst*. *Voor-Oogst* adalah jenis tembakau yang dahulunya berasal dari Virginia yang banyak ditanam rakyat. Wawancara dengan Bapak Jalim di kediamannya di Desa Mangaran Kecamatan Jenggawah pada tanggal 14 Februari 2007.

⁷ Dalam Buletin berjudul: *Mededeelingen van het Besoekisch Proefstation No.5*, Toespraak van den Heer T. Ottolander, Tweeden Voorzitter van het Bestuur van het *Besoekisch Proefstation*, Oktober 1913, hlm. 4.

kondisi umum bidang pertanian atau perkebunan dunia sebagai latarbelakangnya. Proses awal sebagai penyebab berdirinya *Besoekisch Proefstation* adalah kondisi persaingan perdagangan Internasional dan keinginan untuk meningkatkan produksi dan pengembangan perkebunan pada kalangan onderneming-onderneming.

2.1.1 Persaingan Perdagangan Internasional

Sejak awal abad XVIII tengah berlangsung penanaman dan perdagangan hasil-hasil pertanian di dunia meliputi komoditi tembakau, teh, kakao, karet (*Hevea/Rubber*), kopi, tebu (*Suikerriet*) dan kopra/ kelapa (*Cocospalm*)⁸. Negara-negara di dunia yang melibatkan diri dalam perdagangan komoditi-komoditi tersebut adalah India, Hindia Belanda, Malaya (Malaysia), Ceylon (Srilanka), Brazil⁹, Kongo, Cuba¹⁰ dan Philipina. Komoditi teh, tembakau, kopi, gula, kina dan jagung banyak diusahakan pada ladang, sawah (*bevloeiide gronden*), tegalan (*onbevloeiide gronden*) dan perkebunan (*onderneming*) di Pulau Sumatera dan Jawa¹¹. Komoditi tembakau, karet dan kakao banyak terdapat di India¹² sementara karet banyak ditanam di Sumatera, Kalimantan (*Borneo*), Srilanka, Malaysia, Brazil, Singapura dan Afrika Timur¹³. Untuk lebih jelasnya lihat tabel I

⁸ Dalam Majalah, *The Tropical Agriculturist and Magazine of the Ceylon Agricultural Society*, Juni 1910, hlm. 493.

⁹ Walter Hilliers, "Tea and Rubber in Java and Brazil". Dalam, *The Tropical Agriculturist and Magazine of the Ceylon Agricultural Society*, Februari 1910, hlm. 175.

¹⁰ Cuba merupakan Negara peng-ekspor gula. Negara ini bersaing ketat dengan Jawa dalam produksi gula dalam abad ke-19. Dalam, J. Thomas Lindblad, "Fondasi Historis Ekonomi Indonesia", terjemahan Nawianto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 36.

¹¹ Van Hall, *Insulinde de Inheemsche Landbouw*, (Amsterdam, W. van Hoeve. Deventer), hlm. 8. Tanaman yang ditanam pada ladang, sawah dan tegalan adalah jagung dan tembakau yang panennya beberapa kali dalam satu tahun (*eenjarige gewassen*). Di Jawa lahan milik petani pribumi adalah 3.300.000 Ha sawah dan 4.500.000 Ha tegalan.

¹² The American Consul at Bombay, Indian Tobacco Trade. Dalam Majalah, *The Indian Agriculturist*, Vol. XXXIV, No. 11, November 1, 1909. Dalam, *The Tropical Agriculturist and Magazine of the Ceylon Agricultural Society*, *op.cit.*, hlm. 204.

¹³ Alex fairlie's, The Ceylon Rubber Industry. Dalam Majalah, *The Supplement to the Tropical Agriculturist*, hlm. 270 dan 362. Dalam, *The Tropical Agriculturist and Magazine of the Ceylon Agricultural Society*, February, *op.cit.*, hlm. 175-176.

penyebaran penanaman komoditi ekspor di dunia dan Hindia Belanda tahun 1817-1915 dalam lembar lampiran.

Pada tahun 1778 tanaman kakao tiba di pulau Jawa. Pada pertengahan abad XIX kakao berhasil di ekspor untuk kali yang pertama oleh Minahasa dan Manado ke Philipina¹⁴, sementara di wilayah Jawa tengah mulai dilakukan ekspor kakao pada tahun 1880 dan beberapa tahun kemudian Jawa Timur mengikutinya. Pada awal abad ke-20 semuanya berhenti menanam dan perdagangan kakao Jawa menjadi tidak maju. Hal ini karena terjadi serangan hama PBK (Penggerek Buah Kakao) yang merata di seluruh wilayah penanamannya yang terutama adalah di Pulau Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur).

Pada periode Januari 1910 hingga tahun 1915, komoditi pertanian yang menjadi perhatian khusus perdagangan dunia adalah karet. Negara-negara di Asia Tenggara dan Australia yang menjadi peng-ekspor karet adalah Malaysia, Srilangka, Perth, India Selatan, Singapura dan Hindia Belanda. Nilai ekspor karet dari negara-negara tersebut besar dan jumlahnya terus mengalami peningkatan yang semakin cepat. Untuk daerah Hindia Belanda, di pesisir pantai Kalimantan Barat yaitu di Perkebunan Beaufort dilakukan panen getah karet pada 60 pohon¹⁵. Kemudian sebanyak 8000-10.000 pohon di panen di Sumatera pada perkebunan karet milik F.M.S¹⁶. Itu berlangsung mulai tanggal 4 Januari 1910. Hal ini belum yang terjadi di Malaysia, Srilanka dan Singapura. Kesimpulan sementara menyebutkan bahwa standar volume Ekspor dari Asia Tenggara adalah 25.000 Ton hingga 35.000 ton karet mentah. Angka itu akan lebih besar pada 5 atau 6 tahun ke depan karena sejak terjadi *booming* tersebut, para pengusaha kolonial Belanda dan Inggris segera bersaing dalam upaya peningkatan produksi

¹⁴ H. Toxopeus & G. Giesebrger, *History of Cocoa and Cocoa Research in Indonesia in Indonesia 1900-1950*. (tanpa kota: H. Toxopeus & P. Wessel Amer. Cocoa Res. Inst. IOCC, t.th.), hlm. 7-34. Dalam Buletin BPP Jember berjudul: *Prosiding Seminar Cokelat 1985*, hlm. 13.

¹⁵ B.N.B. Herald, Rubber in Borneo, First Tapping on Beaufort Estate, On January, 4. Dalam, *The Supplement to the Tropical Agriculturist*, *op.cit.*, hlm. 270.

¹⁶ Dalam Artikel berjudul: *Rubber in Sumatera*, (*S.F. Press*), January, 29. Dalam, *The Supplement to the Tropical Agriculturist*, *Ibid.* F.M.S adalah singkatan dari *Fair Merchantable Sundried* (Pasar aneka barang dagangan).

perkebunan pada seluruh areal penanaman di wilayah jajahan timur yakni di Hindia Belanda, Malaya (Malaysia), Srilanka, India Selatan dan Singapura.

Pada bulan Januari-Juni 1910 di Jerman diadakan Kongres pertanian tropis Internasional¹⁷ yang menghasilkan beberapa laporan perkembangan bidang pertanian selama tahun 1909-1910 sebagai berikut.

1. Telah terjadi bermacam-macam permintaan dari negara-negara pengonsumsi yang berbeda-beda.
 2. Telah terjadi peningkatan jumlah pengusaha tanaman tertentu di kalangan petani lokal daerah tropis
 3. Metode rotasi tanaman telah diterapkan di daerah tropis, dan diperoleh kesimpulan bahwa sistem rotasi tanaman cocok diterapkan di daerah tropis.
 4. Terjadi peningkatan dalam hal penerapan alat dan mesin pertanian modern
- Agar peningkatan-peningkatan tersebut tetap berlangsung, pada periode Januari 1910 hingga tahun 1915 pemerintah Belanda¹⁸ membuat keterangan-keterangan atau rekomendasi untuk mengembangkannya dengan menyediakan lahan penanaman di Jawa, Sumatera dan Kalimantan (Borneo) seluas 50.000 Ha¹⁹. Di Malaysia direncanakan seluas 240.000 Ha dan di Srilanka seluas 184.000 Ha. Hal tersebut guna melakukan penanaman komoditi perkebunan yang cocok di daerah tropis, seperti tembakau, kopi, kakao, karet dan teh.

Komoditi selanjutnya adalah tanaman teh. Teh Jawa memiliki kualitas tinggi sehingga disenangi para pembeli (*buyer*) di pasar dunia²⁰. pada tahun 1909-

¹⁷ Dalam, *The Tropical Agriculturist and Magazine of the Ceylon Agricultural Society*, *op.cit.*, hlm. 2.

¹⁸ Jajahan Belanda pada periode tahun 1910-1915 adalah Hindia Belanda, Malaya (Malaysia) dan Srilangka (Ceylon). Belanda bermusuhan dengan Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Belgia dan U.S.A. Dalam Artikel dari Director of the Imperial Institute berjudul: *International Congress of Tropical Agriculture and Colonial Development*, Brussels, 1910. Dalam, *The Tropical Agriculturist and Magazine of the Ceylon Agricultural Society*, January, 1910, hlm. 2.

¹⁹ Dalam Artikel berjudul: *Prospects for Rubber*. Dalam, *The The Supplement to the Tropical Agriculturist*, *loc.cit.*

²⁰ Artikel dari Walter Hilliers berjudul: *Tea and Rubber in Java (Nirmala) and Brazil*. Disampaikan dalam rapat Lembaga Legislatif Inggris (*Statutory General*) di Kantor Kamar Dagang London (*London Chamber of Commerce*) pada hari Senin bulan Februari 1910. Dalam,

1910 Hindia Belanda telah meng-ekspor teh sebanyak antara 87.000-100.000 lbs²¹. Hal tersebut menyebabkan permintaan yang luar biasa terhadap lahan yang cocok untuk penanamannya. Ini terjadi selama akhir tahun 1909.

Pembahasan tentang komoditi tembakau menjadi agenda penting. Terdapat 3 keputusan lain dalam hal tembakau dalam kongres tersebut yakni:

1. Perlu dikembangkan dan diusahakan pengembangan tembakau agar di tanam di negara-negara baru.
2. Telah muncul hama jamur dan serangga yang merusak tanaman tembakau.
3. Perlunya peningkatan varietas tembakau pada negara pasar yang berbeda²²

Berdasarkan pengarahannya dari Kongres, Hindia Belanda mengembangkan penanaman tembakau di Sumatera dan Jawa. Di Sumatera sebagian besar terdapat di Deli²³ dan di Jawa adalah di Priangan, Jogjakarta, Madiun dan Besuki (Jember dan Bondowoso) yang meliputi lahan-lahan luas²⁴.

Para petani di Pulau Jawa telah mengusahakan penanaman tembakau sejak tahun 1700-an. Produksi tembakau di Sumatera dan Jawa secara khusus dan Hindia Belanda secara umum sangat memprihatinkan. Produksi tembakau di Jawa sejak pengusaannya berada dalam tingkat produksi yang standar saja. Tembakau Jawa baru mengalami kejayaan ialah sekitar tahun 1870 yang salah satunya terjadi di Jember²⁵. Sejak tahun 1880-an produksi tembakau Jawa dalam

The Tropical Agriculturist and Magazine of the Ceylon Agricultural Society, Februari 1910, *op.cit.*, hlm. 175.

²¹ Van Hall, *op.cit.*, hlm. 148.

²² Dalam, *The Tropical Agriculturist and Magazine of the Ceylon Agricultural Society*, *op.cit.*, hlm. 2.

²³ Nienhuys tahun 1863 membuka perkebunan tembakau di tanah Deli, Langkat, dan Serdang. Dalam *Harian Republika*, Senin, 29 September 2003.

²⁴ *The Tropical Agriculturist*, Februari 1912, *op.cit.*, hlm. 107. Sebutan Priangan, Jogjakarta dan Madiun terdapat dalam, L. P. de Bussy, *Verslag Over de Onderzoekingen in Zake het Rupsenvraagstuk Bijde Tabakscultuur op Java. Verricht in Opdracht van de Tabakmaatschappijen ter Sumatra's Oostkust*, t.th., hlm. 188.

²⁵ Tahun 1870-an adalah tahun kejayaan perkebunan tembakau di Jember khususnya. Lihat, Edy Burhan Arifin, "Emas hijau di Jember: Asal Usul, Pertumbuhan dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980", (*Tesis Pascasarjana Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada*, 1989), hlm. 81.

jumlah besar terus terhambat dan semakin menurun secara drastis. Untuk mengupayakan kenaikannya adalah sejak tahun 1875, LMOD, *Cultuurmaatschappij Djelboek*, BTM dan LMS di Karesidenan Besuki terus memperluas areal penanaman tembakau. Oleh karena upaya tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas tembakaunya, harga jual tembakau Jawa di pasar dunia tidak naik. Para *ondernemer* tembakau Jawa semakin terpuruk oleh munculnya aksi-aksi pembakaran gudang-gudang pembenihan dan pengeringan tembakau yang terutama dilakukan terhadap gudang-gudang tembakau milik LMOD di Jember oleh massa dalam tahun 1880²⁶. Di Sumatera khususnya di Deli (Medan) tembakau mengalami nasib yang sama. Tembakau Sumatera di ekspor sebesar 9000 ton saja pada periode tahun 1900-1910²⁷.

Akibat dari hal tersebut, Hindia Belanda kalah saing dalam produksi tembakau dengan India hingga tahun 1910. India mempunyai tembakau dalam negeri unggulan yang menjadi andalan ekspor dan sangat dibanggakan pemerintah Inggris. Tembakau India adalah satu-satunya tembakau unggulan di pasar dunia.

2.1.2 Kebutuhan Akan Pengembangan dan Peningkatan Produksi

Hambatan umum yang biasa terjadi pada semua jenis tanaman pertanian dan perkebunan yang dapat menurunkan produksi adalah serangan hama dan penyakit tanaman. Serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lampau. Orang-orang dahulu dalam abad XVIII dan XIX acuh tak acuh terhadap fenomena ini. Akibatnya pada tahun 1845-1900, terjadi kehancuran perkebunan kakao²⁸ di Minahasa dan di Pulau Jawa termasuk

²⁶ Edy Burhan Arifin, *Ibid.*, hlm. 67.

²⁷ Van Hall, *loc.cit.*

²⁸ Kakao masuk ke Indonesia tahun 1560 dibawa oleh orang-orang Spanyol dari Mexico. Lihat, F.W.T. Hunger, *Cacao Oost Ind. Cult. Op Nieuw Gegehen Onder de Redactie van H.C. Prinsen Geerlings*. Compleet in Drie Delen. Deel II. J.H. de Bussy, Amsterdam, 335 – 457, 1913. Dalam, Soenaryo dan Arief Iswanto, *Tinjauan Tentang Budidaya Tanaman Cokelat di Indonesia*, (Jember: Balai Penelitian Perkebunan Jember, 1986). Dalam Buletin, BPPB Jember, *loc.cit.*

Jember²⁹. Untuk komoditi lain, pada tahun 1880 ditemukan hama serangga menyerang tanaman tebu dan kopi di Jawa sehingga produksi keduanya menurun secara tajam³⁰. Sejak tahun itu pula di perkebunan tembakau rakyat Jember terjadi serangan hama dan penyakit tanaman yang mengakibatkan kualitas tembakau *krosok* dan *Na-Oogst* jelek³¹.

Menginjak awal abad ke-20, kembali terjadi permasalahan bidang perkebunan. Masalah hama dan penyakit tanaman kembali muncul pada tahun 1904. Pada tahun tersebut di Jawa ditemukan hama pepper bernama *heterodera radicolica* berdasarkan investigasi oleh *Zimmermann* dan *Breda de Haan*. Selanjutnya pada tahun 1907 setidaknya terdapat 2 kasus utama dalam masalah hama dan penyakit tanaman di Asia Tenggara yaitu: (1) di Jawa pada perkebunan Kakao Zehntner milik Dr. Zehntner ditemukan penyakit tanaman berupa fruktifikasi kanker fungus (*Nectria*) pada buah Kakao dan (2) di Malaya ada hama pengganggu tanaman karet bernama *temmes gestroi*³². Akibatnya perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda banyak mengeluhkan masalah pemberantasan hama dan penyakit tanaman, teknik pemupukan dan teknik penanaman terutama terhadap tanaman kopi dan karet.

Untuk hama dan penyakit tanaman tembakau, berdasarkan penelitian dari *Experimental Station at Mahailuppalama* di Ceylon (Srilanka)³³, tembakau yang selama bertahun-tahun dalam abad XIX di tanam di Sumatera dan Jawa, masuk

²⁹ Pengganggu buah kakao berupa hama penggerek buah dan berupa serangga yang bernama *Helopeltis*. Di Pulau Jawa kehancurannya baru terjadi pada tahun 1886 yang meliputi perkebunan di daerah Ungaran, Salatiga, Surakarta, Kediri, Malang dan Jember. Lihat, Didiek H. Goenadi, dkk. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kakao di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2005), hlm. 2. Secara bertahap semenjak kerusakan itu, kebun-kebun kakao kopi dan karet dibongkar. Dalam, Soenaryo dan Arief Iswanti, *Ibid*.

³⁰ Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, terjemahan Handoyo, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), hlm. 274.

³¹ Edy Burhan Arifin, *loc.cit*.

³² *The Tropical Agriculturist and Magazine of the Ceylon Agricultural Society*, Vol. XXXIV, Januari-Juni 1910, hlm. 324-330.

³³ Dalam Buletin dari Imperial Institute berjudul: *Result of the Examination of Tobacco from Ceylon*, 16 November 1911. Dalam, *The Tropical Agriculturist and Magazine of the Ceylon Agricultural Society*, Februari 1912, hlm. 107.

dalam kategori tembakau yang *poor* dan *bad*. *Poor* dan *Bad* artinya miskin dan buruk. Tembakau Sumatera dan Jawa miskin dalam kandungan *Potash* (garam abu/Kalium Karbonat) dan buruk dalam kualitas bakarnya (*Burning Quality*). Hal ini berdasarkan penelitian lembaga tersebut pada tanggal 4 Januari 1911 yang sampelnya diambil dari hasil panen tembakau di Jawa dan Sumatera pada Desember 1909 dan selama tahun 1910. Penyebabnya adalah serangan hama berupa ulat parasit (*rupsenparasieten*) pada dahan dan daun tembakau bernama *Heliothis* dan *Prodenia*³⁴. Ulat parasit itu terdapat pada perkebunan tembakau *LMOD* milik Birnie di Karesidenan Besuki pada awal abad ke-20³⁵. Ulat parasit tersebut secara umum menyerang pula perkebunan tembakau di Jogja, Madiun, Deli (Medan) dan perkebunan *Klatensche Cultuurmaatschappij* dan *CultuurMaatschappij Wedi-Birit* yang keduanya milik W.A. Terwogt di Klaten.

Meskipun telah didirikan beberapa lembaga penelitian pertanian seperti di Bogor dan Salatiga, lembaga-lembaga tersebut baru meneliti tanaman gula. Padahal di Eropa terutama Belanda, penelitian tanaman tembakau dan karet sedang mengalami kemajuan³⁶. Hasil-hasil penelitiannya diterapkan di Malaysia dan Vietnam secara besar-besaran dan meliputi lahan yang luas oleh para *ondernemer* pertikelir Belanda yang termasuk dalam pesaing utama para *ondernemer* di Hindia Belanda termasuk Besuki. Di Hindia Belanda keadaannya memprihatinkan, yakni Kualitas dan kuantitas tanaman gula, tembakau, karet, kopi dan kakao Hindia Belanda semakin tertinggal terus. Akibatnya, para pembeli (*buyer*) dunia kurang tertarik untuk membeli komoditi hasil perkebunan Hindia Belanda.

Dalam perempat pertama Abad XX, terdapat satu persoalan lain yakni para petani swasta Belanda di Hindia Belanda mengalami kesulitan untuk melakukan

³⁴ L.P. de Bussy, *op.cit.*, hlm. 186.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 186-189.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Ignatius Hartana pada tanggal 13 Agustus 2006. Lihat pula dalam Buletin berjudul: *Mededeelingen van het Besoekisch Proefstation* No. 5, *op.cit.*, hlm. 3.

konsultasi budidaya tanaman pertanian mereka³⁷. Para petani partikelir Belanda di Hindia Belanda harus mengeluarkan biaya besar dan memakan waktu yang lama dalam mengirim sampel tanaman ke lembaga-lembaga penelitian yang ada. Mereka mengeluhkan pula bahwa apabila perkebunan dan segala pengolahan hasilnya tidak didukung teknologi, hasilnya kurang bagus³⁸. Hal ini karena komoditi yang terbanyak ditanam khususnya di wilayah Besuki adalah komoditi jangka panjang seperti kopi dan karet. Penerapan teknologi khususnya di Jawa baru terbatas pada teknologi Jaringan Komunikasi, Transportasi, Sistem Irigasi, Pengerjaan Logam Tambahan, Industri ber-Mesin Berat, Pabrik Roti, Minuman non-Alkohol, Konstruksi bahan bangunan seperti batu, kayu, gas dan listrik³⁹. Penerapan teknologi bidang perkebunan, baru terdapat di sekitar Medan yaitu di Pantai Timur Sumatera dan itupun hanya terjadi dalam tahun 1900⁴⁰.

2.2 Berdirinya *Besoekisch Proefstation*

Terdapat dua periode dalam kemunculan lembaga-lembaga penelitian perkebunan zaman Belanda di Pulau Jawa. *Periode pertama* berlangsung selama tahun 1886 hingga pertengahan tahun 1887. Pada periode ini, para pengusaha pabrik gula mendirikan lembaga penelitian tanaman gula bekerja sama dengan pemerintah. Lembaga penelitian tersebut yakni:

1. *Proefstation voor Suikerriet in West Java* di Cirebon melalui *Gouvernement Besluit* No. 2 tanggal 23 Juli 1886,
2. *Proefstation Midden Java* di Semarang melalui *Gouvernement Besluit* No. 217 tanggal 22 November 1886, dan

³⁷ Para petani Belanda menjadi ‘nomor satu’ sementara petani swasta pribumi khususnya Jember tidak dibolehkan melakukan penanaman kopi, karet, tembakau dan coklat. Inilah yang disebut monopoli Belanda dalam perkebunan di Jember. Wawancara dengan Bapak Muatrip pada tanggal 8 Oktober 2006.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Ignatius Hartana pada tanggal 10 Februari 2007.

³⁹ Thomas Lindblad, “Fondasi Historis Ekonomi Indonesia”, *op.cit.*, hlm. 37.

⁴⁰ *Ibid.*

3. *Proefstation Oost Java* di Pasuruan yang setahun kemudian dikukuhkan pemerintah melalui *Gouvernement Besluit* No. 31 tanggal 9 Juli 1887⁴¹.

Periode kedua terjadi pada tahun 1887-1901. Pada periode ini, penelitian lebih difokuskan terhadap tanaman gunung (*Bergcultures*), termasuk teh dan tembakau. Oleh karena itu didirikanlah 3 Balai Penelitian perkebunan diantaranya yaitu:

1. *s' Land Plantentuin* (Kebun Raya Bogor)⁴² yang melakukan penelitian teh, kina, kopi, tembakau dan karet.
2. *Deli Proefstation* di Medan milik D.J.G.C. Vriens
3. *Tabaksproefstation te Klaten* milik Dr. Hj. Jensen⁴³.

Pada tahun 1901 para pengusaha perkebunan kakao se-Jawa Tengah mendirikan *Proefstation voor Cacao* berpusat di Salatiga. Berselang 1 tahun kemudian, di Sukabumi juga berdiri *Proefstation voor Thee* melalui *Gouvernement Besluit* No. 16 tanggal 13 April 1902. Pada tahun 1904 *Proefstation voor Cacao* memperluas cakupan komoditi penelitiannya yakni terhadap tanaman gunung sehingga berganti nama menjadi *Algemeen Proefstation voor de Bergcultures* (1904-1910).

Bermunculannya *proefstation-proefstation* tersebut mengundang perhatian pemerintahan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda Joannes Benedictus van Heutsz (1904-1909). Van Heutsz segera mengambil kebijakan yakni memerintahkan kepada Mr. G.H.Ch. Hart dan Jhr. Mr.W.J. de Jonge untuk mengadakan suatu perjalanan penyelidikan terhadap *proefstation-proefstation*. Praktek penyelidikan tersebut berjalan hingga tahun 1933⁴⁴. *Algemeen Proefstation voor de Bergcultures* dan *Proefstation voor Thee* dibubarkan pemiliknya pada permulaan tahun 1911 dengan alasan jarak yang jauh antara perkebunan dengan lembaga

⁴¹ Hastjarjo Soemardjan dan Rahdi S. Pudjosunaryo, *loc.cit.*

⁴² Sebutan *s' Land Plantentuin* terdapat dalam, L.P. de Bussy, *op.cit.*, hlm. 188.

⁴³ L.P. Bussy, *ibid.*, hlm. 185.

⁴⁴ P.J. Gerke, *Uittreksel uit het Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*. Buitenzorg, den 4den Mei 1933 No.2, hlm. 1.

penelitiannya⁴⁵. Dampak dari pembubaran tersebut, muncul *proefstation* lama yang sebelumnya kalah bersaing dan berdiri pula *proefstation-proefstation* baru yang sengaja didirikan untuk ikut terlibat dalam persaingan tersebut. *Proefstation-proefstation* tersebut adalah:

1. *Malang Proefstation* di Malang tahun 1910,
2. Balai Penelitian non gula di Semarang tahun 1910,⁴⁶
3. *Besoekisch Proefstation* di Jember tahun 1910 melalui *Gouvernement Besluit* No. 41 tanggal 10 Juni 1912,
4. *Proefstation voor Kina* di Pengalengan Jawa Barat melalui *Gouvernement Besluit* No. 35 tanggal 31 Mei 1911.
5. Balai Penelitian Perkebunan di Cinyuruan, Jawa Barat oleh Gubernur tahun 1911,
6. *Proefstation voor Rubber* di Bogor tahun 1914,
7. *Centraal Rubberstation* di Bogor tahun 1915, dan
8. *Algemeen Proefstation voor Thee* di Bogor tahun 1916⁴⁷,

Perintis pendirian *Besoekisch Proefstation* adalah Dr. Zehntner⁴⁸ yang berasal dari kelompok *Onderneming Voor Bergcultures* di Karesidenan Besuki. Zehntner adalah pemilik perkebunan kakao (*Estate Zehntner*) di Pulau Jawa. Sejak tahun 1907 perkebunan kakao Zehntner mengalami kemunduran produksi akibat serangan penyakit kanker yang inangnya adalah jamur *Nectria* pada buah kakao. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 5 September 1910, Zehntner mengirim surat pribadi kepada Teun Ottolander (1854-1935). Teun Ottolander

⁴⁵ *Algemeene Proefstation voor de Bergcultures* kelak diambilalih inventarisasinya oleh *Besoekisch Proefstation*. Untuk *Proefstation voor Thee*, lembaga tersebut pada tahun 1916 diambilalih oleh *Algemeene Proefstation voor Thee* Bogor.

⁴⁶ Balai-balai Penelitian Perkebunan pada zaman Belanda ada dua jenis yaitu Balai Penelitian Perkebunan Gula di Semarang dan Balai Penelitian Perkebunan yang meneliti teh, kina, kopi, tembakau dan karet di Pulau Jawa dan Sumatera.

⁴⁷ Hastjarjo Soemardjan dan Rahdi S. Pudjosunaryo, *Problematika Pengelolaan Penelitian Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Perkebunan, 1998), hlm. 27.

⁴⁸ Artikel dari A.E. De Jonge berjudul: *Canker of Cacao*, (*Recueil des Travaux Botaniques Neerlandais*), Vol. VI, 1909. Dalam, *The Tropical Agriculturist and Magazine of the Ceylon Agricultural Society*, 1910, hlm. 326.

adalah *Administrateur* (ADM) atau *Estate-Manager Onderneming Voor Bergcultures* Tamansari di Kalibaru-Banyuwangi tahun 1909-1925⁴⁹. Isi surat tersebut adalah pandangan Zehntner yaitu agar dalam waktu ke depan, Teun Ottolander melakukan re-organisasi atau pembentukan kembali atau men-daurlang *proefstation-proefstation* di seluruh wilayah Hindia Belanda yang ada secara bijaksana guna memajukan kembali penelitian terhadap tanaman *Bergcultures*. Proefstation yang akan dibentuk salah satunya adalah *Besoekisch Proefstation* di Jember.

T. Ottolander selanjutnya dalam satu tahun ke depan (sejak 5 September 1910 hingga Desember 1911) akan mengaktifkan *proefstation-proefstation* tersebut. Sebagai langkah awal, Teun Ottolander meminta bantuan kepada Direktur Departemen Pertanian Hindia Belanda (*Landbouwdepartement te Nederlansch-Indie*) Dr. H.J. Lovink. Lovink adalah seorang ahli urusan lembaga penelitian (*Proefstation-kwestie*) kepercayaan pemerintah. Lovink menyatakan bersedia untuk melakukan perjanjian kontrak bagi pendirian *Besoekisch Proefstation*. Untuk perjanjian kontrak terhadap proefstation yang lain, H.J. Lovink menundanya untuk sementara dan tidak tergesa-gesa untuk hal itu. Pembentukan lembaga-lembaga penelitian harus dilakukan secara perlahan-lahan dan membutuhkan waktu yang lama. Agar pembentukan *proefstation-proefstation* lain tetap menjadi prioritas dan tidak terlupakan, untuk sementara pengurusannya akan diperbantukan kepada Departemen Pertanian Hindia Belanda. Keputusan H.J. Lovink ini pada akhirnya tidak mendapat dukungan penuh dari para administratur perkebunan *Bergcultures* lainnya. Mereka masih belum setuju untuk secepat itu melibatkan campur tangan pemerintah. Melihat fenomena ini, kelompok *Tabaksonderneming* yang dipimpin oleh seorang jutawan perkebunan

⁴⁹ J.H. Ochtman, *Algemeene Vergadering van het Besoekisch Proefstation, Gehouden op 25 Februari 1920 te 6,5 uur n. m. in het Gebouw van het Besoekisch Proefstation*. Sekarang onderneming tersebut milik PTPN XII. Teun Ottolander wafat pada tanggal 21 November 1935 di *Afdeling* Kebun Soekasari – Pantjoer Angkrek Banyuwangi. Dimakamkan di *Afdeling* Taman Sarie Banyuwangi. Teun Ottolander, D. Birnie, Bosschen dan Dingerdy adalah pendiri Imperium Perkebunan di Hindia Belanda. Dalam, BPPB Jember, *op.cit.*, hlm. 19-22.

D. Birnie⁵⁰ membentuk Perkumpulan *Besoekisch Proefstation* atau *Vereeniging Besoekisch Proefstation (VBP)*⁵¹ atau *Vereeniging tot Bevordering van Landbouw en Nijverheid*⁵² pada tanggal 26 November 1910 berlokasi di Jember Kota. *Vereeniging Besoekisch Proefstation* adalah perkumpulan (*Vereeniging*) *Onderneming-onderneming* tembakau untuk mengupayakan pemecahan persoalan tembakau bagi kelompok *Tabaksonderneming*. VBP kelak menjadi pengelola utama dan menjadi sumber pembiayaan penting *Besoekisch Proefstation*.

Pada tanggal 10 Desember 1910 diadakan rapat umum oleh VBP di *Societeitsgebouw* (gedung Perkumpulan) di Jember Kota. *Societeitsgebouw* adalah gedung pusat pertemuan orang-orang Belanda yang bermukim di Jember kota (kalau sekarang tepatnya di gedung LPM Unej Jl. PB. Soedirman)⁵³. Rapat umum tersebut bersifat wajib dan tertutup⁵⁴, dihadiri oleh delapan *Administrateur* perkebunan yaitu D. Birnie, T. Ottolander, A.H. Loeff, E. Du Bois⁵⁵, A.H.

⁵⁰ D. Birnie adalah keponakan dari George Birnie yang merupakan pemilik Perusahaan Tembakau *LMOD (Landbouw Maatschappij Oud Djember)* yang berdiri tahun 1859. Mulai tahun 1875 D. Birnie diberi kewenangan oleh George Birnie untuk melanjutkan pengelolaan atas *LMOD* dan George Birnie sendiri pulang ke Belanda. Gerald David Birnie mendirikan pula *Landbouw Maatschappij Soekowono (LMS)*. Lihat, Kunhendra Dilitomo, "Peleburan PT. Perkebunan XXVII Jember Menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Tahun 1996, (*Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*, 2004), hlm. 1-31.

⁵¹ *Besoekisch Proefstation Jaar Verslag*, 24 Februari 1912. Dalam, Edy Burhan Arifin, *loc.cit. Vereeniging Besoekisch Proefstations* pada periode tahun 1911-1929 menjadi sumber pembiayaan *Besoekisch Proefstation*. Dalam Bagan berjudul: *Perkembangan Organisasi Balai Penelitian Perkebunan Jember tahun 1911-1983*. Dalam Arsip berjudul: *Taak Organisatie en Financiering 1973-1989*.

⁵² Lembaga ini mempunyai *Afdeeling* (cabang) *Bergcultures* Di Banyuwangi. *Afdeeling* tersebut mengadakan rapat pada tanggal 11 Juli 1911. *Vereeniging tot Bevordering van Landbouw en Nijverheid* artinya Perkumpulan Promosi Industri Pertanian Swasta.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Ignatius Hartana pada tanggal 13 Agustus 2006.

⁵⁴ Rapat dibuat tertutup karena Pemerintah Hindia Belanda melalui H.J. Lovink senantiasa melakukan pemantauan bagi *proefstation-proefstation* di seluruh Hindia Belanda yang sejak tahun 1886 terus mengalami perkembangan. Ketika itu muncul pula organisasi-organisasi dari kalangan pribumi.

⁵⁵ Du Bois adalah seorang Administratur dan peneliti Getah Karet Putih (*Melksap*) pada Perusahaan Perkebunan Karet Alam *Amsterdam* di Tanggul. Dalam, A.J. Ultee, *Gebreken Bij Rubber*. Dalam, *Mededeelingen van het Besoekisch Proefstation*, No.1, t.th., hlm. 6. Du Bois juga adalah seorang Arsitek di Bogor. Lihat, Teun Ottolander, *Besoekisch Proefstation Jaarverslag, Uitgebracht in de Algemeene Vergadering van 24 Februari 1912*, hlm. 8.

Clignett, J.W. Folkersma⁵⁶, J. Kroese⁵⁷ dan G.G. Schrieke dengan pimpinan rapat D. Birnie. Dalam rapat tersebut Teun Ottolander menyampaikan perihal *Besoekisch Proefstation* dan hasil pembicaraannya dengan Zehntner dan H.J. Lovink. pembicaraan rapat terbagi ke dalam 2 bagian yaitu:

I. Pembicaraan seputar pendirian *Besoekisch Proefstation*

Terdapat 3 pembicaraan penting seputar pendirian *Besoekisch Proefstation* yaitu:

1. *Oprichting*

Oprichting yaitu pembicaraan untuk mendirikan *Besoekisch Proefstation*. Untuk mendirikan *Besoekisch Proefstation*, para administrator yang hadir hendaknya melakukan kerjasama dengan *proefstation-proefstation* swasta (*Particuliere Proefstation*) lain di seluruh wilayah Hindia Belanda dan dengan Departemen Pertanian Hindia Belanda. Perantara kerjasama ini adalah H.J. Lovink⁵⁸.

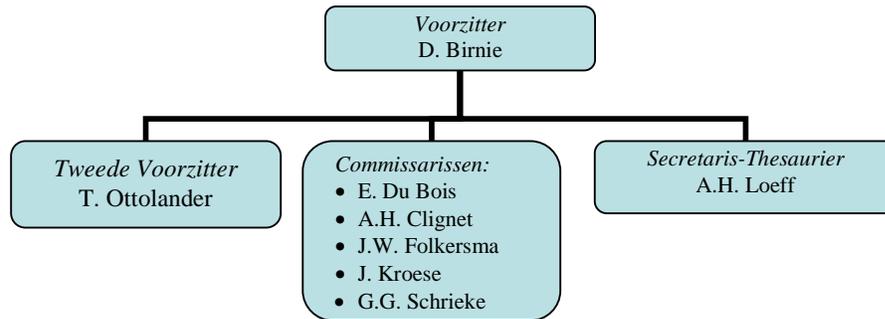
2. *Bestuur*

Bestuur adalah pembentukan kepengurusan VBP. Dibawah ini adalah struktur kepengurusan *Vereeniging Besoekisch Proefstation* untuk periode 10 Desember 1910 hingga 25 Mei 1911.

⁵⁶ J.W. Folkersma adalah Administratur (ADM) pada perkebunan tembakau *N.V. Exploitatie Davo/ Erven* atau perkebunan *Gunung Blau* di Bondowoso. Dalam, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1959 tentang: *Penentuan Perusahaan Pertanian/ Perkebunan Belanda yang dikenakan Nasionalisasi (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara No. 1764)*.

⁵⁷ J. Kroese adalah Administratur (ADM) perkebunan *Bergcultures Goenoeng –Majang*. Dalam, A.H. Loeff, *Besoekisch Proefstation: Notulen der Algemeene Vergadering Gehouden op Donderdag 4 April 1912 des Morgens ten 10 Ure in het Societeitsgebouw te Djember*, hlm. 4.

⁵⁸ H.J. Lovink adalah orang kepercayaan Departemen Pertanian dalam urusan *proefstation* dan pula sebagai orang kepercayaan *proefstation-proefstation* swasta dalam berurusan dengan pemerintah terutama Departemen Pertanian.



(Sumber: *Besoekisch Proefstation, Verslag Omtrent de Bestuurswerkzaamheden Over 1911*)

David Birnie selanjutnya memberi tugas kepada para *Bestuur* tersebut yakni untuk mempelajari dan meneliti tembakau (*Tabakcultuur*) ditunjuk D. Birnie, C.A. Koning dan A.H. Loeff sedangkan untuk menjalankan usaha *Bergcultures* (tanaman gunung) ditunjuk E. du Bois, G.G. Schrieke dan Teun Ottolander. VBP selanjutnya mengangkat Dr. A.J. Ultee⁵⁹ sebagai Direktur *Besoekisch Proefstation* secara lisan dan pada tanggal 1 Januari 1911 Dr. A.J. Ultee dapat memulai pekerjaannya.

Pada Februari 1911, *Besoekisch Proefstation* menjalin kerjasama dengan *Malangsche Proefstation* dan *Proefstation Midden-Java* untuk meneliti tanaman kopi dan kakao, yang semula hanya tembakau. Selanjutnya pada akhir April 1911, Teun Ottolander dan Dr. Ultee beserta rombongan berkunjung ke Salatiga untuk mengambil alih *Algemeen Proefstaion voor de Bergcultures* di sana. Total inventaris lembaga tersebut telah diambilalih senilai f 6032.10⁶⁰. Hal tersebut dilakukan karena *Algemeene Proefstation voor de Bergcultures* telah dibubarkan sejak akhir tahun 1910⁶¹.

3. *Technisch Personeel*

⁵⁹ Dr. A.J. Ultee adalah seorang ahli Kimia (*Scheikundige*).

⁶⁰ T. Ottolander, *Besoekisch Proefstation Jaarverslag, op.cit.*, hlm. 9.

⁶¹ Oleh karena alasan jarak yang jauh antara perkebunan-perkebunan di Salatiga dengan *Algemeene Proefstation voor de Bergcultures*, lembaga tersebut pada akhir tahun 1910 dibubarkan.

Technisch Personeel adalah mengangkat tenaga teknis yang dibebankan kepada Dr. P.C. Cramer dan dimulai pada tanggal 25 Mei 1911. Cramer akan menyeleksi ahli-ahli pertanian (*Landbouwkundige*) yang ada di Belanda dan Suriname untuk bekerja di *Besoekisch Proefstation*. Tenaga teknis akan bekerja pada *Besoekisch Proefstation* yang berbentuk lembaganya dan bukan pada VBP. Tenaga teknis bertugas melakukan penelitian atas tanaman *Bergcultures* dan *Tabakscultuur* dan menangani persoalan-persoalan teknis lainnya.

Para teknisi Belanda yang telah diangkat dan telah bekerja selama tahun 1911 adalah:

1. Dr. Andreas Sprecher (*Botanicus*)
2. Dr. P.C. Cramer (Ahli Hukum Tanah)
3. C.J.J. van Hall (*Phytopatholog*)
4. Dr. van Bemmelen (ahli *Meteorologi*)
5. Dr. A.J. Ultee (*Scheikundige* atau ahli Kimia)
6. Du Bois (Arsitek)

II. Pembicaraan tentang peraturan atau *Statuten Besoekisch Proefstation*

Statuten Besoekisch Proefstation adalah peraturan dasar atau undang-undang dasar *Besoekisch Proefstation* yang berisi uraian tentang visi, misi, arti dan tujuan dasar *Besoekisch Proefstation*. *Statuten* disusun dengan tujuan untuk memberi penerangan kepada pemerintah tentang keberadaan lembaga penelitian pertanian/perkebunan di Jember di samping keberadaan *proefstation-proefstation* lain di seluruh Hindia Belanda. Para peserta rapat bersepakat akan merubah *Statuten* lama yang disusun pada tanggal 26 November 1910. Zehntner pada tanggal 14 Maret 1911 menyarankan bahwa untuk sementara tidak ada ketentuan yang dapat dipegang dalam mengatur intern lembaga dan menjadi alasan nyata untuk tetap menggunakan peraturan (*regeling*) lama yang telah diketahui pemerintah⁶². Para *Bestuur* menyetujuinya dank karena Gubernur Jenderal Hindia

⁶² T.Ottolander, *op.cit.*, hlm. 1-4.

Belanda A.W.F. Idenburg (1909-1916) ketika itu belum memberikan perhatian serius terhadap *Besoekisch Proefstation*.

Untuk membentuk kekuatan sehingga *Besoekisch Proefstation* dapat berkembang, Ultee, T. Ottolander dan Lovink membuat suatu komitmen bersama secara tertulis dan bersifat mengikat ketiganya. Komitmen tersebut disampaikan kepada segenap *Bestuur Besoekisch Proefstation* dalam rapat *Bestuur* (pengurus) pada tanggal 25 Mei 1911. Ketiganya selanjutnya menjadi tulang punggung kokohnya *Besoekisch Proefstation* hingga tahun 1921.

Terdapat beberapa prestasi yang diraih dalam upaya pengembangan lembaga dibawah 3 *founding father Besoekisch Proefstation* tersebut. Prestasi tersebut salah satunya adalah perolehan hak sewa atas lahan-lahan milik LMOD⁶³, digunakan sebagai lahan guna pendirian gedung Laboratorium, kantor, gudang pengeringan tembakau, rumah dinas Direktur, *Proeftuin* (Kebun Percobaan) dan fasilitas Meteorologi⁶⁴. *Besoekisch Proefstation* menyewa lahan-lahan tersebut dengan biaya sewa yang ringan untuk jangka waktu yang panjang. *Besoekisch Proefstation* mengelola lahan tersebut guna kepentingan penelitian tembakau karena LMOD bergerak dalam produksi tembakau. Lahan-lahan tersebut adalah:

1. Lahan di tanah datar Jember Kota (sekarang berdiri Markas Bhayangkara dan Kantor LPM UNEJ) untuk didirikan kantor, laboratorium, *proeftuin*, rumah dinas Direktur dan gudang pengeringan tembakau seluas 6 bau (42 Ha). Lahan untuk kepentingan *Proeftuin* atau kebun percobaan hasil penelitian disiapkan seluas 21 Ha⁶⁵.

⁶³ Lahan atau tanah di Jember yang kelak dijadikan perkebunan tembakau milik LMOD merupakan bekas tanah *Vorstenlanden*. Selama tahun 1908-1910 lahan *Vorstenlanden* di Hindia Belanda terbagi kedalam 2 kelompok yaitu *Vorstenlanden* yang mengusahakan pertanian tanaman padi pribumi dan pertanian orang-orang Eropa meliputi pertanian tembakau, gula, kakao, kopi dan nila. *Vorstenlanden* adalah tanah warisan milik raja yang pengolahannya baik oleh rakyat maupun oleh raja sendiri diserahkan kepada kebijaksanaan raja. (*Vorst*= Raja; *Landen*= tanah/ wilayah/ daerah). Lihat, S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2003), hlm, 772.

⁶⁴ Fasilitas Meteorologi adalah beberapa alat pengukur suhu, curah hujan (*rainfull*) dan iklim, yang membutuhkan lahan yang sangat strategis seperti di pegunungan dan di tengah perkebunan.

⁶⁵ *Bestuur, Jaarverslag 1912*, hlm. 6.

2. Lahan di *Nogosariestaat* (Desa Nogosari) untuk *proeftuin* direncanakan seluas 450 Ha⁶⁶. Hingga keluarnya *Gouvernement Besluit* No. 41 tanggal 10 Juni 1912, pemerintah hanya mengizinkan lahan seluas 160,5 Ha saja⁶⁷.
3. Lahan di Distrik Soekowono seluas 42 Ha.

Besoekisch Proefstation pada tahun 1912 baru mendapat status resmi dari pemerintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda A.W.F. Idenburg (1909-1916) sebagai lembaga penelitian bidang pertanian milik partikelir-partikelir perkebunan Belanda di Karesidenan Besuki dan sebagian wilayah Lumajang dengan pimpinan (*Voorzitter*) Teun Ottolander⁶⁸. Status tersebut diberikan pemerintah melalui *Gouvernement Besluit* No. 41 tanggal 10 Juni 1912⁶⁹. Pemerintah tidak segera memberikan status resmi pada tahun 1910 karena *Statuten* yang diajukan *Besoekisch Proefstation* pada November 1910 terutama pasal 2, 3 dan 10 masih sulit dipahami pemerintah.

2.3 Beberapa Peristiwa Nasional Menuju Nasionalisasi Puslit Koka Tahun 1949-1957

2.3.1 Kegagalan Mosi Indonesia Pada Sidang Umum PBB

Gagalnya mosi Indonesia pada Sidang Umum PBB pada tanggal 29 November 1957 sangat erat kaitannya dengan usaha diplomatis Pemerintah Republik Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat yang terjadi 8 tahun sebelumnya yaitu sejak tahun 1949. Perjuangan diplomasi tersebut sebagai berikut.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Van Schoonneveldt, *Empat Puluh Tahun Kebun Percobaan Kaliwining*, (Jember: Bagian Pertanian dari Stasiun Percobaan Jawa Tengah dan Jawa Timur dari Cabang Balai Penelitian Perkebunan Besar di Jember, t.th.), hlm. 2.

⁶⁸ A.H. Loeff, *Besoekisch Proefstation: Notulen der Algemeene Vergadering Gehouden op Donderdag 4 April 1912 des Morgens ten 10 Ure in het Societeitsgebouw te Djember*, hlm. 1-5.

⁶⁹ Bestuur, *op.cit.*, hlm. 5.

1. Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda di Ridderzaal, Den Haag, Belanda yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 Nopember 1949.
2. Perundingan antara gabungan menteri Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 25 Maret-1 April 1950 di Jakarta.
3. Dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1954, Indonesia menyampaikan Resolusi untuk mendesak Indonesia dan Belanda agar berunding lagi.
4. Dalam konferensi Panca Negara yang terdiri atas negara Burma, Srilangka (Ceylon), Indonesia, India dan Pakistan pada tahun 1955 di Bogor. Indonesia berdiplomasi meminta dukungan mereka.
5. Dalam konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, Indonesia meminta dukungan dari negara-negara Asia Afrika.
6. Dalam sidang umum PBB ke-10 pada tahun 1955.
7. Dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) I pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung. Indonesia meminta dukungan dari negara-negara Asia Afrika.
8. Indonesia dengan Belanda berunding di Genewa pada 10 Desember 1955-11 Februari 1956.

Semua upaya diplomatis di atas selalu menemui kegagalan dan kekecewaan di pihak Indonesia terutama setelah masuk dalam sidang umum dan dalam rapat-rapat resmi PBB. Selama perundingan-perundingan dalam KMB, Belanda bersikap keras kepala dan ingin tetap menguasai Irian Barat. Hal ini dipandang oleh Pemerintah RI sebagai kelanjutan penjajahan Belanda. Akhirnya Indonesia kembali pada apa yang digambarkan John Reinhardt sebagai dan terakhir dari pada pertikaian Irian Barat melalui metode diplomasi⁷⁰. Sementara rasa permusuhan terhadap Belanda semakin memuncak. Tindakan Belanda tidak mengembalikan Irian Barat setelah batas waktu 1 tahun kepada pemerintah Indonesia berdasarkan KMB di atas, menjadi alasan pemerintah Indonesia untuk

⁷⁰ John Saltford, *United Nations Involvement With The Act Of Self-Determination In West Irian (Indonesian West New Guinea) 1968 To 1969*, (Papua Barat: Lembaga Rekonsiliasi Hak-Hak Asasi Masyarakat Koteka (LERHAMKOT), t.th.), hlm. 3.

berjuang merebut kembali wilayah Irian Barat melalui cara non kooperatif. Langkah non kooperatif meliputi:

1. Pada tanggal 2 April 1956 RUU yang membatalkan seluruh perjanjian KMB secara unilateral yang diajukan Kabinet, disetujui secara bulat oleh DPR pada tanggal 3 Mei 1956 dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 8 Mei 1956⁷¹. Bunyi Undang-Undang tersebut sebagai berikut.

Pasal I

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa hubungan Kerajaan Nederland atas perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di S' Gravenhagen (Den Haag) dalam tahun 1949 dan yang didaftarkan pada Sekretariat PBB pada tanggal 14 Agustus 1950 No. 894, dengan ini dihapuskan dan karena itu dinyatakan gagal.

Pasal II

Piagam penyerahan kedaulatan, akta penyerahan kedaulatan serta peraturan tentang status quo Irian Barat dengan ini dihapuskan karena itu adalah gagal.

Pasal III

Hubungan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Nederland selanjutnya adalah hubungan yang lazim antara negara-negara yang berdaulat penuh, berdasarkan hukum Internasional.

Undang-undang Pembatalan seperti tersebut di atas mengandung pengertian bahwa status wilayah Irian Barat adalah bagian dari negara Indonesia. Belanda sangat tersentak dengan tindakan Indonesia ini dan segera menjawabnya dengan melakukan aksi sepihak yaitu memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam

⁷¹ Rancangan Undang Undang (RUU) tersebut selanjutnya menjadi Undang Undang (UU) No. 13 tahun 1956. Ahmad Sudirman, *Soekarno yang Mencaplok, Megawati Yang Menjerat Irian Barat*. (Stockholm: tanpa penerbit, 2003), hlm. 2. Pembatalan persetujuan KMB secara sepihak oleh Indonesia pada prinsipnya didasarkan kepada sikap Belanda yang tidak mau menepati persetujuan KMB yang menyangkut soal Irian Barat. Lihat dalam, Permesta Information Online, *Sejarah Singkat Permesta Disusun Secara Kronologis*, (tanpa kota: Permesta Information Online, 2001), hlm. 7.

wilayah Kerajaan Belanda pada tanggal 23 Agustus 1956⁷². Inilah awal dari ketegangan baru antara Indonesia dengan pihak Belanda.

2. Pada tanggal 18 November 1957 diadakan kampanye raksasa di Jakarta dan di tempat-tempat lain yang bernama “kampanye Sita Modal Belanda” (menyita perusahaan-perusahaan Belanda seperti perkebunan, pertambangan dan lain-lain).
3. Pada tanggal 29 November 1957 digelar suatu kampanye dan dihasilkan 4 resolusi sebagai berikut.
 1. Mendukung sepenuhnya delegasi pemerintah Indonesia di PBB untuk lebih bersiap tegas dalam perjuangan Irian Barat.
 2. Melakukan konsolidasi kekuatan dan tenaga ke dalam untuk menghadapi pengembalian kekuasaan atas Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia.
 3. Pemerintah didesak untuk bertindak tegas jika persetujuan di forum PBB mengalami kegagalan melalui jalan:
 - Direalisasikan pembatalan KMB,
 - Menasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia,
 - Semua warga negara Belanda yang tidak dibutuhkan tenaganya harus keluar dari wilayah Indonesia,
 - Masuknya orang-orang Belanda ke Indonesia harus dihentikan,
 - Percepatan pelaksanaan Indonesialisasi terhadap perusahaan-perusahaan vital Belanda
 - Perusahaan Belanda harus dijadikan Badan Hukum yang kedudukan seluruhnya di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia
 4. Akan dibentuk Brigade Pembangunan di Irian Barat guna keperluan perjuangan pembebasan Irian Barat⁷³.

⁷² Ella Nila Kesumawati, “Usaha Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Irian Barat Tahun 1962”, (*Skripsi* S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 1985), hlm. 51- 55.

⁷³ Syaifudin Fatqurochim, “Nasionalisasi PG. Gondangwinangoen di Klaten Tahun 1950-1963”, (*Skripsi* S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 1999), hlm. 45. Dalam, Baskara T. Wardaya, *Dicari: Masyarakat Kuat*, dalam, *Kompas*, 7 April 2004, hlm. 1-5. Diduga kampanye tersebut dimanfaatkan Angkatan Darat guna meningkatkan posisi politik dan ekonominya. Lihat, Ahmad Sudirman, *op.cit.*, hlm. 3.

Sementara di Den Haag diperdebatkan bahwa orang Papua sedikit atau tidak ada hubungan sama sekali dengan orang Asia Indonesia. Mereka juga menuntut bahwa mereka hanya mengurus Irian Barat dari Jawa sebab mereka tidak mempertimbangkan pemisahan administrasi atas wilayah dengan hanya sedikit orang Belanda yang ada. Meskipun demikian, Jakarta menuntut bahwa Irian Barat adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia.

Disisi lain situasi dalam negeri setelah pertengahan tahun 1950-an, khususnya pergolakan di daerah, mengalihkan perhatian pemerintah kepada bahaya perpecahan bangsa. Penyelundupan komoditas-komoditas ekspor dari daerah-daerah luar Jawa mengakibatkan pasokan devisa bagi Pemerintah Indonesia banyak berkurang. Sementara itu, hubungan dengan Belanda makin merosot.

Akhirnya pada tanggal 29 November 1957, Indonesia gagal mengajukan empat resolusi atas tuntutan mereka dalam Sidang Umum PBB seperti yang tersebut di atas. Sidang tersebut merupakan Sidang Umum PBB yang ke- 12. Persoalan Irian Barat ditempatkan dalam Agenda sidang. Hal ini merupakan titik cerah bagi penyelesaian Irian Barat bagi Indonesia. Persoalan Irian Barat menjadi agenda sidang karena pengajuan persoalan tersebut oleh 15 negara Asia-Afrika. Tapi meskipun demikian, titik cerah tersebut pada akhirnya menjadi suatu kekecewaan bagi Indonesia karena sidang tidak menghasilkan 2/3 mayoritas yang dimestikan yang mendukung Indonesia⁷⁴. Terdapat Dugaan bahwa kegagalan itu disebabkan oleh ketegangan politik Tahun 1957 antara Jakarta-Washington mengenai PRRI/ Permesta⁷⁵.

2.3.2 Reaksi Keras Presiden Soekarno

Atas kampanye dan gagalnya usaha diplomasi pemerintah Republik Indonesia lewat SU PBB ke-12, Presiden Soekarno memberikan reaksi keras.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Daniel Lev, *Ketika Politik Turun ke Jalan, tentang Demokrasi Terpimpin*, (tanpa kota: tanpa penerbit, 1996), hlm. 19.

Presiden Sukarno bersikap anti Kapitalisme dan Imperialisme Belanda atas Indonesia. Presiden mengimbau rakyat Indonesia untuk membangun kekuatan yang dapat memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat. Dalam langkah yang bersifat keorganisasian dibentuklah satu panitia Aksi Pembebasan Irian Barat oleh pemerintah atas perintah Presiden Sukarno yang hasilnya dimuat dalam rapat ke-61 Kabinet Djuanda tertanggal 29 November 1957. Panitia ini banyak memiliki cabang di daerah di seluruh pelosok Indonesia yang salah satunya di Jember yang dikenal dengan sebutan Gerakan Aksi Irian Barat (GRANAT). Tugas panitia adalah:

1. Mobilisasi kekuatan rakyat
2. Siapkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan guna mengatur pemerintahan dan pembangunan Irian Barat
3. Menyiapkan dasar-dasar usaha pembebasan Irian Barat dalam rangka pelaksanaan cita-cita proklamasi
4. Meng-koordinasikan segala tindakan sehingga dapat dicegah terjadinya pemborosan kekuatan⁷⁶

Saat kampanye tersebut, Indonesia tengah berada dalam era demokrasi Liberal berpusat pada komando Presiden Sukarno. Sejak tanggal 9 April 1957 Presiden Sukarno membentuk Kabinet Karya dengan Perdana Menteri Ir. Djuanda (non partai). Kesabaran Presiden Sukarno terhadap sistem parlementer makin menipis, digantikan dengan cara-cara pengambilan keputusan yang terpusat pada dirinya sendiri atau pada sekelompok kecil orang yang ada di sekelilingnya. Dalam demokrasi Liberal ala Sukarno, Kedudukan Ir. Djuanda secara hakikat tidak terlalu kuat. Yang menentukan perkembangan segala hal termasuk nasionalisasi *Centrale Proefstations Vereniging* Jember (selanjutnya disingkat CPV Jember) yang sesungguhnya adalah Presiden Soekarno (Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi) dan KSAD Mayjen A.H. Nasution⁷⁷.

⁷⁶ Zakki Arfani, "Nasionalisasi Perkeretaapian di Bandung Tahun 1950-1963", (*Skripsi* S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 2000), hlm. 43.

⁷⁷ Permesta Information Online, *op.cit.*, hlm. 29.

2.3.3 Lahirnya Keputusan Penguasa Militer/ Menteri Pertahanan No.1063/PMT/1957

Terdapat 2 pucuk kepemimpinan pusat bangsa Indonesia yang berkuasa penuh terhadap segala kebijakan bidang politik, ekonomi, sosial, pertanian dan pertahanan dan keamanan bangsa dalam masa revolusi selama tahun 1957. Kedua pemimpin tersebut adalah Presiden Sukarno dan KSAD A.H. Nasution. Presiden Sukarno memegang kuasa penuh atas kebijakan-kebijakan pemerintah RI terutama dalam hal sosial, politik dan ekonomi, sementara A.H. Nasution berwenang penuh atas segala kebijakan dalam hal pertanian/ perkebunan dan pertahanan dan keamanan. Keduanya saling bekerja sama menentukan arah revolusi bangsa Indonesia sejak awal tahun 1957. Oleh karena keduanya saling percaya, maka Presiden Sukarno memberi kebebasan luas bagi militer untuk mengambil kebijakan perihal pertanian/ perkebunan beserta lembaga penelitian pertanian/ perkebunan termasuk CPV Jember. Fakta di lapangan kelak menunjukkan bahwa seluruh *onderneming* warisan Belanda di Indonesia jatuh ke tangan militer. Atas pemberian ini, militer selanjutnya pada tanggal 14 Maret 1957 mengumumkan tentang pemberlakuan Undang-Undang “Dalam Keadaan darurat Perang” atau SOB untuk seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia "Dalam Keadaan Darurat Perang" (SOB= *Staat van Oorlog en Beleg*)⁷⁸. Undang-undang SOB ini berlaku dari tanggal 14 Maret 1957 sampai 17 Desember 1957. Penerapan SOB di Jember sangat terasa ialah pada Lembaga Kejaksaan Negeri Jember⁷⁹. Lembaga ini berdasarkan instruksi dari SOB, menerapkan instruksi *wajib lapor* bagi tamu-tamu asing baik luar negeri maupun dalam negeri yang masuk ke Jember. Semua tamu untuk kepentingan apa saja dan berada di Jember dalam jangka waktu berapa lama

⁷⁸ Situasi dan keadaan bangsa Indonesia pada waktu itu serba sulit seperti penyelundupan di Sulawesi dan Sumatra, kritik dari daerah Sumatera Utara dan Sulawesi Utara terhadap dominasi Jawa dan ada pengaruh Perang Dingin yaitu campur tangan Amerika Serikat -- dari luar. Penanganan semuanya diserahkan kepada Presiden bersama KSAD A. H. Nasution sebagai penanggung jawab utama SOB. Permesta Information Online, *op.cit.*, hlm. 1-5.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono pada tanggal 11 Februari 2007.

saja, wajib melapor meskipun hanya sebagai Konsultan pertanian terutama untuk CPV Jember. Peraturan *wajib lapor* diterapkan dengan ketat karena pemerintah khawatir keberadaan orang asing adalah untuk tujuan lain yang negatif tapi secara diam-diam seperti melakukan Subversi. Untuk CPV Jember, jika tidak melapor maka lembaga akan terkena salah atau telah melakukan aktifitas yang salah dan statusnya menjadi pihak yang bersalah/ tersangka atau di-cap sebagai yang bersalah. Maka konsekuensinya adalah pihak yang bersalah akan terkena denda atau hukuman dengan denda dan hukuman yang jelas dan tegas, tidak ada kolusi, suap dan perilaku sejenis lainnya.

Situasi dan kondisi rasa aman pada bangsa Indonesia tengah memprihatinkan. Bangsa Indonesia dibayang-bayangi peperangan dengan Belanda sebagai konsekuensi atas konflik memperebutkan Irian Barat. Hingga tahun 1957 Belanda tetap bersikukuh ingin memiliki Irian Barat. Rakyat Indonesia yang sebagian besar adalah petani trauma dengan penjajahan Belanda pada 350 tahun ke belakang. Rakyat tidak dapat berbuat apa-apa jika seandainya Belanda benar-benar perang dengan Indonesia dalam memperebutkan Irian Barat. Diperlukan suatu solusi tentang keamanan dan solusi itu telah ditemukan pada militer bangsa Indonesia. Hanya militer yang dapat menghadapi Belanda. Militer dapat melatih calon-calon tentara mulai dari kalangan pelajar setingkat SMP hingga orang-orang dewasa seperti yang dicontohkan militer di Jember ketika Jember melakukan aksi GRANAT-nya pada tahun 1957-1962⁸⁰.

Dominasi militer mencakup pula bidang perkebunan. Lembaga penyelidikan ilmiah di lapangan pertanian/ perkebunan berada di bawah kekuasaan ADM-ADM perkebunan. Maka apabila dilihat dari struktural kekuasaan di perkebunan, lembaga penyelidikan pertanian/ perkebunan berada di bawah komando militer. Hal ini berarti segala kebijakan perihal lembaga tersebut bersumber dari perintah penguasa militer A.H. Nasution.

Sejak tahun 1956 yang diindikasikan dengan hengkangnya para pengusaha Belanda, aktivitas perusahaan-perusahaan vital bagi bangsa Indonesia yang

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Zulkarnaen di kediamannya Jl. Semeru XVIII Jember pada tanggal 1 April 2007.

merupakan milik Belanda terhambat dan hampir macet. Sebagai salah satu contoh adalah produksi kopi dan kakao pada sebelum perang (sebelum konflik Irian Barat) adalah tinggi sehingga masuk peringkat pertama penyumbang devisa negara⁸¹. Pada pasca perang (saat konflik Irian Barat) ekspor kopi merosot hingga hanya 40%-30% di bawah minyak tanah dan timah. Hal tersebut terjadi karena modal yang dimiliki oleh sebagian besar pengusaha-pengusaha Belanda hengkang dan di bawa pulang ke Belanda.

Dari kondisi ekonomi yang memprihatinkan, menyebabkan banyak orang baik perorangan maupun massa yang mengambil jalan pintas seperti mencuri kopi di perkebunan dan tindakan kejahatan lainnya. Salah satu tindakan kejahatan massa adalah massa buruh perkebunan dan buruh *proeftuin* yang berusaha menguasai perkebunan dan *proeftuin-proftuin* milik CPV Jember pada tahun 1957.

Telah diketahui bahwa pengaturan terhadap segala aset Belanda dan sebagainya dikendalikan oleh Presiden bersama KSAD A. H. Nasution. Hal ini dilakukan guna menghindari kemacetan Perekonomian Negara khususnya sektor pertanian. Melihat kondisi ekonomi dan keamanan yang memprihatinkan dan sebelum habis masa berlakunya SOB, maka perlu untuk menguasai lembaga-lembaga penyelidikan bidang perkebunan⁸². Lembaga penyelidikan bidang perkebunan seperti CPV Jember di pandang penting oleh Presiden Sukarno dan A.H. Nasional. Hal ini guna menghindari kerusakan secara fisik pada lembaga tersebut oleh karena buruh perkebunan dan orang-orang yang tidak berkepentingan atasnya tengah mengincar untuk memiliki. Oleh karena itu Militer dalam hal ini berperan penting untuk menghalau massa di lapangan. Dari itu semua maka lahirlah keputusan tentang penguasaan Lembaga Penelitian Pertanian

⁸¹ *Menara Perkebunan*, Tahun ke-29 No. 7 – Djuli 1960, hlm. 13. Majalah Menara Perkebunan pada tahun 1931-1958 bernama *De Bergcultures* yang merupakan terbitan berkala hasil kerjasama ALS, ZWSS, CPV dan AVROS (*Algemeene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatera*). Menara Perkebunan sebagai lanjutan dari *De Bergcultures* yang diterbitkan oleh Algemeen Landbouw Syndicaat/Centrale Proefstations Vereniging sejak tahun 1926. Dalam Makalah berjudul: *Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia*, Bogor, 21 Desember 1987.

⁸² *Menara Perkebunan*, No. 1, Jakarta, Januari 1958, hlm. 17.

oleh Penguasa Militer/ Menteri Pertahanan No. 1063/PMT/1957 yang diberlakukan mulai tanggal 9 Desember 1957.

BAB 3. NASIONALISASI PUSLIT KOKA JEMBER

3.1 Menuju Nasionalisasi

3.1.1 Kemunduran Puslit Koka Jember (CPV Jember)

Pada tahun 1950-an Puslit Koka Jember atau CPV Jember mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut disebabkan oleh *pertama*, perginya para pegawai berkebangsaan Belanda dari lembaga. Pada tanggal 1 Mei 1955 Direktur *Landbouwkundige Afdeling Midden-en Oost-Java* di Jember (CPV Jember) beralih dari tangan Ir. J.C. van Schoonneveldt (1948-1955) kepada Ir. F. Van Gogh (1955-1956)¹. Van Gogh adalah orang Belanda yang telah cukup berpengalaman bekerja di Dinas Penerangan Pertanian (*Landbouw Voorlichtings Dienst*).

Pada tahun 1955 dilakukan pengiriman 4 orang Akademisi CPV Jember ke Belanda untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian entomologi atau penelitian tentang serangga di Balai Pusat Botani Belanda². Keempat Akademisi itu mengemban pula jabatan *Beheerder* (Kepala) *Proeftuinen* di Jember sehingga jabatan Kepala *Proeftuin* untuk sementara tidak ada. Pekerjaan mereka di Belanda ternyata menyita banyak waktu. Akibatnya *proeftuin-proeftuin* seluas 235 Ha³ milik CPV Jember yang ditinggalkan mereka menjadi terbengkalai. *Proeftuin* menjadi terhambat produksinya dan percobaan penanaman komoditi kopi unggul dan sebagainya terbengkalai dan tidak terpantau. Pengiriman keempat Akademisi tersebut dilakukan tanpa seijin CPV Bogor. Akhirnya muncul ketidakpercayaan dari CPV Bogor. Ternyata pengiriman 4 Akademisi ke negeri Belanda, dipergunakan sebagai upaya untuk melarikan diri dari wilayah Indonesia

¹ Van Heusden, *het Proefstation der C.P.V. in 1955*. Dalam Majalah, *De Bergcultures*, 25e Jrg. No. 14 – Djakarta, 16 Juli 1956, hlm. 331.

² *Ibid.*, hlm. 341. Entomologi adalah ilmu tentang serangga.

³ *Proeftuin* seluas 235 Ha terdiri atas: *Proeftuin* Kaliwining (\pm 160 ha karet, kopi, kakao, tembakau), *Proeftuin* Sumber Asin (\pm 125 ha kopi) dan K.P. Kedung Pane (\pm 50 ha kakao). Dalam, Dewan Perancang Nasional Republik Indonesia, *Dasar Undang Undang Pembangunan Nasional Semesta-Berencana Delapan Tahun 1961-1969*, t.th., hlm. 1875.

mengingat kondisi keamanan Indonesia terutama Kota Jember pada periode tahun 1956-1960 terganggu⁴. Sebagian besar buruh di perkebunan-perkebunan Jember berafiliasi dengan komunis. Jumlah mereka di LMOD sebesar 30.000 orang⁵ dan di Kebun Percobaan Kaliwining sebesar 150-172 orang⁶. PKI di Indonesia sangat anti Belanda sejak kegagalannya di Madiun tahun 1948. Para buruh sering melampiaskan kekesalannya terhadap orang asing. Orang-orang asing yang melintasi jalan raya kota Jember sering di serang beberapa orang tidak dikenal.

Selanjutnya jabatan *Beheerder Proeftuin* (Kepala Kebun Percobaan yang bertugas sebagai pengawas dan pemelihara Kebun) dapat terisi kembali. Muncul permasalahan baru menyangkut Kepala *Proeftuin* ini. Belum mencapai beberapa bulan, orang-orang Belanda yang telah diserahi jabatan Kepala *Proeftuin*, diketahui sebanyak 1 orang *Beheerder Proeftuin* Sukowono telah mutasi jabatan dan 1 orang *Beheerder Proeftuin* di Sumber Asin Malang telah mengundurkan diri (*ontslag*)⁷. Aktivitas ini dilakukan tanpa sepengetahuan CPV Jember. Mereka langsung meminta ijin CPV Bogor di Bogor. Oleh karena hubungan yang kurang sehat antara CPV Bogor dan CPV Jember, permintaan pengunduran diri dan mutasi kedua *Beheerder Proeftuinen* tersebut dipenuhi CPV Bogor. *Beheerder Proeftuinen* lainnya yang tetap pada jabatannya yaitu *Beheerder Proeftuinen* Kaliwining dan *Beheerder Proeftuinen* Kedung Pane Semarang.

Persoalan lowongan jabatan masih menjadi persoalan yang belum dapat dipecahkan, apalagi kali ini menyangkut jabatan Kepala CPV Jember. Jabatan ini

⁴ P.C. Suroso dkk, *Perekonomian Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 128.

⁵ Tri Chandra Aprianto, "Petani dan Nasionalisasi; Keikutsertaan Massa Rakyat Tani dalam Proses Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan di Jember", (Laporan Akhir Penelitian Fakultas Sastra Universitas Jember, 2004), hlm. 108.

⁶ Jumlah pegawai di kantor CPV Jember cenderung tetap meliputi para fungsionaris tua sejak tahun 1955 hingga terjadinya peristiwa pengambilalihan, bahkan mungkin berkurang karena sebagian besar mereka adalah orang asing yang di benci rakyat. Untuk jumlah buruh di kebun percobaan Kaliwining cenderung bertambah terutama untuk buruh musiman (*Seizoe arbeiders*) dalam setiap musim panen. Dalam Tabel berjudul: *Perkembangan Tenaga Kerdja Balai Penyelidikan Perkebunan Besar Djember dan Kebun-kebun Pertjabaannya sedjak 1 Djanuari 1958 s.d. 1 Djanuari 1968*.

⁷ Van Heusden, *op.cit.*, hlm. 332.

kosong akibat ditinggal pergi Van Gogh ke negeri Belanda untuk menjemput 4 Akademisi yang tak kunjung kembali. Sebetulnya telah ada upaya untuk mengganti jabatan yang ditinggal oleh Van Gogh, khususnya dari para pegawai muda. Namun para pegawai muda tidak berani mengambil resiko, karena beratnya tanggung jawab jabatan kepala CPV Jember.

Ketika situasi tengah panik karena kepergian F. van Gogh ke Belanda, F. van Gogh datang kembali ke Jember pada tanggal 1 November 1955⁸. Van Gogh selanjutnya diangkat kembali sebagai kepala CPV Jember pada hari itu pula⁹. Dengan demikian CPV Jember telah gagal untuk memilih golongan pegawai junior. CPV Jember pada akhirnya tetap dipimpin oleh pegawai fungsionaris senior atau tua. Meskipun demikian, semangat untuk mencari pimpinan dari golongan junior tetap ada.

Upaya tersebut semakin menemui titik cerah pada awal tahun 1956, dimana CPV Jember mengeluarkan keputusan resmi yakni mencari segera calon pegawai (*krachten*) CPV yang berasal dari orang Indonesia asli yang telah cukup berpengalaman. Keputusan ini sebagai perintis Indonesianisasi di CPV Jember. Selanjutnya CPV Jember mendapat hambatan lagi yang semakin menjauhkan proses Indonesianisasi. Semua orang baik asing maupun pribumi hingga tahun 1957 tidak ada yang mau bekerja di CPV Jember. Meskipun ada, orang pribumi tersebut hanya bersedia sebagai pekerja kasar. Melihat fenomena ini, jumlah pegawai CPV Jember tidak berubah dan tetap meliputi para fungsionaris senior atau tua. Permasalahan di atas terus berjalan hingga berlarut-larut. Permasalahan di atas merupakan awal mengakarnya rasa menyesal pada kalangan *onderneming* karena telah bersusah-payah mendirikan lembaga penelitian guna menyelesaikan permasalahan perkebunan mereka, ternyata justru menambah masalah. Fenomena ini yang kelak meruncing pada tahun 1957 sehingga memunculkan ide agar CPV Jember dibubarkan saja seperti yang telah dilakukan pada CPV Malang, Salatiga

⁸ *Ibid.*, hlm. 331.

⁹ Pengangkatan van Gogh menjadi Direktur CPV Jember berlangsung sederhana disebabkan kepanikan yang terjadi pada segenap pegawai oleh karena kondisi keamanan yang kurang mendukung seperti yang telah disinggung di atas.

dan Semarang¹⁰. Para pegawai Belanda terus mengupayakan untuk pergi dari kota Jember. Hal ini tidak lepas dari nasib yang kurang menguntungkan yang dialami Puslit Koka Jember. Puslit Koka Jember sejak Oktober 1956 dan begitu pula dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan Belanda lainnya, berada dalam keadaan lembaga yang cenderung mengambang dan hampir tidak dapat dipertahankan eksistensinya, sementara kesulitan-kesulitan semakin meningkat¹¹.

Kedua, pengaturan keuangan lembaga yang buruk. Oleh karena CPV Jember berada di bawah CPV Pusat Jakarta dan CPV Pusat Jakarta berada dibawah ALS (*Algemeene Landbouw Syndicaat*)¹² pusat Jakarta dan ALS pusat tunduk terhadap Kementerian Luar Negeri Indonesia yang merupakan wakil pemerintah RI dalam urusan gaji pegawai asing, pengaturan penggajian di CPV Jember diatur kementerian Luar Negeri Indonesia yang notabene benci kepada Belanda. Disisi lain iuran bersama para *ondernemer* Belanda terputus disebabkan oleh korupsi dan kocar-kacirnya para Direksi *onderneming-onderneming* karena takut kepada orang-orang pribumi. Akibatnya persoalan pengaturan gaji pegawai CPV Jember menjadi macet selama tahun 1956. Sebagian besar pegawai CPV Jember adalah orang Belanda yang merupakan mantan interniran (tahanan) Jepang seperti van der Veen, van der Heide dan lain-lain¹³. CPV Jember tidak banyak menjanjikan urusan gaji yang memadai karena urusan keuangan lembaga tersebut berada di bawah wewenang Kementerian Luar Negeri Indonesia.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono pada tanggal 11 Februari 2007.

¹¹ Joost Jonker dan Keetie Sluyterman, *Thuis op de Wereldmarkt, Hederlandse Handelshuizen Door de Eeuwen Heen*. The Hague: SDU. Dalam, J. Thomas Lindblad, *Macroeconomic Consequences of Decolonization in Indonesia*, (Leiden: Tanpa Penerbit, 2000), Lembar 9.

¹² Seluruh perusahaan perkebunan di Hindia Belanda menjadi anggota ALS. ALS adalah organisasi yang terdiri atas gabungan perusahaan-perusahaan perkebunan. ALS berfungsi menyediakan dana bagi kegiatan penelitian di puslit-puslit perkebunan di seluruh Hindia Belanda. Pada periode tahun 1926-1933 Puslit Koka Jember dibiayai ALS. Wawancara dengan Bapak Ignatius Hartana pada tanggal 10 Februari 2007. Lihat dalam *Bagan* berjudul: Perkembangan Organisasi Balai Penelitian Perkebunan Jember tahun 1911-1983, dalam Arsip berjudul: *Taak Organisatie en Financiering 1973-1989*.

¹³ Wawancara, *Ibid*.

Pemerintah RI pada tahun 1956 kurang begitu memberikan perhatian penuh kepada CPV Jember yang menyebabkan kondisi keuangan lembaga menjadi buruk. Hal ini setidaknya disebabkan oleh:

1. Pemerintah lebih sibuk mengurus:
 1. Perjuangan merebut Irian Barat
 2. Perselisihan kalangan partai politik
 3. Pengembangan sektor industri berat
 4. Inflasi yang kian tak terkendali dan menimbulkan *defisit* anggaran Negara sebesar Rp. 5.300.000.000,-¹⁴
 5. Penyelesaian pemberontakan PRRI/ Permesta

Semuanya membutuhkan perhatian penuh segenap bangsa Indonesia dan penyediaan dana yang besar.
2. Pemerintah masih belum memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap CPV Jember karena CPV Jember sejak berdirinya berada di bawah tanggung jawab penuh *onderneming-onderneming* partikelir Belanda. Artinya, singgungan-singgungan pemerintah terhadap perihal CPV Jember hampir tidak ada.
3. Penemuan-penemuan mutakhir CPV Jember bidang pertanian tidak ada disebabkan kegalauan para peneliti (*Research Workers*) Belanda dalam menyelamatkan nyawa mereka sendiri.

Permasalahan kesejahteraan hidup orang Belanda tidak terpikirkan. Akhirnya pada tanggal 7 Juli 1956 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberikan sedikit toleransi. Instruksi Kementerian Luar Negeri RI merupakan merupakan satu-satunya kebijakan pemerintah Presiden Soekarno terhadap CPV Jember. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan instruksi agar ada pengaturan masalah gaji bagi para interniran baik statusnya dia masih aktif di tempat pekerjaannya ataupun yang sudah pensiun. Gaji tersebut masih

¹⁴ Hamid Hasan, dkk, *Buku Materi Pokok Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, Depdikbud, 1986), hlm. 171.

dikurangi pemerintah dengan dikenakan wajib pajak sebesar $f 300$ ¹⁵ untuk mengisi kas negara. Kondisi keprihatinan ini disebabkan oleh:

1. Pendapatan pemerintah dari ekspor sangat menurun
2. Resesi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat selama akhir tahun 1957 hingga permulaan tahun 1958
3. Inflasi yang semakin tidak terkendali
4. Gangguan keamanan dalam negeri
5. Alokasi dana APBN sebagian besar untuk Pertahanan dan Keamanan¹⁶

Instruksi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di atas berlaku terhadap seluruh pegawai berkebangsaan Belanda pada perusahaan apa saja. CPV pusat Jakarta Pada tanggal 19 Juli 1956 menindak lanjuti instruksi dengan mengeluarkan kebijakan agar CPV Bogor, CPV Semarang dan *CPV L.A.M.O.J. Djember*¹⁷ saling membantu dalam mengurus pegawai-pegawai asing. Pada tanggal 28 Juli 1956 *CPV L.A.M.O.J. Jember* menerima instruksi tersebut. Dengan kebijakan tersebut, kesejahteraan pegawai CPV Jember berkebangsaan Belanda kembali normal yang disisi lain kegiatan penelitian tidak berjalan. Orang-orang Belanda yang notabene musuh besar bangsa Indonesia tetap hidup sejahtera sementara kesengsaraan dan kemiskinan rakyat secara umum dan kesengsaraan para buruh perkebunan secara khusus tetap dalam kondisi memprihatinkan. Permasalahan ini menjadi *moment* tercapainya puncak keberhasilan perjuangan organisasi buruh perkebunan yang akan terjadi pada awal tahun 1957.

Ketiga, munculnya kekuatan Sarbupri (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) di kebun-kebun percobaan CPV Jember. Sarbupri sejak awal tahun 1950 berhasil mempengaruhi pemikiran seluruh pegawai (buruh) perkebunan-perkebunan Jember dan kebun percobaan Kaliwining milik CPV Jember. Gerakan Sarbupri di Jember berasal dari Sarbupri Bangil, Malang dan

¹⁵ *Financieele Dagblad*, Zaterdag, 7 Juli 1956.

¹⁶ P.C. Suroso dkk, *op.cit.*, hlm. 136.

¹⁷ CPV L.A.M.O.J. Jember atau CPV Jember atau *Centraale Proefstation Vereeniging Landbouekundige Afdeeling Midden-End Oosts Java* adalah gabungan CPV Jember dengan CPV Malang sejak tahun 1933.

Probolinggo¹⁸. Para pimpinan Sarbupri Bangil, Malang dan Probolinggo sejak tahun 1950 melakukan perekrutan terhadap para pemuda kampung, pemuda petani dan pemuda pekerja atau buruh lepas di perkebunan-perkebunan Jember. Calon PKI muda tersebut yang terbanyak adalah dari desa Wonojati Kecamatan Tempurejo. Mereka kuat dan kompak melakukan perekrutan dan penggalangan dana dari uang saku sendiri. Mereka merupakan perintis utama penyebaran paham komunis pada kalangan buruh kebun percobaan milik CPV Jember di desa Kaliwining kecamatan Rambipuji.

Atas fenomena di atas, kelak pada waktu pengambilalihan, perkebunan Wonojati kelak dikuasai para pemuda komunis. Penguasaan itu hanya berlangsung selama beberapa bulan. Militer tidak berani masuk ke desa Wonojati karena takut diserang pemuda-pemuda PKI Tempurejo yang cukup tangguh. Pihak pemuda komunis bersedia menyerahkan perkebunan Wonojati dengan syarat mereka menerima sejumlah uang sebagai ganti rugi. Permintaan itu cepat ditanggapi PPN Baru (Pusat Perkebunan Negara Baru). PPN Baru adalah bekas *onderneming-onderneming* Belanda. PPN Baru pengertiannya adalah agar setelah diberlakukannya ambil alih, penguasaan terhadap PPN Baru beralih ke tangan ABRI (termasuk Dwi-fungsinya, kolonel, Kapten dan pensiunannya) dan generasi muda seperti lulusan –lulusan sipil bidang pertanian yang baru.

PPN Baru segera menyerahkan langsung sejumlah uang kepada para pemuda komunis. Setelah perkebunan dimiliki PPN Baru, dibuatlah galian yang cukup dalam di tengah-tengah perkebunan Wonojati dan di Pedukuhan Gumuk Payung (selatan kantor kebun percobaan (KP) atau Persil Kaliwining atau *Nogosariestaat*). Lubang besar hasil penggalian tersebut kelak dimanfaatkan bagi penanaman dan pembenaman orang-orang komunis dari kalangan buruh perkebunan, buruh kebun percobaan Kaliwining dan masyarakat umum di kecamatan Tempurejo dan kecamatan Rambipuji pada masa pemberantasan PKI tahun 1965 oleh pemerintah daerah, militer dan PPN Baru di Jember¹⁹.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Zulkarnaen di kediamannya Jl. Semeru XVIII Jember pada tanggal 1 April 2007.

¹⁹ *Ibid.* Juga hasil wawancara dengan Bapak Jalim, *Loc.Cit.*

Pada tahun 1953 kaum buruh dari berbagai serikat buruh (SOBSI dan non-SOBSI seperti Sarbupri dan lain-lain) di tingkat nasional mengorientasikan perjuangannya untuk melakukan 6 rencana yaitu:

1. Mengadakan Kongres Upah untuk membicarakan soal-soal upah
2. Mengadakan Komite Makanan Rakyat
3. Mengadakan Komite Kaum Penganggur
4. Mengadakan front di dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau perwakilan-perwakilan lainnya
5. Mengadakan Sekretariat Bersama untuk melaksanakan suatu fusi²⁰

Sarbupri adalah organisasi kemasyarakatan yang sebagian besar pemimpinnya telah terpengaruh ide-ide komunis. PKI adalah partai politik, sementara Sarbupri adalah *Onderbouw* PKI²¹. Sumber keuangan Sarbupri adalah dari hasil penjualan Lisensi-lisensi Impor di pasar bebas dinaikkan sebesar 200 hingga 250% dari harga nominalnya²². Aktivitas ini mulai berlangsung sejak prestasi tinggi yang di raih PKI pada Pemilu tahun 1955.

Diantara ke-enam rencana kaum buruh tersebut, yang terwujud pada CPV Jember adalah membicarakan soal-soal kenaikan upah dan kenaikan tingkat. Hal ini dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut.

Direksi perkebunan beserta staf yang non komunis tidak berani melarang penetrasi Sarbupri pada kalangan buruh. Sarbupri merupakan organisasi massa yang mandiri, bermodal sendiri dan menjadi lawan para elit perkebunan. Sarbupri cabang Jember merupakan ranting dari Sarbupri Pusat di Jl. Manggis 52 Jakarta²³. Direksi perkebunan seperti *Administrateur*, *Sinder*, *Mandor* dan

²⁰ Central Comite Partai Komunis Indonesia (CC PKI), *Soal Serikat Buruh Reaksioner dan Arbitrasi Pemerintah*, (Djakarta: CC PKI, 1952), hlm. 29.

²¹ Wawancara dengan Bapak Jalim, *Loc. Cit.*

²² Ong Hok Ham, *Sejarah Ekonomi Kontinuitas dan Perubahan I, (1945-1965)*. Dalam, International Quality Publication, *Perekonomian Indonesia Memasuki Milenium Ketiga*, (London: International Quality Publication, 1997), hlm. 46.

²³ Sekretaris Umum Sarbupri Pusat adalah Hutomo dan Sekretaris Sosial-Ekonomi Sarbupri Pusat adalah Setiati Surasto. Dalam *Surat Edaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sarbupri*

sebagainya di Karesidenan Besuki yang pangkatnya tinggi, mereka benci terhadap Sarbupri, begitu pula sebaliknya.

Dalam hubungannya dengan CPV Jember, Sarbupri menjalin hubungan yang kurang sehat dengan lembaga tersebut. Bentuk gerakan Sarbupri di kebun-kebun percobaan milik CPV Jember adalah membela hak buruh-buruh bulanan dan harian di kebun percobaan Kaliwining. Sarbupri mencari-cari masalah di Kebun Percobaan Kaliwining, Sumber Asin Malang dan Belakang Kantor CPV Jember hingga kepada masalah terkecil dan sederhana sekalipun seperti pengaduan buruh karena dipukul oleh mandor dan sebagainya.

Orang komunis yang ada di kantor CPV Jember membatasi diri hanya pada perasaan simpatik terhadap perjuangan Sarbupri²⁴. Mereka tidak mempunyai rencana apapun di lembaga tempat mereka bekerja. Fungsi utama mereka di CPV Jember ialah menyediakan fasilitas pengurusan stempel, tanda tangan dan cap jari guna mendukung pengaduan-pengaduan buruh kebun-kebun percobaan CPV Jember. Sarbupri berhasil mengangkat persoalan upah atau gaji dan kenaikan tingkat bagi para *krachten* (pegawai muda) di kebun percobaan Kaliwining. Karena CPV Jember statusnya milik gabungan (*Vereeniging*) perkebunan-perkebunan swasta, kedua masalah itu langsung di naik-bandingkan kepada Direktur ALS pusat Jakarta dimana proses pengurusan stempel dan tanda tangannya dibantu oleh orang-orang kantor CPV Jember yang simpatik terhadap perjuangan Sarbupri seperti yang telah disinggung di atas. ALS pusat Jakarta mengepalasi semua perkebunan partikelir di seluruh Indonesia dan menjadi sumber dana utama CPV Jember ketika itu. Kebijakan tentang hal apapun dari pengurus ALS pusat akan ditaati CPV Jember, *onderneming-onderneming* dan CPV-CPV lainnya di Indonesia.

kepada Dewan Ranting/ Tjabang Sarbupri seluruh Indonesia No. 69/Secr/DPP/Sosek/'53, 23 Maret 1953.

²⁴ Tetapi meskipun demikian, kelak terdapat 1 orang pegawai simpatisan Sarbupri, yakni Holal, seorang Teknisi kantor (yang bertugas memperbaiki kendaraan yang rusak, memperbaiki kran air yang bocor, mengganti lampu yang mati dan sebagainya), yang ikut dibantai militer di Kaliwining pada tahun 1965. Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono, *op.cit.*, pada tanggal 28 Januari 2008.

Para buruh perkebunan berada di bawah ALS karena ALS adalah lembaga yang memperoleh kepercayaan penuh dari perkumpulan organisasi-organisasi perkebunan dan balai penyelidikan perkebunan di seluruh Indonesia untuk menangani persoalan pegawai atau buruh di masing-masing perkumpulan tersebut termasuk CPV Jember²⁵. ALS menerima segala protes Sarbupri mengenai kenaikan tingkat bagi para *krachten*. Eksistensi CPV Jember di mata ALS menjadi buruk. ALS segera menindak CPV Jember berupa tuntutan tentang kenaikan tingkat²⁶. Atas tindakan ALS Pusat terjadi suatu terobosan baru di CPV Jember. Terobosan tersebut sebagai berikut.

Terdapat beberapa buruh di kebun percobaan Kaliwining milik CPV Jember yang berhasil dinaikkan pangkatnya dan dinaikkan gajinya. salah satunya adalah Pak Atmo. Pak Atmo dinaikkan jabatannya menjadi Mantri Juru Hitung/Gambar. Sebelumnya ia hanya seorang buruh lepas. Buruh lepas baru mendapat upah apabila sewaktu-waktu dipanggil mandor kebun untuk membantu panen kopi dan sebagainya. Pak Atmo ahli membedakan jenis karet pada bagian benih karet dan mudah akrab dengan para tamu Belanda semenjak menjadi buruh lepas di CPV Jember pada awal tahun 1954 dan potensi ini tidak diketahui CPV Jember. Setelah ada perjuangan Sarbupri baru terbuka potensi itu dan dapat diketahui buruh-buruh yang lain.

Begitu pula dengan Pak Jalim yang sebelumnya membantu ayahnya sebagai pegawai tetap KP Kaliwining atau *Nogosariestaat*. Dikarenakan Pak Jalim gesit bekerja dan kritis terhadap buruh lepas lainnya yang bermalas-malasan bekerja di KP, maka potensi tersebut diketahui Administrateur KP Kaliwining Kho Bing Tjing sehingga langsung diangkat sebagai mandor kecil KP Kaliwining dan menjadi orang kepercayaan Kho Bing Tjing. Atas perjuangan Sarbupri, Pak Jalim diangkat sebagai Mandor Kepala KP Kaliwining yang membawahi semua

²⁵ ALS hingga tahun 1957 masih disertai kepercayaan untuk memberikan ijin tertulis kepada para pegawai CPV Jember yang mempunyai status sebagai Warga Negara Asing yang ingin *ontslag* (berhenti) bekerja di lembaga untuk pulang ke negaranya. Dalam Surat ALS perwakilan Jawa Timur kepada CPV Jember tentang *Ontslagverlening* (pemberian hak berhenti) tanggal 13 Maret 1957.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono, *Loc.Cit.*

mandor kecil, buruh lepas dan buruh tetap di KP Kaliwining pada tahun 1955-1957.

Hal-hal umum yang diperjuangkan Sarbupri di perkebunan dan *Proeftuin* atau kebun percobaan CPV Jember adalah sebagai berikut.

1. Tentang kenaikan tingkat atau pangkat pegawai karena telah cukup lama bekerja. Hampir semua pegawai di Puslit Koka dan di Kebun Percobaannya juga diperjuangkan.
2. Tentang tunjangan-tunjangan atau upah-upah seperti tunjangan hari raya dan jatah serta tunjangan beras. Apabila jatah beras terlambat maka Sarbupri segera menuntut kenapa beras tidak segera datang. Masalah dan hambatannya apa dan banyak pertanyaan kritis lainnya. Tunjangan upah ini berlaku bagi golongan pegawai terutama pegawai menengah di CPV dan mandor kecil di Kebun Percobaan (*Proeftuin*) hingga pegawai lepas yang terdiri atas buruh-buruh perkebunan (*arbeiders*)²⁷.

Perwujudan perbincangan menyangkut soal-soal upah buruh di CPV Jember terjadi mulai tanggal 25 Juli 1955. Selanjutnya pada tanggal 24 April 1956 dilakukan penyempurnaan menyangkut upah buruh melalui kesepakatan *Dictum-Beslessing* sebagai berikut.

Gerakan-gerakan buruh seperti Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia (KBKI), Sarekat Buruh Islam Indonesia (SBII) dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) pada tanggal 24 April 1956 membuat *Dictum-Beslessing* (Dictum-Putusan)/ kesepakatan dengan ALS, ZWSS, BEBTO (*de Bond van Eigenaren van Besukische Tabaksondernemingen*), PPN (Pusat Perkebunan Negara) dan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga dibawah wewenang ALS dan sebagainya termasuk CPV Jember²⁸. Dicapai kesepakatan bahwa kenaikan gaji untuk tahun 1956-1957 bagi para buruh sebesar minimal Rp. 50,- dan maksimal Rp. 300,- dari gaji awal sebesar f 300-f 22,5. Selanjutnya

²⁷ *Positieregeling 1949*, hlm. 1. Dalam, *Reglement* (Peraturan) CPV Djakarta-Kota. Lihat pula, *Positieregeling Lagerpersoneel 1951-1973*.

²⁸ Surat Keputusan *Centrale Commissie ter Beslechting van Arbeidsgeschillen* tentang *Dictum-Beslessing* No. P4/M/56/4431/P4 – 5062, Jakarta, 24 April 1956.

peraturan tersebut disempurnakan pada tanggal 1 Juni 1956 dimana dikeluarkan peraturan kenaikan gaji beriringan dengan momen lebaran bagi para buruh Kebun Percobaan (*Tuinpersoneel*) CPV Jember yang beragama Islam dan buruh anggota Sarbupri. Kenaikan gaji tersebut antara Rp.100, hingga Rp.300,-²⁹.

Selanjutnya terhadap para pegawai yang beragama Kristen diperlakukan istimewa misalnya mereka mendapat uang bonus Kristen (*Kerstvoorschot*) sebesar Rp 500,-. Bonus tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 1956³⁰. *Kerstvoorschot* berlaku bagi para pegawai Kristen di CPV Bogor, Semarang dan Jember/ Malang.

Atas naiknya kemakmuran beberapa golongan pegawai di atas, para pegawai yang ber-golongan gaji IV keatas yang semuanya berkebangsaan Belanda, menuntut CPV Pusat Jakarta untuk mengeluarkan kebijakan kenaikan gaji bagi mereka. J.T. Wassink menerima tuntutan tersebut sehingga lahirlah kebijakan kenaikan gaji bagi pegawai golongan IV (pegawai Belanda) dan di atasnya sebesar Rp 2000,- hingga Rp 3000,- setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1957³¹. Meskipun demikian, disebabkan oleh kondisi keamanan Jember yang semakin tidak mendukung, para pegawai Belanda tetap ingin pergi dari Indonesia.

Sehubungan dengan bergulirnya kebijakan menyangkut persoalan gaji tersebut, kondisi ekonomi para pegawai pribumi secara perlahan-lahan membaik. Hal ini setidaknya disebabkan oleh:

1. Perjuangan Sarbupri
2. Pendapatan CPV Jember dan *onderneming-onderneming* dari hasil ekspor yang masih tinggi hingga akhir tahun 1957
3. Belum terjadi resesi ekonomi dunia

²⁹ Arsip berjudul: *Positieregeling Lagerpersoneel 1951-1973.*, *Loc. Cit.*

³⁰ Ontwerp CPV Jember No. CPV 1129 tentang *Kerstvoorschot* tanggal 4 Desember 1956.

³¹ Surat CPV Jember No. CPV 1079/ D tentang *Salarisverhoging* per 1 Djanuari 1957 dari CPV Jakarta kepada CPV Jember. J.T. Wassink adalah Direktur CPV Pusat Jakarta.

4. Pemerintah pusat masih peduli terhadap sektor ekonomi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan dengan mengalokasikan dana sebesar 13% dari APBN³²

Hingga pertengahan tahun 1957 CPV Jember memiliki 5 Kebun Percobaan (KP) yaitu KP Kaliwining, KP *Kedung Pane* Semarang, KP Belakang Kantor (*proeftuinen Achtertuin*), KP *Sumber Asin* di Malang dan KP Onder Afdeling Malang yang merupakan bekas *Malang Proefstation*. Kebun Percobaan Onder-Afdeling Malang pada tanggal 1 November 1957 dibubarkan. Mantan para *Arbeiders* (buruh perkebunan) di sana diberi uang pesangon/ d jasa sebagai tunjangan hidup untuk beberapa bulan ke depan. Uang Pesangon/ D jasa ini dibebankan sepenuhnya kepada ALS dan Djawatan Pengawas Perburuhan di Malang³³ dan bukan kepada CPV Jember padahal kebun percobaan (*proeftuin*) tersebut diolah CPV Jember. Hal ini terjadi karena sejak saat itu kondisi keuangan CPV Jember terus merosot.

Adapun kemajuan-kemajuan penelitian yang telah berhasil dicapai selama tahun 1954-1957 yakni berdasarkan hasil penelitian oleh para peneliti Belanda tahun 1954, telah ditemukan bibit kopi unggul, yakni BP 4 (*Besoekisch Proefstation 4*), BP 42, BP 358, BP 409, SA 237 (Sumber Asin 237), SA 56 dan SA 109³⁴. Selanjutnya pada tahun 1955 ditemukan kembali bibit kopi unggulan dari hasil persilangan 4 famili kopi yakni:

1. SA 24 X (disilangkan dengan) BP 42
2. SA 29 X BP 42
3. BP 368 X BP 369
4. BP 358 X BP 42

³² P.C. Suroso dkk, *op.cit.*, hlm. 128.

³³ Arsip No. CPV 119, *Onderwerp: Uang Pesangon/ D jasa*.

³⁴ Diantara bibit-bibit kopi tersebut, yang hingga tahun 1994 masih dapat mempertahankan keunggulannya ialah BP 42, BP 358, BP 409 dan SA 237. Untuk menyebut salah satu contohnya, adalah BP 42 merupakan bibit yang peka terhadap hama cacing tanah parasit dan begitu pula dengan bibit-bibit yang lain, peka terhadap hama tertentu. Dalam, CPV Jember, "Pelatihan Pengawas Benih Kakao", Jember, 3-8 Oktober 1994, hlm. 2. Lihat pula dalam, CPV Jakarta, *Vraagbaak Voor De Koffiecultuur en De Koffiebereiding*, (Jakarta: CPV Jakarta, 1954), hlm. 27.

Keempat jenis tanaman induk kopi tersebut di tanam di KP Sumber Asin Malang dan di Gunung Gumitir Banyuwangi pada tahun 1956 sebanyak 73 pohon sementara pupuk yang dianjurkan adalah pupuk NPK, NP dan N. Pupuk-pupuk tersebut diujicobakan pula di perkebunan-perkebunan Karesidenan Besuki, terutama untuk tanaman kopi³⁵. Kemajuan yang lain yakni CPV Jember bekerja sama dengan CPV Bogor menerbitkan buku berjudul *Ziekten en Plagen van Hevea Brasiliensis in Indonesie* Tahun 1955 berdasar atas penelitian L.A. Beery (CPV Bogor) dan Van der Knaap (CPV Jember)³⁶. Kemajuan dalam bidang lain yakni:

1. Laporan Penelitian Ir. C.J. Gude tentang Kopi Robusta yang berjudul *Enige Gedachten Betreffende Robusta Selectie naar Aanleiding van het Plaantadvies 1956* tahun 1955 dan yang berjudul *Resultaten van Robustatoetsproeven op de Onderneming Gunung Gumitir en in de roeftuin Sumber Asin* pada awal tahun 1957
2. Laporan penelitian Dr. H. Jakobs berjudul *Koffiebereiding en Raung Wasmachine* Tahun 1955 dan yang berjudul *Ribber, het Bewaren van Type-Monsters*.
3. Laporan Penelitian Ir. J.R. Willet berjudul *Leucaenaklonen en Hun Behandeling in de Proeftuin Kaliwining, Verwerking van Een Enquete Betreffende Ziekten en Plagen in de Koffiecultuur 1955 en 1956* dan yang berjudul *Bessen Bubuk in de Koffie*
4. Laporan Penelitian oleh Ir. W.P. Van der Knaap berjudul *Het Onderzoekingswerk Ten Behoeve van de Cacaocultuur in Indonesie*³⁷

3.2 Nasionalisasi Puslit Koka

³⁵ B.P.P. CPV LAMOJ Jember, *Rencana Programma Kerja 1959, Kopi*, 1959, hlm. 2-3.

³⁶ *De Bergcultures*, 25ste Jaargang 1956, hlm. 4-5.

³⁷ *Auters – Register van de Bergcultures 25ste Jaargang 1956*. Lihat pula dalam Daftar Nama-nama Pengarang dari *De Bergcultures*, Jilid 26 – 1957.

Nasionalisasi Puslit Koka berkaitan erat dengan nasionalisasi perusahaan perkebunan (*onderneming*) di Karesidenan Besuki. Hal ini karena telah terjalin kerjasama yang erat antara *onderneming-onderneming* dengan Puslit Koka sejak tahun 1910. Kerjasama dilakukan untuk membiayai penelitian, memelihara *Proeftuin* dan Aktivitas penting lainnya di Puslit Koka. Pembiayaan terbesar penelitian di Puslit Koka pada tahun 1910-1957 bersumber dari *onderneming-onderneming* di Karesidenan Besuki seperti *Landbouwmaatschappij Oud Jember (LMO)*, *Besoeki Tabakmaatschappij (BTM)*, *Cultuurmaatschappij Djelboek* dan *Landbouwmaatschappij Soekowono (LMS)*. Hal ini sangat menentukan lancartidaknya aktifitas-Aktivitas kelembagaan di Puslit Koka ketika nantinya perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut di nasionalisasi.

Nasionalisasi Puslit Koka terjadi karena A.H. Nasution selaku penguasa militer/ Menteri Pertahanan RI pada tanggal 9 Desember 1957 mengeluarkan kebijakan tentang nasionalisasi perkebunan beserta lembaga penyelidikan ilmiah di lapangan pertanian/ perkebunan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Pertahanan RI No. 1063/PMT/1957³⁸. Nasionalisasi Puslit Koka disebabkan pula oleh sengketa Irian Barat yang berlarut-larut sehingga untuk menuntaskannya, bangsa Indonesia harus menggunakan metode memaksa. Metode ini motor penggerak adalah peristiwa nasionalisasi total secara serentak terhadap semua aset Belanda pada tahun 1957. Nasionalisasi juga memiliki motor penggerak ialah Militer RI.

Nasionalisasi Puslit Koka diselenggarakan secara damai oleh intern Puslit Koka sendiri berdasarkan arahan teknis dari Menteri Pertanian RI. Nasionalisasi Puslit Koka berbeda dengan nasionalisasi perkebunannya. Teknis nasionalisasi Puslit Koka tidak dilakukan oleh tentara sementara nasionalisasi perkebunan diselenggarakan sepenuhnya oleh tentara. Sebabnya adalah tentara tidak berkompetensi di Puslit koka. Pada Puslit Koka, tentara hanya sebagai pihak keamanan, mengamankan aset yang ditinggal Belanda. Tentara lebih banyak masuk di perkebunan-perkebunan seperti di perkebunan (*onderneming*) Wonojati

³⁸ Dikutip dari Makalah berjudul: *Kumpulan Surat-surat Mengenai Pengambilalihan Perkebunan (Jakarta: AP3I, 1995)*, hlm. 58-60.

dan Kalisanen Kecamatan Tempurejo. Ketika tentara masuk, seluruh kepengurusan atau Direksi perkebunan diambil-alih tentara. Jabatan ADM (*Administrateur*), Mandor dan Sinder Perkebunan dipegang tentara.

3.2.1 Nasionalisasi Perkebunan di Karesidenan Besuki

Telah disinggung di atas bahwa Nasionalisasi terhadap *onderneming-onderneming* di Karesidenan Besuki berkaitan erat dengan nasionalisasi Puslit Koka yaitu sebagai berikut:

5. Selama tahun 1956 *onderneming-onderneming* di seluruh Indonesia mengalami penurunan saldo perusahaan perkebunan (*sterkedaling van het exploitatiesaldo in Indonesie*)³⁹ dimana hal ini menyebabkan timbulnya krisis anggaran pada *onderneming* atau perkebunan selama tahun 1957-1958. Hal tersebut menghambat aktivitas penelitian pertanian/perkebunan di Puslit Koka
6. Biaya penelitian ketika perkebunan di nasionalisasi beralih kepada ALS Pusat Jakarta yang merupakan gabungan seluruh perkebunan di Indonesia
7. Selama tahun 1957 terjalin hubungan yang tidak sehat antara perkebunan-perkebunan di karesidenan Besuki dengan ALS sehingga Puslit Koka menjadi terlantar sementara kontrol ALS terhadap Puslit Koka sangat bergantung kepada *onderneming-onderneming* tersebut⁴⁰

Untuk menindaklanjuti surat keputusan Menteri Pertahanan RI No. 1063/PMT/1957 tanggal 9 Desember 1957, Menteri Pertanian mengeluarkan dua lembar surat edaran. Keduanya dikeluarkan masing-masing pada tanggal 10 Desember 1957 No. 229/Um/1957 dan tanggal 11 Desember 1957 No. 247/ Um/ 1957⁴¹. Dalam surat edaran pertama dijelaskan bahwa penguasaan perkebunan-

³⁹ *De Bergcultures*, 26e Jrg. No. 19 – Jakarta, 1 Oktober 1957, hlm. 477.

⁴⁰ Penyebab ketiga hal tersebut adalah selama berlangsungnya nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan, terdapat beberapa lahan perkebunan di Karesidenan Besuki yang berhasil dijual kepada orang Cina oleh *administrateur-administrateur-nya* tanpa sepengetahuan Direksi, sebagian lagi terdapat lahan yang jatuh ke tangan Sarbupri dan perilaku korupsi oleh pegawai perkebunan.

⁴¹ *Menara Perkebunan* th. Ke-27 No. 1 – Djakarta, Djanuari 1958, hlm. 17.

perkebunan serta direksi-direksinya ditempatkan di bawah satu badan yang bernama Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN Baru). PPN Baru pengertiannya adalah agar setelah nasionalisasi, kepemimpinan PPN Baru beralih ke tangan ABRI (termasuk Dwi-fungsinya, kolonel, Kapten dan pensiunannya) dan generasi muda seperti para lulusan sipil bidang pertanian yang baru⁴². Penyerahan komando atas PPN Baru ke tangan Militer didasarkan atas perintah Menteri Pertahanan atau Penguasa Militer Republik Indonesia A.H. Nasution. Jabatan Direktur dapat dipegang tentara berpangkat Kolonel dan Wakil Direktur oleh seorang perwira⁴³. Semuanya bertugas sebagai pengawas dan pengelola perkebunan.

Di Jawa Timur PPN Baru bernama Pusat Perkebunan Negara Baru Jatim IX. PPN Baru Jawa Timur IX membawahi seluruh perusahaan tembakau di Karesidenan Besuki. Di Karesidenan Besuki terdapat 4 Perusahaan tembakau besar yang memiliki banyak lahan garapan. Keempat perusahaan tersebut di nasionalisasi yaitu:

1. *Nederlandsche Vereeniging (N.V.) LMOD* yang membawahi 6 lahan garapan yaitu:

1. Perusahaan Perkebunan Tembakau Ajong
2. Perusahaan Perkebunan Tembakau Gambirone
3. Perusahaan Perkebunan Tembakau Kertosari Oost Djember
4. Perusahaan Perkebunan Tembakau West Djember
5. Perusahaan Perkebunan Tembakau Nangkaan di Bondowoso
6. Perusahaan Perkebunan Tembakau *Oost Djember*⁴⁴

2. *N.V. Besoeki Tabakmaatschappij* yang membawahi:

1. Perusahaan Perkebunan Tembakau "*Modjo*" di Jember

⁴² Wawancara dengan Bapak Zulkarnaen, *Loc. Cit.*

⁴³ Dwi Arlini, "Sengketa Tanah Bekas Erfpacht NV. Landbouw Maatschappij Oud Djember di Sukorejo Jember Tahun 1964-1989", (*Skripsi* S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Jember, 2000), hlm. 59.

⁴⁴ Dikutip dari Makalah berjudul: *Kumpulan Surat-surat Mengenai Pengambilalihan Perkebunan*, *Loc. Cit.*

2. Perusahaan Perkebunan Tembakau “*Soember Djeroek*” di Bondowoso
3. Perusahaan Perkebunan Tembakau “*Tamansari*” di Bondowoso
3. *N.V. Cultuurmaatschappij Djelboek* membawahi:
 1. Perusahaan Perkebunan Tembakau “*Djelboek*” di Jember
 2. Perusahaan Perkebunan Tembakau “*Soekokerto/Adjong*” di Jember
4. *N.V. Landbouwmaatschappij Soekowono* (LMS) membawahi:
 1. Perusahaan Perkebunan Tembakau “*Soekowono*” di Sukowono Jember.

Jadi terdapat 12 Perusahaan Perkebunan Tembakau di Karesidenan Besuki yang secara *de facto* di nasionalisasi pada tanggal 10 Desember 1957 oleh Kolonel R. Kartidjo selaku penguasa daerah Jember atas nama pemerintah pusat⁴⁵. Status lahan perusahaan-perusahaan tersebut secara *de facto* adalah milik Negara Republik Indonesia sejak tahun 1953 melalui PP No. 8 Tahun 1953⁴⁶.

Surat edaran pertama di atas berisi ketetapan peraturan pelaksanaan penguasaan perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda seperti yang tersebut dalam keputusan Menteri pertahanan. Tujuannya adalah demi efisiensi dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengedepankan segi pragmatisme dalam urusan manajemennya dan agar pemerintah pusat lebih mudah serta tidak kerepotan dalam menentukan kebijakan bidang pertanian/perkebunannya,
2. Pengaturan bidang keadministrasian, sehingga tidak banyak pembukuan,
3. Pengurangan jumlah pegawai, sehingga kinerja kepegawaian, administrasi dan pengupahan akan lebih efektif,
4. Penggolongan komoditi tanaman,
5. Penggolongan daerah, wilayah dan lahan perkebunan sehingga tidak terlalu banyak kebun dan letaknya tidak berjauhan⁴⁷.

⁴⁵ Tri Chandra Aprianto, *op.cit.*, hlm. 155.

⁴⁶ Arief S, *UUPA dan Beberapa Masalah Hukum Agraria di Seluruh Indonesia* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.th), hlm. 295. Dalam, Dwi Arlini., *op.cit.*, hlm. 36.

⁴⁷ Wawancara dengan Pak Zulkarnaen, *Loc.Cit.*

Efisiensi tersebut juga bermanfaat untuk menghindari terjadinya tarik-menarik *Devisa* hasil perkebunan oleh para Bupati di Karesidenan Besuki. Sebagai contoh, Direksi perkebunan se-Karesidenan Besuki terdapat di Jember, bukan di Bondowoso atau Situbondo. maka devisa hasil perkebunan di daerah Bondowoso akan masuk ke Bupati Jember, sementara Bupati Bondowoso sendiri tidak mendapatkannya. Ini adalah sumber tarik-menarik tersebut. Pemerintah, berdasarkan ketentuan dalam nasionalisasi, memindahkan Kantor Direksi Perkebunan se-Karesidenan Besuki ke Surabaya setara dengan Direksi perkebunan lain di Jawa Timur.

Teknis pelaksanaan efisiensi tersebut mula-mula seluruh perkebunan di Jawa Timur melakukan Registrasi ke Kantor Pengadilan Negeri di masing-masing Kabupaten untuk memperoleh ijin tetap berproduksi. Selanjutnya menunggu turunnya kebijakan dari gubernur Jawa Timur.

Terdapat beberapa perkebunan yang tidak diberlakukan nasionalisasi yaitu

1. Kalibaru
2. Trebla Sala
3. Bande Alit
4. kebun Keputren
5. ADM Perkebunan Sukamade Baru di Banyuwangi

Onderneming-onderneming Kali Baru, Trebla Sala dan Kebun Keputren tidak dinasionalisasi karena perkebunan-perkebunan tersebut milik Inggris⁴⁸. Sementara perkebunan Sukamade Baru dan Bande Alit (seluas 3000 Ha diantaranya) adalah milik Boek Liem (pengusaha kaya dari China)⁴⁹ dan perkebunan milik LMOD di Desa Ketajek Kecamatan Panti, seluas 477, 87 Ha telah menjadi milik Tan Tjiang Bek⁵⁰.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ignatius Hartana, *op.cit.*, pada tanggal 13 Agustus 2006. Para partikelir Inggris dan China ketika itu baru memperoleh hak milik yang sah atas perkebunan pada tanggal 1-10 Desember 1957.

⁴⁹ Wawancara dengan Pak Zulkarnaen, *Loc.Cit.*

⁵⁰ Tim Forum Solidaritas Petani Kasus Tapal Kuda, *Pengenalan Kasus Rakyat, Sebuah Pendekatan Pelaksanaan Landreform di Jawa Timur*, (t.th.). Dalam, Tri Chandra Aprianto, *op.cit.*, hlm. 164.

Nasionalisasi hanya berlaku bagi perkebunan-perkebunan yang termasuk di dalamnya ialah badan-badan penelitian Perkebunan milik Belanda. Perkebunan Kali Baru, Trebla Sala, Keputren, Sukamade Baru dan Bande Alit pada awalnya milik Belanda. Namun, dalam beberapa hari saja sebelum tanggal 10 Desember 1957, kelima *onderneming* Belanda tersebut telah dijual kepada orang China dan Inggris oleh pemiliknya tanpa sepengetahuan pemerintah. Belanda melakukan itu karena hendak pulang. Teknis penjualannya yaitu Belanda menggunakan Materai lama berangka tahun 1918 atau 1922 yang dibubuhi tanda tangan Boek Liem sehingga oleh pemerintah RI dianggap sebagai perkebunan milik orang China yang merupakan warisan orang-orang China secara turun-temurun sejak tahun 1918 atau tahun 1922⁵¹.

Perkebunan-perkebunan itu dijual pada orang China dan bukan orang Indonesia, dengan tujuan agar setelah situasi aman, Belanda dapat kembali ke Jember sedangkan kebunnya berada di tangan orang non Indonesia. Belanda akan mudah melakukan nego untuk berbagi hasil dari produksi yang dihasilkan selama ditinggal. Belanda lebih menyukai melakukan hal itu karena orang China sifatnya kompromistis dan tidak kasar. Tindakan ini tidak diketahui Mr. R. Sadjarwo selaku Menteri Pertanian Kabinet Karya pimpinan Ir. Djuanda. Menteri R. Sadjarwo justru berkeinginan untuk memelihara hubungan baik dengan semua negara yang tidak dalam sengketa dengan Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tidak mengadakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik orang asing bukan Belanda⁵². Untuk memelihara hubungan baik ini, Mr. R. Sadjarwo membuka peluang umum kepada perusahaan koperasi dan swasta nasional untuk mengadakan *joint enterprise* (usaha bersama) dengan pengusaha-pengusaha asing China dan Inggris. Dalam kenyataannya hal tersebut tidak pernah terjadi karena para ADM perkebunan China dan Inggris di Jember tidak mau seandainya kelak

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Zulkarnaen, *Loc. Cit.*

⁵² *Menara Perkebunan*, tahun ke-29 No. 7 – Djuli 1960, hlm. 13. Perkebunan Bandi Alit Jember hingga kini milik PT. LDO (Ledo Ombo) yang merupakan warisan turun-temurun untuk menduduki 1 keluarga besar orang-orang Tionghoa di Jember.

Income yang diperoleh ternyata terbelah tiga antara pemilik, koperasi milik pribumi dan Belanda yang kelak akan datang kembali ke Indonesia. Para pengusaha Belanda sehubungan dengan hal-hal di atas, ternyata mereka jeli dan cerdas men-siasati situasi dan keadaan.

Tindakan yang lebih nyata tentang nasionalisasi atau penguasaan perusahaan perkebunan/ pertanian milik Belanda, dilakukan pada tanggal 23 Februari 1959 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959 serta tanggal 2 Mei 1959 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1959 yaitu penguasaan terhadap 38 Perusahaan Perkebunan Tembakau dan 205 perusahaan Perkebunan Karet, Kopi, Kopro, Kakao dan gula termasuk parik-pabriknya di seluruh Indonesia⁵³.

Nasionalisasi perkebunan tersebut adalah suatu upaya untuk memperoleh manfaat total bagi rakyat dan bangsa Indonesia yang bersumber dari hasil-hasil perkebunan. Melalui undang-undang ini dan karena perusahaan bersangkutan telah *expirasi* atau lewat tempo *erfpacht*-nya⁵⁴, masyarakat dan bangsa Indonesia akan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari keberadaan perkebunan-perkebunan di negara kita. Undang-Undang Perkebunan tersebut harus dapat merekayasa seluruh tatanan pembangunan perkebunan dalam hal-hal yang sangat mendasar yaitu menumbuhkan sikap mental secara total dari individu-individu dan masyarakat bangsa Indonesia agar dengan gigih dan bersama-sama memperjuangkan tingkat kemajuan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.

3.2.2 Proses Nasionalisasi Puslit Koka

Nasionalisasi terhadap perkebunan menyisakan satu permasalahan yaitu anggaran. Ketika Nasionalisasi mulai diberlakukan, segenap pimpinan *onderneming-onderneming* besar di seluruh Indonesia seperti ADM, Sinder, Mandor dan staf Belanda, membawa pulang simpanan uang di Bank ke Belanda

⁵³ Dikutip dari Makalah berjudul: *Kumpulan Surat-surat Mengenai Pengambilalihan Perkebunan* (Jakarta: AP3I, 1995), *op.cit.*, hlm. 58-60.

⁵⁴ Nasionalisasi berlaku bagi semua perusahaan milik asing dengan pertimbangan *expirasi* dan berdasarkan UU no. 28, 29/ 1956. Dalam, *Menara Perkebunan*, *op.cit.*, hlm. 175.

sebesar 3⁵⁵ hingga 3,5 Milyar⁵⁶ dari hasil ekspor selama tahun 1956-1957. Secara teknis, uang tersebut dialihkan kepada anak perusahaan yang sulit terlacak oleh pemeriksaan pemerintah RI, seperti perusahaan pelayaran guna menyebut salah satu contohnya⁵⁷. Pemasukan anggaran bagi perkebunan menjadi kecil. Fenomena anggaran yang sedikit ini menjadi suatu masalah penting, yang apabila tidak teratasi akan menyebabkan timbulnya permasalahan baru dalam ke-direksi-an baru pasca hengkangnya Belanda. Dalam kenyataannya, masalah anggaran ini tidak pernah teratasi. Akhirnya timbul permasalahan baru yaitu:

1. Manajemen kebun yang kacau

Setelah diadakan pengambilalihan dari asing, pekerja atau karyawan atau buruh perkebunan pada umumnya lebih banyak menuntut hak dari pada kewajibannya sebagai pekerja. Para buruh kerap kali melakukan penuntutan hak atas tanah perkebunan, sehingga seolah-olah tanah perkebunan adalah milik nenek moyang atau kyai mereka yang diwariskan kepada mereka. Banyak diantara para buruh perkebunan Ajung, Mangli, Keraton, Curah Lele dan Kali Kempit Banyuwangi⁵⁸ untuk menyebut beberapa contohnya, mengaktifkan kembali gaya laten komunis, yakni teror berupa pembabatan, perampasan dan pendudukan lahan-lahan perkebunan kakao, kopi dan karet. Dengan teror ini, menyebabkan munculnya tanah-tanah *Okupasi*, yakni tanah yang dituntut untuk dapat dimiliki rakyat⁵⁹. Akibatnya, para buruh banyak yang memperlakukan tanaman perkebunan secara kurang sempurna dan tidak adil. Terdapat

⁵⁵ *Menara Perkebunan*, Tahun ke-28 No. 3 – Maret 1959, hlm. 61.

⁵⁶ *Menara Perkebunan*, Tahun ke-29 No. 7 – Djuli 1960, *op.cit.*, hlm. 13.

⁵⁷ Tri Chandra Aprianto, *op.cit.*, hlm. 164.

⁵⁸ Perkebunan Kali Kempit Banyuwangi ketika massa Sarbupri bergerak, tanaman kakao yang ada, dicabut dan diganti dengan tanaman tembakau dan palawija.

⁵⁹ Tanah Okupasi segera di babat dan diduduki rakyat. Di dalam tanah tersebut, didirikan balai desa, rumah penduduk, Masjid dan pasar sehingga telah berubah menjadi sebuah desa. Untuk menyebut salah satu contohnya adalah Desa Keraton Kecamatan Tempurejo dan Desa Curah Lele Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Wawancara dengan Bapak Zulkarnaen, *op.cit.*, pada tanggal 3 Januari 2008.

beberapa diantara mereka yang menanam tebu, tembakau dan jagung di sela-sela pohon karet. Pupuk yang seharusnya diperuntukkan bagi pohon karet, justru diserap tebu, tembakau dan jagung. Selain sebab-sebab di atas, terdapat penyebab lain, yakni ketidakcocokan antara keadaan-keadaan yang tengah berlaku dengan peraturan perkebunan yang ada. Persoalan pengaturan penanaman, investasi tembakau semisal, penelitian, rehabilitasi tanaman tua dan peraturan tentang kedisiplinan perburuhan seperti jam masuk kerja, cuti, tentang hari raya, semua telah banyak dilanggar oleh buruh dan pihak perkebunan sendiri. Padahal peraturan tersebut merupakan peraturan dasar atau standar yang harus ditaati oleh semua perkebunan di Indonesia dan berkaitan erat dengan kacau-tidaknyamanajemen suatu perkebunan. Kekacauan manajemen disebabkan pula oleh munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai penguasa baru perkebunan, yang membingungkan orang-orang perkebunan. Pengelola utama perkebunan di seluruh Indonesia sebagai yang menggantikan Belanda dalam kenyataannya adalah militer. Militer kurang menguasai dan acuh tak acuh terhadap manajemen perkebunan. Salah satu kebijakan tersebut adalah penyederhanaan atau penggabungan atau merger terhadap beberapa perkebunan. Dengan terjadinya penjarahan dan pendudukan lahan-lahan perkebunan oleh massa rakyat sejak kebijakan nasionalisasi bergulir, produksi perkebunan tidak berjalan. Perkebunan-perkebunan banyak mengalami kerugian produksi sehingga tidak mampu menyumbangkan bagi devisa negara dan kepercayaan pasar dunia terhadap kopi Indonesia sebagai menyebut salah satu contohnya, semakin menurun. Oleh sebab itu pemerintah mengambil kebijakan merger di maksud. Salah satu contoh kebijakan tersebut adalah menggabungkan 3 Direksi BTM (*Besoekisch Tabaksmaatschappij*) ke dalam PPN Baru Jawa Timur IX. Ketiga Direktur BTM diberhentikan secara mendadak. Uang perusahaan yang tersisa tiba-tiba raib entah kemana. Bidang administrasi, surat-menyurat, saldo, peraturan mengenai biaya rutin untuk penelitian

perkebunan di CPV Jember, pengeluaran dan penerimaan laba pada ketiga Direksi menjadi kacau.

2. Menurunnya disiplin kerja

Oleh karena para buruh lebih sibuk untuk mengurus tuntutan-tuntutan seperti yang tersebut di atas, mereka kemudian mengabaikan kedisiplinan dalam bekerja. Para buruh banyak yang mengurangi jam kerjanya. Waktu bekerja yang seharusnya 6-7 jam setiap hari, dikurangi menjadi hanya 5 jam.

3. Kondisi perkebunan yang morat-marit. Sebagai contoh Kondisi yang paling memprihatinkan adalah perkebunan karet milik *LMOD*. Sejak pengambilalihan perusahaan tersebut, karet hasil panen dikumpulkan dalam jangka waktu lama di gudang berdasarkan arahan pemerintah Indonesia. Karet tidak segera dijual, diolah atau diekspor seperti yang telah biasa dilakukan oleh Belanda sebelum nasionalisasi. Pengumpulan karet ini menjadi awal hancurnya *LMOD* sehingga *LMOD* harus di merger (digabungkan). Padahal warisan *LMOD* ini sangat banyak meliputi lahan-lahan di wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, lahan-lahan di Madiun, Malang dan Kediri dan di Seluruh Karesidenan Besuki⁶⁰. Juga terdapat kebun bernama perkebunan Djati Runggo I dan Kedung Pane⁶¹ milik *LMOD* di Semarang yang pada waktu nasionalisasi diambil Sarbupri cabang Semarang⁶².

4. Korupsi

Masalah korupsi dapat sering terjadi terhadap pejabat perkebunan (Direktur, Sinder, Mandor, Mandor Kepala dan Mandor Lapangan), petugas di lapangan atau kebun dan petugas pemerintah. Anggaran dari

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Lahan di Perkebunan Kedung Pane terdapat 50 hektar diantaranya merupakan *Proeftuin* yang sepenuhnya dikelola CPV Jember. Lahan tersebut pada tahun 1957-1958 dijadikan lahan tempat percobaan penanaman pengujian primer bibit cokelat unggulan hasil penelitian CPV Jember. Oleh karena telah dikuasai Sarbupri, penanaman tersebut dibatalkan. Dalam, BPP C.P.V. L.A.M.O.J, *Rentjana Programma Kerja 1959; kopi*, 1959, hlm. 1-2.

⁶² Wawancara dengan Pak Zulkarnaen, *Loc.Cit.*

pemerintah pusat atau Direksi LMOD Jawa Timur semisal, akan dipermainkan mereka. Untuk menyebut salah satu contohnya, ternyata diketahui bahwa jumlah anggaran tersebut tidak sesuai dengan rencana dan anjuran pihak perkebunan, maka hal ini dapat menimbulkan terjadinya penyelewengan anggaran. Anggaran tersebut yang semestinya digunakan untuk perbaikan tanaman, oleh pejabat perkebunan dialihkan untuk merawat gedung kongsi⁶³. Seperti pada BTM Bondowoso pasca merger, anggaran yang semula berasal dari Direktur utama BTM yang diperuntukkan sebagai gaji rutin bagi ketiga direktur di bawahnya, oleh karena ketiganya telah diberhentikan, anggaran tersebut dapat diambil oleh Direktur utama, bagian pengurusan keuangan pada ketiga direksi yang telah dibubarkan, militer, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

5. Munculnya suara nyaring para buruh perkebunan (*arbeiders*) yang dipengaruhi oleh Sarbupri (*Communistische Vakbondleiders Indonesie*)⁶⁴

Munculnya kelima permasalahan tersebut secara garis besar disebabkan oleh semangat menguasai seluruh aset Belanda kemudian segera mengganti pimpinan atau Direktornya ketika kebijakan nasionalisasi bergulir. Mengenai anggaran dan dampak yang ditimbulkan, tidak pernah terpikirkan⁶⁵. Yang terpikirkan adalah bagaimana perkebunan tersebut tetap berjalan. Pihak Militer yang terdapat di *onderneming-onderneming* tidak mampu berbuat banyak. Selanjutnya penguasaan atas *onderneming-onderneming* beralih ke tangan Pemerintah.

Selama tahun 1957 persediaan uang negara menipis sehingga Pemerintah hanya mampu memberi subsidi secara cuma-cuma. Itu pun hanya untuk mendanai kepentingan-kepentingan produksi, tidak untuk gaji pegawai dan lain-lain. Kondisi yang demikian berimbas pada Puslit Koka sehingga muncul gagasan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *De Bergcultures*; 26 e Jrg. No. 19 – Jakarta, 1 Oktober 1957, *Loc.Cit.* Juga hasil Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono, *Loc.Cit.*

⁶⁵ *Ibid.*

untuk membubarkan Puslit Koka. Puslit Koka ketika itu merupakan induk dari Balai Besar Penyelidikan Pertanian Tjabang Malang (ex. CPV Malang), sebab kegiatan Penyelidikan Pertanian CPV untuk Bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur dilakukan sepenuhnya di Puslit Koka Jember. Sehubungan dengan ide pembubaran seperti yang telah disinggung di atas, keadaan memprihatinkan terjadi di Balai Besar Penyelidikan Pertanian Tjabang Malang (BBPP Tjabang Malang) (ex. CPV Malang) pada jauh-jauh hari sebelum kebijakan nasionalisasi perkebunan bergulir. Pada September hingga Oktober 1957, terdengar pemberitaan bahwa CPV Malang hendak dihentikan hubungannya dari CPV Jember oleh para administraturnya sebelum jatuh ke tangan pemerintah Republik Indonesia. Adalah J.J. Revermann yang merupakan pegawai CPV Jember, dengan di bantu oleh pihak ex. pengurus CPV Malang, dia segera memindahkan bibit-bibit tanaman yang unggul, mencabut semua *Naamborden*⁶⁶ CPV Malang dan membawa peta-peta penerangan tentang kondisi perkebunan-perkebunan di Malang ke Jember⁶⁷.

Hampir semua pihak yang menggantikan kekuasaan Belanda atas perkebunan terutama kalangan pegawai perkebunan asli pribumi bersepakat untuk membubarkan CPV Jember. Ide tentang pembubaran CPV Jember muncul dilatar belakangi oleh:

1. Dana rutin tahunan sebagai penyokong penelitian di CPV Jember telah dibawa lari para *ondernemer* Belanda. Sejak saat itu keharmonisan hubungan antara *onderneming* dengan CPV Jember menjadi renggang
2. Orang-orang Indonesia yang menggantikannya kurang berpengalaman terutama dalam hal melanjutkan *estafet* program penelitian dan produksi Kebun Percobaan
3. Ekspor komoditi perkebunan tidak memberikan hasil yang menguntungkan

⁶⁶ *Naamborden* adalah papan nama yang memuat daftar nama-nama staf pegawai suatu lembaga.

⁶⁷ Surat dari BBPP Tjabang Malang kepada BPP CPV Bagian Pertanian Djawa Tengah dan Djawa Timur No. 9/L, tanggal 8-9 Djanuari 1959. Dalam Arsip CPV Jember No. 049.

4. Segenap pegawai perkebunan pribumi mempunyai latar belakang pendidikan bukan Sarjana yang hanya menguasai dan mempraktekkan penanaman tanaman perkebunan semisal, tanpa ada keinginan untuk mendalami dan menyelami akan penelitian perkebunan. Mereka merupakan para pekerja kasar di perkebunan
5. Para pegawai perkebunan tidak mengetahui manfaat dan nilai penting penelitian dalam rangka meningkatkan produksi dan kualitas komoditi perkebunan. Mereka meremehkan dan menyimpulkan bahwa keberadaan lembaga penelitian tidak ada pengaruhnya terhadap perkebunan

Diantara perkebunan di Jember yang pro-aktif mendanai dan mengelola Puslit Koka pada waktu itu adalah perusahaan-perusahaan perkebunan partikelir atau swasta diantaranya *LMOD* (sekarang PTPN X), PPN Karet XVI (sekarang PTPN XII), Antan (Aneka Tanaman) XII dan XIII, *Anemaat, onderneming Soember Tengah* di Sempolan milik V.Y.C. Gelderen, perkebunan milik *Tiedeman van Kerchem* dan perkebunan milik *Roseteller*⁶⁸. Atas ide tersebut, manajemen pengelolaan Kebun Percobaan di CPV Jember yang merupakan hal terpenting dalam bidang penelitian pertanian menjadi terganggu. Persoalan manajemen pengelolaan pada perusahaan apapun terutama yang bergerak dalam bidang ekonomi merupakan syarat utama eksistensi suatu perusahaan atau lembaga. Dalam bidang perkebunan besar ketika itu, justru tidak banyak pengusaha-pengusaha nasional perkebunan besar yang memiliki pengalaman memadai. Hal ini terjadi karena hampir seluruh perusahaan perkebunan besar di Indonesia sejak berdirinya pada abad XVIII, senantiasa berada dibawah pengelolaan penuh *ondernemer* Belanda dan China secara turun menurun. Bahkan dalam hal perdagangan pengumpulan hasil perkebunan rakyat (*Collecterende Handel*) yang dapat saja dilakukan oleh petani *Inlanders* (petani pribumi), semuanya dilakukan oleh tenaga-tenaga asing⁶⁹.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono, *Loc.Cit.*, dan Bapak Ignatius Hartana, *Loc.Cit.*

⁶⁹ *Menara Perkebunan*, tahun ke- 29 No. 7 – Djuli 1960, *Loc.Cit.*

Perihal pembubaran ini diketahui pula oleh Presiden Soekarno. Oleh karena kondisi keuangan, politik dan keamanan yang memerlukan banyak perhatian penuh pemerintah, Presiden Sukarno tidak mampu mengambil kebijakan tertentu terhadap CPV Jember. Presiden mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang telah direncanakan pengelola perkebunan yang baru dengan beberapa alasan yang telah tersebut di atas. Dengan pertimbangan kondisi keamanan yang kurang mendukung di daerah Jember, sementara kegiatan penelitian pertanian harus tetap berjalan untuk dapat mengurangi beban keuangan negara, Presiden untuk kali yang pertama membatalkan niatnya untuk membubarkan CPV Jember. Presiden selanjutnya memanggil Jenderal A.H. Nasution.

Presiden memberikan kekuasaan dan kewenangan penuh perihal pengurusan perkebunan beserta lembaga penyelidikan ilmiah pertanian kepada penguasa militer A.H. Nasution. Keputusan ini diambil Presiden setidak-tidaknya dilatar belakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut.

1. Dalam pengambil-alihan CPV dikhawatirkan terjadi sengketa tanah dengan rakyat yang dipersenjatai PKI seperti yang terjadi secara umum pada *onderneming-onderneming* di Karesidenan Besuki
2. Kondisi keamanan di daerah-daerah tengah labil
3. Keadaan keamanan nasional berada di bawah kendali SOB

Pada tanggal 9 Desember 1957 bergulir nasionalisasi terhadap perkebunan beserta lembaga penyelidikan ilmiah di lapangan pertanian/ perkebunan oleh penguasa Militer/ Menteri Pertahanan RI A.H. Nasution melalui Surat Keputusan (SK) Penguasa Militer/ Menteri Pertahanan No. 1063/PMT/1957. Dengan dikuasainya *onderneming-onderneming* oleh militer, segala kebijakan mengenai CPV Jember berada di tangan penguasa Militer A.H. Nasution. Untuk kali yang kedua, CPV Jember tidak berhasil dibubarkan oleh para pegawai pribumi pengganti Belanda Belanda dengan alasan lembaga telah jatuh ke tangan militer secara resmi.

Pada tanggal 13 Desember 1957 Surat Keputusan (SK) Menteri Pertahanan diterima CPV Jember. Sejak saat itu CPV Jember secara *de jure*

berada di bawah pengawasan militer yakni Legium eteran RI cabang Jember pimpinan Ltd/ Inf. Soewandi⁷⁰. Penguasa Militer A.H. Nasution mengirimkan SK Menhan No. 1063/PMT/1957 pada tanggal 9 Desember 1957 kepada CPV Bogor, CPV Jember dan terhadap lembaga-lembaga penelitian lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun telah diketahui sendiri oleh CPV Jember, CPV Bogor tetap mengabarkan secara resmi kepada CPV Jember tentang kehadiran militer di CPV Jember pada tanggal 13 Desember 1957. Hal ini karena CPV Bogor saat itu berkedudukan sebagai Balai Penelitian Pusat bagi:

1. BPPB Bagian Pertanian Jawa Barat dan Sumatera Selatan
2. BPPB bagian Botani Pusat
3. BPPB bagian Tehnik Kimia Pusat
4. BPPB Djember bagian Pertanian Jawa Tengah dan Jawa Timur⁷¹

Hingga tanggal 21 Desember 1957 Militer tidak dapat berbuat banyak di CPV Jember dan di CPV-CPV lain. Hal ini terjadi karena:

1. Militer tidak mengetahui dan memahami akan manfaat terbesar lembaga penelitian yang dikuasainya
2. Militer hanya mampu menyimpulkan bahwa CPV Jember tidak berpengaruh dan tidak memiliki kegunaan sedikitpun bagi perkebunan-perkebunan⁷²
3. Militer tidak dapat merasakan dan cenderung meremehkan keberhasilan-keberhasilan yang pernah diraih perkebunan-perkebunan atas jasa CPV Jember dahulu dan hingga akhir tahun 1957 masih dipraktekkan

⁷⁰ Surat dari Ir. J.T. Wassink (Direktur CPV Bogor) kepada *Hoofd* (Ketua) *L.A.M.O.J. Besoekisch Proefstation* Djember Ir. W.P. van der Knaap tentang pemulangan pegawai Belanda (*Afvoer Nederlands Personeel*) tanggal 13 Desember 1957.

⁷¹ Dewan Perancang Nasional Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 1875.

⁷² Suara-suara miring militer diungkapkan dalam bahasa jawa seperti perkataan “*Gawe Opo Rah, bubarno ae mari. Ngentekno duit tok*” atau “buat apa, sudah bubarkan saja! Menghabiskan uang saja!”. Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono pada tanggal 28 Januari 2008.

perkebunan-perkebunan seperti klon-klon unggulan kopi yang bernama BP 42, BP 409 dan BP 359 (*Besoekisch Proefstation 359*)⁷³.

Hal ini yang membuat surutnya semangat militer dalam memelihara CPV Jember dan CPV lainnya sehingga timbul ide untuk membubarkan CPV Jember. Ide ini berhasil mempengaruhi Presiden, PPN Baru, Militer dan segenap masyarakat Jember. Ketika itu tidak ada pihak yang berani tampil ke depan mempertahankan keberadaan CPV Jember. Ketika situasi sedang kritis karena bimbang apakah CPV Jember dibubarkan atau tidak, satu-satunya harapan utama untuk keberlangsungan dan eksistensi CPV Jember adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbangtan) milik Departemen Pertanian.

Badan Litbangtan Departemen Pertanian Kabinet Karya (9 April 1957-10 Juli 1959) dibawah menteri Pertanian Sadjarwo unjuk gigi. Departemen pertanian menyampaikan saran agar Presiden bersama penguasa militer tidak membubarkan CPV Jember dan lembaga-lembaga penelitian pertanian/ perkebunan lainnya⁷⁴. Pemerintah dan penguasa militer menyetujui saran tersebut. Dengan demikian untuk kali yang ketiga, militer, presiden, PPN Baru dan masyarakat Jember tidak berhasil membubarkan CPV Jember dikarenakan munculnya saran atau anjuran Departemen Pertanian RI tersebut. Selanjutnya Departemen Pertanian RI mengambil alih penguasaan atas lembaga-lembaga penelitian pertanian/ perkebunan di seluruh Indonesia termasuk CPV Jember dengan mengeluarkan surat edaran kedua No. 247/Um/1957 pada tanggal 11 Desember 1957. Surat edaran ini baru diterima CPV Jember ialah pada tanggal 21 Desember 1957. Departemen Pertanian baru unjuk gigi pada 2 hari kemudian yakni pada tanggal 11 Desember 1957 oleh karena pada masa demokrasi dan ekonomi yang serba terpimpin tahun 1957-1965 ketika itu, fungsi Parlemen hampir ditiadakan, termasuk Departemen Pertanian yang berada di bawah pemerintahan Parlementer Kabinet Karya pimpinan Ir. Djuanda⁷⁵.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono , *op.cit.*, tanggal 3 Januari 2008.

⁷⁴ *Ibid.*, tanggal 11 Februari 2007.

⁷⁵ Ong Hok Ham, *Loc. Cit.* Dalam International Quality Publication, *op.cit.*, hlm. 46.

Pengalihan penguasaan atas CPV Jember dari tangan militer ke tangan Departemen Pertanian RI dilakukan karena:

1. Kelangsungan alat produksi dan penyelidikan pertanian/ perkebunan khususnya pertanian/ perkebunan adalah penting bagi Negara
2. Militer tidak berkompentensi atas kelangsungan alat produksi dan penyelidikan pertanian/ perkebunan di CPV-CPV di seluruh Indonesia karena militer bukan ahlinya untuk mengurus masalah tersebut
3. Militer tidak mengerti tentang bentuk pengelolaan CPV lembaga penelitian pertanian/ perkebunan dimaksud⁷⁶

Militer hanya mampu bertindak sebagai pihak yang mengawasi dan mengelola proses-proses produksi dan penyelidikan pertanian/ perkebunan di CPV Jember.

Di dalam surat edaran kedua tersebut dimuat pengumuman bahwa organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga penyelidikan dan lain-lain seperti ALS⁷⁷ (*Algemeen Landbouw Syndicaat*) atau gabungan pengusaha-pengusaha besar umum pertanian atau perkumpulan organisasi-organisasi perkebunan, AVROS (*Algemeen Vereeniging van Rubber Planters Oostkust van Sumatra*), ZWSS (*Zuid en West-Sumatera Syndicaat*), CPV, ASSI dan lain-lain berada di bawah suatu badan yang bernama Badan Koordinasi Perkumpulan dan Organisasi Perkebunan (BKPOP) yang berpusat di Jakarta. *Central Proefstation Vereeniging (CPV)* di Indonesia pada tahun 1957-1962 terdiri atas:

1. CPV Bogor
2. Pusat Penelitian Karet Rakyat di Palembang (partikelir Belanda)
3. RISPA Karet dan Kelapa Sawit Medan (partikelir Belanda)
4. Balai Penelitian Padi di Suka Mandi (pemerintah Hindia Belanda)
5. Pusat Penelitian Teh dan Kina Bandung

⁷⁶ *Menara Perkebunan*, th. Ke-27 No. 1 – Djakarta, Djanuari 1958, *op.cit.*, hlm. 21-23.

⁷⁷ ALS melakukan kegiatan-kegiatan seperti memberi ceramah kepada *proefstation-proefstation*, mengadakan forum-forum tanya jawab soal perkebunan seperti persoalan pembayaran upah buruh, persoalan keadaan yang terjadi di kebun dan lain-lain. Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono, *Loc.Cit.*

6. Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Bogor (partikelir Belanda)
7. Pusat Penelitian di Semarang
8. Pusat Penelitian tanaman Hortikultura Malang (pemerintah Hindia Belanda)
9. Balai Penelitian Gula di Pasuruan
10. CPV Jember
11. Balai Penelitian Tembakau dan tanaman serat⁷⁸ (Balitas) Malang
12. Balai Penelitian Kelapa Menado (pemerintah Hindia Belanda)⁷⁹.

CPV Bogor percaya bahwa dari penguasaan keadaan oleh pemerintah (Departemen Pertanian) melalui surat edaran tersebut, setidaknya terdapat 4 maksud yang dimiliki pemerintah yaitu agar:

1. Keuangan,
2. Perekonomian,
3. Alasan psikologi dan
4. Kelangsungan penelitian perkebunan besar di seluruh CPV

harus tetap berjalan⁸⁰. Aset milik perkebunan seperti pabrik, bangunan dan benda-benda yang tidak bergerak, keuangan, kegiatan ekonomi perkebunan dan keadaan psikologi para pegawainya yang kurang ada semangat kerja, harus tetap berjalan dan diupayakan kembali kepada keadaan yang lebih baik. Keadaan keuangan negara yang memburuk sebagai akibat dari Inflasi yang semakin tidak terkendali dan perginya modal asing perkebunan ke luar negeri, berakibat pada lepasnya kontrol manajemen keuangan oleh pihak intern perkebunan sendiri. Hal ini berakibat pada berhentinya kegiatan ekonomi perkebunan dan psikologi para pegawai menjadi terganggu. Pemerintah khawatir hal seperti ini akan terjadi apabila pemerintah tidak segera turun tangan. Hal-hal tersebut berlaku pula terhadap CPV Jember dan Kebun-kebun Percobaannya.

⁷⁸ Tanaman serat seperti benang, karung, Rosela, Acavel dan kapas.

⁷⁹ Dalam, Arsip berjudul: *1. Positie Salarisregeling Academici: 2. Immigratie Documenten, Nationaliteitspapieren, enz* (1951-1971).

⁸⁰ Dalam *Positie-en Salarisregelling Middelbaarpersoneel 1937-1977*.

Dalam bidang penelitian perkebunan besar, lembaga-lembaga penyelidikan ilmiah di lapangan pertanian merupakan aset penting bagi peningkatan kualitas hasil perkebunan nasional. Oleh karena aktivitas perusahaan perkebunan yang dikhawatirkan berhenti sehingga secara otomatis penelitian perkebunan akan berhenti pula, maka CPV Jember dan CPV-CPV lain sebaiknya dikuasai negara sehingga diharapkan nantinya akan terus berjalan. Begitu pula masalah psikologi para pegawai CPV Jember diupayakan normal kembali dan memiliki semangat baru untuk tetap bekerja di lembaga, mengingat para pegawai terdahulu telah banyak yang pergi atau pindah bekerja di tempat lain dan hal ini dikhawatirkan membudaya pada kalangan pegawai baru. Dengan demikian diharapkan SDM yang berkualitas pada CPV Jember dan begitu pula pada perusahaan perkebunan akan tetap terjaga.

Keempat maksud tersebut adalah keinginan utama pemerintah RI kepada CPV Jember mengingat CPV Jember dan CPV-CPV lainnya merupakan aset penting bagi perencanaan penelitian komoditi perkebunan besar (*groot-landbouw*) milik pemerintah. CPV Jember dipandang strategis untuk dikuasai pemerintah dan berada langsung di bawah tanggung jawab pemerintah. Hal ini setidaknya disebabkan oleh:

1. Penyelesaian permasalahan keuangan, penelitian, perekonomian dan psikologi yang ada di CPV Jember sepenuhnya hanya dapat diatasi oleh negara.
2. Para *ondernemer* dan staf pengurus Belanda di CPV Jember telah pulang ke Belanda
3. CPV Jember berada di bawah kekuasaan *onderneming-onderneming* sementara *onderneming-onderneming* tersebut telah diambil-alih pemerintah

Sejak tanggal 9 Desember 1957 secara *de facto* CPV Jember telah berada di bawah pengawasan militer melalui Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI No. 1063/PMT/1957. Secara *de jure* pengawasan tersebut baru terlaksana 5 hari kemudian yaitu mulai tanggal 13 Desember 1957 oleh tentara Legium Veteran RI cabang Jember pimpinan Ltd./ Inf. Soewandi. Pada tanggal 11 Desember 1957

secara *de facto* penguasaan CPV Jember beralih ke tangan Departemen Pertanian RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 247/Um/1957 sebagai pengganti SK Menteri Pertahanan RI No. 1063/PMT/1957. Secara *de jure* peralihan tersebut baru terlaksana pada 8 hari berikutnya yakni pada tanggal 21 Desember 1957 dengan menunjuk Ong An Pang sebagai Direktur CPV Jember.

Dalam menyambut perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, massa rakyat Jember ikut melibatkan diri dengan menggelar aksi ramai-ramai massa. Untuk mendukung dan mewujudkan kebijakan nasionalisasi dan Operasi Pembebasan Irian Barat, massa rakyat Jember Kota menggelar aksi ramai-ramai massa di alun-alun Kota Jember, di Jalan Gajah Mada dan di Jalan PB. Sudirman. Sebagian dari mereka ada yang menggelandang ke dalam kantor CPV Jember di Jalan PB. Sudirman pada awal tahun 1958. Beberapa perwakilan massa pemuda masuk ke dalam kantor CPV Jember. Segenap pegawai ketika itu tetap bekerja seperti biasa⁸¹. Hingga awal tahun 1958 W.P. Van der Knaap masih berada di kantor CPV Jember. Oleh karena keadaan kantor masih berada di bawah pengawasan Tentara Legium Veteran RI cabang Jember⁸², para pemuda perwakilan tersebut tidak dapat berbuat banyak ketika bertemu dengan Van der Knaap. Mereka masih dapat menjunjung tinggi nilai-nilai ketertiban dan kesopanan dalam menggelar aksinya tersebut. Akhirnya Para pemuda hanya meminta kunci gedung *Societeit* kepada Van der Knaap. Setelah mendapat ijin dari militer, Van der Knaap sebagai pengurus dan pemegang kunci *Societeit* kemudian memberikan kunci tersebut⁸³. Gedung *Societeit* ketika itu berada di belakang kantor CPV Jember.

Aksi massa lainnya yakni dilakukan terhadap orang-orang Tionghoa yang sebagian besar bertempat tinggal di sekitar alun-alun kota Jember. Pertokoan,

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono pada tanggal 28 Januari 2008.

⁸² Legium Veteran RI adalah cadangan tentara nasional yang sewaktu-waktu diterjunkan apabila dibutuhkan negara. Legium Veteran RI cabang Jember merupakan kesatuan tentara dibawah TNI dan menjadi milik Kodim (Komando Distrik Militer) Jember. Wawancara dengan Bapak Usman pada tanggal 30 Desember 2007 di kediamannya Jl. Karimata perumahan Semeru.

⁸³ Sub Balai Penyelidikan Budibaya Djember, *Loc. Cit.*

gedung sekolah, Kelenteng (tempat ibadah orang Tionghoa) dan Gedung STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) yang terletak di depan pasar Johar sebagai milik orang-orang Tionghoa, direbut kembali oleh massa. Aksi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya berbagai aksi anarkis massa anti Tionghoa di daerah lain di Jawa dan Sumatera Utara pada masa Revolusi tahun 1950-1959. Segenap rakyat Jember Kota menamakan aksi tersebut dengan sebutan Granat (Gerakan Anti Tionghoa) pada tahun 1957-1962. Aksi Granat atas Irian Barat dengan Granat atas orang Tionghoa konteks, waktu dan tempatnya sama, namun sasarannya berbeda⁸⁴. Granat atas Irian Barat di Jember Kota dilakukan oleh massa yang lain dan ditujukan kepada perkebunan-perkebunan dan kantor CPV Jember milik Belanda. Adapun Granat atas orang Tionghoa, dilakukan massa dalam jumlah yang lebih besar lagi, yang ditujukan kepada pertokoan, sekolah-sekolah, kelenteng dan gedung STAIN milik orang Tionghoa di sekitar alun-alun. Keduanya dilakukan dalam kurun waktu tahun 1958-1962. Aksi Granat atas Irian Barat dilakukan secara tertib dan teratur, tidak ada tindakan-tindakan anarkis, penjarahan dan sebagainya. Lain halnya dengan aksi Granat atas Tionghoa yang dilakukan dengan tidak tertib, disertai pencurian, penjarahan dan lain-lain⁸⁵.

Mula-mula para pemuda Jember kota di alun-alun, mengunci semua kios pertokoan milik orang-orang Tionghoa dengan kunci gembok pada malam harinya sambil mencuri beberapa pot bunga yang bagus-bagus. Keesokan harinya pertokoan sulit di buka karena telah terkunci dari luar. Pertokoan milik pribumi ketika itu hanya ada 3 buah, terdapat di alun-alun Jember, yang salah satunya adalah toko emas milik Bapak Zulkarnaen. Pertokoan milik orang-orang Tionghoa jumlahnya 10 hingga 100 buah⁸⁶.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Zulkarnaen pada tanggal 29 Januari 2008.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Zulkarnaen, *Loc. Cit.*

Menjelang siang hari, orang-orang Tionghoa merasa kepanasan dan mereka berteriak-teriak minta tolong⁸⁷. Para pemuda Granat membuka kunci gembok dan langsung melemparkan air cabai mengenai wajah orang-orang Tionghoa. Aksi ini disebut aksi tembak di tempat oleh karena para pemuda Tionghoa lebih menguasai ilmu Bela Diri Kung-fu, sementara para pemuda Jember akan selalu kalah apabila melawan mereka. Apalagi ketika itu di setiap kios atau toko telah dipersiapkan orang-orang mega kuning dari Surabaya, yaitu para pemuda Tionghoa yang mahir bermain Kung-fu.

Setelah menyerah karena tidak kuat menahan rasa perih di wajah, antara 10 hingga 20 orang Granat masuk ke dalam kios. Mereka menangkap dan kemudian menyerahkan orang-orang mega kuning ke Kantor Kodim Jember. Para pemuda yang masuk ke dalam kios, terdapat beberapa diantaranya yang memecahkan meja kaca dan mengambil perhiasan emas di dalamnya, sementara sebagian yang lain hanya menangkap orang-orang mega kuning. Menjelang malam, para pemuda Granat berkumpul di Kantor Kodim. Salah satu diantara mereka ada yang membawa makanan dan minuman ber-merk sebagai hasil penjualan perhiasan emas yang telah dicuri dari kios orang Tionghoa. Makanan dan minuman tersebut segera ditukar dengan perhiasan emas semula dan pelakunya kemudian dijauhkan dari pergaulan dengan teman-teman lain.

Para prajurit Legium Veteran RI cabang Jember atau prajurit Kodim ketika itu sebagian besar diterjunkan ke perkebunan-perkebunan dan perkantoran-perkantoran Belanda yang telah ditinggal penghuninya. Penanganan orang-orang Tionghoa, sebagian besar diserahkan kepada massa rakyat. Pemerintah Daerah dan militer tidak mampu bertindak tegas orang-orang Tionghoa sebab diantara ketiganya telah terjalin hubungan balas budi dan jasa yang erat sejak abad XIX seperti yang telah disinggung di atas.

Aksi Granat atas orang-orang Tionghoa oleh massa dilakukan secara sporadis, muncul, kemudian dengan cepat tenggelam. Hal ini karena militer dan

⁸⁷ Kios-kios orang Tionghoa ketika itu hanya dipisahkan oleh satu lapis tembok dinding, tidak memiliki jendela dan hanya ada ventilasi udara. Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnaen, *Loc.Cit.*

pemerintah daerah segera menggelar aksi penertiban dan pengamanan situasi. Aksi Granat hanya berlangsung dalam satu hingga tiga hari secara berturut-turut, tanpa adanya waktu berhenti. Di Pulau Jawa, aksi ini dilakukan secara beruntun, terjadi di satu kota, kemudian pindah ke kota lain keesokan harinya. Aksi Granat atas Tionghoa di Jember Kota merupakan luapan rasa dendam dan benci yang terus terpendam sejak abad XIX.

3.2.3 Diangkatnya Ir. Ong An Pang

Pada periode tahun 1956-1957, CPV Jember dipimpin oleh Ir. W.P. Van der Knaap. CPV Jember menerima surat edaran kedua dari Menteri Pertanian pada tanggal 21 Desember 1957. Pada tanggal tersebut, pimpinan/ Direktur CPV Jember langsung berpindah ke tangan Ong An Pang dan nama CPV Jember diubah menjadi Lembaga Penyelidikan Ilmiah Pertanian Djember⁸⁸.

Ong An Pang berkewarganegaraan Cina. Ia adalah seorang ahli Kopi lulusan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor (sekarang IPB) dan menjadi pegawai CPV Jember sejak awal tahun 1957⁸⁹. Ong An Pang memimpin Lembaga Penyelidikan Ilmiah Pertanian Djember pada periode tahun 1958-1960. Ong An Pang bertanggung jawab terhadap pimpinan CPV Pusat Jakarta dan pimpinan CPV Jakarta bertanggung jawab kepada pimpinan Badan Koordinasi Perkumpulan dan Organisasi Perkebunan (BKPOP) yang telah dibentuk pemerintah RI. Beberapa kondisi yang mendukung pengangkatan Ong An Pang adalah sebagai berikut.

1. Kekurangan tenaga ahli di CPV Jember.
2. Memburuknya keuangan CPV Jember sebagai akibat perkebunan-perkebunan tidak lagi menyokong dana untuk lembaga.
3. Tidak ada jabatan orang asli Indonesia lainnya yang jabatannya tertinggi dalam lembaga.

⁸⁸ *Positie-en Salarisregelling Middelbaarpersoneel 1937-1977, Loc.Cit.*

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Ignatius Hartana pada tanggal 3 Januari 2008 di kediamannya Jl. PB. Sudirman Kecamatan Patrang Depan Stasiun KA Jember.

4. Ong An Pang adalah seorang Insinyur. Dalam tahun 1956-1957 CPV Jember tidak memiliki seorang pegawai yang bergelar Insinyur dari kalangan pegawai *krachten* (pegawai pribumi yang baru diangkat sebagai pegawai).
5. Ong An Pang ditunjuk oleh Menteri Pertanian Sadjarwo untuk memimpin CPV Jember berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 247/Um/1957 Tanggal 11 Desember 1957 yang berbunyi:

*Menteri Pertanian dapat menundjuk orang lain untuk memimpin Lembaga Penjelidikan itu, djika dianggapnja perlu*⁹⁰.
6. Ong An Pang memiliki karakter familier sehingga cukup dihargai oleh segenap pegawai⁹¹

Ong An Pang memiliki rasa ambiguitas, yaitu antara mau dan tidak dalam menduduki jabatan sebagai pimpinan CPV Jember. Ong An Pang khawatir akan gaji yang kelak diterimanya tidak layak karena kecil. Kendati demikian, Ong An Pang telah diberi kepercayaan penuh oleh Menteri Pertanian untuk mengelola CPV Jember berdasarkan SK Menteri Pertahanan No. 247/Um/1957 Pasal 3 Ayat 3 seperti yang tersebut di atas. Oleh sebab itu, Ong An Pang memaksimalkan segenap kemampuan yang ada dalam mengelola lembaga.

Pada masa nasionalisasi di bawah kepemimpinan Ong An Pang, keadaan kegiatan penelitian di CPV Jember vakum. Hal ini karena para peneliti Belanda pergi begitu saja ke luar negeri. CPV Jember meminta bantuan tenaga ahli kepada CPV Bogor pada tanggal 1 Januari 1958. Ternyata ahli-ahli pertanian bangsa Indonesia masih kosong baik yang ada di CPV Jember, CPV Bogor maupun ditempat lainnya. Hal ini terus berlanjut hingga tahun 1960 dimana CPV Jember masih belum mendapatkan 5 ahli pertanian (teh, karet, kopi dan 2 tembakau), 1 Botanist, 1 Geneticus dan 1 Ahli tehnik⁹². Penyebab utama hal ini adalah

⁹⁰ *Menara Perkebunan*, Tahun ke-27 No. 1 – Januari 1958, *op.cit.*, hlm. 23.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Totok Seoharsono pada tanggal 28 Januari 2008.

⁹² Dewan Perancang Nasional Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 1879. Dalam kurun waktu 1960-1965 perkembangan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh Manifesto Politik yang diumumkan Presiden Sukarno melalui Keputusan Presiden No. 1/1960 tanggal 29 Januari

selama tahun 1958-1960 terjadi kemunduran-kemunduran di dalam negeri, yaitu:

1. Banyak diantara para sarjana yang bergelar Insinyur lebih menyukai untuk bekerja di luar negeri.
2. Negara tengah berada dalam keadaan yang serba sulit
3. Keadaan keamanan dalam negeri masih jauh dari memuaskan
4. Jumlah para sarjana atau tenaga ahli pun sangat kurang baik asing maupun pribumi
5. Perusahaan perkebunan tengah dihadapkan dengan berbagai macam rintangan sehingga terputus komunikasinya dengan lembaga-lembaga penelitian⁹³

Kemunduran tersebut berdampak pada terjadinya kemerosotan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) bidang perkebunan sehingga lulusan-lulusan sekolah perkebunan dalam negeri tidak ada yang bergelar Insinyur. Para pemuda pribumi masih belum ada yang mampu sekolah di *Wageningen*, yaitu lembaga pendidikan buatan Belanda setingkat Perguruan Tinggi yang menghasilkan lulusan Sarjana Pertanian di Belanda.

Untuk pendidikan perkebunan didirikan sekolah-sekolah perkebunan rendah yang lulusannya paling tinggi bekerja sebagai *Asisten* Peneliti. Sekolah-sekolah itu adalah:

1. *Cultuurschool* atau SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas) di Sukabumi, Bogor dan Malang
2. *Lagere-Land* atau *Tuinbouw School*
3. *Ambachtsschool*
4. ULO

1960. Dalam, P.C. Suroso dkk, *op.cit.*, hlm. 93. Permintaan CPV Jember agar dikirimkan bantuan 5 orang ahli pertanian atau staf peneliti, baru terwujud pada tanggal 20 Februari 1969, sebelas tahun kemudian. Lihat, CPV Bogor, *General Information of the Research Institute for Estate Crop*, 1969, hlm. 4.

⁹³ *Menara Perkebunan*, Tahun ke- 28, No.1 – Djanuari 1959, hlm. 1.

5. SPPMA (Sekolah Perusahaan Perkebunan Menengah Atas) Patrang-Jember⁹⁴
6. SMP
7. SGB⁹⁵

Pihak *onderneming* maupun *Besoekisch Proefstation* dan *proefstation-proefstation* lain di Hindia Belanda apabila melihat satu orang pegawainya yang tidak profesional dalam bekerja, mereka membuang pegawai bersangkutan ke kearsipan, yang merupakan jabatan yang cukup rendah di CPV Jember⁹⁶. Sebagai contoh, dengan latar belakang Puslit Koka berada dibawah pengawasan perkebunan-perkebunan partikelir Belanda, lembaga tersebut tidak otonom sehingga segala kebijakan-kebijakan menyangkut pegawai pun diatur perkebunan. Bapak Totok Soeharsono seorang pegawai perkebunan Di Sumber Tengah Sempolan milik V.Y.C. van Gelderen pada tahun 1957 disarankan Gelderen untuk pindah ke Puslit Koka dengan alasan Bapak Totok usianya masih muda dan belum semestinya untuk bekerja di Perkebunan. Bapak Totok dijanjikan akan dinaikkan golongan gaji dan jabatannya setelah dia duduk di Kearsipan.

Akibat dari kebijakan tersebut, pengurusan dalam hal penelitian seperti sortasi, pemilihan, *verpakking* dan pengolahan (*processing*) hasil-hasil perkebunan dilakukan oleh para peneliti *Hoa-Kiau* (para peneliti perkebunan dari

⁹⁴ SPPMA telah diakui secara resmi sebagai sekolah untuk mendidik tenaga-tenaga Kejuruan untuk perusahaan perkebunan oleh Menteri Pertanian dan Agraria RI melalui SK No. SK/23/PA/1962 pada tanggal 19 Mei 1962. Dalam, *Menara Perkebunan* Tahun ke-31, No. ¾ - Maret/ April 1962, hlm. 45.

⁹⁵ Tan An Djien, *Pertanian Perkebunan di Indonesia*. Dalam, *Menara Perkebunan*, Tahun ke-27 No. 4 – April 1958, hlm. 92.

⁹⁶ Wawancara dengan Pak Totok Soeharsono, *Loc.Cit.*

kalangan orang Tionghoa) termasuk Ong An Pang⁹⁷. Untuk peneliti berkebangsaan Indonesia tidak ada. Yang ada hanya pegawai pembantu di Laboratorium seperti Pak Marsudi dan Ibu Soegiarti⁹⁸.

CPV Bogor ketika terjadi kekurangan ahli di CPV Jember bermaksud mengirim ahlinya ke Jember. Tapi Bogor sendiri tidak dapat melakukannya karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. CPV Bogor masih kekurangan ahli pertanian terutama ahli kopi, kakao dan tembakau berkebangsaan Indonesia yang sangat dibutuhkan CPV Jember
2. Penduduk Jember masih jarang. Hal ini memunculkan pandangan kuat bahwa banyak jalan-jalan yang sepi sehingga tidak menjamin keamanan
3. Letak Kota Jember jauh dari Bogor
4. Kondisi keamanan di Jember masih belum mendukung

Dengan mempertimbangkan alasan di atas maka Bogor lebih cenderung tidak mengirim bantuan ahlinya ke Jember. Keputusan ini menyebabkan para pegawai CPV Jember semakin besar keinginannya untuk dapat pindah dan bekerja di perkebunan atau perusahaan lain karena anggaran CPV guna menggaji pegawai benar-benar *menipis*. Para pegawai tidak memperoleh pakaian dinas yang baru sementara di Kebun Percobaan banyak pegawai yang sakit-sakitan karena tidak memakai sepatu pengamat dan jas hujan⁹⁹. Berdasar atas fenomena tersebut, Puslit

⁹⁷ *Hoa-Kiau* adalah orang China yang membawa budaya dan norma China ke Indonesia kemudian oleh pemerintah RI dijadikan sebagai salah satu budaya dan norma asli Indonesia (*Hoa-Kiau are native Indonesians with Chinese customs and norms*). Dalam, R. Sadjarwo, *Usaha Nasional dalam Bidang Perkebunan*. Dalam Konferensi Usahawan Marhaenis, Tawangmangu (Surakarta), 15-18 Djuni 1960. Dalam, *Menara Perkebunan*, tahun ke-29 No. 7 – Djuli 1960, *op.cit.*, hlm. 13. Lihat pula dalam, Jusni Hilwan, *Mengunjungi Negeri Leluhur I*, Dalam, *Indonesia Media Online*, Mid May 2005. Juga dalam, Eddin Khoo, *Advancing the Virtues of Reason*. Dalam, *Majalah, Sunday Star*, 31 Januari 1999.

⁹⁸ *Positieregeling Lagerpersoneel Algemeen (C.P.V. maand-endaggers Algemeen, Sarbupri-personeel) 1951-1973*.

⁹⁹ Berdasarkan data dari Rainfall Figures (Daftar Hujan) hasil penelitian bidang Meteorologi milik CPV Jember sejak awal tahun 1911, sejak Januari 1958, di Jember banyak terjadi hujan. Dalam Surat CPV Jember No. DB/MisC/58-5 pada tanggal 25 Februari 1958. Dalam Arsip CPV No. 0241.

Koka Jember mengambil beberapa program mandiri Balai sebagai sumber *Income* utama selama tahun 1958, antara lain yaitu:

1. Menjual produk bahan tanaman seperti benih dan hasil stek
2. Membuka jasa *Advis* ke perkebunan-perkebunan atau jasa ceramah atau penyuluhan ke perkebunan-perkebunan
3. Membuka Jasa Analisa air tanah dan daun
4. Bantuan dari Badan Litbangtan pemerintah khusus bagi pengadaan peralatan penelitian
5. Menjual hasil panen kopi dan kakao pada KP Kaliwining, KP *Achertuin* dan KP *Afdeeling* Sumber Asin di Malang¹⁰⁰

Untuk menindaklanjuti kebijakan program mandiri balai tersebut, CPV Jember menjual produk benih tembakau langsung kepada para mandor di perkebunan-perkebunan milik LMOD Besuki tanpa sepengetahuan direksi LMOD yang ada di Surabaya (PPN Baru IX). Penjualan ini langsung diterima para mandor dan segera diterapkan penanamannya dalam rangka percobaan benih baru selama tahun 1958. Hasil panen tembakau dalam tahun tersebut ternyata kurang memuaskan. Keadaan ini diketahui Direksi LMOD di Surabaya. Direksi LMOD begitu sensitif terhadap persoalan sekecil apapun sehingga persoalan sederhana tersebut pada akhirnya menjadi besar. Pada tanggal 13 Maret 1959 diselenggarakan rapat kerjasama antara BEBTO, CPV dan BUT (Badan Urusan Tembakau). Rapat tersebut ternyata membahas persoalan dimaksud. Rapat memutuskan bahwa persoalan itu dapat diselesaikan apabila kedua belah pihak (CPV Jember dan LMOD) saling menjalin rasa pengertian yang baik. Pada masa yang akan datang, apabila CPV akan mengadakan percobaan penanaman bibit yang baru, CPV Jember hendaknya berunding terlebih dahulu dengan Direksi LMOD di Surabaya sehingga program penanaman tersebut disetujui Direksi LMOD secara resmi dan tertulis. Keputusan ini tetap tidak dapat merubah pendirian LMOD. LMOD tetap ingin mengadakan pembenihan sendiri berdasarkan atas ketidak puasan mereka terhadap hasil-hasil pekerjaan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono, *Loc.Cit.*

penyelidikan CPV. BEBTO akhirnya turun tangan. Sebagai perasaan pengikat terhadap CPV dan untuk melanjutkan hubungan yang lebih baik antara BEBTO dengan LMOD, BEBTO mendesak LMOD. Atas desakan tersebut, LMOD akhirnya sanggup melanjutkan pembayaran sebesar Rp. 40.000 tiap tahun untuk membiayai penelitian di CPV Jember¹⁰¹. BEBTO merupakan pemilik perserikatan perkebunan tembakau se- Karesidenan Besuki yang kedudukannya berada di atas *onderneming-onderneming* tembakau seperti BTM, LMS di Besuki, termasuk LMOD Besuki. BEBTO berani mendesak LMOD karena ketika itu tengah berlangsung hubungan yang kurang baik antara BEBTO dengan CPV Jember. BEBTO sejak pertengahan tahun 1958 mempunyai tunggakan utang sebesar Rp 180.000,- kepada CPV Jember¹⁰². Oleh sebab itu, sebagai perasaan pengikat dan agar hubungan baik dengan CPV tetap terpelihara, BEBTO berani mendesak LMOD.

Kepengurusan lembaga yang baru di bawah pimpinan Ong An Pang sepakat untuk memberlakukan tindakan hati-hati dalam mengeluarkan barang-barang inventaris yang ada keluar lembaga sejak awal tahun 1958. Pada tanggal 30 Maret 1958 CPV Jember meminta izin secara resmi kepada pengurus *Societeit* untuk meminjam Taplak Meja guna kepentingan penghormatan terhadap menteri pertanian yang akan datang di CPV Jember. Oleh karena kepengurusan *Societeit* tengah sibuk dengan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan karena baru 28 hari beralih ke tangan bangsa Indonesia (Legium Veteran RI cabang Jember), permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi pengurus *Societeit*.

Pada tanggal 25 Juni 1958, bagian pengurus balai pertemuan umum gedung *Societeit* meminta tolong dengan hormat kepada pimpinan CPV Jember Ong An Pang untuk memberi pinjaman gunting rumput ber roda. Ong An Pang bersedia meminjamkannya dengan syarat bila memang sungguh-sungguh dibutuhkan. Apabila memang demikian, pengurus *Societeit* dapat mengambilnya

¹⁰¹ CPV-Djember, *Rapat Kerjasama BEBTO-CPV dan BUT tanggal 13 Maret 1959*. Dalam, Arsip No. 068.2, *Loc.Cit.*

¹⁰² *Ibid.*

sendiri di kantor CPV Jember pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 1958 pada pukul 07.00 pagi dan pada pukul 12.30 siang harus sudah dikembalikan. Gunting rumput ber roda milik CPV ketika itu sangat penting untuk digunakan sendiri dan begitu sulit untuk dipinjamkan¹⁰³. Persyaratan ini menimbulkan perasaan tidak tenang pihak *Societeit* dalam menggunakan pemotong rumput ber roda tersebut karena penggunaannya dibatasi hanya 5 jam saja. Oleh karena para *Hoa-Kiau* ketika itu menguasai CPV Jember, muncul perasaan tidak senang pihak *Societeit* kepada CPV Jember. Ketidak senangan ini merupakan embrio perasaan *phobi* para pegawai CPV Jember asli pribumi terhadap para *Hoa-Kiau* di CPV Jember yang terjadi kelak pada akhir tahun 1960¹⁰⁴.

Sikap hati-hati tidak hanya terhadap pengeluaran barang-barang inventaris semata. Dalam hal keuangan, BPPB Djember atau CPV Jember mengeluarkan kebijakan pengeluaran keuangan yang se-minimal mungkin yang hal ini membuat BPPB Bogor geleng kepala. BPPB Bogor begitu memahami kondisi yang memprihatinkan di BPPB Djember. Oleh karena itu, BPPB Bogor mempunyai inisiatif sendiri. Untuk memperbanyak jumlah koleksi buku-buku di perpustakaan BPPB Djember, atas inisiatif tersebut, sejak awal tahun 1958 BPPB Bogor mengirimkan majalah-majalah yang berjudul *Archive Voor De Koffiecultuur*, *Archive Voor De Rubbercultuur*, *Archive Voor De Cacaocultuur* dan Buletin *Mededelingen Van Het Besokisch Proefstation* ke Jember meskipun tidak ada pemesanan dan permohonan untuk berlangganan atasnya dari BPPB Djember. Pada tanggal 21 Agustus 1958 Ong An Pang meminta 2 buah buku kepada BPPB Bogor sebagai tambahan koleksi di perpustakaan. BPPB Djember menghendaki agar kedua buku tersebut diberikan secara cuma-cuma. Permintaan ini tidak dapat dipenuhi Bogor karena buku-buku tersebut sangat dibutuhkan di Bogor dan BPPB

¹⁰³ Surat CPV Jember kepada Pengurus Balai Pertemuan Umum Gedung Societeit No. 894, 28 Juni 1958. Dalam Arsip No. 0281.

¹⁰⁴ Para *Hoa-Kiau* di CPV Jember hingga tahun 1962 diantaranya ialah Ong An Pang, Lauw Siek Liem, Kho Bing Tjing dan M.H. Mamoto.

Bogor merasa keberatan apabila kedua buku itu dipinjamkan ke luar balai¹⁰⁵. Selanjutnya pada 17 September 1958 BPPB Djember kembali meminta buku yang berjudul "*Mededelingen Algemeen Proefstation voor de Landbouw No. 1-10*" untuk melengkapi koleksi perpustakaan dengan pengiriman secara cuma-cuma (gratis). Untuk kali yang kedua, BPPB Bogor tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut. Sikap BPPB Bogor yang tidak bersedia memberikan buku yang dikehendaki BPPB Djember merupakan pukulan berat bagi BPPB Djember. Keadaan BPPB Djember selanjutnya ibarat seekor anak ayam yang baru kehilangan induknya, terlantar dan memprihatinkan. Sejak saat itu BPPB Djember semakin mengintensifkan sikap kehati-hatiannya. Kondisi ini terus berlangsung hingga Agustus 1960.

Selanjutnya mengenai Jasa Adpis ke perkebunan-perkebunan. Jasa Adpis adalah bentuk penawaran jasa bidang pertanian oleh CPV kepada perkebunan-perkebunan dalam bentuk penyuluhan pertanian mengenai tata cara penanaman, pemupukan dan pemeliharaan tanaman perkebunan. Sejak tanggal 20 Nopember 1958, CPV Pusat Jakarta, CPV Bogor dan CPV Jember membangun komitmen bersama untuk membuka jasa Adpis kepada perkebunan-perkebunan di seluruh Indonesia. Sebagai langkah awal, ketiganya kemudian membentuk Komisi Teknik Adpis (*Technische Advies-Commissie*) yang akan menyelenggarakan rapat mengenai Rencana Kerja (RK) CPV untuk tahun 1959 pada Januari 1959 dalam hal Adpis. CPV Jakarta, CPV Bogor dan CPV Jember akhirnya bergerak mengunjungi perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan lain yakni PPN Baru (ex. H.I.L. Mij. Tiedeman van Kerchem) di Surabaya, Cultuurbank, Perkebunan Francis Peek & Co. LTD (Incorporated in England)¹⁰⁶, perkebunan Brusselanden Oost Java p/a C.O. Sumber Wadung-Kalisat, PPN (BTM

¹⁰⁵ Surat BPPB Djember kepada BPPB Bogor No. 1114 tanggal 21 Agustus 1958 Dalam Arsip No. 049-1.

¹⁰⁶ Perkebunan Francis Peek & Co. LTD membawahi perkebunan-perkebunan Sumber Ayu di Tanggul, Sumber tengah di Sempolan, Gunung Gunitir di Mrawan, Tanah Manis di Mrawan, Purwojoyo di Glenmore Banyuwangi dan Perkebunan Kali Sepanjang di Glenmore. Perkebunan-perkebunan tersebut sekarang menjadi milik PTPN XXII. Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono pada tanggal 28 Januari 2008.

Bondowoso) dan LMOD. Sejak tanggal 20 Nopember 1958, perkebunan-perkebunan masih banyak yang kurang mengerti dan cenderung tidak setuju terhadap program ini, seperti Perkebunan Francis Peek dan LMOD. Hingga Januari 1959 hanya ada 3 orang utusan dari pihak perkebunan yang bersedia duduk di Komisi Tehnis Adpis. Hal ini masih belum memadai untuk membahas Rencana Kerja (RK) Balai untuk tahun 1959.

CPV-CPV mengambil kebijakan lain dan membatalkan RK tersebut. CPV-CPV akhirnya mengambil kesepakatan lagi yakni mengundurkan RK tahun 1959 dan merencanakan RK yang baru untuk tahun 1961-1963. Pada tanggal 16 September 1960 CPV Bogor meminta kepada PPN Baru (ex. LMOD) Jember untuk memilih seorang ahli budidaya tanaman gunung yang umum di usahakan di Jawa Timur (karet, kopi, kakao dan teh) yang dimilikinya untuk duduk sebagai anggota dalam perbincangan Komisi Tehnis Adpis yang akan datang, November 1960 di Bandung. Dengan terbukanya LMOD untuk mendukung Komisi Tehnis Adpis ini, menyebabkan perkebunan-perkebunan lain pun mulai terbuka. Perbincangan Komisi Tehnis Adpis akhirnya terlaksana pada Nopember 1960 di Jakarta dan Bandung. Ketika itu CPV Bogor tengah mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu BPPB Bogor hanya mampu menanggung pembiayaan dalam hal minuman kopi dan makan siang saja¹⁰⁷. Dengan demikian terwujudlah sidang Komisi Tehnis Adpis di Bandung pada awal Nopember 1960 yang dihadiri oleh 6 orang wakil perkebunan dan CPV, yaitu Ir. Lauw Siek Liem (CPV Jember), Kho Bing Tjing (CPV Jember), J. Vink (LMOD), Ong Tjing Khie (LMOD), P. Van Heerden (perwakilan dari Brussellanden oost Java Sumber Wadung Kalisat, Cultuurbank dan Francis Peek Co. LTD) dan H.W. Hougeveen (BTM Bondowoso)¹⁰⁸.

Dari semua program di atas pada akhirnya hanya menghasilkan *Income* yang masih sangat kurang. *Income* yang diperoleh masih belum dapat menutupi pembayaran gaji pegawai, biaya administrasi, perawatan alat dan gedung dan

¹⁰⁷ Surat CPV Bogor kepada CPV Jember No. 515/D. Dalam, CPV-Djember, *Loc.Cit.*

¹⁰⁸ CPV-Djember, *Loc.Cit.*

kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sesaat setelah bergulirnya kebijakan nasionalisasi perkebunan atau *onderneming*, *onderneming-onderneming* tidak berjalan produksi dan manajemennya. Hal tersebut karena pemiliknya lari ke luar negeri membawa serta sejumlah uang hasil korupsi.

Sejak tanggal 1 Januari 1958 pembiayaan penelitian diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Perkumpulan dan Organisasi Perkebunan yang dibentuk Departemen Pertanian RI pada tanggal 11 Desember 1957¹⁰⁹. Bantuan tersebut berasal dari tabungan dana *Cess* milik negara. Dana *Cess* yakni pungutan hasil ekspor perkebunan besar swasta. Dana *Cess* ini dihimpun dan disalurkan kepada CPV Jember melalui Perhimpunan Balai Penyelidikan Perkebunan Besar Jakarta (PBPPP Jakarta) atau CPV Jakarta¹¹⁰.

Dengan bantuan pemerintah tersebut, Ong An Pang selanjutnya mengadakan pembenahan-pembenahan keadministrasian, kepengurusan organisasi, pemantauan terhadap para peneliti Belanda dan lain-lain. Ong An Pang melakukan pengurusan surat exit-permit bagi sisa-sisa para teknisi dan staf Belanda yang masih ada di kantor dan ingin meninggalkan Indonesia. Selama tahun 1958 sebagian besar staf ahli asing (Belanda dan Cina) pada Puslit Koka segera mengurus surat exit-permitnya untuk meninggalkan Indonesia¹¹¹. Jumlah mereka berkisar antara 20-30 orang.

Pada pertengahan tahun 1958 Ong An Pang mengundurkan diri dari jabatan Direktur dan pulang ke Kebumen Jawa Tengah¹¹². Pengunduran dirinya disebabkan karena ia sudah tidak senang lagi di Puslit Koka. Ong An Pang berpendirian bahwa dia harus segera pergi dari Puslit Koka. Dia merasa sudah

¹⁰⁹ Hastjarjo Soemardjan dan RAhdi S. Pudjosunaryo, *Problematika Penelitian Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Perkebunan, 1998), hlm. 28.

¹¹⁰ Dalam Bagan berjudul: *Perkembangan Organisasi Balai Penelitian Perkebunan Besar Tahun 1911-1983*. Dalam, *Taak Organisatie en Financiering 1973-1989*.

¹¹¹ Dikutip dari Makalah berjudul: *Keterangan Singkat Tentang Balai Penelitian Perkebunan Tjambang Djember*, 1971, hlm. 1.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono pada tanggal 28 Januari 2008. Ong An Pang tidak memperoleh dana pensiun atas dirinya. Dana pensiun dari CPV Jember baru diterapkan setelah keluarnya istilah PTPN pada tahun 1974.

tidak cocok lagi dengan lingkungan lembaga baik dengan para pegawai maupun dengan masyarakat sekitar kantor¹¹³. Hal itu dilatar belakangi oleh terbentuknya Persatuan Karyawan Balai (Perkaba)¹¹⁴ sehingga segala aktivitas pegawai asli Indonesia di kantor Puslit Koka ketika jam kerja memperlihatkan sikap-sikap yang tidak disenangi Ong An Pang seperti sindiran, mendengarkan siaran radio bersama yang memberikan komentar yang tidak enak di dengar Ong An Pang dan sebagainya¹¹⁵. Para pegawai berani melakukan hal tersebut meskipun Ong An Pang adalah orang nomor satu di lembaga CPV Jember. Hal itu karena kedudukan Ong An Pang adalah Pejabat Kepala yang kedudukannya masih berada di bawah CPV Bogor¹¹⁶. Ong An Pang tidak dapat sekehendak hati memberikan perintah tanpa berpedoman kepada instruksi dari Bogor (CPV Bogor) terutama dalam hal pemecatan atau pemberhentian pegawai. Penyebab lainnya adalah kondisi keuangan lembaga yang sangat *menipis* sehingga gaji yang diterimanya tidak memadai dan kecil. Ong An Pang mengundurkan diri dengan begitu saja tanpa melalui proses-proses kelembagaan secara tertulis. Tidak ada instruksi darinya untuk kepemimpinan lembaga selanjutnya. Pengunduran dirinya berjalan dengan apa adanya.

Kepemimpinan CPV Jember pasca pengunduran diri Ong An Pang menjadi kritis. Kegiatan penelitian, aktivitas pegawai dan program serta rencana lembaga menjadi kacau. Situasi ini berlangsung selama 2 tahun dari pertengahan tahun 1958 hingga awal tahun 1960. Selama periode tersebut CPV Jember berada pada tingkat kemunduran yang luar biasa, yaitu:

1. Penelitian tidak berjalan,
2. Dana yang ada semakin menipis,

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono , *Loc.Cit.*

¹¹⁴ Penjelasan tentang Perkaba terdapat dalam pembahasan selanjutnya.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ P.B.P.P.B. Djakarta mempunyai Direksi yang terdiri atas Ir A. Garot, sebagai Pendjabat Direktur I yang berkedudukan di Jakarta, Ir R. Surdjawoko Danusastro, Pendjabat Direktur II yang berkedudukan di Bogor dan B.P.P.B. Djember dipimpin oleh Ir Ong An Pang sebagai Pendjabat Kepala yang berkedudukan di Jember.

3. Ir. Lauw Siek Liem sebagai seorang peneliti yang menjabat wakil Direktur ketika itu tidak mau memimpin CPV,
4. Para pegawai menengah yang kedudukannya cukup penting telah banyak yang mengundurkan diri¹¹⁷ dan
5. Para pegawai dalam menjalankan pekerjaannya dilakukan dengan perasaan *mengkis-mengkis* atau perasaan hidup segan mati tak mau¹¹⁸
6. Struktur kepengurusan lembaga sering *tambal sulam* terutama jabatan pegawai menengah. Jabatan pegawai menengah hanya dipegang beberapa bulan saja sementara terus muncul permasalahan-permasalahan baru lembaga.

Para pegawai yang ada telah sangat *phobi* terhadap orang China yaitu Ong An Pang, Lauw Siek Liem, Kho Bing Tjing dan M.H. Mamoto. CPV Bogor turun tangan. Sehubungan dengan tidak ada lagi orang Indonesia asli yang berkompeten di dalamnya, maka kepemimpinan CPV Jember beralih kepada orang China yaitu Lauw Siek Liem pada tanggal 1 Januari 1961¹¹⁹. Lauw Siek Liem adalah seorang ahli Karet lulusan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor. Ia menjadi pegawai CPV Jember sejak tanggal 1 Juni 1957¹²⁰. Para pegawai tidak memprotes kepemimpinan Lauw Siek Liem yang kapasitasnya ia sebagai orang asing. Hal itu karena:

1. kondisi lembaga saat itu tengah memprihatinkan terutama dalam hal pegawai dan finansial
2. Para pegawai banyak yang ingin ber-disintegrasi dan pindah ke perkebunan-perkebunan

¹¹⁷ Uraian persoalan ini terdapat pada sub bab berikutnya.

¹¹⁸ Dalam istilah bahasa Jawa disebut *mengkis-mengkis* atau perasaan “hidup segan mati tak mau”. Hal ini mengakibatkan laporan tahunan untuk tahun 1958, 1959 dan tahun 1960 tidak terpikirkan. Para pegawai pribumi yang ada selalu mempertanyakan bahwa CPV Jember hendaknya diapakan, apakah dibubarkan saja atau bagaimana. Mereka tidak mampu menjamin kelangsungan penelitian, sementara mereka tidak setuju apabila CPV Jember dibubarkan. Hasil Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono pada tanggal 28 Januari 2008.

¹¹⁹ *Menara Perkebunan*, Tahun ke-30 No. 1 – Januari 1961, hlm. 2.

¹²⁰ Arsip No. CPV 160 tentang: *Kenaikan Gaji Tahunan Pegawai*, 16 Mei 1958.

3. Tidak ada perhatian penuh untuk urusan kepemimpinan dari segenap pegawai
4. Ketika itu belum terjadi *Clash* (ketegangan yang memuncak) antara pegawai asli Indonesia dengan para *Hoa-kiau*
5. Masih berlakunya kebijakan Presiden Sukarno dalam *Manifesto* Politiknya yang berbunyi:

*“Bahwa segala tenaga dan segala modal (funds and forces) yang terbukti progressief akan diadjak dan diikut-sertakan dalam pembangunan; tenaga-tenaga bukan asli jang sudah menetap di Indonesia dan jang menjetudjuinja, lagi pula sanggup membantu program Kabinet Kerdja, akan mendapat tempat dan kesempatan jang wadjar dalam usaha-usaha memperbesar produksi di lapangan perindustrian dan pertanian”*¹²¹.

3.3 Dampak Nasionalisasi

Dampak nasionalisasi bagi Puslit Koka Jember adalah persoalan-persoalan yang muncul beberapa lama setelah nasionalisasi diberlakukan. Persoalan tersebut awalnya sederhana. Karena tidak segera ditangani, persoalan tersebut akhirnya menjadi terus berlanjut hingga memunculkan beberapa persoalan baru secara beruntun. Hal tersebut disebabkan pihak internal lembaga kurang cepat dalam menanggapi keadaan pada saat itu. Dampak nasionalisasi pada Puslit Koka berupa aktifitas-Aktivitas orang-orang Belanda, China dan pegawai dari kalangan bangsa Indonesia sendiri. Terdapat beberapa dampak utama nasionalisasi Puslit Koka yaitu perginya para peneliti Belanda, keinginan beberapa pegawai untuk meninggalkan lembaga dan masalah kewarganegaraan Lauw Siek Liem.

3.3.1 Para Peneliti Belanda Meninggalkan Lembaga

Dampak yang paling utama dari nasionalisasi secara umum adalah dalam periode tahun 1956-1959 para peneliti terutama yang berkebangsaan Belanda meninggalkan Indonesia. Fenomena ini berlaku bagi seluruh orang yang berkebangsaan Belanda yang telah lama atau baru berada di Indonesia. Kepulangan orang-orang Belanda ke negerinya yang terjadi pada tahun 1956-1957

¹²¹ *Menara Perkebunan*, tahun ke-29 No. 7 – Djuli 1960, hlm. 13.

lebih diakibatkan karena pemerintah Indonesia bersitegang dengan pemerintah Belanda dalam memperebutkan Irian Barat. Gelombang besar kepulauan tersebut secara nasional dan melibatkan seluruh orang Belanda terjadi pada akhir tahun 1957 tatkala Presiden Soekarno, Ir. Djuanda, Menteri Kehakiman dan A.H. Nasution mengumumkan ultimatum-ultimatum keras kepada orang-orang Belanda tanpa terkecuali mulai dari kelompok orang Belanda yang standar ekonominya menengah ke bawah, yang tidak punya pekerjaan hingga yang mempunyai kedudukan penting di berbagai perusahaan Belanda¹²². Ultimatum tersebut diumumkan beriringan dengan lahirnya keputusan Presiden tentang aksi Pembebasan Irian Barat pada November 1957. Pemerintah RI menamakan aksi tersebut dengan sebutan *Operasi Pembebasan Irian Barat*¹²³. Di Kota Jember dimana komunitas orang Belanda merupakan mayoritas, dikenal dengan sebutan Gerakan Aksi Irian Barat atau disingkat GRANAT. Semua itu dilakukan sebagai konsekuensi dari semangat pembebasan Irian Barat¹²⁴.

Untuk CPV Jember, kepergian para peneliti dan teknisi dimulai pada tanggal 5 September 1956. Pada tanggal tersebut dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (*Beeindiging dienstverband*) terhadap C.J. Gude¹²⁵, seorang peneliti bagian tanaman keras di CPV Jember. C.J. Gude mengundurkan diri dari CPV Jember disebabkan oleh kunjungannya ke Eropa dalam rangka cuti kerja mulai 10 Maret 1956 hingga 9 September 1956. Kunjungan tersebut membuatnya senang sehingga sebelum habis masa cutinya, ia tergesa-gesa pulang ke Jember untuk meminta ijin pemberhentiannya di CPV pada tanggal 5 September 1956. Selama cuti, Gude mendapatkan penawaran kerja yang lebih layak di Eropa sehingga

¹²² G. Kessel Brenner, *Irian Barat Wilayah yang tak Terpisahkan dari Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kebudayaan Rakjat, 1961), hlm. 22. Dalam, Susiati, "Masalah Nasionalisasi di Javasche Bank Tahun 1951-1953", (*Skripsi* S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 1987), hlm. 56.

¹²³ M. Yahmadi, "Memo", Surabaya, 2 Juni 2007. lembar 2.

¹²⁴ Dalam, *Taak Organisatie en financiering tahun 1973-1989*, *Loc.Cit.* Lihat pula dalam, *Menara Perkebunan*, tahun ke-27 No. 4 – April 1958., hlm. 91.

¹²⁵ Arsip CPV Jember No. 1264 tertanggal 5 September 1956 tentang *Beeindiging dienstverband Ir. C.J. Gude*.

Gude ingin cepat kembali ke Eropa dan melepaskan pekerjaannya sebagai pegawai di CPV Jember. Pemberhentian tersebut dilakukan atas permintaan F. van Gogh (Direkteur CPV Jember tahun 1956) kepada CPV Pusat Jakarta.

Pada tanggal 10 Desember 1956, Mejuffrouw G.L. Freudenberg, seorang *asisten* tanaman keras, meminta izin pengunduran diri dari CPV Jember¹²⁶. Alasan pengunduran dirinya tidak diketahui. Pengunduran dirinya berdasarkan perintah langsung dari Direktur CPV Bogor J.T. Wassink tanpa sepengetahuan CPV Jember secara resmi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat CPV Jember sendiri tengah dilanda krisis keuangan yang mengakibatkan krisis kepercayaan CPV Bogor terhadap CPV Jember. Krisis ini merembet kepada menurunnya kepercayaan diri sebagian besar pegawai di CPV Jember terhadap tempat dinasya sendiri.

Atas fenomena pengunduran diri tersebut dan dipengaruhi rasa khawatir dan takut dikarenakan kondisi Jember yang mulai menggemakan semangat anti Belanda sejak dilancarkannya GRANAT (Gerakan Aksi Irian Barat) tahun 1957-1962 oleh para pemuda pribumi, selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 1957 W.P. Van der Knaap mengeluarkan kebijakan resmi tentang pemberian hak berhenti (*Ontslagverlening*) bagi para pegawai yang ingin berhenti. Knaap begitu mudah memberlakukan keputusan tersebut. Sejak saat itu para pegawai Belanda mulai meninggalkan CPV Jember secara bertahap. Arus kepergian orang-orang Belanda dari CPV Jember merupakan yang paling awal dan menjadi motor utama bagi hengkangnya orang-orang Belanda lain pada *onderneming-onderneming* dan CPV-CPV sejenis di Jawa Timur khususnya dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Semangat untuk hengkang dari Indonesia semakin deras dilakukan oleh pegawai-pegawai Belanda pada *onderneming-onderneming* termasuk CPV-CPV di Indonesia. Berdasarkan instruksi ALS Pusat Jakarta, ALS perwakilan Jawa Timur (*Algemeen Landouw Syndicaat Vertegenwoordiging Oost-Java*) bemarkas di Jl. Radjawali 29 – *Posttrommel* 53 Surabaya pada tanggal 13 Maret 1957 mengeluarkan dan segera mengirimkan surat Pemberian Pemberhentian

¹²⁶ *Positieregeling Lagerpersoneel 1951-1973, Loc.Cit.*

(*Ontslagverlening*) No. 89/ A-6 Tahun 1957 secara resmi kepada Ketua (*Hoofd*) di CPV Jember yaitu Van der Knaap bagi pegawainya yang ingin berhenti¹²⁷. Ketika itu ALS Surabaya membawahi CPV Jember, Puslit Gula di Pasuruan, Puslit Tanaman Hortikultura dan Balitas di Malang. Keempat lembaga penelitian tersebut beserta seluruh perusahaan perkebunan di Indonesia merupakan anggota ALS.

Pada tanggal 10 Desember 1957 Pimpinan CPV Jakarta W.H. Meijer (berkebangsaan Swiss) memberikan surat *Exit-Permits* bagi anak-anak dan istri-istri para peneliti (*vrouw en kinderen van* ¹²⁸*Landbouwkundige*) CPV Jember untuk dapat pulang ke Belanda¹²⁹. Surat tersebut sebagai antisipasi guna menghindari segala kemungkinan yang akan terjadi di Jember seperti aksi anarkis orang-orang Granat dan lain-lain. Surat tersebut berlaku untuk 3 bulan ke depan. Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. 1063/PMT/1957 dan surat *Exit-Permits* di atas menjadi penyebab penting bagi perginya orang-orang berkebangsaan Belanda di seluruh Indonesia secara besar-besaran ke luar negeri yang dimulai pada tanggal 10 Desember 1957.

Jumlah tenaga pimpinan atau Direksi pada sektor perkebunan dari kalangan orang-orang asing terutama Belanda yang ada di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 1957 meliputi:

- Jabatan: 1. *Hoofd Administrateurs* atau Direktur Perkebunan sebesar 14,0%
 2. *Eerste Employe's/Wnd. Administrateurs* atau Pegawai Pertama/Wakil Direktur Perkebunan sebesar 7,8%
 3. *Tuinemploye's* atau pegawai pengurus perkebunan sebesar 44,4%¹³⁰

¹²⁷ ALS Vertegenwoordiging Oost-Java, *Ontslagverlening*, Surabaya, 13 Maart 1957.

¹²⁸ Thomas Lindblad menyebutkan bahwa *eksodus* orang-orang berkebangsaan Belanda yang ada di Indonesia di mulai pada tanggal 10 Desember 1957. Dalam, Thomas Lindblad, *The Importance of Indonesianisasi During The Transition from the 1930s to the 1960s*, (Leiden: Leiden University, 2002), 19.

¹²⁹ Arsip CPV Jember No. 912 tentang *Exit-Permits* tanggal 10 Desember 1957.

¹³⁰ *Menara Perkebunan* Tahun ke-27 No. 4 – April 1958, *loc.cit.*

Sebesar 84% dari para Administrateur atau penyelenggara Perkebunan diantara anggota ALS ialah terdiri atas tenaga-tenaga bangsa Belanda¹³¹. Sebesar 97,5% dari jumlah orang-orang asing Eropa yang ada di Indonesia adalah orang Belanda. Jumlah pegawai CPV (Djember dan Bogor) sebanyak 54 orang adalah orang asing (Belanda, Swiss dan China)¹³². Pada Puslit Koka Jember sebanyak 10 orang pegawai berkebangsaan Belanda, segera meninggalkan Jember. Mereka itu ialah:

1. H. Vecht (ahli bahan tanam/ahli material tanaman atau ahli plaantmateriaal)
2. Ir. Willet (peneliti kopi)
3. J.H. Potter (pegawai bagian Administrasi atau TU)
4. W.P. Van der Knaap (Direktur periode tahun 1956-1958)
5. Van Der Veen (ahli tanah untuk penanaman tembakau)
6. Van Der Linde (ahli teknologi benih untuk bahan tanam kopi)¹³³
7. E.J. Her (*asisten* bagian tembakau)
8. H.F.C. Kemper (*Administrateur Proeftuin Kaliwining*)
9. J.L.K. Block (Teknisi Kebun di Kebun Percobaan Kaliwining)
10. J.J. Revermann¹³⁴

Satu orang Belanda lainnya adalah Van Sprankhuizen. Dia tidak pulang ke Belanda, akan tetapi pulang ke rumahnya di depan Stasiun Kereta Api Kota Jember¹³⁵ hingga wafatnya. Hal ini karena ia punya status kewarganegaraan Indonesia dan sebagai salah satu warga kota Jember.

¹³¹ Tan An Djien, *Persoalan-persoalan Dalam Lapangan Perkebunan*. Dalam, *Menara Perkebunan*, Tahun ke-27 No. 4 – April 1958, *loc.cit.*

¹³² Arsip, *Data Jumlah Pegawai CPV, Jakarta – Kota, 6 Desember 1957*. Tenaga² Ahli : (Bogor + Djember) : 37 orang.

¹³³ Van der Linde adalah ADM perkebunan *Anim Sand I-IV* Kalibaru Banyuwangi tahun 1919-1925.

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono dan Bapak Ignatius Hartana pada tanggal 10 Februari 2007.

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Totok Suhartono, *Ibid*. Sekarang rumah tersebut ditempati oleh Bapak Ignatius Hartana.

Sepuluh pegawai CPV Jember diatas termasuk ke dalam daftar 50.000 orang Warga Negara Belanda yang Pada tanggal 6 Desember 1957 oleh pemerintah Republik Indonesia diperintahkan agar meninggalkan Indonesia dan pulang ke negeri Belanda. Pemulangan para pegawai CPV Jember sepenuhnya diurus oleh CPV Jember bekerjasama dengan tentara Infanteri pimpinan Ltd./Inf. Soewandi dan Kantor ke-Imigrasi-an di Surabaya dalam hal prosedur terbaik pengurusan *Uitreis-visa*¹³⁶. Mereka yang dipulangkan termasuk para wanita dan anak-anak orang Belanda. Mula-mula mereka diangkut dari *Lodji* (perumahan-perumahan orang-orang Belanda di Jember) dengan memanfaatkan kendaraan truk, dikumpulkan di Markas Kodim Jember (sekarang ber-lokasi di Jl. Gajah Mada), dipisahkan antara perempuan dan laki-laki, diberi pengarahan dan kemudian di pulangkan ke Belanda dengan menggunakan kapal laut dan pesawat udara. Diantara kesepuluh pegawai CPV Jember termasuk di dalamnya adalah istri-istri dan anak-anak berjumlah 25-30 orang. Begitu pula dengan yang berada di *Lodji-lodji* perkebunan, jumlah mereka rata-rata sebanyak 25-30 orang¹³⁷. Hal ini dilakukan demi alasan ekonomis, finansial dan psikologi orang-orang Belanda yang harus tetap berjalan dan fasilitas untuk itu hanya ada di negeri asal mereka di Belanda¹³⁸. Di Indonesia jaminan untuk ketiga hal tersebut tidak ada karena kondisi Indonesia tengah berada dalam situasi gencar-gencarnya menyerukan semangat anti *Nederland*. Orang-orang Belanda tidak pergi begitu saja meninggalkan Indonesia. Beserta mereka dibawa sejumlah uang modal perusahaan atau lembaga termasuk modal di CPV Jember. E.J. Her adalah salah satu pegawai CPV Jember. Pada akhir Desember 1957 E.J. Her membawa pulang nomor-nomor bibit tembakau N.O. yang unggul ke Belanda. Bibit-bibit nomor

¹³⁶ *Uitreis* artinya perjalanan ke luar negeri; *Visa* artinya tanda tangan (bahwa telah dilihat dan disetujui). Dalam, S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 752.

¹³⁷ Untuk menyebut salah satu contohnya, dari perkebunan Kotok Kecamatan Kalisat setelah dipulangkan sebanyak 30 orang yang terdiri atas nyonya-nyonya, tuan-tuan pegawai perkebunan dan anak-anak mereka. Wawancara dengan Bapak Usman pada tanggal 30 Desember 2007.

¹³⁸ Arsip CPV Jember, *Onderwerp: Afvoer Nederlands Personeel*, Bogor, 13 Desember 1957.

tersebut terdapat di *Proeftuin*, sementara nomor-nomor yang menunjukkan bibit-bibit mana yang unggul, dibawa pulang ke Belanda. Akibatnya, pekerjaan seleksi tembakau *N.O.* menjadi macet. Harapan untuk dapat mempertahankan tembakau *N.O.* jenis unggul sangat sedikit¹³⁹.

Fenomena ini kelak menimbulkan terputusnya kesinambungan SDM (Sumber Daya Manusia) bermutu yang merupakan aset utama lembaga penelitian, *estafet* program penelitian akan berpindah kepada pihak yang minus pengetahuan, keahlian dan pengalaman akan program tersebut serta krisis keuangan yang cukup berarti¹⁴⁰.

3.3.2 Keinginan Pegawai Untuk Meninggalkan Lembaga

Kondisi Perekonomian Bangsa Indonesia pada tahun 1957-1962 sangat memprihatinkan terutama untuk sektor perkebunan dan penelitian perkebunan. Dana pemerintah cenderung dipusatkan untuk membiayai upaya pembebasan Irian Barat¹⁴¹. Sektor perkebunan sebelum Aksi Irian Barat tahun 1957 menyumbangkan bagi Devisa Negara sebesar 70% dengan ekspor senilai 7 Milyard¹⁴² dan sisanya 30% berasal dari minyak tanah dan timah. Pada tahun 1958 terjadi penurunan produksi tembakau, kina, kopi dan teh dari seluruh perkebunan milik Belanda antara 40% - 5% dibandingkan dengan produksi pertanian lainnya¹⁴³. Hal ini menyebabkan turunnya ekspor dari 40% tahun 1940, menjadi 29,2% tahun 1958. Kemunduran tersebut disebabkan karena:

5. Tidak amannya sektor produksi terutama di daerah Sumatera Timur

¹³⁹ Dewan Perancang Nasional Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 1908.

¹⁴⁰ Hastjarjo Soemardjan dan Rahdi S. Pudjosunaryo, *Problematika Pengelolaan Penelitian Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Perkebunan, 1998), hlm. 32.

¹⁴¹ Mochtar Lubis, *Hati Nurani Melawan Kedzoliman* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm. 75. Dalam, Sunarlan, "Pemikiran dan Usaha Sukarno Menerapkan Nasakom Pada Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia Tahun 1959-1965", (*Skripsi* S1 Jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 1996), hlm. 152.

¹⁴² *Menara Perkebunan*, tahun ke-29 No. 7 – Djuli 1960, *op.cit.*, hlm. 13.

¹⁴³ Tan An Djien, *Loc. Cit.* Dalam, *Menara Perkebunan*, Tahun ke-27 No. 4 – April 1958, *op.cit.*, hlm. 89.

6. Turunnya harga-harga komoditi penting dalam pasaran dunia karena resesi ekonomi dunia¹⁴⁴

Hal tersebut menyebabkan kemampuan keuangan Perhimpunan Balai-balai Penjelidikan Perkebunan Besar (PBPPB adalah penerus CPV) di Jakarta melemah. Perhimpunan ini berada di bawah Departemen Perkebunan dan Departemen Perkebunan berada di bawah Yayasan Dana Penelitian dan Pendidikan Perkebunan milik pemerintah.

Pada tahun 1961 BPPB (Balai Penjelidikan Perkebunan Besar) Djember mengusulkan kenaikan dan penetapan gaji baru. Usulan ini tidak disetujui PBPPB dan tidak mengizinkan penetapan gaji baru dengan alasan kemampuan keuangan Perhimpunan yang tidak menyanggupinya. Pada tahun 1961-1963 BPPB Djember (ex. CPV Jember) terpaksa memakai peraturan gaji lama yang merupakan warisan kolonial Belanda yang telah dipakai sejak 1 Januari 1950¹⁴⁵. Peraturan ini diberlakukan kembali karena peraturan yang sama dengan atas nama perjuangan Sarbupri dalam kenyataannya sudah tidak berlaku lagi setelah Sarbupri kehilangan pamornya sejak akhir tahun 1957. Peraturan gaji lama mengatur pembayaran gaji antara f 325 - f 22,5 kepada seluruh golongan pegawai terutama pegawai menengah di CPV dan mandor kecil di Kebun Percobaan (*Proeftuin*) hingga pegawai lepas yang terdiri atas buruh-buruh perkebunan (*arbeiders*)¹⁴⁶. Peraturan gaji lama tersebut diatur dalam Reglement CPV Pusat Jakarta Pasal 1 Ayat 5 tentang ketentuan-ketentuan bagi pekerja (*Werknemer*). Peraturan lama tahun 1950 tentang peraturan gaji yang pelaksanaannya sampai dengan tahun 1957 telah mencukupi kebutuhan hidup para pegawai secara cukup memuaskan karena pada periode tahun 1950-1957 belum terjadi krisis keuangan yang cukup berarti. Bahkan pada tanggal 25 Juli 1955, 24 April 1956 dan 1 Juni 1956 dikeluarkan peraturan kenaikan gaji beriringan dengan momen lebaran bagi para buruh

¹⁴⁴ *Menara Perkebunan*, tahun ke-28 No. 3 – Maret 1959, *op.cit.*, hlm. 61.

¹⁴⁵ Reglement (Peraturan) CPV Jember Tahun 1950, hlm. 1.

¹⁴⁶ *Positieregeling 1949*, *op.cit.*, hlm. 1. Dalam, *Reglement (Peraturan) CPV Djakarta-Kota*.

khususnya buruh Kebun Percobaan (*Tuinpersoneel*) yang beragama Islam dan buruh anggota Sarbupri antara Rp. 100, hingga Rp.300,-¹⁴⁷. Peraturan kenaikan gaji ini mengindikasikan kondisi keuangan CPV Jember yang cukup stabil. Ketika terjadi nasionalisasi dan modal untuk gaji para pegawai dilarikan ke luar negeri oleh para pengusaha Belanda yang pulang ke negerinya sejak tahun 1956, bangsa Indonesia kekosongan dana dan hal ini berdampak pada para pegawai CPV Jember. CPV Jember kewalahan dan kebingungan perihal ketersediaan dana bagi gaji pegawainya. Keadaan ini diperparah oleh ketidakjelasan dan kemantapan status CPV Jember apakah BUMN, Balai Penelitian Swasta, LSM atau Koperasi¹⁴⁸. Kejelasan status ini penting sebab akan membawa pengertian bahwa CPV Jember adalah milik pemerintah berwujud BUMN. Jika CPV Jember menjadi BUMN maka pendanaan untuk gaji pegawai dan dana kepentingan-kepentingan penelitian lainnya akan jelas dan pasti berasal dari pemerintah. Setelah perkebunan-perkebunan Belanda yang menyokong dana utama bagi CPV Jember menjadi PPN Baru yang berarti menjadi milik pemerintah RI pusat Jakarta, CPV Jember menjadi kehilangan induk hingga berlarut-larut.

Atas kebijakan menggunakan peraturan gaji lama tersebut mengakibatkan motivasi para pegawai untuk menggali dan mengaktualkan potensi yang dimilikinya kepada Balai Penelitian di Jember telah menurun sehingga menjadi kurang bagus¹⁴⁹. Juga dedikasi para pegawai berkurang dan sulit mempertahankan tenaga kerja yang unggul. Padahal, aset utama bagi institusi penelitian adalah SDM yang bermutu tinggi, khususnya untuk tenaga peneliti dan para teknisi yang secara langsung melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan. Penelitian adalah kegiatan yang berorientasi ke masa depan, berjangka panjang, berperan *vital* bagi perkebunan dan hasilnya penuh dengan ketidak-pastian. Akibatnya ketenangan jiwa bagi SDM yang terlibat menjadi terganggu. Maka terjadi perpecahan dikalangan pegawai BPPB Djember yaitu:

¹⁴⁷ *Positieregeling Lagerpersoneel 1951-1973*, *Loc.Cit.*

¹⁴⁸ Hastjarjo Soemardjan dan Rahdi S. Pudjosunaryo, *op.cit.*, hlm. 31.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

1. Beberapa pegawai yang memilih untuk tetap bekerja di lembaga
2. Beberapa pegawai yang meninggalkan lembaga

Para pegawai yang bersedia tetap bekerja di lembaga selama tahun 1957-1962 juga kinerjanya *semrawut* disebabkan oleh satu orang pegawai diberi tugas menangani beberapa bidang penelitian. Satu orang pegawai CPV Jember diberi tugas menangani karet, tanah, penyakit tanaman dan pengolahan (*bereiding*) hasil panen. Hal ini tidak seperti yang terjadi di lembaga *Rubber Research Institute of Malaysia* (RRIM) yang mana dalam satu komoditi karet, sebanyak 200 orang ahli menangani 200 bidang penanganan karet, yakni satu orang menangani penyakit karet dan satu orang menangani hama cacing dan sebagainya¹⁵⁰.

Alasan yang lainnya yakni mereka bekerja di lembaga adalah sebagai batu loncatan sambil menunggu pekerjaan di lembaga atau perusahaan perkebunan lain yang lebih terjamin penggajiannya¹⁵¹. Mereka adalah:

1. Boesono (Kepala Kantor CPV Jember)
2. Wangke (Juru Tik)
3. Mengko (Pengurus KP Kaliwining)
4. Soetomo (Juru Tik)
5. Aruman (Juru Tik)
6. Sosrodarmodjo (Bagian Keuangan)
7. Soeprapto (Bagian Arsip)
8. Abutoyo (Kepala Perpustakaan)¹⁵²

Para pegawai lain yang memilih untuk meninggalkan lembaga merupakan para *asisten* peneliti kopi, kakao dan karet yaitu:

1. Soemarto (Lulusan SPMA Malang)
2. Soeherman (Lulusan SPPMA Jember)
3. Samsoetedjo (Bekas TRIP Jember yang disekolahkan di *Landbouwschool* Malang melalui Ikatan Dinas)¹⁵³

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono pada tanggal 28 Januari 2008.

¹⁵¹ *Laporan CPV Jember Tahun 1961-1963*, hlm. 1.

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono, *Loc.Cit.*

4. Lucas Soetomo, meletakkan jabatannya sebagai *Proefveld-assistent* CPV Jember pada tanggal 31 Mei 1958¹⁵⁴. Ia adalah Lulusan SPMA Yogyakarta
5. F.X. Boeseke, mengundurkan diri pada tanggal 1 September 1962. Ia adalah seorang penyuluh bahan tanam (bibit karet, kopi dan kakao).
6. Soeninto (Lulusan SPMA Yogyakarta)
7. Bambang Soegeng
8. R. Sadjarto, berhenti dari jabatannya sebagai pimpinan KP Kaliwining pada tanggal 1 Desember 1960.
9. Roedyati Rasjid (kelahiran Bandung), mengundurkan diri pada tanggal 31 Maret 1961. Ia adalah seorang pegawai Laboratorium.
10. Rahajoe. Mengundurkan diri pada tanggal 31 Mei 1962. Ia adalah seorang pegawai Laboratorium.
11. R. Moch. Koesnowadi, mengundurkan diri pada tanggal 1 Juli 1962. Ia adalah Pj. Pemimpin KP Sumber Asin di Malang¹⁵⁵.
12. Ir. Lauw Siek Liem. Mengundurkan diri sebagai Pj. Pemimpin CPV Jember pada tanggal 1 Agustus 1962¹⁵⁶.
13. Ir. Ong An Pang. Mengundurkan diri dari jabatan Pj. Pemimpin CPV Jember pada tanggal 1 Januari 1961¹⁵⁷.

¹⁵³ TRIP adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar hasil pelatihan TNI agar dapat berjuang membantu TNI mengusir Belanda. Ketika orang-orang Belanda telah pulang ke negeri asalnya berkat perjuangan segenap rakyat Jember dibantu TNI dan TRIP, para anggota TRIP Jember sebagian diantaranya ada yang disekolahkan ke SPMA Malang dan SPMA Bogor.

Anggota TRIP lainnya yang disekolahkan ke SPMA-SPMA oleh CPV Jember atas perjanjian Ikatan Dinas dengan pemerintah RI adalah Simanhadi dan Sunarya. Keduanya kelak menjadi perintis berdirinya Universitas Tawang Alun atau Universitas Jember.

Begitu pula dengan Tentara Genie Pelajar (TGP) atau Tentara yang memiliki bakat luar biasa, yang merupakan hasil pelatihan TNI Jember, anggotanya disekolahkan ke *Ambachtsschool* (Sekolah Teknik Menengah dengan beberapa jurusan yaitu bangunan, perairan dan mesin).

¹⁵⁴ *Menara Perkebunan*, Tahun ke- 27 No. 7 – Juli 1958, *op.cit.*, hlm. 161.

¹⁵⁵ *Ibid.* Lihat pula dalam, *Menara Perkebunan*, Tahun ke-31 No. 8/9 – Agustus/ September 1962, hlm. 85.

¹⁵⁶ *Menara Perkebunan*, Tahun ke-31 No. 5/6/7 – Mei/ Juni/ Juli 1962, hlm. 85.

¹⁵⁷ *Menara Perkebunan*, Tahun ke-30 No. 1 – Djanuari 1961, hlm. 2.

14. Kho Bing Tjing. Mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1962. Ia adalah seorang penyuluh pertanian yang aktif datang ke KP Kaliwining untuk memberikan penyuluhan tentang pemetikan kopi, *entres* dan tata cara teknis pengolahan perkebunan lainnya.

Mereka adalah penyelidik (Research Workers). Keadaan mereka saat itu *onder betaald*, artinya menerima gaji yang tidak seimbang dengan tugas dan kedudukannya dalam masyarakat¹⁵⁸. Mereka merupakan *brain power* negara atau *Scientist* atau ilmuwan atau pemikir kuat bidang pertanian sebagai aset hidup milik Negara yang harus dipelihara demi kemajuan Negara. Oleh karena gaji mereka di CPV kurang, kebanyakan *research workers* tersebut bekerja di tempat lain yang lebih menjanjikan keuntungan finansial dan terjamin akan kebutuhan kesejahteraannya. Mereka itu adalah:

1. Soemarto, yang setelah keluar dari CPV Jember, ia menjadi Administratur atau ADM pada salah satu perkebunan milik PPN IX di Jember
2. Soeherman, menjadi Sinder di Perkebunan *Adjoeng* Jember
3. Lucas Soetomo, menjadi Sinder di salah satu perkebunan di Jember
4. Soeninto, menjadi Sinder di Perkebunan Tugu Sari Kecamatan bangsal Sari yang merupakan perkebunan milik Inggris, menggantikan F.X. Boeseke
5. F.X. Boeseke, menjadi Sider di perkebunan Tugu Sari menggantikan Soeninto setelah tanggal 1 September 1962¹⁵⁹
6. Bambang Soegeng, bekerja di PT. Perantara cabang Jember. PT. Perantara adalah makelar perdagangan Tembakau antara Indonesia dengan Jerman. PT. Perantara bertugas mencari pembeli di Jerman.
7. R. Moch. Koesnowadi, bekerja di Perkebunan Sumber Wadung (sekarang milik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP))

¹⁵⁸ Dewan Perancang Nasional Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 1882.

¹⁵⁹ F.X. Boeseke menjabat sebagai Sinder pada perkebunan Tugu Sari menggantikan Soeninto. Pada perempat akhir tahun 1962, Soeninto dibunuh oleh penduduk setempat di Tugu Sari oleh karena penduduk yang mayoritas berbahasa Madura tersebut merasa tersinggung dengan sikap Soeninto (Kelahiran Klaten) yang sombong dan meremehkan etnis Madura. Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono pada tanggal 28 Januari 2008.

Mereka di sambut dengan senang hati di perkebunan-perkebunan dan langsung dijadikan Sinder. Pihak perkebunan telah melihat kualitas para lulusan SPMA dan *Landbouwschool* di Malang dan Bogor tersebut. Mereka dapat diandalkan guna mendapatkan *Tantie'me* atau jasa produksi dalam menaikkan laba hasil produksi perkebunan. Dengan keadaan seperti itu menyebabkan para mantan *asisten* tersebut tidak mau kembali lagi bekerja di CPV Jember¹⁶⁰. Di Perusahaan baru mereka lebih tenang dan 100% pemikiran atau ide-idenya dapat tercurahkan.

Dengan berkurangnya jumlah pegawai dan tidak ada yang segera menggantikannya, kelancaran pekerjaan penelitian menjadi terganggu. Disisi lain pegawai ada yang sibuk membimbing tenaga-tenaga baru lulusan SPMA dan SPPMA yang belum mahir me-manajemen lembaga. Para pegawai baru tersedia bersedia bekerja meskipun gajinya kecil. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan BPPB Djember vakum selama 6 tahun (1957-1963). Vakum dalam pengertian:

1. Tidak menghasilkan penemuan bibit atau obat baru bagi hama tanaman
2. Tidak banyak tamu asing yang berkunjung
3. Produksi hasil *Proeftuin* seperti kakao, kopi dan karet sedikit hasilnya
4. Kunjungan ke perkebunan untuk cek tanaman harus dijemput dari pihak perkebunan dengan ongkos bensin dari perkebunan karena lembaga tidak punya kendaraan layak pakai dan sebagainya¹⁶¹.

3.3.3 Masalah Kewarganegaraan Lauw Siek Liem Tahun 1962

¹⁶⁰ Fungsi seorang asisten di CPV Jember adalah sebagai orang yang diperintah lembaga agar berangkat ke perkebunan-perkebunan guna mengambil *sampel* tanah dan buah kopi hasil panen untuk kemudian di bawa ke laboratorium CPV Jember guna penelitian lebih lanjut berdasarkan permintaan dari perkebunan-perkebunan. Perkebunan-perkebunan di Jember sejak berdirinya selalu mengeluhkan tentang hama, penyakit dan metode pemupukan yang benar kepada CPV Jember. Hasil wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono pada tanggal 28 Januari 2008.

¹⁶¹ Seperti keadaan keuangan Lembaga yang tidak mampu untuk membeli ban luar dan dalam untuk model ban kuno mobil *Jeep Willys* karena ban kuno harganya mahal dan hanya terdapat di Jakarta. Dalam, Laporan BPPB Djember Tahun 1961-1963, *loc.cit.* Ketika itu, diantara mobil-mobil yang melintas di Jember Kota, sebagian besar adalah milik orang-orang perkebunan. Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono pada tanggal 28 Januari 2008.

Sejak Abad ke-19, orang-orang China mengawali dominasi ekonominya dengan menguasai perdagangan candu, toko, rumah gadai dan terus-menerus menjalin keakraban dengan pemerintah Hindi Belanda. Hasilnya, beberapa diantara mereka ada yang diangkat menjadi *Opsir* keamanan dan ada yang diberi pangkat Letnan, Kapten dan Mayor¹⁶². Posisi-posisi strategis etnis China sebagai *Opsir*, pengusaha candu, pengelola toko dan rumah gadai, cenderung diwariskan secara turun-temurun dalam beberapa *Klan* keluarga China, bahkan hingga 5 atau 6 generasi ke bawahnya di wilayah perkotaan, daerah dan propinsi. Sejumlah Modal hasil usaha dari profesi-profesi tersebut dapat terkumpul dan tersimpan dalam lingkup kecil di pemukiman orang-orang China (*Pecinan*) untuk jangka waktu yang lama.

Pada periode tahun 1930-an orang-orang China di Hindia Belanda tiba-tiba menjadi miskin, menganggur dan penghasilan yang ada begitu kecil oleh karena terjadinya Resesi ekonomi dunia pada waktu itu. Ketika situasi ekonomi kembali normal, orang-orang China kembali menggiatkan usaha ekonomi dan melanjutkan kembali profesi politiknya hingga tahun 1945. Sekolah-sekolah bagi etnis China mulai berdiri dan terdapat beberapa diantara mereka berhasil menempuh pendidikan di *Wageningen*, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia Bogor (UI Bogor) khusus jurusan pertanian.

Dengan terjadinya berbagai gejolak kebangsaan yang mengusung semangat anti orang asing di berbagai wilayah RI sejak tahun 1945, hubungan orang Belanda dengan orang China atau orang Tionghoa atau para *Hoa-Kiau* yang berprofesi di luar bidang politik (seperti para pedagang, pemilik toko, kalangan pelajar dan Sarjana Belanda dan Tionghoa), menjadi erat. Dengan latar belakang ini menyebabkan orang-orang Tionghoa lebih mudah aksesnya untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda disamping beberapa diantara mereka juga memiliki perusahaan. Sebelum nasionalisasi, sektor-sektor kehidupan yang strategis yang dimiliki orang Belanda dan Tionghoa adalah sekolah, perkebunan, lembaga penelitian perkebunan, pertokoan emas, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

¹⁶² Ong Hok Ham, *loc.cit.* Dalam, International Quality Publication, *op.cit.*, hlm. 27.

Lauw Siek Liem, Ong An Pang, Kho Bing Tjing dan orang Tionghoa lainnya dapat dengan mudah diterima untuk dapat bekerja di CPV Jember, sementara Lucas Soetomo, Totok Soeharsono, Rahmulyoko dan lain-lain akan sulit untuk dapat bekerja di CPV Jember seandainya tidak lahir kebijakan nasionalisasi, Indonesianisasi dan perjuangan Sarbupri oleh karena dominannya bangsa Indonesia dalam sektor politik bangsa Indonesia.

Dengan kehadiran para *Hoa-Kiau* di CPV Jember, yang begitu mudah untuk menduduki jabatan penting lembaga, menyebabkan para pegawai pribumi pada CPV Jember telah benci terhadap superioritas para *Hoa-Kiau* tersebut. Para pegawai CPV Jember pasca nasionalisasi sebagian besar adalah orang Indonesia asli. Para ahli, staf peneliti dan pemegang jabatan tertinggi pasca nasionalisasi di CPV Jember adalah terdiri atas orang-orang *Hoa-kiau*. Para *Hoa-kiau* memegang kendali penuh atas apapun menyangkut persoalan kelembagaan. Mereka tidak menyadari akan hal-hal yang telah dialami kebanyakan orang asing ketika keberadaan mereka di Indonesia tidak disenangi oleh segenap rakyat Indonesia.

Dampak yang dirasakan segenap pegawai pribumi CPV Jember untuk menjaga kelangsungan penelitian di tempat dinas adalah kebanyakan para pegawai pribumi kurang suka memanfaatkan para *Hoa-kiau* untuk mengelola lembaga. Para pegawai pribumi lebih berkeinginan untuk memilih orang asli Indonesia seandainya tidak muncul *Manifesto* Politik Presiden Sukarno dan SK Menteri Pertanian Mr. Sadjarwo No. 247/Um/57 Pasal 3 Ayat 3 sejak nasionalisasi bergulir pada akhir tahun 1957. *Manifesto* Politik Presiden Sukarno yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian, secara tidak langsung sejak Desember 1957, menghendaki agar para *Hoa-kiau* mendapat tempat dan kesempatan yang wajar untuk memimpin CPV Jember guna mengupayakan perbesaran produksi di lembaga tersebut. Para pegawai pribumi tidak menghendaki Lauw Siek Liem menjadi pimpinan CPV Jember dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Semangat Nasionalisme yang tinggi terutama pada kalangan staf perpustakaan, staf Tata Usaha dan Administratur Kebun Percobaan, yang

salah satunya dibuktikan dengan aktivitas bersama mendengarkan siaran Radio secara berulang-ulang

2. Bapak Rahmulyoko sebagai staf senior Tata Usaha (TU) menjadi orang nomor satu versi pegawai pribumi yang mempunyai hubungan baik dengan pihak-pihak di luar CPV dan sebagai penentang utama para *Hoa-kiau*
3. Staf menengah CPV seperti TU, Perpustakaan (membawahi arsip dan penerbitan) dan *asisten* lapangan (pendamping para tamu yang meninjau kebun percobaan) merupakan orang-orang yang gigih dan kreatif mengikuti perkembangan politik kebangsaan Indonesia

Lauw Siek Liem yang langsung naik pangkat menjadi Direktur CPV Jember pasca pengunduran diri Ong An Pang, menjadi bulan-bulanan para pegawai pribumi. Rasa tidak senang para pegawai pribumi terhadap Lauw Siek Liem diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan-tindakan yang masih berada dalam batas-batas kewajaran dan tetap mengindahkan sikap menghargai harga diri dan martabat orang lain misalnya dalam hal pembicaraan, para pegawai pribumi sesekali mengeluarkan kata-kata sindiran yang tidak enak didengar. Liem mempunyai karakter *otoriter* terhadap para pegawai pribumi. Ia bersikap sombong dan selalu menekan para pegawai di kebun-kebun percobaan. Sikap ini semakin memperburuk keadaan lembaga yang tengah kacau.

Sindiran-sindiran seperti yang tersebut di atas, membuat Liem jengkel dan sakit hati. Permasalahannya adalah BPPB Jember atau CPV Jember kedudukannya masih berada di bawah CPV Bogor yang berwenang menangani persoalan-persoalan perkebunan tembakau, kopi, karet dan kakao yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur (*Landbouw Afdeeling Midden en Oost Java*). Direktur CPV Bogor R. Sudjarwoko Danusastro dapat menindak Liem apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan Bogor di Jember, sementara CPV Bogor telah jatuh sepenuhnya ke tangan orang Indonesia asli. Keadaan ini tidak memungkinkan Liem untuk membalas sindiran tersebut seandainya Liem berkeinginan untuk membalas. Keadaan ini menyebabkan Liem selalu merasa serba salah dalam ber-aktivitas di CPV Jember karena para *Hoa-kiau* lebih

cenderung memiliki sifat individualistis sehingga dijauhkan *akses* sosialnya di lembaga. Sindiran yang dimotori oleh Rahmulyoko sebagai pipinan tidak resmi CPV Jember, merugikan dan diskriminatif. Lauw Siek Liem akhirnya tidak peduli terhadap penelitian di CPV Jember.

Dampak yang diakibatkan dari sikap Lauw Siek Liem yang tidak peduli terhadap kelangsungan penelitian tembakau, kopi, kakao dan karet di CPV Jember yang sejak bergulirnya nasionalisasi telah menjadi instruksi resmi pemerintah RI adalah para pegawai pribumi akan semakin mudah dalam upaya mewujudkan impian menyingkirkan Lauw Siek Liem yang diupayakan dengan sehalus mungkin, sehingga kelak Liem akan mengundurkan diri seolah-olah dari keinginannya sendiri seperti yang telah dilakukan pendahulunya Ong An Pang. Para pegawai pribumi melakukan aksi sindiran tidak secara terus-menerus dilakukan. Cukup sesekali dilakukan, setelah terlihat ada perubahan sikap Liem, para pegawai merundingkan kembali aksi-aksi yang akan diterapkan selanjutnya. Strategi ini digunakan para pegawai pribumi untuk menanamkan rasa tidak enak dan tidak betah dalam ber-aktivitas di lembaga kepada Lauw Siek Liem.

Langkah ini berlangsung dalam kurun waktu cukup lama, yakni 5 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juni 1957 saat Liem diangkat menjadi staf ahli, hingga tanggal 1 Agustus 1962 saat Soenarjo diangkat secara resmi sebagai Direktur CPV Jember menggantikan Liem¹⁶³. Dalam kurun waktu tersebut, ialah pada tanggal 9 September 1959, Persatuan Pengusaha Perkebunan Besar Indonesia (P3BI) yang merupakan gabungan dari ex. ALS/ ZWSS semenjak nasionalisasi bergulir, memerintahkan kepada semua kantor-kantor cabang P3BI di daerah dan kepada BPPB (CPV) termasuk BPPB Jember, agar memberitahukan (*Opgave*) nama-nama tenaga asingnya. Hal itu dilakukan guna memenuhi Instruksi Penguasa Perang Pusat A.H. Nasution No. Instr/Peperpu/089/1959 tanggal 25 Juli 1959 tentang kebijaksanaan di bidang kepegawaian/ perburuhan dalam perusahaan-perusahaan negara mengenai pegawai-pegawai/ buruh-buruh yang berkewarganegaraan asing dan pengumuman Menteri Penerangan RI No. AI/138

¹⁶³ *Majalah, Menara Perkebunan*, Tahun ke-30 No. 1 – Januari 1961, *op.cit.*, hlm. 2.

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1958 tentang Peremajaan Alat-alat Negara yang masing-masing diterima CPV Jember pada tanggal 26 Agustus 1959 dan tanggal 11 Agustus 1959. Di CPV Jember terdapat nama-nama seperti Lie King Hie, Kho Bing Tjing, Mengko dan Lauw Siek Liem¹⁶⁴. Para *Hoa-kiau* di CPV segera diganti oleh tenaga-tenaga bangsa Indonesia sebab mereka hanya pegawai menengah (bagian Asisten, TU dan Perpustakaan). Liem tidak diganti sebab dia adalah Pejabat Pimpinan CPV Jember yang tenaganya masih dibutuhkan di lembaga berdasar atas rekomendasi Menteri Penerangan G.A. Maengkom dan Instruksi Penguasa Perang Pusat seperti tersebut di atas. Lauw Siek Liem untuk kali yang pertama tetap menjadi pimpinan CPV Jember.

Pada tanggal 14 Desember 1959 lahir Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat 1 Jawa Timur No. KP2-72/12/1959 tentang kebijaksanaan di bidang kepegawaian/ perburuhan dalam perusahaan-perusahaan negara¹⁶⁵. Dalam Pasal 2 keputusan tersebut, secara tidak langsung A.H. Nasution memberi kesempatan untuk tetap dapat bekerja bagi tenaga-tenaga ahli asing di CPV Jember hingga 31 Desember 1959. Kesempatan ini diperpanjang lagi hingga tanggal 15 Januari 1960, terutama terhadap Direktur/ Pimpinan Perusahaan Negara (termasuk CPV Jember) di wilayah Jawa Timur¹⁶⁶. Untuk kali yang kedua, Lauw Siek Liem telah aman dari jeratan peraturan-peraturan tersebut karena ia memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara sah.

Untuk menindak lanjuti keputusan penguasa perang tersebut, Brigadir Jenderal D. Soeprajogi sebagai wakil ketua Dewan Pimpinan Pusat Badan Nasionalisasi (DPP BANAS) melalui keputusannya No. K/077/BANAS/60 tanggal 2 Maret 1960 menegaskan kembali tentang pentingnya pelaksanaan

¹⁶⁴ Arsip Regelingen en Reglementen, Algemeen 1959-1977.

¹⁶⁵ Perusahaan-perusahaan Negara termasuk salah satunya adalah CPV Jember. Dalam *Surat PBPPB* Jakarta kepada Pimpinan Balai Penyelidikan Perkebunan Besar Jember melalui Peperda Jatim, Surabaya, 21 Maret 1960.

¹⁶⁶ Keputusan Penguasa Perang No. KP2-72/12/1959 tentang kebijaksanaan di bidang kepegawaian/ perburuhan dalam perusahaan-perusahaan negara, Pasal 4 Ayat a.

keputusan penguasa perang termaksud di seluruh Direksi Badan-badan Penampung Orang-orang Tionghoa. Dalam keputusan Dewan Pimpinan BANAS Pasal 3 Ayat 3 disebutkan bahwa:

Mereka jang hingga kini masih terus berdiam diri, tidak pernah menentukan sikapnya. Terhadap mereka supaja diminta ketegasan, mau menjadi warga negara R.I. atau R.R.T. meskipun di dalam perdjandjian soal Dwi-kewarganegaraan R.I.-R.R.T. kepada mereka diberi waktu 2 tahun untuk menentukan sikap. Djika mereka belum menentukan sikap, sementara waktu mereka harus dianggap sebagai orang asing, akan dikenakan instruksi KASAD/ Pe. Per. Pu No. Instr/089/1959. Djika mereka telah menentukan sikap memilih kewarganegaraan R.I. maka supaja dibuatkan daftar bagi mereka untuk mendapatkan perlakuan sebagai warga negara R.I. Guna tertibnja supaja daftar tersebut dimintakan legalisatie Pengadilan Negeri setempat, sambil menunggu kemungkinan pelaksanaan setjara technisch daripada perdjandjian soal dwi-kewarganegaraan R.I.-R.R.T. bagi mereka jang ingin mendjadi warga negara R.I.

*Dengan sendirinja pelaksanaan segala sesuatu tidak memerlukan biaya².*¹⁶⁷

CPV Jember termasuk salah satu Badan Penampung orang-orang Tionghoa sebab CPV Jember memiliki pegawai dari kalangan orang-orang Tionghoa. Sebagai tindak lanjut, PBPPB Jakarta pada tanggal 21 Maret 1960 mengharapakan dengan sangat agar pegawai-pegawai BPPB Jember dapat mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Lauw Siek Liem sejak tahun 1940 memiliki kewarga-negaraan ganda atau Dwi-kewarganegaraan, yakni RRC dan Warga Negara Belanda berdasarkan Undang-Undang Atas Kerakyatan Belanda (*Wet Op Het Nederladsch Onderdaanschap*) atau WNO atau undang-undang tentang Kawula Belanda yang diberlakukan pemerintah Kerajaan Belanda sejak tanggal 10 Februari 1910¹⁶⁸. WNO menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa yang telah menjadi keturunan

¹⁶⁷ Dikutip dari Arsip Surat Keputusan Dewan Pimpinan BANAS No. K/077/BANAS/60 tanggal 2 Maret 1960.

¹⁶⁸ R. Soemarsono, *De Hedendaagse Staatkundige Hervorming*. Dalam, J.H. Haye dkk, *Bestuurvraagstukken*, (Jakarta: Departement van Binnenlandse Zaken), hlm. 316. Lihat pula dalam, Benny G. Setiono, "Kehancuran dan Kebangkitan Martabat/ Jati Diri Etnis Tionghoa di Indonesia, t.th., hlm. 15.

kedua yang lahir di Hindia Belanda adalah Kawula Belanda. Di sisi lain pemerintah RRC mengklaim bahwa seluruh orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda adalah warga RRC. Klaim-klaim tersebut mengakibatkan munculnya masalah Dwi-kewarganegaraan. Kedua negara (RRC dan Belanda) saling mengklaim bahwa seluruh orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda menjadi warga negara mereka.

Ketika Indonesia merdeka, status kewarganegaraan orang Tionghoa di Indonesia adalah sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai Warga Negara Tiongkok (China). Pada tahun 1955 dilakukan penandatanganan perjanjian Dwi-kewarganegaraan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRT/ RRC.

Adalah Perkaba singkatan dari Persatuan Karyawan Balai. Pekumpulan ini terbentuk dari swadaya internal Puslit Koka pada tahun 1958. Perhimpunan ini sebelumnya tidak pernah ada dan akhirnya berdiri dengan latar belakang sebagai berikut.

1. Oleh karena situasi dan keadaan pada waktu itu dimana kaum buruh sudah punya perhimpunan buruh bernama Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri), buruh Kereta Api tergabung dalam SBKA (Serikat buruh Kereta Api), Sarbumusi (Sarekat Buruh Muslimin Indonesia), Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia (KBKI), Sarekat Buruh Islam Indonesia (SBII) dan dan lain-lain, maka para pegawai Kantor Puslit Koka menggalang perhimpunan pula.
2. Juga pendirian Perkaba dilatar belakanginya oleh banyaknya usulan-usulan pribadi dari pegawai menyangkut segala hal sebagai akibat pengambilalihan lembaga seperti penuntutan kenaikan tingkat karena telah cukup lama bekerja. Usulan-usulan tersebut tidak terwadahi.
3. Karena masa peralihan adalah masa yang *Soro* (menyusahkan) terutama masalah anggaran atau keuangan. Untuk menyelesaikan masalah ini maka tidak ada cara lain kecuali mempersatukan para pegawai.

Perkaba tidak menginduk kepada Sarbupri dan lain-lain dan tidak berpihak kemana-mana. Perhimpunan ini mutlak intern yang berdirinya dilatar belakanginya oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas. Ketua Perkaba adalah Rahmulyoko. Di

dalam Puslit Koka ia adalah seorang pegawai Tata Usaha (TU). Pada saat itu jumlah pegawai Puslit Koka beserta kebun-kebunnya kecuali buruh masih sedikit yaitu kurang dari 50 orang.

Para pimpinan Perkaba lainnya adalah Pak Soetikno (bagian Arsip), Soeprapto (bagian Arsip), Pak Mashari (staf TU) dan Pak Soewarso (*Asisten Tembakau*)¹⁶⁹. Ketiga orang tersebut selain sebagai pegawai biasa, mereka pintar pula dalam berpolitik. Pak Totok Suharsono pada waktu itu termasuk anggota Perkaba.

Pada tahun 1960 Lauw Siek Liem naik jabatan menjadi Direktur Puslit Koka. Secara diam-diam Lauw Siek Liem mempunyai status kewarganegaraan ganda yaitu WNI dan Warga Negara RRC. Dilatar belakangi semangat anti non pribumi, seluruh pegawai dalam wadah Perkaba mencari jalan agar Puslit Koka dipimpin orang Indonesia asli. Rahmulyoko sebagai pimpinan Perkaba, telah menjalin hubungan yang akrab dengan Kantor Imigrasi Jember, Pengadilan Jember dan Keejaksaan Negeri Jember. Sejak turunnya instruksi resmi PBPPB Jakarta pada tanggal 21 Maret 1960, Rahmulyoko meminta izin kepada Liem untuk menemui seorang temannya yang bekerja di Kantor Imigrasi Jember. Rahmulyoko berdasarkan usulan Perkaba dan tanpa sepengetahuan resmi lembaga, menyelidiki latar belakang Lauw Siek Liem di Kantor Imigrasi Jember. Alasan Rahmulyoko melakukan hal tersebut adalah:

1. Dugaan Dwi-kewarganegaraan Lauw Siek Liem oleh pegawai pribumi anggota Perkaba
2. Kecemburuan sosial dari pihak pegawai pribumi terhadap para *Hoa-kiau* yang menduduki jabatan-jabatan penting lembaga
3. Terbentuknya euforia nasionalisme pada kalangan pegawai pribumi yang kian hari kian kokoh
4. Dalam keseharian Aktivitas di lembaga, Lauw Siek Liem kerap kali memperlihatkan sikap tergesa-gesa, terutama setelah CPV Jember menerima surat dari PBPPB Jakarta pada tanggal 21 Maret 1960

¹⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono dan Bapak Ignatius Hartana, *op.cit.*, pada tanggal 5 Januari 2008.

Aktivitas Rahmulyoko untuk mencoba mengungkap persoalan tersembunyi kewarganegaraan Lauw Siek Liem, dilakukan secara perlahan-lahan, tidak secara terus-menerus datang ke Kantor Imigrasi. Keadaan lembaga ketika itu masih memprihatinkan. Kondisi CPV Jember atau BPPB Jember serba tidak menentu. Para pegawai pribumi melakukan aktivitas keluar-masuk lembaga sekehendak hati. Mereka mencoba mencari pekerjaan lain disebabkan persoalan anggaran lembaga. Penelitian pun masih belum menentu oleh sebab tidak adanya anggaran. Penelitian yang telah ada pun sebagai warisan Belanda mengenai klasifikasi nama-nama *klon* tembakau unggulan, untuk menyebut salah satu contohnya, menjadi tersendat-sendat. Diantara para pegawai yang telah mengundurkan diri, termotivasi oleh pandangan bahwa tidak ada gunanya bertahan di CPV Jember, sementara keadaan lembaga serba tidak menentu¹⁷⁰.

Dengan latar belakang kondisi lembaga tersebut, Rahmulyoko menunda untuk sementara penyelidikannya perihal Dwi-kewarganegaraan Lauw Siek Liem. Rahmulyoko memberi kepercayaan sepenuhnya perihal penyelidikan tersebut kepada pihak ke-Imigrasi-an untuk sementara waktu. Rahmulyoko sesekali datang ke Kantor Imigrasi Surabaya seandainya di sana ditemukan keterangan perihal Lauw Siek Liem dan itupun apabila Liem memerintahkan Rahmulyoko untuk pergi ke Surabaya untuk urusan kelembagaan.

Pada Januari 1962 hingga Juli 1962 keadaan perekonomian Bangsa Indonesia sedikit membaik. Anggaran Penerimaan Tahunan Negara meningkat dari Rp. 49.877.000,- pada tahun 1960, menjadi Rp. 77.205.000,- pada tahun 1962¹⁷¹. Dana untuk bidang pertanian yang semula Rp. 2.145.000,- pada tahun 1961, meningkat menjadi Rp. 2509.162,- pada tahun 1962¹⁷². Akibatnya, Anggaran tahunan untuk CPV Jember yang disalurkan oleh PBPPB Jakarta pun

¹⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Totok Seoharsono, pada tanggal 9 Januari 2008.

¹⁷¹ P.C. Suroso dkk, *op.cit.*, hlm. 217.

¹⁷² Jumlah tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut: Sebesar 13% dari penerimaan Negara dialokasikan untuk membiayai kebutuhan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Sebesar 25% dari dana untuk keempat sektor ekonomi tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian, yang salah satunya adalah CPV Jember. Lihat dalam, P.C. Suroso dkk, *Ibid.*, hlm. 88.

meningkat. Alokasi dana untuk pembayaran gaji dan operasional penelitian di CPV Jember untuk tahun 1962 sebesar Rp.150.000-200.000,-¹⁷³.

Dengan bangkitnya keuangan lembaga CPV Jember, Rahmulyoko menerima berkas-berkas bukti diri lauw Siek Liem dari Kantor Imigrasi Jember secara tersembunyi tanpa sepengetahuan Liem. Rahmulyoko dalam kurun waktu tersebut dengan atas nama Perkaba memerintahkan kepada Pak Soetikno dan Pak Soeprapto untuk datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Jember guna mencari tahu perihal ijin keluar-masuk kota Jember yang dilakukan Liem ketika menjadi pegawai CPV Jember. Rahmulyoko juga memerintahkan kepada Pak Mashari dan Pak Soewarso untuk mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Jember, memberitahukan rencana untuk menggelar acara dalam rangka mengadili Lauw Siek Liem. Hingga awal Juli 1962, Liem dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Jember. Semula Liem menolak pemanggilan tersebut. Atas permintaan resmi dari segenap pegawai CPV Jember dan berdasarkan rekomendasi dari CPV Bogor, Liem akhirnya memenuhi panggilan tersebut, yang sebelumnya, salah seorang pegawai CPV hampir memukul Liem. Pada akhir Juli 1962, Liem diadili oleh Pengadilan Negeri Jember. Hanya beberapa jam saja proses peradilan tersebut berakhir dengan keputusan bahwa Liem harus di Deportasi ke negeri China. Istilah Deportasi ketika itu dipahami masyarakat sebagai sesuatu hal yang melibatkan orang-orang penting, merupakan pemberitaan yang paling besar dan penting dan dapat menimbulkan peperangan antar negara¹⁷⁴. Liem akhirnya pulang ke negaranya pada akhir Juli 1962. Lauw Siek Liem dinyatakan bersalah dan harus di Deportasi adalah disebabkan oleh jabatan yang dipegangnya ketika itu adalah Direktur. Seandainya Lauw Siek Liem hanya seorang pegawai biasa atau staf ahli, di tidak akan diperkarakan oleh Perkaba, cukup diberhentikan saja berdasarkan

¹⁷³ Perhitungan ini berdasarkan Tabel *Perbandingan Anggaran Gaji Pegawai CPV Jember Tahun 1958*, Jakarta-Kota, 6 Desember 1957. Anggaran tersebut sebesar Rp.145.000-180.000,-. Dalam kurun waktu tahun 1958-1962, terdapat kebijakan kenaikan gaji sebesar 1-5%. Hal tersebut belum termasuk anggaran untuk biaya operasional penelitian yang dianggarkan pemerintah melalui PBPPB Jakarta sebesar Rp.10.000-20.000,- setiap tahun.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Totok Soeharsono, *Loc.Cit.*

Keputusan Penguasa Perang RI No. KP2-72/12/1959 pasal 1¹⁷⁵. Lauw Siek Liem harus di Deportasi disebabkan pula oleh sikapnya yang tidak patuh atau tidak taat terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan BANAS No. K/077/BANAS/60 Pasal 3 Ayat 3, yang mengharuskan Liem untuk menentukan sikap pada tanggal 2 Maret 1962. Hingga akhir Juli 1962 Liem ternyata belum menentukan sikap.

Persoalan Dwi-kewarganegaraan ini Lauw Siek Liem ini merupakan satu diantara sekian banyak persoalan menyangkut eksistensi orang-orang Tionghoa di Indonesia. Persoalan Dwi-kewarganegaraan orang-orang Tionghoa berawal dari perilaku Departemen Kependudukan Kerajaan Belanda yang meminta kepada pemerintah kerajaan Belanda guna memenuhi tuntutan perhitungan atas jumlah penduduk Belanda yang diharapkan naik mulai tahun 1910. Akibatnya hubungan diplomatik antara Belanda dengan negara RRC menjadi kurang sehat. Hubungan yang kurang sehat ini oleh pemerintah Hindia Belanda diwariskan kepada bangsa Indonesia. Ketika terjadi revolusi Indonesia tahun 1950-1959, dengan mengusung semangat nasionalisme, rakyat Indonesia secara serentak melakukan aksi anti Tionghoa, terutama di Pulau Jawa yang menewaskan ribuan jiwa dari kalangan orang-orang Tionghoa. Negara RRC tidak mau terima akan hal ini, yang akhirnya menghasilkan perjanjian Dwi-kewarganegaraan RI-RRC atas orang-orang Tionghoa yang berdomisili dan lahir di Indonesia pada tahun 1955. Akibat perjanjian tersebut, muncul persoalan perasaan superior dari kalangan orang-orang Tionghoa dibanding orang-orang pribumi oleh karena mereka meraih sukses dalam perdagangan dan bisnis. Bangsa Indonesia mempunyai alasan yang kuat untuk membalas keangkuhan orang-orang Tionghoa tersebut, yakni nasionalisasi dan persoalan Dwi-kewarganegaraan. Dengan atas nama nasionalisasi, bangsa Indonesia dapat menyeimbangi bisnis orang-orang Tionghoa dan dengan menggelar persidangan atas kasus Dwi-kewarganegaraan, bangsa Indonesia dapat menyingkirkan orang-orang penting Tionghoa.

¹⁷⁵ *Ibid.*

BAB 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan di atas maka dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya tindakan nasionalisasi terhadap lembaga Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember oleh pemerintah RI. Nasionalisasi yang diberlakukan terhadap Puslit Koka Jember disebabkan oleh *pertama*, kegagalan pemerintah RI untuk menguasai Irian Barat dari tangan Belanda. Belanda selalu mengulur-ngulur waktu dalam pemberian janji pengembalian Irian Barat ke tangan bangsa Indonesia.

Kedua, munculnya Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. 1063/PMT/1957 pada tanggal 9 Desember 1957 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan beserta lembaga penyelidikan ilmiahnya. Surat Keputusan ini dikeluarkan oleh Penguasa Militer Pusat A.H. Nasution.

Ketiga, adanya keinginan pemerintah RI untuk dapat merubah sistem ekonomi yang bersifat kolonial menjadi sistem ekonomi yang bersifat nasional, yang dibantu oleh gerakan massa rakyat. Aksi massa rakyat petani, massa partai dan massa buruh-buruh perkebunan memberikan ruang bagi kebebasan segenap bangsa Indonesia dalam menuntut haknya yang selama 350 tahun telah dirampas oleh kekuasaan kolonial Belanda. Kebebasan pemerintah RI untuk melakukan nasionalisasi di tengah-tengah tumbuhnya semangat nasionalisme rakyatnya, mendapatkan suasana baru dan terlindungi oleh rakyat.

Terdapat perbedaan antara nasionalisasi Puslit Koka dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia. Nasionalisasi terhadap perusahaan lain menyebabkan bangkitnya semangat pemerintah dan para penyelenggaranya di lapangan untuk merubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Segenap kebijakan dan petunjuk teknis dilapangan dikeluarkan secara teliti dan tepat guna. Pemerintah dan pihak penyelenggara nasionalisasi telah terkuras segenap pemikiran dan tenaganya sehingga kondisi intern perusahaan atau lembaga-lembaga bersangkutan telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik seperti yang disimpulkan John O. Sutter, J. Thomas Lindblad dan para peneliti Indonesianisasi lainnya melalui analisis mereka.

Fenomena umum yang muncul di masyarakat sehubungan dengan nasionalisasi perusahaan dan lembaga-lembaga lain di luar Puslit Koka Jember adalah lahan-lahan, pabrik, gedung perkantoran dan lain-lain jatuh ke tangan rakyat terlebih dahulu sebelum kemudian jatuh ke tangan militer. Terdapat beberapa dari kekuatan bangsa tersebut (rakyat) yang berhasil menguasai lahan, mendudukinya, mengolah dan mendirikan pedesaan di dalamnya dan tidak sempat jatuh ke tangan pihak lain hingga sekarang.

Untuk Puslit Koka Jember, nasionalisasi yang diberlakukan terhadapnya, menyebabkan menurunnya semangat pemerintah pusat, militer, rakyat Jember dan para pegawai pribumi yang bekerja di dalamnya, untuk mengelola dan melanjutkan *estafet* penelitian tembakau, kopi, kakao dan karet yang semula dilakukan oleh para peneliti Belanda. Pemerintah tidak mau ambil pusing menyangkut nasionalisasi Puslit Koka. Pada tanggal 9 Desember 1957, Presiden Sukarno menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada A.H. Nasution selaku Penguasa Militer nasional. Militer kemudian tidak mau ambil pusing sehingga muncul pemikiran untuk membubarkan Puslit Koka Jember. Badan Litbangtan kemudian unjuk gigi dan penguasaan secara resmi kemudian beralih ke tangan Departemen Pertanian RI. Dengan latar belakang kondisi politik, ekonomi, sosial dan keamanan yang serba tidak menentu ketika itu, Departemen Pertanian RI kurang sungguh-sungguh dalam mengelola Puslit Koka Jember. Hal ini berdampak pada pindahnya para *asisten* peneliti dan para pegawai lainnya ke perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan lain di Jember. Melihat fenomena ini, Puslit Koka akhirnya jatuh ke tangan para *Hoa-Kiau* dari kalangan Tionghoa. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan militer dan Departemen Pertanian menjadi tidak cocok diterapkan pada Puslit Koka dalam rangka mewujudkan Indonesianisasi yang sesungguhnya di lembaga tersebut. Bangsa Indonesia telah gagal dalam mengelola Puslit Koka pasca perginya orang-orang Belanda. Sejak saat itu Puslit Koka Jember terus menerus mengalami perubahan menuju arah yang paling buruk. Hal ini menjadi pengecualian dari pemikiran beberapa tokoh pemikir nasionalisasi di atas. Analisis Lindblad, J.O. Sutter dan lain-lain mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengalihan (*transfer*),

kontrol, pengembalian (*return*) dan partisipasi orang-orang pribumi pada bekas perusahaan asing seperti yang tersebut di atas, tidak terwujud pada Puslit Koka Jember. Puslit Koka Jember sejak tahun 1957 hingga tahun 1962, masih menjadi milik asing bukan pribumi. Dalam kondisi seperti ini, Puslit Koka Jember dapat menjadi *embrio* bagi lahirnya kekuatan ekonomi asing yang baru sebagai pengganti kekuatan ekonomi asing yang lama (Belanda) apabila para pegawai pribumi yang masih tersisa, Perkaba dan BANAS tidak segera turun tangan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh para pegawai Puslit Koka Jember dalam usahanya mewujudkan kelangsungan penelitian perkebunan sesuai instruksi program nasionalisasi oleh pemerintah terhadap lembaganya, dilakukan melalui dua cara. *Pertama*, meminta pengiriman tenaga-tenaga ahli perkebunan dari CPV Bogor ke Puslit Koka Jember (CPV Jember). Langkah ini dilakukan karena Puslit Koka Jember telah kehilangan seluruh ahli pertaniannya yang sebagian besar berkebangsaan Belanda.

Cara yang *kedua* adalah menjalankan Program Mandiri Balai. Program ini dilakukan CPV Jember setelah permintaan akan para ahli perkebunan tidak dapat dipenuhi pemerintah dan CPV Bogor, sementara kondisi lembaga semakin hari semakin memburuk, baik dalam segi pegawai maupun keuangan lembaga atau balai. Program mandiri ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan lembaga sehingga para pegawai dapat tetap bertahan di lembaga, disamping tetap megupayakan berlangsungnya kembali penelitian kopi, tembakau, kakao dan karet di CPV Jember.

Tindakan nasionalisasi terhadap lembaga penelitian perkebunan oleh pemerintah RI pada tahun 1957-1962 banyak menimbulkan dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif yang terjadi yakni didapatkannya aset-aset lembaga berupa gedung, tanah dan fasilitas penelitian yang telah menjadi hak milik Puslit Koka. Hal tersebut membawa dampak pada profesionalitas kinerja pada staf dan peneliti pemula atau junior dalam rangka melanjutkan kembali *estafet* penelitian perkebunan untuk membantu memulihkan kembali keterpurukan ekonomi bangsa pasca naiknya Soenaryo.

Dampak positif yang lain yakni terungkapnya kasus Dwi-kewarganegaraan Lauw Siek Liem, yakni antara menjadi warga Negara Indonesia atau warga Negara RRC. Lauw Siek Liem memiliki kewarganegaraan ganda tersebut sejak jaman Belanda. Liem selalu lolos dari jeratan peraturan-peraturan yang dikeluarkan militer dan Pemerintah. Liem baru terbukti memiliki kewarganegaraan ganda ialah melalui perjuangan Rahmulyoko beserta Perkabanya.

Dampak positif selanjutnya adalah menguatnya jiwa kemandirian pada kalangan pegawai pribumi karena adanya perjuangan bersama mengelola lembaga yang dilakukan dalam keadaan yang serba sulit dan susah. Para pegawai pribumi telah terlatih secara mental untuk tetap tegar dalam menghadapi hambatan-hambatan lain yang mungkin muncul di kemudian hari.

Adapun dampak negatif yang terjadi adalah Puslit Koka Jember kehilangan para ahli pertanian berkebangsaan Belanda yang merupakan tulang punggung penelitian perkebunan di Puslit Koka. Para ahli pertanian pergi begitu saja meninggalkan lembaga. Bersama mereka terdapat sejumlah modal dan nomor-nomor komoditi unggul hasil penelitian. Hal ini menyebabkan *frekuensi* penelitian menjadi tersendat-sendat, bahkan cenderung tidak berjalan sehingga tidak menghasilkan sumbangan apapun dalam bidang Iptek pertanian bagi bangsa Indonesia dalam kurun waktu tahun 1957-1962.

Dampak negatif lainnya yakni merosotnya disiplin kerja para pegawai pribumi dan mereka ingin pergi meninggalkan lembaga. Mereka sering keluar-masuk lembaga dengan sekehendak hati hingga tidak kembali lagi. Mereka berusaha mencari pekerjaan lain di luar lembaga. Aktivitas ini terus berlangsung hingga naiknya Soenaryo menjadi Direktur Puslit Koka Jember menggantikan Lauw Siek Liem tahun 1962.

DAFTAR PUSTAKA

Arief S, *UUPA dan Beberapa Masalah Hukum Agraria di Seluruh Indonesia*.
Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.th.

A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 8: Pemberontakan PKI 1948*. Bandung: Angkasa, 1996.

Badan Penerbit Universitas Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: BP-UJ, 1998.

Benny G. Setiono, *Kehancuran dan Kebangkitan Martabat/ Jati Diri Ethnis Tionghoa di Indonesia*. t.th.

BPP Jember , *Prosiding Seminar Cokelat 1985*.

BPPB Jember, *Simposium Tiga Abad Kopi*. Jember: BPPB Djember.

Central Komite Partai Komunis Indonesia (CC PKI), *Soal Serikat Buruh Reaksioner dan Arbitrasi Pemerintah*. Djakarta: CC PKI, Juli 1952.

CPV Jakarta, *Vraagbaak Voor De Koffie En De Koffiebereiding*. Jakarta: CPV Jakarta, 1954.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Dewan Perantjang Nasional Republik Indonesia, *Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Semeta-Berentjana Delapan Tahun 1961-1969, Pola Pendjelasan Bidang Penelitian Djilid XVII*.

- Didiek H. Goenadi, dkk. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kakao di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pertanian, 2005.
- Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dwi Arlini, "Sengketa Tanah Bekas Erfpacht NV. Landbouw Maatchappij Oud Djember di Sukorejo Jember Tahun 1964-1989". *Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*, 2000.
- Edy Burhan Arifin, *Emas hijau di Jember: Asal Usul, Pertumbuhan dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980*. *Tesis Pascasarjana Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 1989.
- Ella Nila Kesumawati, "Usaha Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Irian Barat Tahun 1962". *Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*, 1985.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1982.
- _____. "*Understanding History: A primer of Historical Method*". terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987.
- Hamid Hasan, dkk, *Buku Materi Pokok Sejarah Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, 1989.
- Hastjarjo Soemardjan dan Rahdi S. Pudjosunaryo, *Problematika Pengelolaan Penelitian Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Perkebunan, 1998.

- Haye, J. H. dkk. *Bestuursvraagstukken*. Batavia: Departemen van Binnenlandsche Zaken.
- Horton, B. Paul dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*. Terj. Aminudin Ram dan Tita Sobari, Jakarta: Erlangga, 1996.
- I.G. Krisnadi, *Sejarah Indonesia Kontemporer*. Jember: Universitas Jember, 2000.
- International Quality Publication, *Perekonomian Indonesia Memasuki Milenium Ketiga*. London: International Quality Publication, 1997.
- Kuntjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Kunhendra Dilitomo, "Peleburan PT. Perkebunan XXVII Jember menjadi PT. Perkebunan Nusaantara X (Persero) Tahun 1996". *Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*, 2004.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 1999.
- Lindblad, J. Thomas. *The Importance Of Indonesianisasi During The Transition From The 1930s To The 1960s*. Leiden: Leiden University, 2002.
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan*. Jakarta: Dephankam, 1971.
- P.C. Suroso, *Perekonomian Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Terj. Drs. Dharmono Hardjonidjono, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1982.
- _____, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Smelser, Neil J. *Sosiologi Ekonomi*. Bahana Aksa, 1987.
- Soegijanto Padmo dan Edhie Djatmiko, *Tembakau: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Soenaryo dan Arief Iswanto, *Tinjauan Tentang Budidaya Tanaman Cokelat di Indonesia*. Jember: Balai Penelitian Perkebunan Jember, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Spillane, James J. *Komoditi Kopi, Peranannya Dalam Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Sunarlan, "Pemikiran dan Usaha Sukarno Menerapkan Nasakom Pada Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia Tahun 1959-1965". *Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*, 1996.
- Susiati, "Masalah Nasionalisasi de Javasche Bank Tahun 1951-1953". *Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*, 1994.

Syaifudin Fatqurochim, *Nasionalisasi PG. Gondangwinangoen di Klaten Tahun 1950-1963. Skripsi S1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 1999.*

Tri Chandra Aprianto, *Petani dan Nasionalisasi; Keikutsertaan Massa Rakyat Tani dalam Proses Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan di Jember. Laporan Akhir Penelitian, Jember, 2004.*

Van Hall, C.J.J. *Insulinde de Inheemsche Landbouw.* Amsterdam, W. van Hoeve. Deventer.

Van Niel, Robert. *Sistem Tanam Paksa di Jawa.* terjemahan Handoyo. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 2003.

Van Schoonneveldt. *Empat Puluh Tahun Kebun Percobaan Kaliwining.* Jember: Bagian Pertanian Dari Stasiun Percobaan Jawa Tengah dan Jawa Timur Dari Cabang BALAI Penelitian Perkebunan Besar di Jember, t.th.

Winarno Surachmad, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Tehnik.* Bandung: Tarsito, 1982.

Zakki Arfani, *Nasionalisasi Perkeretaapian di Bandung Tahun 1950-1963. Skripsi Sastra Unej, Jember, 2000.*

Arsip-Arsip

ALS Vertegenwoordiging Oost-Java, *Ontslagverlening,* Surabaia, 13 Maart 1957.

Besoekisch Proefstation, *Verslag Omtrent de Bestuurswerkzaamheden Over 1911.*

Besoekisch Proefstation Jaar Verslag, 24 Februari 1912.

Bestuur, *Jaarverslag 1912*.

BPPB Djember, *Laporan Tahun 1961-1963*.

BPP C.P.V. L.A.M.O.J, *Rencana Programma Kerja 1959; Kopi*, 1959.

Centrale Commissie ter Beslechting van Arbeidsgeschillen, *Dictum-Beslessing*
No. P4/M/56/4431/P4 – 5062, Djakarta, 24 April 1956.

CPV Bogor, *Afvoer Nederlands Personeel*, 13 Desember 1957.

CPV Djakarta – Kota, *Data jumlah pegawai CPV*, Jakarta – Kota, 6 Desember
1957.

_____, *Reglement (Peraturan)*, t. Th.

CPV Jember, *Bagan Perkembangan Organisasi Balai Penelitian Perkebunan*
Jember tahun 1911-1983.

CPV Jember, *Reglement (Peraturan)*, 1950.

_____, *Beeindiging dienstverband Ir. C.J. Gude*, No. 1264, 5
September 1956.

_____, *Onderwerp: Afvoer Nederlands Personeel*, Bogor, 13
Desember 1957.

_____, *Onderwerp: Perihal Kenaikan Gadji Bulanan biasa*, No. CPV
946.

_____, *Taak Organisatie en financiering tahun 1973-1989*.

_____, *Salarisverhoging, No. CPV 1079/D, 1 Djanuari 1957*.

Data Jumlah Pegawai CPV, Jakarta-Kota, 6 Desember 1957.

De Bussy, L. P. *Verslag Over de Onderzoekingen in Zake het Rupsenvraagstuk Bijde Tabakscultuur op Java. Verricht in Opdracht van de Tabaksmaschappijen ter Sumatra's Oostkust*, 1910.

Financieele Dagblad, Zaterdag, 7 Juli 1956.

Gerke, P.J. *Uittreksel uit het Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*. Buitenzorg, den 4den Mei 1933 (No.2).

Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur No. KP2-72/12/1959, 14 Desember 1959.

Keputusan Dewan Pimpinan BANAS No. K/077/Banas/60, 2Maret 1960.

Loeff, A.H. *Besoekisch Proefstation: Notulen der Algemeene Vergadering Gehouden op Donderdag 4 April 1912 des Morgens ten 10 Ure in het Societeitsgebouw te Djember*.

Mededeelingen van het Besoekisch Proefstation, No. 1, t.th.

Mededeelingen van het Besoekisch Proefstation, No. 5, Oktober 1913.

No. CPV 028, *Societeitsvereniging "Djember"*, 1958.

No. CPV 049.

No. CPV 049-1.

No. CPV 068.2.

No. CPV 119, *Onderwerp: Uang Pesangon/ Djasa.*

No. CPV 160, *Kenaikan Gaji Tahunan Pegawai, 16 Mei 1958.*

No. CPV 912, *Exit-Permits 10 December 1957.*

No. CPV 0241.

No. CPV 0281.

No. CPV 1264, *Beindiging Diensverband Ir. C.J. Gude.*

Ochtman, J.H., *Algemeene Vergadering van het Besoekisch Proefstation, Gehouden op 25 Februari 1920 te 6,5 uur n. m. in het Gebouw van het Besoekisch Proefstation.*

Ontwerp CPV Jember No. CPV 1129, *Kerstvoorschot, 4 Desember 1956.*

Ottolander, Teun. *Besoekisch Proefstation Jaarverslag, Uitgebracht in de Algemeene Vergadering van 24 February 1912.*

Perbandingan Anggaran Gaji Pegawai CPV Jember Tahun 1958, Jakarta-Kota, 6 Desember 1957.

Positieregeling 1949.

Positieregeling Lagerpersoneel Algemeen (C.P.V. maand-endaggers Algemeen, Sarbupri-personeel) 1951-1973.

Positieregeling Lagerpersoneel 1951-1973.

Positie-en Salarisregelling Middelbaarpersoneel 1937-1977.

1. *Positie Salarisregeling Academici*: 2. *Immigratie Documenten, Nationaliteitspapieren, enz* (1951-1971), tanpa halaman.

PP No. 19 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/ Perkebunan Belanda yang dikenakan Nasionalisasi (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara No. 1764).

Reglement (Peraturan) CPV Jember Tahun 1950.

Regelingen en Reglementen, Algemeen 1959-1977.

Surat PBPPB Jakarta Kepada Pimpinan Balai Penyelidikan Perkebunan Besar Jember, Melalui Peperda Surabaya, 21 Maret 1960.

Taak Organisatie en Financiering, Tahun 1973-1989.

Brosur dan Buletin

Bagan Perkembangan Organisasi Balai Penelitian Perkebunan Jember tahun 1911-1983.

Balai Penelitian Perkebunan Besar Jember, *Keterangan Singkat Tentang Balai Penelitian Perkebunan Besar Jember*, Jember: BPPB Jember, 1984.

Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 26, no. 1, Tahun 1990.

CPV Bogor, *General Information of the Research Institute for Estate Crop*, 1969.

CPV Bogor, *Keterangan Singkat tentang Balai Penelitian Perkebunan Tjabang Djember*, 1971.

Keterangan Singkat Tentang balai Penelitian Perkebunan Bogor, tanggal 29 November 1974.

M. Yahmadi, *Memo*, 6 Juni 2007, lembar 2.

Puslit Kopi dan Kakao, *Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Selayang Pandang*.
Jember: Puslit Koka, 1996.

Majalah dan Surat Kabar

De Bergcultures, 25ste Jaargang 1956.

De Bergcultures, 25e Jrg. No. 14 – Djakarta, 16 Juli 1956.

_____, 26e Jrg. No. 19 – Jakarta, 1 Oktober 1957.

Indonesia Media Online, Mid May 2005.

Kompas, 7 April 2004.

Menara Perkebunan, No. 1, Jakarta, Januari 1958.

_____, th. Ke-27 No. 1 – Djakarta, Djanuari 1958.

_____, tahun ke-27 No. 4 – April 1958.

_____, No. 4 – April 1958.

_____, No. 5, Mei 1958.

_____, Tahun ke-28, No. 1 – Januari 1959.

_____, Tahun ke-28 No. 3 – Maret 1959.

_____, No. 4, April 1959.

_____, Tahun ke-29 No. 7 – Djuli 1960.

_____, no. 1, Januari 1961.

_____, Tahun ke-31 No. $\frac{3}{4}$ - Maret/ April 1962.

_____, Tahun ke-31 No. 5/6/7 – Mei/ Juni/ Juli 1962.

_____, Tahun ke-31 No. 8/9 – Agustus/ September 1962.

Pelita Perkebunan, Volume 2 no. 1, April 1986.

Pikiran Rakyat, Kamis 11 Agustus 2005.

_____, Jumat, 1 Juni 2001.

Republika, Senin, 29 September 2003.

Sunday Star, 31 January, 1999.

The Tropical Agriculturist and Magazine of the Ceylon Agricultural Society,
January, 1910.

Februari, 1910.

Juni 1910.

Vol. XXXIV, Januari-Juni 1910.

1910.

February, 1912.

Warta PPN, Tahun 1961.

Makalah

Agus Pakpahan, "*Undang-Undang Perkebunan: Dapatkah Membalik Arus dan Gelombang Sejarah Perkebunan Indonesia*".

Ahmad Sudirman, *Soekarno yang Mencaplok, Megawati Yang Menjerat Irian Barat*. Stockholm: tanpa penerbit, 2003.

AP3I, *Kumpulan Surat-surat Mengenai Pengambilalihan Perkebunan*. Jakarta: AP3I, 1995.

Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia. Bogor, 21 Desember 1987.

Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Sastra UGM, 12 Agustus 1988.

Lev, Daniel. *Ketika Politik Turun ke Jalan, tentang Demokrasi Terpimpin*. tanpa kota: tanpa penerbit, 1996.

Lindblad, J. Thomas. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. terjemahan Nawianto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Permesta Information Online, *Sejarah Singkat Permesta Disusun Secara Kronologis*. tanpa kota: Permesta Information Online, 2001.

Saltford, John. *United Nations Involvement With The Act Of Self-Determination In West Irian (Indonesian West New Guinea) 1968 To 1969*. Papua Barat: Lembaga Rekonsiliasi Hak-Hak Asasi Masyarakat Koteka (LERHAMKOT).

Thee Kian Wie, *Akar-akar Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, 2001.

Tri Chandra Aprianto, *Warisan Kolonial yang Belum (di)selesai(kan): Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan di Jember*, 2001.

LAMPIRAN 1



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Telp. (0331) 339385 Fax. (0331) 337818 Jember 68121
E-mail : lemlit_unej@jember.telkom.net.id

Nomor : **273** /J25.3.1/PL.5/2006 15 Maret 2005
2006
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin melaksanakan Penelitian

Kepada : Yth. Sdr. Pemimpin
Kantor Puslit Kopi Dan Kakao
Jenggawah - Jember
di -
JEMBER.

Memperhatikan surat pengantar dari Fakultas Sastra Universitas Jember No. 414/J25.1.6/PP.9/2006 tanggal 14 Maret 2006, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : UJANG RUMANTO / 01 - 1083
Fakultas/Jurusan : Sastra / Ilmu Sejarah
Alamat : Jl. Bangka V Masjid Al-Ikhlas Jember
Judul Penelitian : Sejarah Pusat Penelitian (Puslit) Kopi Dan Kakao Jember Tahun 1994 – 1999.
Lokasi : Kantor Puslit Kopi Dan Kakao Jenggawah, Jember
Lama Penelitian : 6 (enam) bulan

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

Ketua,

Prof. Drs. Kusoo, DEA., Ph.D.
NIP. 131 592 357

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip.

LAMPIRAN 3

Tabel Penyebaran Penanaman Komoditi Pertanian Ekspor Hindia Belanda dan Dunia tahun Tahun 1817-1915.

No	Komoditi	Negara/ Distrik/ Afdeeling	
		Hindia Belanda	Dunia
1	Tembakau	Magelang, Kedu, Semarang, Wonosobo, Batoer, Karang Kobar, Weleri, Kendal, Banyumas, Deli (Medan), Temanggung, Kuningan, Bojonegoro, Blitar Lumajang, Bondowoso, Madura, <i>Vorstenlanden of Besoeki</i> , Bali (<i>Onderafdeeling Buleleng</i>), Lombok, Pantai Barat Sumatera (<i>Sumatera's Westkust</i>) di <i>Pajakoembo</i> dan <i>Sawah Lunto</i> , Sulawesi Selatan (Distrik Oelawang dan Amali) dan Palembang (daerah Ranau).	India dan Amerika Utara yaitu Virginia (<i>Virginia Tobacco</i>)
2	Teh	Priangan (<i>Preanger Regenschap</i>), Tjitjoeroeg (1880), <i>Soekaboemische Lanbouw Vereeniging</i> , Tjibadak (<i>Vereeniging Mitra noe Tani</i> dan <i>Madoe Tawoen</i> tahun 1915), Pengalengan, Garut, Cianjur dan Sumatera (Sinagar dan Parakan Salak tahun 1875)	China (sejak 1826), Kolonial Inggris di <i>Britisch-Indie</i> (Assam-India) dan Ceylon (Srilanka).
3	Karet	Malakka, Bogor, Kalimantan Tenggara (<i>Afdeeling Barabai, Wester dan Oeloe Soengei</i> tahun 1905), Kampong Pagat, Pontianak, Sambas, Kapuas (Suku Dayak), Serapat, Klampan-Kanaal, Afdeeling Kandangan, Amuntai, Tandjoeng, Martapura,	Brazil (<i>Hevea Brasiliensis</i>) (Amazone-dal), Ceylon dan

		Bandjar, Riau (Indragiri), Tapanuli, Bangka, Jambi, Palembang (Kommering, Ogan, Lematang, Muara Enim), Bengkalis, Asahan, Pekanbaru (Tapoeng kanan dan Tapoeng kiri) dan Minangkabau.	Singapura.
4	Gula	Malang, Jombang Selatan, Kediri (<i>Afdeeling Tulung Agung</i>), Karesidenan Madiun dan Japara-Rembang.	-
5	Kopra	Minangkabau, Kalimantan Barat, sepanjang pantai Sulawesi, (terbesar penanamannya), Maluku (Ternate, Halmahera, Buru, Seram), Kepulauan Riau (<i>Afdeeling Poelau Toedjoeh</i>), Sumatera, Bali, Lombok, Nieuwe Guinea, Minahasa, Menado, Tondano, Serawak, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Sulawesi Utara, Lampung (<i>Afdeeling Sepoetih</i> , Sekampoeng dan Teloek Betong), Billiton, Madura dan Aceh.	Philipina dan Ceylon.
6	Kopi	Palembang, Benkoeloen, pantai barat Sumatera, Distrik Lampung, Cirebon, Pekalongan, Jacatra, Priangan, Lereng gunung Merapi, Malang (pusat kopi Hindia Belanda), Lereng gunung Semeru, Tengger dan Kawi, Madiun, Semarang, <i>Padangsche Bovenlanden</i> , Tapanuli (Mandheling),	India, Afrika, Ceylon, Liberia (1880) dan Kongo (jajahan Belgia.)

		<p>Korintji (Kerinci), Tapanuli Selatan, Padang Sidempoen, Muara Sipongi, <i>Karo en Toba Hoogvlakten</i> (dataran tinggi Karo dan Toba), <i>Dairi-landen</i>, Aceh, Koekoesan, Seminoeng, Sulawesi Selatan (<i>Piek van Bonthain</i>), Sulawesi tengah (Tanah Toraja), Bali, Timor, Flores, <i>Onder-afdeeling Pager</i> Palembang, Lereng gunung Dempo Palembang, Dataran Pasemah, daerah Ranau (<i>Ranau-gebied</i>), Bukit Barisan (<i>Barisan-gebergte</i>) di Karesidenan Benkoelen, lereng gunung Merapi di Loemboek Sikaping dan Moearah Laboeh.</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber: C.J.J. van Hall, *Insulinde den Inheemsche Lanbouw*, (Amsterdam: W. Van Hoeve. Deventer).

LAMPIRAN 4

BESTUUR (*)
 VAN DE VEREENIGING
BESOEKISCH PROEFSTATION
 TE
DJEMBER.

Opgericht 10 December 1910.

D. BIRNIE		<i>Voorzitter.</i>
T. OTTOLANDER		<i>Tweede Voorzitter.</i>
A. H. LOEFF		<i>Secretaris-Thesaurier.</i>
E. DU BOIS	}	<i>Commissarissen.</i>
A. H. CLIGNETT		
J. W. FOLKERSMA		
J. KROESE		
G. G. SCHRIEKE		

Directeur: DR. A. J. ULTÉE.

Botanicus: DR. ANDREAS SPRECHER

(*) Na terugkeer uit Europa is de Heer D. Birnie tot voorzitter gekozen, terwijl op de algemeene vergadering van 4 April 1912 het aantal bestuursleden op acht werd gebracht.

BESOEKISCH PROEFSTATION.

JAARVERSLAG. ¹⁾

Mijne Heeren.

Ingevolge artikel 8 der statuten, voorschrijvende dat de Voorzitter van het Besoekisch Proefstation ieder jaar uiterlijk in de maand Maart in een algemeene vergadering van leden verslag uitbrengt van de handelingen der vereeniging gedurende het afgelopen jaar, heb ik het genoegen het volgende aan uwe aandacht te onderwerpen.

I. Oprichting.

Op de algemeene vergadering van de Vereeniging ter bevordering van Landbouw en Nijverheid gehouden 10 December 1910 werd besloten tot de oprichting der vereeniging „Besoekisch Proefstation.”

De notulen dezer vergadering zijn te vinden in Publicaties van het Nederlandsch Indisch Landbouw Syndicaat, aflevering III, 4de jaargang, welke notulen aan u allen zijn toegezonden. Het is u daardoor bekend dat, nadat de Directeur van Landbouw, de heer H. J. Lovink de proefstation-kwestie, speciaal de samenwerking tusschen het Departement van Landbouw en de particuliere proefstations had duidelijk gemaakt, de vereeniging: „het Besoekisch Proefstation” werd opgericht en de Statuten werden vastgesteld. Als leden hebben zich toen opgegeven de volgende ondernemingen:

¹⁾ Uitgebracht in de Algemeene Vergadering van 24 Februari 1912.

baksonderningen.	Postadres.		
Amsterdam-Besoeki Tabakmaatschappij.	Djember	33 Kendeng-Lemboe	Banjoewangi
Besoeki Tabakmaatschappij	Kalisat	34 Lidjen	"
Cultuurmaatschappij Boender-Sentoeng	Bondowoso	35 Menoewoen Moekti	"
" Djelboek	Djember	36 Moemboel	Djember
Landbouwmaatschappij Oud-Djember	"	37 Pagoendangan	Banjoewangi
" Soekokerto-Adjoeng	Kalisat	38 Pantjoer en Angkrek	Pradjekan
" Soekowono	Soekowono	39 Pasewaran	Banjoewangi
Tabaksonderneming Soember Sarie	Bondowoso	40 Petoeng Redjo	Tangoel
		41 Sentoel	Djember
		42 Silosanen	Kalisat
		43 Soeko Koelon	Tangoel
ondernemen voor bergcultures.		44 Soember Ajoe	"
Aengsono	Djatirotto	45 " Tenggoelon	"
Amsterdam	Tangoel	46 " Wadoeng	Kalisat
Anim-Sand I-IV	Kali-baroe	47 Taman Gtoegah	Banjoewangi
Bajoe Kidoel	Banjoewangi	48 " Sarie	"
" Lor	"	49 Tjorah Mas	Kalisat
Bandjarsarie	Djember	50 Trebla Sala	Banjoewangi
Bendo	Banjoewangi	51 Widodaren	Djember
Blawan	Pradjekan	52 Wonodjati	"
Dampar	Djember		
Doerdjo	"		
Garahan Kidoel	Mrawan		
Gereng Redjo	Petoeng		
Goenoeng Majang	Djember		
Gondang	Tangoel		
Kajoemaas	Sitobondo		
Kali Baroe	Kali Baroe		
" Doeren I	Djatirotto		
" " II	Djatirotto		
" Klattak	Banjoewangi		
" Mrawan	Kalisat		
" Sat	Pradjekan		
" Selogiri	Banjoewangi		
" Telepak	"		
Kedaton	Djember		

Enkele andere der aanwezige administrateurs achten het gewenscht kunne directie te raadplegen alvorens als lid toe te treden. In het begin van het jaar 1912 gaven zich reeds enkele nieuwe ondernemingen op, zoodat de hoop gekoesterd mag worden dat weldra nagenoeg alle ondernemingen in de Residentie Besoek zich hebben aangesloten.

2. Bestuur.

Op deze zeldige vergadering werd het bestuur benoemd bestaande uit de hh. D. Birnie, C. A. Koning en A. H. Loef gekozen door de leden, die de tabakscultuur beoefenen, en de hh. E. du Bois, G. G. Schrieke en T. Ottolander, gekoze

Kali Kempit	Kempit
Sawee Djadjar	Banjoewangi
Kali Badjing	Djember

Handwritten note: De heer van der ...

Handwritten note: Het is te betreuren dat de ...

door de leden die de bergcultures drijven. Op eene bestuursvergadering gehouden 25 Mei 1911 werd overeenkomstig artikel 4 onzer statuten tot voorzitter gekozen de hr. T. Ottolander, tot ondervoorzitter de hr. D. Birnie, tot secretaris-thesaurier de hr. A. H. Loeff en tot commissarissen de hh. E. du Bois, C. A. Koning en G. G. Schrieke.

Technisch personeel.

Het eerste werk dat aan de orde kwam na oprichting van het Proefstation was de benoeming van het technisch personeel. Bij particulier schrijven aan ondergeteekende van Dr. Zehntner, gedateerd Bahia 5 September 1910, was in uitzicht gesteld dat indien de reorganisatie van het proefstation-wezen in Ned. Indië doorging op de wijze zooals aan hem door mij was geschreven, hij nog gaarne eenige jaren op Java zou willen werkzaam zijn.

Met den directeur van Landbouw had ik daarna deze zaak besproken; de hr. Lovink had zich daarop bereid verklaard Dr. Zehntner voor het Besoekisch Proefstation te engageeren en mocht hij niet gelukkig aan dat station kunnen werkzaam zijn hem zoo lang een tijdelijke betrekking aan het Departement te willen waarborgen. Dd. 14 Maart j.l. ontvingen wij van den Directeur bericht dat Dr. Zehntner voorloopig nog geen beslissing kon nemen en werd ons in overweging gegeven een tijdelijke regeling te treffen opdat met de inrichting aan het Proefstation een aanvang kon worden gemaakt.

Deze regeling bestond in het aanstellen van Dr. A. J. Ullée als zelfstandig scheikundige.

In het laatst van April bezocht ik Salatiga met de bedoeling hr. Ullée te polsen over de betrekking te Djember en tevens a te gaan wat van de inventaris van het algemeen Proefstation van Salatiga voor ons proefstation te gebruiken was zou kunnen worden overgenomen.

Na het gehouden gesprek met Dr. Ullée werd mondeling verleg gepieegd met den Directeur van Landbouw, welk

Rapport 29 Feb. 1912 110 Dec 710 - 610-8P

2 25 Mei 1911
3 9 April 1912

overleg tegelijkertijd schriftelijk werd vastgelegd. Het resultaat daarvan was dat op onze bestuursvergadering dd. 2 Mei Dr. Ullée definitief benoemd werd als zelfstandig scheikundige, terwijl ons bestuur vrij bleef hem later af of niet te (directeur) te benoemen. Dit laatste voorbehoud was noodig zoolang van Dr. Zehntner geen definitief bericht was ontvangen. Ook was in dien tijd eenig uitzicht dat Dr. P. C. Cramer's Lands dienst zou verlaten en wellicht genegen zou zijn aan ons Proefstation te worden verbonden.

Daar ook naar het oordeel van Dr. Ullée zoolwel Dr. Zehntner als Dr. Cramer voor het directeurschap oudere rechten konden doen gelden, en bovendien de betrekking van scheikundige als een geheel zelfstandige werkring was ingesteld natuurlijk met overlegging met het andere technische personeel in zoover gecombineerd onderzoek betrof, kon Dr. Ullée zich geheel met den gang van zaken vereenigen.

Door den Directeur van Landbouw werd nadat van Dr. Zehntner geen bericht meer kwam en Dr. Cramer besloten had vooreerst te Suriname te blijven de botanist Dr. Jeswiet aangezocht in onzen dienst te komen. Dr. Jeswiet nam de betrekking aan maar nadat hem door het suikerproefstation betere voorwaarden waren aangeboden, kregen wij bericht dat hij van een plaatsing te Djember afzag.

Er is daarop door den Directeur van Landbouw geseind naar Dr. Bernard, directeur van het Theeproefstation te Buitenzorg (met verlof in Genève) om een selectie-botanist voor ons te engageeren; waarbij tevens de belofte werd gedaan Dr. van der Wolk, die in Mei 1912 te Buitenzorg zou arriveeren naar Djember te detachieren, indien Dr. Bernard niet spoedig in zijn opdracht slaagt. Intusschen is bericht ontvangen, dat Dr. Andreas Sprecher aan ons proefstation werd verbonden en Juni 1912 te Djember zal arriveeren.

*) In de vergadering van 4 April 1912 werd aan de leden medegedeeld, dat Dr. A. J. Ullée, conform het voorstel van den Directeur van Landbouw, door het bestuur tot Directeur werd benoemd.

[Handwritten notes and signatures in various colors (blue, red, black) are scattered throughout the page, often overlapping the printed text. Some legible notes include: 'Rapport 29 Feb. 1912', '2 25 Mei 1911', '3 9 April 1912', and 'In de vergadering van 4 April 1912...']

Op dit oogenblik is dus nog alleen Dr. Ullée aan ons proefstation verbonden. Ingevolge de bij de benoeming gedane afspraak is deze heer eerst met 1 Januari j. l. in dienst getreden, zoodat van zijn werkzaamheden over dit verslagjaar niets valt te vermelden. Slechts kan bericht worden dat Dr. Ullée zijn kortstondig verblijf in Nederland benut heeft om zich zooveel mogelijk op de hoogte te stellen van de vraagstukken, die hem aan ons proefstation zullen worden voorgelegd.

Binnenkort zal echter de heer Ullée geassisteerd worden door een botanist, terwijl het uitzicht bestaat, dat in dien zelfden tijd ook een landbouwkundige, hetzij in vasten dienst, hetzij van wege het Departement gedetacheerd, aan ons station zal worden verbonden.

bouwen en inventaris.

Behalve de aanstelling van het technisch personeel was een voornaamste zorg van het bestuur de aanbouw van het laboratorium-gebouw. Met de hr. Dr. Ullée en van Hall werd door den voorzitter gecombineerd en een ideaal plan voor Djember ontworpen. Dit plan werd door bemiddeling van den Directeur van Landbouw aan den architect te Buitenzorg, de hr. du Bois ter uitwerking gegeven.

De maatschappij Oud-Djember heeft de belangstelling voor ons Proefstation zoo ver getrokken dat zij dat gebouw op een in de onmiddellijke nabijheid van de kota Djember aan haar toebehoorende stuk grond, voor eigen rekening zal bouwen en aan het Proefstation tegen een matige prijs zal verhuren.

Ook de Directeurswoning die naast het laboratorium-gebouw zal worden opgezet zal op die wijze voor ons worden gebouwd.

Tevens zal deze maatschappij ter onzer beschikking stellen eenige naast het terrein liggende gronden om als proeftuin te dienen voor eventuele cultuur proefnemingen, die in de onmiddellijke nabijheid van het station moeten plaats hebben.

Ik acht dat aan de Mij. Oud-Djember onze hartelijke toekomst voor deze buitengewoon groote hulp.

Van de inventaris van het algemeene Proefstation werd een bedrag van f 6992.10 overgenomen, terwijl op de ven van de vezel-tentoonstelling nog eenige instrumenten we gekocht, o. a. microscoop met toebehooren, trekmac microtoom etc. ten bedrage van f 960.—
De hadere uitbreiding van de inventaris zal naar g van behoefte geschieden.

Proeftuin.

Een voor proeftuin zeer geschikt stuk grond werd geden in een ten Zuid-Westen van de kota Djember ligt boschreserve. Het plan is van deze boschreserve 50 in bruikleen aan te vragen, zoodra onze vereeniging r persoonlijkheid heeft verkregen.

Statuten.

Op de in de vergadering van 10 December 1910 a nomen statuten is de goedkeuring van de Ned. Ind. reg gevraagd, maar is deze nog niet verkregen.)

Werkplan.

Op een vergadering van de bestuursleden door de be tures aangewezen werd een werkplan ten-behoev de bergcultures ontworpen en gepubliceerd in de catio van het N. I. Landbouw-Syndicaat No. IX, jaargang.

Dit werkplan is bedoeld als algemeen plan, terwijl de naaste toekomst zal moeten gedaan worden nog worden vastgesteld in overleg met het technisch pei en met den directeur van Landbouw.

) Bij het ter perse gaan van dit verslag werd bericht ontvangen, dat de gae is verleend.

10 samenwerking met het Departement en de particuliere proefstations.

Onnoodig is het te zeggen dat deze samenwerking een zeer loeftreffende is en in alle opzichten aan het doel beantwoord. betreffende de uitgave der publicaties der proefstations is loor Dr. van Hall een regeling ontworpen die deze samenwerking zeer in de hand zal werken. Van alles wat de proefstations en de afdelingen van het Departement publiceeren worden over en weer de mededeelingen, naar gelang het aantal door de diverse instellingen benodigd, gewisseld. Op die wijze krijgen alle leden van ons proefstation kennis van alles wat de andere proefstations en de afdelingen van het Departement onderzoeken.

Tot nu toe krijgt ons proefstation voorkennis van hetgeen door het Malangsche proefstation en het proefstation Midden-Java in speciaal onderzoek wordt genomen, en werden wij geraadpleegd in de selectie-kwestie bij cacao en koffie.

Het plan bestaat dat in den loop van 1912, zoodra bij ons proefstation het technisch personeel aanwezig is, en de andere proefstations zooda de twee proefstations voor tabak in de Vorstenlanden en het theeproefstation in de Preanger, in deze samenwerking nader zijn betrokken, eene vergadering van het technisch personeel der proefstations en der Departements-afdeelingen bij een te roepen, opdat dit personeel met elkaar in nauwere connectie zal komen en de wetenschappelijke vraagstukken in betrekking tot onze cultures kunnen bespreken.

Een algemeene vergadering der besturen der proefstations is ook in overweging opdat ook deze besturen in goede connectie met elkaar zullen komen, en de verschillende vraagstukken die er zich voordoen gezamenlijk kunnen regelen en het vele werk onderling naar kracht en behoefte kunnen verdeelen.

Uit den aard der zaak heeft ons proefstation nog niet in deze zaken kunnen optreden als wel gewenscht was omdat in 1911 ons alle technisch personeel ontbrak. Alleen mochten wij iets bijdragen betreffende de organisatie van sommige

11 zaken en door diverse besprekingen de geest van samenwerking bevorderen.

Meteorologische waarnemingen.

Door Dr. Utlée is bij zijne komst te Batavia met directeur en met den onderdirecteur van het Meteorologisch Observatorium overleg gepleegd over de wijze waartoe Djember de waarnemingen zullen geschieden.

Reeds arriveerden de benodigde instrumenten met instr. terwijl eene uitvoerige handleiding werd toegezonden. Z met de opstelling der apparaten is begonnen. Een ge. terrein, in de onmiddellijke nabijheid van het te be. laboratorium, werd door Dr. van Bemmelen tijdens verblijf te Djember in overleg met den heer Folk uitgezocht.

Bovendien zijn er door Dr. van Bemmelen secundaire s uitgezocht, een op het Iden-plateau, twee op de no. helling en twee op de zuidwesthelling van het Raoten gebergte, benevens twee regenstations in de hoogere streken van dit gebergte. Later zal omtrent deze s de deeling waarmede zij gesticht worden en de in verschillende zijden daarop aan het proefstation ten i van de meteorologische kennis van onze residentie b uitvoering worden bericht.

Departement van Landbouw.

Ten slotte volgde hier nog een woord van dank steun en hulp die ons proefstation van het Departement Landbouw mocht verkrijgen. In het bijzonder de Dire heer Lovink, en de chef van de phytopathologische Dr. C. J. J. van Hall stonden ons bij met raad en d is niet het minst aan hunne bemoeienis te danken langzamerhand de moeilijkheden waarmede alle be heeft te worstelen te boven komen.

T. OTTOLANI

Sumber: *Besoekisch Proefstation Verslag Omtrent de Bestuurswerkzaamheden Over 1911.*

LAMPIRAN 5

" BESOEKISCH PROEFSTATION "

NOTULEN
ULEN DER ALGEMEENE VERGADERING GEHOUDEN OP DONNERDAG 4 APRIL 1912
 DES MORGENS TEN 10 URE IN HET SOCIETEITSGEBOUW TE DJEMBER.

Anwezig zyn de leden: T.Ottolander, A.H.Glignett, D.de Ruyter, E.van Vol-
 lenhoven, J.C.van der Palm, A.Horsting, F.Rambonnet, G.J.C.Wynmalen, D.Groin,
 D.Birnie en A.H.Loeff, en de Heeren J.W.Folkersma en Dr.A.J.Ultée.

OPMERKINGEN TER BEHANDELING:

1. Statuten-wyziging
2. Benoeming bestuursleden.

De Voorzitter opent de vergadering en zegt, dat zocals den Heeren bekend
 op 10 December 1910 in een op dezelfde plaats gehouden byeenkomst be-
 sloten werd tot oprichting van het " Besoekisch Proefstation ", dat toen
 statuten zyn vastgesteld, waarop de goedkeuring der Regeering is gevraagd.
 Die goedkeuring kon door de Regeering nog niet worden verleend, en werd
 die afhankelyk gesteld van eenige noodig aan te brengen wyzigingen.
 Alsnu constateert de Voorzitter, dat voor de byeenroeping dezer
 op heden te houden vergadering voldaan is aan het bepaalde by artikel 14
 der statuten, waar staat: " Tot wyziging dezer statuten kan alleen worden
 overgegaan, wanneer de voorstellen daartoe tenminste dertig dagen te voren
 aangekondigd en kan dus in deze wettige besluiten nemen.
 De op de oorspronkelyke statuten door de Regeering gemaakte aan-
 merkingen zyn de volgende:

1. Wordt gevraagd wat onder het ressort der vereeniging wordt verstaan.
2. Hoe het lidmaatschap der Vereeniging wordt verkregen.
3. Wordt eenige aanvulling gevraagd van de bepaling omtrent het stemrecht.

Verder heeft het Bestuur naar aanleiding van gehouden besprekingen
 en overzinking der statuten het noodig geoordeeld een voorstel aan de Al-
 gemeene Vergadering te doen, om het oorspronkelyk aantal bestuursleden van

der = het = is

2

zes uit te breiden tot hoogstens negen. De bedoeling hiervan is, leden te benoemen, die in de nabijheid van Djember wonen en makkelijk in dringende gevallen ter vergadering kunnen komen, teneinde in spoedeisende gevallen even een Bestuursvergadering te kunnen houden en eene beslissing te nemen. Alle aanwezigen verklaren zich met dit voorstel te kunnen verenigen.

Aan de bezwaren der Regeering sub 1 en 2 kan worden tegemoet gekomen door het tweede lid van artikel 2 te wyzigen als volgt:

* Leden kunnen alleen zijn eigenaren van landbouwondernemingen, gelegen in de residentie Besoeki en de afdeling Loemadjang. Ieder die lid der vereeniging wenscht te worden, geeft aan het bestuur der vereeniging op zijn naam, de ondernemingen waarvoor hy zich wil aansluiten, de uitgestrektheid van den aanplant van iedere onderneming en verdere bijzonderheden, welke noodig zijn voor de bepaling der contributie.

Het bestuur der vereeniging beslist over de toelating van een lid. Personen en instellingen enz:

In verband met het bestuursvoorstel tot uitbreiding van het aantal bestuursleden ware artikel 3 te wyzigen als volgt:

* De Vereeniging wordt bestuurd door het Bestuur, bestaande uit een maximum van 9 personen, waarvan er 3 door de leden der Vereeniging, die tabaksondernemingen en 3 door de leden, die ondernemingen voor bergcultures exploiteeren, gekozen worden, terwyl door de Algemeene Vergadering verdere bestuursleden tot bovengenoemd maximum op voorstel van het bestuur kunnen worden toegevoegd.

Zy treden periodiek af, met dien verstande, dat elk jaar (voor het eerst op de Algemeene Vergadering in 1913, bedoeld in Artikel 8) twee leden aftreden, zulks volgens een door het Bestuur op te maken rooster.

Het 3^e bezwaar der Regeering geldt het stemrecht. Zooals de statuten oorspronkelijk luiden, zouden leden die het minimum van F 100.- betalen geen stemrecht hebben, wat natuurlijk de bedoeling niet is geweest.

Deze fout kan verholpen worden door in de laatste alinea van artikel 10 de woorden meer dan te laten vervallen, zoodat het artikel dan zal luiden:

" Het stemrecht op algemeene vergaderingen van leden wordt als volgt uitgeoefend: leden die F 100.- dooch minder dan F 250.01 aan contributie betalen brengen één stem uit; leden die meer contributie betalen brengen voor ieder vol bedrag van F 250.- één stem meer uit.

De als boven voorgestelde wyzigingen van de artikelen twee, drie en tien worden, na artikel voor artikel besproken te zyn, met algemeene stemmen goedgekeurd en aangenomen.

De Voorzitter zegt daarna, dat de vergadering van 10 December 1910 gedacht had goedkeuring op de statuten te zullen krygen, dat zulks niet was geschied, en wyst op de mogelykheid, dat waar in deze vergadering de statuten-wyzigingen zyn goedgekeurd, de Regeering mogelyk nog één of meer bezwaren zal hebben. Het is daarom, dat hy aan de leden voorstelt den Voorzitter en den Secretaris, zoo te zamen als ieder afzonderlyk te machtigen om op deze gewyzigde statuten van het " BESOEKISCH PROEFSTATION " de goedkeuring der Regeering aan te vragen, en daarin zoo noodig die wyzigingen aan te brengen, als waarvan de goedkeuring der Nederlandsch-Indisch Regeering afhankelijk wordt gesteld.

Op de desbetreffende vraag van den Voorzitter verklaart niemand bezwaar te hebben tegen de Statuten, zoodals zy nu zyn, en wordt met algemeene stemmen de machtiging verleend aan den Voorzitter en den Secretaris om zoo te zamen als ieder afzonderlyk de goedkeuring der Regeering hierop aan te vragen.

De Voorzitter deelt nu mede, dat het Bestuur dadelijk gebruik wenscht te maken van de ~~zoo~~ verleende bevoegdheid tot uitbreiding van het aantal bestuursleden en stelt aan de Algemeene Vergadering voor thans twee leden aan het bestuur toe te voegen, n.l. één uit de leden, die tabaksondernemingen, en één uit de leden, die ondernemingen voor bergcultures

de statuten dieser vergadering op te maken in te maken

als = 54, april, sept, oct.

exploiteeren. Voor de tabak stelt het bestuur voor den Heer J.W. Folkersma
 te benoemen en voor de bergcultures den Heer J. Kroese, administrateur van
 Goenoeng-Majang. De Heer Folkersma verklaart deze benoeming te aanvaarden.
 Mocht de Heer Kroese, die afwezig is, bedanken, dan verzoekt het bestuur den
 Heer D. de Ruyter te benoemen, die in dat geval verklaart, bereid te zijn als
 bestuurslid op te treden.
 Verder wordt den leden bekend gemaakt, dat van den Directeur van
 Landbouw, Nijverheid en Handel bericht is ontvangen dat de Heer Dr. Andrea
 Sprecher te Zürich de betrekking van selectiebotanist by het Besoekisch
 Proefstation heeft aangenomen en 2 Mei a.s. met de Duitse mail naar Indië
 vertrekt.
 Eveneens dat de Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel aan het
 Bestuur in overweging had gegeven tot Directeur van het Besoekisch Proef-
 station te benoemen den Heer Dr. A.J. Ultée, thans reeds tydelijk die functie
 bekleedende, en dat het Bestuur zich geheel met die voordracht kon vereenigen
 zoodat Dr. A.J. Ultée definitief als Directeur optreedt.
 De Directeur leest alvorens die rond te zenden eenige circulaires
 voor, waarvan de eerste betrekking heeft op het chemisch laboratorium.
 Na voorlezing van de notulen der op 24 Februari 1912 gehouden Alge-
 meene Vergadering, die met algemeene stemmen worden goedgekeurd, sluit de
 Voorzitter de vergadering.

BESOEKISCH PROEFSTATION
 de Secretaris: Th. Sautter,



rond = terdita luti, Germanaan.

Sumber: *Besoekisch Proefstation Jaarverslag 1912.*

Lampiran 6
Laporan Tahunan *Besoekisch Proefstation* Tahun 1913

Algemeene Vergadering
VAN HET
BESOEKISCH PROEFSTATION
op 21 Februari 1913
TE
D J E M B E R.

Verdient te worden voor de vergadering van 21 Februari 1913. De voorzitter, de secretaris, de leden van de vergadering, de leden van de commissie van onderzoek, de leden van de commissie van landbouwkunde, de leden van de commissie van bergcultures, de leden van de commissie van landbouwsubsidie, de leden van de commissie van algemeen mededeelingen.

Planten van behandeling:
Rekening en verantwoording 1912.
Jaarverslag 1912.
Verkiezing van twee leden in het Bestuur, wegens periodieke aftreding van de Heeren D. Birnie en E. du Bois (aftrappende Bestuursleden zijn ter stand herkiefsbaar).
Werkplan 1913. (Tabak en bergcultures).
Aanstelling van een Landbouwkundige.
Vermeerdering inkomsten der afdeling Bergcultures.
Aanleg Prachtuin.
Aanvraag Regerings-subsidie.
Algemeene mededeelingen.

Aanwezig zijn:
Van het Bestuur de Heeren:
T. Ottolander, tweede Voorzitter,
A. H. Looff, Secretaris-thesaurier,
A. H. Clignett en J. W. Folkeisina, commissarissen.
Van de leden de Heeren:
J. H. Bétrus, J. H. Bijbau, J. H. A. Croin, Degens, C. Fiet, J. Nikkels,
C. J. v. d. Palm, van Thiel, M. J. Stubbe en E. van Vollenhoven.
Verder werd de vergadering bijgewoond door den Directeur van Landbouww. den heer H. J. Lovink, den Directeur van het Proefstation Dr. A. J. Ultee en de heeren J. W. Birnie, A. de Koning en S. Lamminga.

Door afwezigheid van den Heer D. Birnie, opent de Tweede voorzitter, de Heer T. Onthinder de vergadering, gehouden ter voldoening van art. 8 en 9 der Statuten, en heet allen welkom. In het bijzonder den Directeur van Landbouw, den Heer Lovink en den Heer de Koning, hoofd van de Cultuurschool te Buitenzorg.

Rekening en Verantwoording 1912.

De rekening en verantwoording wordt voorgelezen, waarna de voorzitter de heeren Croin, Bijhan en van Vollenhoven verzoekt, deze te willen nazien. Nadat de heeren aan dit verzoek voldaan hebben en de rekening in orde verklaren, wordt deze door de vergadering goedgekeurd en het Bestuur acquit en décharge verleend voor het gevoerde beheer.

Jaarverslag.

Daarna wordt het jaarverslag van het Bestuur voorgelezen, hetwelk in de Bijlage is opgenomen.

Naar aanleiding van het medegedeelde omtrent den proeftuin voor de bergcultures, belooft de Directeur van Landbouw te zullen onderzoeken, hoe het met de aangevraagde gronden te Nogosarite staat en de afdoening te bespoedigen.

Verder vraagt de heer Bijhan inlichtingen over de zaakverstrekking, waarop de voorzitter antwoordt, dat deze zoo royaal mogelijk zal geschieden en later nog definitief geregeld zal worden.

Verkiezing van twee leden in het Bestuur.

Aan de beurt van aftrading zijn de heeren Birnie en du Bois, die dadelijk herkiezbaar zijn.

De voorzitter stelt voor deze heeren opnieuw te benoemen, waarmede de leden gáarne accoord gaan.

Werkplan 1913.

Dit is in de te voren gehouden Bestuursvergadering uitvoerig behandeld en staat in nauw verband met dat van 1912. Het is als het ware een voortzetting daarvan.

- 1) Voortzetting Selectieproeven.
- 2) Invoer van nieuwe Zaadsorten.
- 3) Voortzetting Bemestingsproeven.
- 4) Grondonderzoek en Grondbewerkingsproeven.
- 5) Aanplant van boomsoorten, die evtl. dan sadeng kunnen vervangen als bouwmateeriaal voor schuren.

Voor de bergcultures is het werkplan eveneens een voortzetting dat 1912, dat destijds aan de leden in druk toegesonden is. Natuur het personeel steeds bereid over niet vernamde onderzoeken van te dienen en monstern of zekten en pagen te onderzoeken. O werkplan is het Bestuur nog niet in overleg getreden met den Directeur van Landbouw, zooals de Statuten dit voorschrijven.

Aanstelling Landbouwkundige.

Door bijzondere omstandigheden staat dit punt in verband met voorgaand. *Vermeerdering van taken van der afdoening Bergcultures.* Bij den voorspoken opzet van ons proeftuin was gedacht het personeel zou bestaan uit een chemicus en een botanicus, die zakeijlke bijzake krachten aan de tabakscultuur zouden wijliden ten landbouwkundige voor de bergcultures zou worden aangesteld. Steeds bij deze regeling zouden de inkomsten der bergcultuur geen acht duzend gulden) eenigszins toereikend zijn.

Personeel om een landbouwkundige te vinden zijn van den af door den Directeur van Landbouw en het Bestuur aangevraagd zonder resultaat. Eenigen tijd geleden heeft men gestaan te zijn alszins geschikt personeel in den heer Sensius gevonden, die hadde door een nog niet geheel opgeschiederd missersland werd deze niet toegewezen.

Nu is echter in het aangevraagd verslagjaar duidelijk gebleven bergcultures zélf vragen stellen, die door een landbouwkundige bij kunnen worden beantwoord. Hetzelfde dalkamen tóch verzoeken betrekking hebbende op vraagstukken van chemischen en phytologischen aard.

Daarvoor zou ook als een landbouwkundige gevonden werd van directeur en botaniciers veel zandheid gevraagd worden, wat geringe inkomsten der bergcultures ten koste van de tabakscultuur geschieden.

In overleg met het proefstatiepersoneel sield, daarom het best een phytopatholoog in plaats van een landbouwkundige te eng die dan bijgestaan door den directeur vooral voor de Berg werkgán zou zijn.

Om deze duurdere krachten te kunnen betalen is het echter noodig, dat de primiers der Bergcultures meer bijdragen, en vooral collega's in, Midden-Java, Malang en Kediri 50 cent per heplan contributeeren.

Dan zullen de bergcultures in Besoeki en Loerjadiang nimm biesen trekken en zullen dan ook meer stem in het kapittel hebbe De voorzitter vraagt nu aan de aanwezige leden of er bezwa de bijdragen voor 1914 in dien geest te verhooren volgen de

[Handwritten notes and signatures in Dutch, including names like Birnie, du Bois, and dates like 1912, 1913, 1914, 1915.]

4
 attractie op deze basis voor die jaren dus voor 1914-1915 en 1916. Heer van Thiel is, er voor onder andere goedkeuring van zijne directie. Heer van Voltenhoven gaf er mede 'accoord' de Heer Sibbe zal het directie voorstellen, de Heeren Behrus, Fillet, Degens, Bijbaou, Nikkels van der Palm zijn er voor terwijl de Heer Folkersma ook voor. Danpar en takan de 'toezegging' doet. Alle aanwezigen zijn het van harte met het siet eens en zullen alle pogingen in het werk stellen om het er door rigten. Voor 1914 kan het door de plan met den phytopatholoog schuivering geschiedt worden, terwijl bij zekerheid van de verhoogde ragen reeds in 1913 zou kunnen worden bevestigd.

5
 Hetop veldt de Heer Lovink het woord. Hij begint met den Voorzitter, sedanken voor de woorden van welkom, ook hem gesproken. Het spreekt de opening van het moerasstation niet te hebben kunnen bijwonen. Zijn ailig naar zijn verhouding hier. Wat betreft het aanschaffen van een topotholoog, wij hij nog eens terugkomen op een landbouwkundige. Een thouwkundige zou, rethand' mochten zijn, die onder leiding van den cieur voortlicher zou kunnen worden op landbouwkundig gebied. Landbouwkundigen hebben deinstelling bezeggen en indien zij niet chikt zijn, wordt het belang van het moerasstation een grooten stap en opbeiden en daarna beschikbaar te stellen voor de proefstations. Hij te die pogingen gedaan doen is het steeds op leidingstelling, ingeloopten der dagen, heeft zelf weder iemand aanbevolen die van de gestelde den volkoud. Als de bergcultures meer begaan en de inkomsten ruimer den, wil de heer Lovink hem gagine voor Diember bestemming, als fectant daar ligt in heeft.

6
 Wanneer het later mogelijk blijkt, dat de betrofde persoon niet geschikt zal de heer Lovink hem terugnemen en een anderen werving geven. Heest; echter allen inoed dat het gaan zal. Als het salaris grooter is, wordt c de leere ruiter. Het is hier niet alleen de geldwashe, doch is deze een belangrijke factor. Jongelui willen zich niet verbinden door den Chien njam der proefstations; het vertrouwen is niet niet geheel ergekeerd. Hij raad aan niet te overhaasten en looft dat wij niet den truk krijgen, dat hij met de beste hand er over neeuwaat. Ook andere stuations zijn nog niet geslaagd.

7
 De Voorzitter zegt hierop den Directeur van Landbouw dank voor ne uitvoerige uiteenzetting en vraagt hooveel salaris zou moeten worden gezegd.

8
 Het antwoord luidde: een beginsalaris van 1.350,- na één jaar, indien persoon voldoet te verhoogen tot 1.450,- heel vrije woning.

9
 De heer Ottolander vraagt daarop, wanneer wij de bedoelden sollicitemt liden kunnen krijgen. De heer Lovink zeurt er onmiddellijk werk van te lfen, maken, althit niet voor zijn vertrek, dan zal hij in April in Holland t probeeren. Voor 15 Maart zal hij bericht geven of de persoon, dien hij

10
 op het oog heeft, bereid is bij het Besoekisch Proefstation te komen. De heer Ottolander zegt, dat in dat geval het Bestuur accoord gaat met over- schrijding der begroefing met een bedrag van 1.3000,-. De heer Ottolander krijgt volmacht, om te zake naar Siam te handelen. Men in Holland gezocht moet worden, zal 1.600,- à 1.750, vergoed moeten worden voor uitrusting en overtochtkosten.

11
Aandeg Proeftuin.
 De heer Folkersma zet hierop aan de leden de plannen uiteen voor de tabaksproefstuden. Er zullen twee terreinen sawah, elk van 6 bouw, gehand worden: een gelegen in de vlakke, b.v. te Diember en een in de bergdistricten b.v. te Soekowito. Op elk der terreinen zal een droogschuur gebouwd worden van 12 kamers. De één van elk terrein wordt in den Oost-moesson voor tabaksproefveld gebezigd, de andere blijft het volgend jaar. In den West-moesson wordt het geheele terrein in eigen beheer geuomig, in den West-moesson wordt het een verhuurd afgestaan om met paat te beplanten.

12
 Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat de werkzaamheden in den proef- tun voor de bergcultures geen aanvang kunnen nemen voor dat het terrein is toegestaan. Goed-Diember heeft terein beschikbaar gesteld om kweek- beuden voor de bergcultures te kunnen aanleggen. De Voorzitter verzoekt den leden van de bergcultures te kunnen aanleggen. De Voorzitter verzoekt de wenscht achtyl aan te leggen. De Directeur, Dr. Ullée gaat over enkele ridgen naar Banglelan om met Dr. Warth afspraken te houden. Indien' een leden zijn die bezigtigheden hebben op dit gebied, welken zij zulks aan Dr. Ullée op te geven.

13
Regeringsubsidie.
 Het bestuur dankt in overeenstemming met het idee der Regering een subsidie te vragen, evenals de proefstations Malang en Midden- Java: 1.4000,-. De Voorzitter roept de lijf van den Directeur van Land- bouw in, om deze zaak bij de regering te stellen.

14
 De heer Lamminga vraagt nog of koffie van den proeftuin als bibit geleygd wordt, wat beslistend door den Voorzitter beantwoord wordt.

15
 De Voorzitter zegt hierop den Directeur van Landbouw dank voor zijn leggenwoordigheid en voor den grooten steun aan het Besoekisch Proefstation.

16
 Tot slot dankt hij allen voor hunne opkomst en sluit de vergadering.

17
Het Bestuur

MEDEDEELINGEN

VAN HET

BESOEKISCH PROEFSTATION

No. 5.

INHOUD:

proef
Toespraken, gehouden bij de feestelijke opening van het nieuwe
gebouw
laboratorium van het Besoekisch Proefstation



waartoe de Heeren hadden besloten. De wettelijke bepalingen stelden mij in staat onrustige elementen, die kwade praktijken beoogden, tot rede te brengen en te weren. Thans nu de ondernemer niet meer behoeft te zeggen: „Wijs mij de plaats, waar ik gezaaid heb”, is ook het woord aan de wetenschap, in dit gewest vertegenwoordigd door dit Proefstation en door hen, die daaraan zijn verbonden.

Indien Gij Heeren ondernemers, die werken en raadgevingen van de maatschappelijke wetenschap opvolgt, zult gij werken in de richting, door de Tabaksvordering beoogd, al verbetering van de cultuur. Het zal U dienen besluiten zooveel mogelijk groen te oogsten, Uw schuurruimte uit te breiden en een verklaard legenslander te zijn van het stelsel om zooveel mogelijk tabak in de kampong te doen drogen, welk systeem de ondervinding heeft het geleerd, op het oog heeft gemakkelijk, eens anders tabak te kunnen krijgen. Haalt Uw product betere prijzen en de ondervinding van de laatste maanden heeft geleerd tot welke hoogte die prijzen kunnen stijgen, dat behaagt gij niet alleen Uw eigen belangen maar ook die der inlandische bevolking. U kunt ruimer betalen en behoeft niet „scherp” waar te nemen. Als de inlander betere prijzen maakt, dan is dit in Uw belang en zal hij minder „vrij” planten.

Door onderlinge samenwerking van de wetenschap (het Proefstation) de praktijk (Heeren ondernemers) en het Besluit kan voortgegaan worden met het bevorderen van het algemeen belang en bereikt worden wat wij allen beoogen: de voortdurende bloei en ontwikkeling van de Besoektsche Tabakscultuur.

Namens den Geweststijlen Raad, namens de Europeesche en Inlandische ambtenaren, namens alle aanwezigen en verder persoonlijk, wensch ik U gefeliciteerd met den dag van heden en spreek de hoop uit dat het proefstation moge strekken tot heil en tot bloei van de culturas.

HET BESOEKISCH PROEFSTATION.

TOESPRAAK, GEHOUDEN DOOR DR. A. J. ULTÉE, DIRECTEUR VAN HET PROEFSTATION.

Zeer gewenschte Toehoorders en Toehoorders,

De Koloniale Landbouw vraagt meer en meer naar wetenschappelijke voorlichting. Niet alleen in Nederlands overzeesche bezittingen, doch in alle tropische landen, waar groote cultures worden gedreven, zijn de laatste jaren meerdere proefstations verreesen of werden de bestaande instellingen aanzienlijk uitgebreid.

Veelal ging de regering voor en steunde de planters met raad en daad, doch ook deren sloegen de handen ineen en getoossten zich meer-malen belangrijke finantiele offers om wetenschappelijke medewerking te verkrijgen van personen, die door hunne studie en hunne ervaring daartoe aangewezen waren.

Zoo bezalten thans op Java de kina, de suiker, de thee en de Verlandsche tabak hun proefstations, terwijl de grootsche, wereldvermaarde inrichting te Buitenzorg voort geheel Nederlandsch Indië en de particuliere instellingen te Djember, Malang en Salangit, elk in hun ressort, de belangen van de overige cultures behartigen.

Op Sumatra's Oostkust hebben onlangs de tabakplanters het krachtig voortbestaan van het Delproefstation weer voor een tiental jaren verzekerd, stelden de ondernemingen gelden beschikbaar voor den bouw van een groot, modern laboratorium en verhoogden hunne jaarlijksche contributien tot een totaal bedrag van 1½ ton. De caoutchoucplanters op Sumatra en in West-Java zullen waarschijnlijk wel binnen niet al te langen tijd het voorbeeld van hunne collega's volgen en zich eveneens vereenigen om hunne rubberproefstations op te richten.

Deze verblijdende opbloei van het proefstationwezen in de laatste jaren werd vooral bevorderd door den krachtigen steun van den Directeur van Landbouw, den heer Lovink, die, toen een inzinking dreigde, in alle cultuurcentra van Java, op plantersbijeenkomsten, het nut van wetenschappelijke voorlichting uiteenzette en door het toezeggen van hulp het tot stand komen van nieuwe proefstations verzekerde.

Deze hulp bleef niet achterwege: verscheidene particuliere proefstations staan nu in nauwe relatie met het Departement van Landbouw, enkele ontvangen weldra ook finantiele steun; de samenwerking tusschen Buitenzorg, Djember, Malang en Salangit laat niets te wenschen over. Op de Bandoengsche bijeenkomst (19, 20 en 21 Aug. '12), op initiatief van den Directeur van Landbouw gehouden en waar vrijwel alle wetenschappelijke personen aanwezig waren, die in Nederlandsch Indië de belangen der culturas behartigen, werd de kiem van een nog ruimeren bond gelegd.

Algemeene Vergadering
VAN HET
BESOEKISCH PROEFSTATION

op 28 Februari 1914

TE
D J E M B E R.

Punten van behandeling:

Rekening en Verantwoording over 1913.
Jaarverslag van de Bestuurswerkzaamheden over 1913.
Verkiezing van twee leden in het Bestuur wegens periodieke aftreding
van de heeren A. H. CLIGNETT en J. W. FOLKERSMA (aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar).

Werkplan 1914 (tabak en bergcultures).
Aanleg proeftuin bergcultures.
Algemeene Mededeelingen.

Aanwezig zijn:

Van het Bestuur de heeren:

D. BIRNIE, Voorzitter.

T. OTTOLANDER, tweede Voorzitter.

A. H. LOEFF, Secretaris-thesaurier.

A. H. CLIGNETT en J. KROESE, Commissarissen.

Van de leden de heeren: F. RAMBONNET, C. E. BRUGMAN, J. FILET, Th.

HAVERSTROOM, J. H. A. CROON, E. VAN VOLLENHOVEN en J. G. CASTER.

Geïntroduceerd de heeren Dr. A. J. ULTEË en P. E. KEUCHENIUS.

De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De notulen van de vorige algemeene vergadering worden voorgelezen en
goedgekeurd.

Rekening en verantwoordingsrapportage 1913.

De rekening en verantwoordingsrapportage wordt voorgelezen, waarna de Voorzitter de heeren BRUGMAN, CROIN en CÖSTER verzoekt, deze te willen nazien, dat de heeren aan dit verzoek voldaan hebben en de rekening in orde klaren, wordt deze door de vergadering goedgekeurd en het Bestuur juist en décharge verleend voor het gevoerde beheer.

Als bijlage A is deze rekening en verantwoordingsrapportage in dit verslag diergebracht.

De Voorzitter merkt op, dat de buitengewone uitgaven het volgende is veel minder zulten bedragen, daar ditmaal veel geld aan installatie van het laboratorium, chemicalien, het bouwen van schuren, etc. moest worden uitgegeven.

Wat de chemicalien betreft, er is een groote voorraad zwavelkoolstof, die een der leden in het tabaksproduct last hebben van verschijnenselen worm, dan kan dit kwaad hiermede op voldoende wijze bestreden worden. De heer BIRNIE heeft vier gebouwtjes, die voor dit doel geschikt zijn, zegt, dat de leden, bij voorkomen van de plaag van deze gebouwen gebruik kunnen maken, welk voorstel door de aanwezigen zeer geapprecieerd wordt.

De begroefing voor 1914 is aan de leden toegezonden. De heer BRUGMAN vraagt of wel voldoende hulp in den tabakstijd voor proeftuinen aanwezig is.

Dr. ULTEE deelt hierop mede, dat het vorige jaar na de overplaatsing van den employé naar Soekowirjo inderdaad te Djember te weinig hulp was, doch dat door de benoeming van een tweeden employé hierin werd voorzien. Op de begroefing voor 1914 zijn thans twee employés geplaan. De heer BIRNIE stelde nog voor zoo spoedig een der geëmployeerden in de ondernemingen voor tweeden employé te bestemmen. Verleden jaar heeft Oud-Djember daarvoor den heer OTTOLANDER Jr. afgestaan, die de groote drukte weder naar eigen werking terugkeerde.

Jaarverslag van de Bestuurswerkzaamheden over 1913.

Het Jaarverslag wordt door den Voorzitter uitgebracht, waarop niemand iets te bemerken heeft.

Dit verslag zal als gewoonlijk worden gedrukt en den leden worden gezonden (Zie bijlage B.)

Afkeuring van twee leden van het Bestuur.

De aftradende leden, de heeren A. H. CLIGNETT en J. W. FOLKERSMA worden bij acclamatie herkozen.

Werkplan 1914 (Tabak en Bergcultures).

Op verzoek van den Voorzitter geeft de Directeur Dr. ULTEE een lichting van het werkprogramma voor 1914, dat reeds door den Directeur van Landbouw is goedgekeurd en dat als volgt is samengesteld:

A. Tabak.

- 1) Voorzetting Selectie en Kruisingsproeven.
- 2) " " Bemestingsproeven en Grondonderzoek.
- 3) Invoer nieuwe soorten.
- 4) Proeven met boomsoorten, die evl. de sadong voor het bouwen van schuren kunnen vervangen.

B. Bergcultures.

a. Hevea.

- 1) Viscositeitsbepalingen.
- 2) Bemestingsproeven.
- 3) Tapproeven op ondernemingen.
- 4) Onderzoek naar de waarde van een jonge rubberboom als toekopstige rubberproducent. (Chemisch, morphologisch, anatomisch en physiologisch).
- 5) Aanleg proeftuin.

b. Koffie.

- 1) Invoer nieuwe soorten en aanleg soortentuin.
- 2) Bewaren der oorspronkelijke typen en vastleggen der verbeteringen door het maken van enten.
- 3) Onderzoek naar de levenswijze van groene en witte luis en hun parasieten.

Dr. ULTEE begint met de opmerking te maken, dat de werkzaamheden zich niet zulten beperken tot de onderwerpen in het programma vermeld. Natuurlijk is daarnaast het personeel steeds bereid over allerlei andere kwesties van advies te dienen en monsters of materiaal, aangevraagd door ziekten en plagen, te onderzoeken.

Wat punt 1. Ald. Tabak betreft, brengt Dr. ULTEE de aanwezig tabaksteden in herinnering, dat in 1913 twee proeftuinen voor tabak werden aangelegd, een in de gunstige Kedwestreek te Soekowirjo, en in hoofdzaak voor Deli-tabak, in de onmiddellijke nabijheid van Djember terwyl achter het proefstation nog ruimte gevonden werd, om hybride te kweken.

2. Bemestingsproeven zijn reeds in 1913 aan gang gezet, ze moeten op de ondernemingen geschieden. Leden, die den wensch te kennen geven dergelijke proeven te nemen, zullen zooveel mogelijk daarmee worden geholpen.

Het kan niet ontkend worden, dat in onze residentie tot dusverre de resultaten niet bijzonder zijn.

3) Van lapproeven geldt hetzelfde als van de bemestingsproeven in de eerste afnake is gezegd.

Het is zeer gewenscht, dat deze op grooter schaal worden verricht, dan tot dusverre geschiedde.

4) Dit punt, dat bij grondige bestudering den tijd van het personeel geheel in beslag zou nemen, is op voorstel van een der leden op het programma geplaatst met de bedoeling, dat het personeel er zijn gedachten eens over zou laten gaan of een dergelijk onderzoek met kans op succes mogelijk zou zijn.

Helaas laten de meer noodzakelijke werkzaamheden geen uitvoering zuiver wetenschappelijk onderzoek toe. Meer personeel zou daartoe noodig zijn, hetgeen echter op het oogenblik de financiën niet toelaten. Omrent den aanleg van een proeftuin zal samenwerking met Dr. CRAMER plaats hebben, nu deze weldra aan het hoofd van een gouvernementselectieftuin zal komen te staan.

Koffie.

1/2) Wat hier vlak boven in punt 5 is gezegd, geldt evenzoo voor den aanleg van den koffieproeftuin. Dr. ULTEE brengt in herinnering, dat hij voor eenigen tijd een circulaire tot de leden richtte met het verzoek hem van fraaie moederboomen zaden te verstrekken. Tot zijn genoegen werd hieraan door meerdere administrateurs voldaan.

Dank zij de hulp der Landbouw Mij. Oud-Djember werd terrein voor kweekbedden verkregen, waar de bibit, onder de goede zorgen van den heer CORONEL, er thans uitstekend bijstaat, vooral als men de langdurige droogte in aanmerking neemt.

3) Dr. ULTEE deelt omtrent dit punt mede, dat op tal van ondernemingen in Besoeki in den afgelopen Oost-moesson de luizenplag hevig optrad en groote schade berokkende. Daarom was een der eerste werkzaamheden van den heer KEUGHENUS zich op verschillende ondernemingen van dit kwad op de hoogte te stellen en materiaal te verzamelen. Dit onderzoek zal in 1914 krachtig worden voortgezet.

Aanleg Proeftuin Bergcultures.

De Voorzitter zegt, dat voortooijig voor dit doel een bedrag van f 3000.— voldoende geacht wordt, in verband met het aanleggen van den soortetuin in West-Java.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.

De Secretaris-Thesaurier,

ze twee proeftuinen zijn de door Dr. SPRECHER in 1912 op de ondernemingen uitgezochte moederboomen op hun nakomelingschap terecht, met de bedoeling van de beste lijnen zaad aan de ondernemingen te verstrekken. Hierover zal Dr. SPRECHER t. z. t. uitvoerig berichten, terwijl in 1914 de proeven zullen worden voortgezet.

In toememende belangstelling in hybriden, zal aan kruisingsproeven tevens de noodige aandacht worden geschonken.

Stijge terreinen voor proeftuin zijn reeds ter onzer beschikking. Ook zij de steun van de maatschappijen B. T. M., Djelboek, Oud-Djember en Soekowono.

De bemestingsproeven zijn in het afgelopen jaar door den Directeur op aanteiding van enkele vragen der heeren CROIN en RAMBONNET met Dr. ULTEE nog mede, dat de onderneming slechts terrein en koehes heeft te verschaffen, dat de mest door het proefstation wordt verschaft, t de sortatie en verdere beoordeling op het proefstation geschiedt, dat op de onderneming de tabak gedroogd en getrimmeerd is, dat s resultaat kan worden geconstateerd meer 1e en 2e lengte dan 1 de onbemeste percelen.

In het afgelopen jaar zijn meerdere nieuwe tabaksoorten ingevoerd, die tegeen ook in den vervolge zal geschieden.

De schaaarscher worden van den sadeng is het wenschelijk naar haalsvervangers om te zien. Te dien einde zullen in den proeftuin togosarie, die weldra ontgonnen zal kunnen worden, proeven met verschillende boomsoorten worden verricht (Eucalyptus etc.) Jehoopt wordt op medewerking van het beschwezen.

Door een der leden wordt er de aandacht op gevestigd, dat ook bamboe schaars wordt. De heer CROIN deelt mede, door het gebruik van renga dit bezwaar grootendeels te hebben ondervangen. Het is dan noodig de kamers in tweeën te verdeelen. Ook andere aanwezig, die dit systeem beproeiden, betuigden hunne voldoening over deze werkwijze.

B. Bergcultures.

Hevea.

Nu de ondernemingen meer en meer in productie komen, is het van belang, dat zij hare rubber kunnen laten onderzoeken. Dr. ULTEE deelt mede, dat viscositeitsbepalingen in dit opzicht zeker van waarde zijn, al moet aan onderzoek van het ge vulcaniseerde product de voorkeur worden gegeven. Voorloopig kan echter het proefstation er nog niet aan denken zich een zeer kostbare volledige installatie aan te schaffen.

Mit: "Het Financieele Dagblad"
van Zaterdag, 7 Juli 1946.

OFFICIELE PUBLICATIE.

BEKENDMAKING VAN HET MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN.

De tussen Japan en Nederland onlangs gesloten overeenkomst krachtens welke door de Japanse regering gelden ter beschikking zullen worden gesteld voor het doen van een uitkering aan burger-personen-Nederlanders, die - ongeacht leeftijd - tijdens de oorlog door de Japanners in Azië geïnterneerd zijn, is thans van kracht geworden. Tot het doen van bedoelde uitkeringen kunnen derhalve thans de nodige maatregelen worden genomen. Degenen, die tijdens hun internering Nederlander waren, doch nadien een andere nationaliteit hebben verworven, zijn ook deelgerechtigd. Degenen, die tijdens hun internering Nederlandse onderdanen waren, en thans het Nederlanderschap bezitten, zullen eveneens als deelgerechtigd worden aangemerkt. Naar schatten zal de uitkering, waarvan door Nederland geen belasting zal worden geheven, per persoon ongeveer f 300,- bedragen. Het juiste aantal ex-geïnterneerden is niet bekend. Derhalve kan het bedrag, waarop ieder belanghebbende recht kan doen gelden, niet reeds thans worden vastgesteld.

Voor de uitkering komen in aanmerking:

1. Zij, die voor 15 Augustus 1945 gedurende tenminste in totaal zes maanden door de Japanners in Azië geïnterneerd zijn geweest. Met internering wordt gelijkgesteld, de aanhouding in gevangenissen of andere als zodanig ge- bezigde gebouwen, anders dan terzake van strafbare feiten vallende onder het gewone strafrecht. Onder strafbare feiten worden niet verstaan zodanige, welke kennelijk zijn begaan met het doel de bezetter afbreuk te doen.
2. Zij, die ten aanzien van de duur van internering of aanhouding niet aan het vereiste onder 1 voldoen, doch die ten gevolge van mishandelingen door, of op last van de Japanners gepleegd, blijvend in hun gezondheid werden geschaad.
3. De gezamenlijke erfgenamen(n) en rechtverkrigende(n) van ^{alleen die in aanmerking} ~~de onder 1 en 2 bedoelde personen~~. Voor de beoordeling wie in aanmerking komt voor deze uitkering, zijn afzonderlijke vragenlijsten samengesteld voor:
 - a. Personen, die bij de aanvang der internering meerderjarig waren en tijdens de internering geen kinderen te hunnen laste hadden,
 - b. Personen, die tijdens de internering wettige, gewettigde of wettelijk erkende natuurlijke kinderen, pleegkinderen en/of stiefkinderen te hunnen laste hadden.
 - c. Personen, die bij de aanvang der internering minderjarig waren, doch geboren zijn voor 1 Juni 1935.

4. internering c. 2. aanhouding zijn overleden
4. De gezamenlijke erfgenamen(n) en rechtverkrigende(n) van de onder 1. en 2. bedoelde personen.
komt uit 4.

Sumber: Arsip CPV Jember

LAMPIRAN 10

10 December 1957.

W 912.

Aan de LANDBOUWKUNDIGE AFDELING MIDDEN- EN
OOST-JAVA van het PROEFSTATION DER
CENTRALE PROEFSTATIONS VERENIGING,

te

D J E M B E R.

permits.

Mijne Heren,

Tenzinde rekening te houden met eventualiteiten
komt het ons raadzaam voor alvast een aanvang te maken
met de verzorging van exit-permits voor *Wf* vrouwen en
kinderen, welke permits tenslotte een geldigheidsduur
hebben van drie maanden.

Dit advies is uitsluitend bedoeld als voorzorgs-
maatregel.

Hoogachtend,
CENTRALE PROEFSTATIONS VERENIGING,

(Ir. W.H. Meijer)
Voorzitter.

Sumber: Arsip CPV Jember

LAMPIRAN 11

Salinan.
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

No. 1063/PMT/1957.

KEPUTUSAN tentang penguasaan perusahaan perkebunan/pertanian, milik Belanda.

PENGUASA MILITER/MENTERI PERTAHANAN,

MENIMBANG: bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan di daerah-daerah tertentu demi kepentingan kelangkaan alat produksi yang penting bagi Negara, dianggap perlu untuk menempatkan perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda dibawah penguasaan Negara Republik Indonesia;

- MENINGGAT:** 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1957 No. 40 tentang Peninjauan Kembali Darurat Perang atau wilayah-wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg (Sbl. 1939 No. 582), sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian;
3. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaga Negara tahun 1954 No. 96);
4. „Algemene Maatregelen van Bestuur” (Sbl. 1939 No. 557);
5. „Verordening medewerking bedrijven” (Sbl. 1945 No. 136).

MEMUTUSKAN:

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan perkebunan/pertanian, milik Belanda, termasuk yang dimiliki Belanda bersama dengan Pemasalahan Republik Indonesia atau Warga Negara Indonesia, beserta pabrik-pabriknya, Lembaga-lembaga penjelidikan ilmiah diperganti pertanian, bangunan-bangunannya dan benda-benda tidak bergerak lainnya, benda-benda bergerak dari perusahaan termasuk keuangannya dan surat-surat berharga, dikuasai seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2.

Pelaksanaan selanjutnya dari penguasaan perusahaan-perusahaan dimaksud dalam pasal 1 ditugaskan kepada Menteri Pertanian, yang atas nama kami menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melancarkan perusahaan-perusahaan itu secara yang sebaik-baiknya.

„Media Perkebunan”, G. 1c:27 No. 1 — Jakarta, Desember 1957

Pasal 3.

Karena penguasaan termaksud dalam pasal 1 semua buruh dan pekerja-pekerja lainnya, termasuk Direksi dan stafnya dari perusahaan perkebunan/pertanian yang bersangkutan wajib menjalankan segala perintah yang diberikan oleh atau atas nama Menteri Pertanian untuk kepentingan kelangkaannya perusahaan.

Pasal 4.

Dilarang melakukan segala tindakan-tindakan yang menghalang-halangi atau merugikan jalannya perusahaan yang sebaik-baiknya.

Pasal 5.

Perusahaan-perusahaan dimaksud dalam pasal 1 yang dikuasai oleh Negara disajutkan perusahaan vital dalam arti kata pasal 2 Peraturan Penguasa Militer No. 755/PMT/tahun 1957.

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di wilayah Indonesia.

Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal hari penempatannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya dan mengabdikannya, keputusan ini diumumkan dengan perantaraan radio dan surat kabar.

Ditandatangani pada tanggal
 9 Desember 1957.
MENTERI PERTANIAN:
 Mr. SADIARWO

DITUTUPKAN DI: DJAKARTA,
 Pada tanggal: 9 Desember 1957.
PENGUASA MILITER/MENTERI
PERTAHANAN:
 (s.d.)
 (s.d. DIGANDA)

SALINAN SEBUAH DENGAN ASLINYA
 Kepada Bagai Kabinet Menteri.
 (s.d.)
 (SOTOTO BROKOKOSOEMO)

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

No. 247/Uu/57

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 DJAKARTA, 11 Desember 1957

MENTERI PERTANIAN

MENIMBANG: bahwa kelangkaan alat produksi dan penyelidikan adalah penting bagi Negara;

- MENINGGAT:** 1. Keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertanian No. 1063/P.M.T./1957 tg. 9 Desember 1957 pasal 1 dan 2;
2. Keputusan Menteri Pertanian No. 229/Uu/57 tanggal 10 Desember 1957 pasal 10;

21

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan-peraturan mengenai tjara-tjara pelaksanaan penguasaan perkebunan, pertanian termaksud dalam keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan No. 1063/P.M.T./1957 tanggal 9 Desember 1957 sebagai berikut:

Pasal 1.

1. Termasuk dalam perusahaan perkebunan/pertanian termaksud dalam keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan No. 1063/P.M.T./1957 tanggal 9 Desember 1957 adalah pula Perkumpulan dari Organisasi-organisasi Perusahaan Perkebunan, yang djenis dan sifatnja seperti Algemeen Landbouwsyndicaat, Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Indonesia dsb., dan Organisasi-organisasi lainnja, yang mempunyai tugas diantara lain mengurus kepentingan bersama dari para anggotanja, perusahaan perkebunan/pertanian, dan/atau lembaga-lembaga penyelidikan ilmiah perkebunan/pertanian;

2. Dalam hal² dimana terdapat keragu-raguan tentang hak milik/status dari perkumpulan/organisasi tersebut dalam ayat 1, maka penyelesaiannya akan dilakukan setjara soal demi soal, sesuai dengan makna surat keputusan Penguasa Militer tersebut diatas;

3. Pelaksanaan kekuasaan diserahkan kepada sebuah badan, yang disebut dengan nama „BADAN KOORDINASI PERKUMPULAN DAN ORGANISASI PERKEBUNAN”.

4. Sebagai Ketua dari badan koordinasi tersebut dalam ayat 3 diatas ditunjuknja Ketua dari „CENTRALE CULTUURFONDSSEN” yang telah didirikan menurut Stbl. 1948 No. 28 dan Stbl. 1949, No. 310.

5. Ketua dari badan koordinasi tersebut diatas memangku pula jabatan ketua/pemimpin dari perkumpulan-perkumpulan dan Organisasi² tersebut dalam ayat 1;

6. Ketua dari badan Koordinasi berhak menundjuk satu atau beberapa orang yang akan mewakilinja dan yang dapat bertindak atas namanya, menurut kebijaksanaannja sendiri.

7. Kantor-kantor dari perkumpulan-perkumpulan dan organisasi-organisasi tersebut dalam ayat 1 pimpinannya diserahkan kepada paling banjak tiga (tiga) orang pegawai staf bangsa Indonesia dari Perkumpulan yang bersangkutan yang pangkatnja tertinggi dan mempunyai susunan berikut:

- a. seorang Pemimpin,
- b. seorang Wakil Pimpinan-I,
- c. seorang Wakil Pimpinan-II,

8. Menteri Pertanian dapat menundjuk pemimpin-kantor lain, djika dianggap perlu;

„Menara Perkebunan”, th. ke-27 No. 1 — Djakarta, Djanuari 1958

Pasal 2.

1. Para Pemimpin kantor-kantor tersebut dalam pasal 1 ayat 7 bertugas melakukan pimpinan kantor dan mengurus segala sesuatu yang dapat melantjarkan pekerjaan Perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi tersebut dalam pasal 1 ayat 1;

2. Para pemimpin kantor bertanggung-djawab kepada dan mendjalankan instruksi-instruksi dari „Badan Koordinasi”.

3. Badan Koordinasi termaksud dalam pasal 1 ayat 3 bertugas melantjarkan tugas dari Perkumpulan-perkumpulan dari Organisasi-organisasi Perusahaan Perkebunan/Pertanian, dan Organisasi-organisasi lainnja termaksud dalam ayat 1 dengan mempergunakan alat-alat dari Perkumpulan/Organisasi-organisasi masing-masing;

4. Badan Koordinasi tersebut bertanggung-djawab kepada Menteri Pertanian dengan memperhatikan pula peraturan-peraturan yang berlaku pada Perkumpulan-perkumpulan/Organisasi tersebut diatas.

Pasal 3.

1. Lembaga-lembaga Penyelidikan ilmiah perkebunan, yang diurus oleh Perkumpulan-perkumpulan/organisasi tersebut dalam pasal 1 ayat 1 tetap diurus oleh Perkumpulan-perkumpulan/Organisasi yang bersangkutan;

2. Pimpinan Lembaga-lembaga termaksud dalam pasal 3 ayat 1 dipegang oleh seorang, djika dianggap perlu oleh beberapa orang, bangsa Indonesia yang berpendidikan Sekolah Tinggi; pada tingkatan pertama tenaga itu diambilnja dari lembaga itu sendiri;

3. Menteri Pertanian dapat menundjuk orang lain untuk memimpin lembaga penyelidikan itu, djika dianggapnja perlu;

4. Pimpinan Lembaga-lembaga termaksud dalam pasal 3 ayat 1 langsung bertanggung-djawab kepada Perkumpulan/Organisasi yang mengurusnja.

Pasal 4.

Peraturan-peraturan mengenai Lembaga-lembaga penyelidikan ilmiah pertanian termuat dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 229/Um/57 pasal 9 ayat 1 dan 2 dengan adanya keputusan ini dianggap telah ditjabut;

Pasal 5.

Peraturan-peraturan mengenai hal-hal yang belum disebut dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut;

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari penetapan.

MENTERI PERTANIAN

tid.

(Mr. SADJARWO).

23

perubahan struktur?

LAMPIRAN 12

101-3

PROEFSTATION DER
CENTRALE PROEFSTATIONS VERENIGING
BOGOR
Indonesië

Bogor 13 december 1957

Aan het Hoofd van de L.A.M.O.J.
Besukisch Proefstation
D J E M B E R

Obj: Afvoer Nederlands personeel

Weledelgestrenge Heer,

Hoewel mij geen officiële berichten omtrent Uw toestand hebben bereikt, geloof ik te kunnen aannemen dat ook Uw Instituut onder toezicht van de regering resp. militairen is gesteld.

In verband met de thans heersende toestand in Indonesië geloof ik dat het weinig zin heeft om de research voor de groot-landbouw voort te zetten. Hiervoor zijn vele economische, financiële en psychologische argumenten aan te voeren.

De staf hier te Bogor is unaniem van mening dat zij zo spoedig mogelijk naar Nederland of elders wenst te vertrekken. Ook het Bestuur is van mening dat een vertrek der Nederlandse C.P.V.-employés noodzakelijk is.

Deswege verzoeke ik U voor allen, die daarvoor in aanmerking wensen te komen, uitreis-visa aan te vragen. De beste procedure is waarschijnlijk om te beginnen met uitreisvisa voor vrouwen en kinderen en vervolgens voor de mannen. Zodra dez. visa zijn verstrekt kan boeking plaats vinden.

Reeds thans kunt U aan het kantoor van de Stoomvaartmaatschappij "Nederland" melden hoeveel Nederlanders in C.P.V.-verband wensen te vertrekken en naar welk land. Dit laatste om de scheepvaartmaatschappij een inzicht te geven in de te verwachten stroom van passagiers. Ik zal trachten U de nodige werkgeversverklaringen te doen toekomen, doch ik kan niet voorzien of deze U zullen bereiken. In dat geval macht ik U hierbij de werkgeversverklaringen voor het thans in dienst zijnde personeel namens mij te ondertekenen, onder verwijzing naar dit schrijven.

Het spijt mij dat ik niet in staat ben U meer hulp dan deze te verstrekken. Mocht er echter nog iets anders zijn dat ik eventueel voor U zou kunnen doen dan kunt U er van verzekerd zijn dat e.e.a. onze volle aandacht heeft.

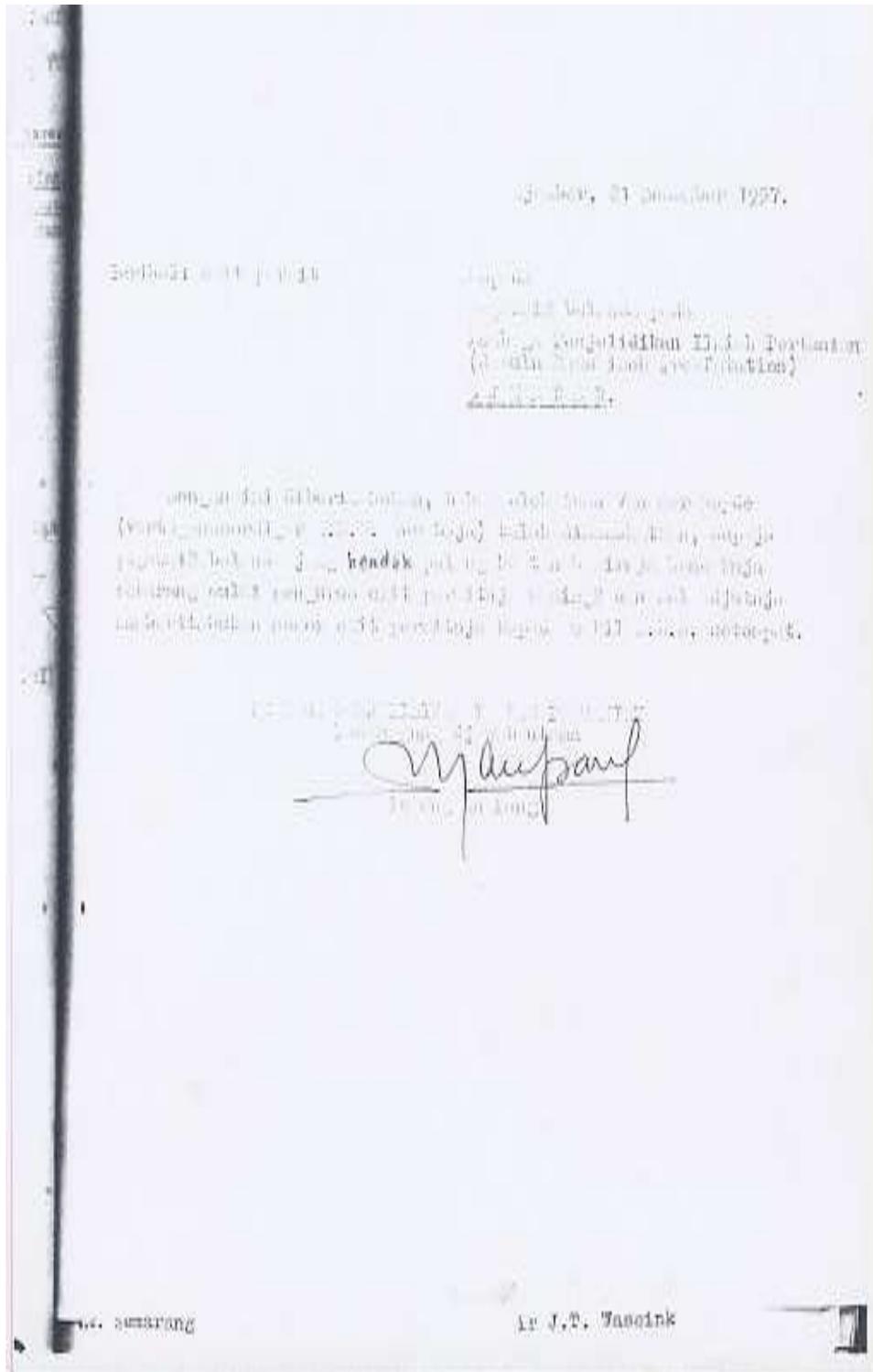
Heden zond ik U een telegram luidende:
"vraag primo exits vrouwen en kinderen-secundo mannen-brief volgt"

Hoogachtend,
De Directeur van het Proefstation der
Centrale Proefstations Vereniging
ir J.T. Wassink

c.c. Semarang

Sumber: Arsip CPV Jember

LAMPIRAN 13



Sumber: Arsip CPV Jember

LAMPIRAN 15

Kementerian Perburuan
 dan Hubungan Perburuan Ressort
D J E M B E R

: 634/II-a/1958
 : Pentjabutan pers.
 : persoorangan.

Kepada
 Jth. Sdr. E.P. Her
 d/a Umbul Rezeki
 di
D j e m b e r
 Jth. Sdr. Kemper d/a E.J. Her
 di
Djember

Menjumbuh surat kami tel. 13/12-'57 no.5166/II
 a/1957 dengan ini kami sarankan agar perneliahan
 perseorangan jng sdr. diajukan kepada kami Lawan CPV
 di Djakarta ditjabut, mengingat :

1. CPV telah diambil alih oleh pemerintah.-
2. Kuasa dari CPV oleh Den. P./ van der Heide
 mungkin telah kembali ke Negeri Belanda.

Bila Sdr. setuju terhadap saran kami ini, hen-
 dukaja setjara formel pentjabutan-sdr. lakukan tertu-
 lis.

Ditambahnya sebagai perneliahan dari kami bu-
 kan berarti bahwa masalah perneliahan ini sudah seles-
 ai, tetapi penjelasannya diadjukan kepada pengadilan
 Negeri.

Demikian kami ingja chaber dari sudara.-

Tindakan kepada Jth.

1. Diant. Pengantoran Perk.
 Ressort S/V di Djember
2. C.P.V. Djakarta d/1 Bezekisch
 Prefektion di Djember
3. D J E M B E R

Djember tel. 19 Febr. 1958
 a/n. Kepala Djawatan hubungan
 Perburuan Res. Djember
 Djamiludin.

Sumber: Arsip CPV Jember

LAMPIRAN 16

INSTRUKSI PENGUSAHA PERANG PUSAT
No: Instr/Peparpu/009/1959

TENTANG
KEBIDJAKSANAAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN/PERUBAHAN DALAM
PERUSAHAAN NEGARA MENGENAI PEGAWAI/BURUH JANG BERKE-
WARGANEGARAAN ASING.

KEPALA STAF ANGKATAN BARAT SELAMU PENGUSAHA
PERANG PUSAT UNTUK DAERAH ANGKATAN BARAT:

DIANG : bahwa kebijaksanaan dibidang kepegawaian/perubahan dalam perusahaan Negara pada asasnya harus dapat didirikan jang sama dengan kebijaksanaan kepegawaian pemerintahan pada umumnya, sehingga harus digunakan tenaga Indonesia dengan pengetahuan teramat ahli asing jang belum dapat digantikan oleh tenaga Indonesia;

bahwa sudah datang saatnya untuk ber-angsur meng-Indonesia-nisasikan pegawai/buruh jang selama ini dipegang oleh bangsa asing;

bahwa kebijaksanaan itu sungguh diperlukan, demi kawaspadan nasional umumnya serta demi ketertiban dan keamanan umum umumnya;

DIANGAT : (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 dengan Undang No. 79 tahun 1957 (LN 1957/170; TLM 1957/1491) tentang Parnjataan Keadaan Perang atas seluruh wilayah R.I. berhubungan pula dengan Undang No. 82 tahun 1958 (LN 1958/152; TLM 1958/1480) tentang Perpan-djangan Keadaan Perang;

(2) Undang No. 74 tahun 1957 (LN 1957/160; TLM 1957/1485) tentang Keadaan Bahaja, pasal 38 ayat (1) berhubungan dengan pasal 31 dan 41, berhubungan pula dengan pasal 7 ayat (2);

DIANGAT : (1) Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peparpu/08/1958 tanggal 11 April 1958 tentang Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing;

(2) Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peparpu/019/1959 tanggal 4 Mei 1959 tentang Pengawasan terhadap tempat tinggal dan perjalanan bagi orang asing;

M E N G I N S T R U K S I K A N :

PADA : 1. KEPALA DJAMATAN PENEMPATAN TENAGA PADA KEMENTERIAN PER-BORUHAN;

2. PADA DIREKTUR PERUSAHAAN NEGARA;

DIVY : Tersebut ad 1.

a. Didalam memberikan izin perpanjangan/perbaharuan hubungan kerja antara perusahaan Negara dengan pegawai/buruh jang berwarganegara asing, supaya diteliti agar hanya diberikan izin tersebut kepada pegawai/buruh jang tenaganya memang untuk sementara waktu belum dapat diadakan penggantinya dengan tenaga Indonesia;

b. Ketjuali kepada warganegara asing sebagai termaksud dalam ad 1 diatas, semua hubungan kerja dengan warganegara asing hanya diperkenankan se-lambat-lambanya sampai dengan tanggal 31 Desember 1959;

- 2 -

Tersebut ad 2.

Memberikan bantuan seperlunya yang berupa bahan2 keterangan untuk dapat dipakai sebagai bahan oleh tersebut ad 1 dalam mengambil sesuatu keputusan.

T i a t a a n :

1. Yang dimaksud dengan warga negara asing dalam instruksi ini ialah semua orang yang bukan warganegara Indonesia, sehingga didalamnya termasuk pula mereka yang tidak berkewarganegaraan (Staatslozen);
2. Yang dimaksud dengan perusahaan Negara adalah segala usaha perusahaan yang terdapat didalamnja Modal Negara, baik seluruhnja atau sebagian.

Instruksi Penguasa Perang Pusat ini mulai berlaku pada hari dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Djakarta
pada tanggal : 25 Djuli 1959.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT SELAKU
PENGUASA PERANG PUSAT

td.

A.H. NASUTION
LETNAN DJENDERAL T.N.I.

LAMPIRAN 17

	Pelaksanaan peromadjaan alat-alat negara.	Bogor, 27 Djuli 1959.
uksi sia, ber-	-----	Kepada :
		1. Semua Kementarian,
		2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
		3. Ketua Mahkamah Agung,
1 matja ilk-se-		4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
		5. Semua Pembedar yang bertak mengangkat dan memberhentikan pegawai.

hari		
	SURAT-EDARAN PRESIDEN/PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 1959.	
KU	<p>Karena telah ternjata, bahwa Peraturan Pemerintah No.68 tahun 1958 tentang Peromadjaan Alat-alat Negara, hingga sekarang belum mendapat pelaksanaan sebagai mastinja, maka setelah mendengar musjawarah Kabinet pada tanggal 27 Djuli 1959 saja memutuskan, bahwa mulai sekarang ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut harus idjalankan seluruhnja sesuai dengan maksud dan tudjuan peraturan itu.</p> <p>Berhubung dengan itu bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa mulai dari waktu ini setiap pegawai negeri jang memenuhi syarat-syarat dalam Peraturan Pemerintah tersebut tepat pada waktunya <u>harus diberhentikan</u> dari djabatannya dengan pemberian pensiun atau tundjangan menurut ketentuan-ketentuan termaksud.</p> <p>Jang dapat diketjualikan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah hanya tenaga-tenaga jang dimaksudkan dalam penjelasan pasal 10 jaitu tenaga-tenaga jang mandjalankan pekerdjaan dalam lapangan penjelidikan pengetahuan (research-workers), guru-besar dan lektor. Usul-usul pengetjualian itu harus diadjukan kepada Presiden melalui Dewan Urusan Pegawai.</p> <p>Achirnja perlu ditegaskan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku pula terhadap para pegawai negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) jang telah diberhentikan dari djabatannja/diberhentikan untuk sementara waktu dari djabatannja, menurut Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952; b) jang diberi istirahat diluar tanggungan negara, atau istirahat dalam negeri menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953; c) jang dibebaskan dari tugas kewadjabannja untuk membantu Pengurus Besar Serikat Sekerdja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1956; d) jang diperbantukan pada Pemerintah Daerah atau pada badan-badan usaha/jajasan-jajasan/perusahaan-perusahaan/lembaga-lembaga, baik jang setjara langsung maupun tidak langsung seluruhnja atau untuk sebagian dimiliki oleh Negara. 	
	PRESIDEN/PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO.	

Sumber: Arsip CPV Jember

LAMPIRAN 18

Tentang :

KEBIDJAKSANAAN DIBIDANG KEPENCANAAN/PERBURUHAN DALAM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN INSTRUKSI PENGUASA PERANG PUSAT NOMER: INSTR/PEPERPU/089/1959 TANGGAL 25 JULI 1959.

PENGUASA PERANG DAERAH SMTANTRA TINGKAT I
D J A W A - T I M U R

1. MENYERANG: 1. Setelah mempelajari kedudukan orang-orang Asing yang dipekerdjakan dalam perusahaan-perusahaan Negara ditilik dari segi kepentingan Perusahaan yang bersangkutan dengan memperhatikan pengalaman pekerdjaan serta djabatannya masing-masing.

2. Setelah pada tanggal 7 Desember 1959 mendengar pendjelasan urgensi dari Perusahaan-perusahaan Negara yang bermaksud mempekerdjakan terus orang-orang Asing untuk waktu sesudah tanggal 31 Desember 1959.

3. Setelah memperhatikan dan merundingkan pendjelasan urgensi itu dengan Pendjabat-pendjabat dari Djawatan Penempatan Tenaga, Djawatan Migrasi, Pengawas Kedjaksan Djawa Timur dan Ketua B.K.I. Staf Harian Penguasa Perang Daerah Djawa Timur.

2. MENYINGKAT: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomer 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 berhubungan dengan Undang-Undang nomer 79 tahun 1957 tanggal 27 Desember 1957 tentang penjataan KEADAAN PERANG atas seluruh WILAJAH Republik Indonesia.

2. Keputusan K.S.A.D. selaku Penguasa Perang Pusat atas wilayah Angkatan Darat seluruh Indonesia Nomer Kpts/Peporpu/01/1957 tanggal 27 Desember 1957.

3. Undang-Undang nomer 74 tahun 1957 tentang KEADAAN BAHAYA futsal 7

4. Undang-Undang nomer 82 tahun 1958 tentang perpandjangan penjataan KEADAAN PERANG.

5. Undang-Undang nomer 3 tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing.

6. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomer Prt/Peporpu/014/1958 tanggal 16 April 1958 tentang beberapa hal mengenai kewarganegaraan, keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Februari 1956 nomer Bpk. 6/2/38 dan Surat Menteri Kehakiman tanggal 28 Djuni 1958 nomer: J.B.3/92/16 ad 4.

7. Instruksi Penguasa Perang Pusat nomer Instr/Peperpu/089/1959 tanggal 25 Djuli 1959 dan Surat Deputy Penguasa Perang Nomer B.1257/Depeper/1959 tanggal 21 September 1959.

M E M U T U S K A N :

1. Untuk menjaga kelanjutan djalannya perusahaan dan sebelum ada Keputusan Deputy Penguasa Perang sebagaimana termaktub dalam suratnya tanggal 21 September 1959 Nomer B.1257/Depeper/1959 ad.4, memperkenankan Perusahaan-perusahaan Negara tersebut kolom 2 untuk mempekerdjakan terus orang Asing tersebut kolom 3 dalam djabatan tersebut kolom 4 dari daftar lampiran pertama Surat Keputusan ini, dengan ketentuan:

(a). Agar dalam pekerdjaan sehari-hari ditundjuk tenaga Indonesia untuk mendampingi orang-orang Asing itu dalam arti memberikan pendidikan/melatihnya sehingga dalam waktu sesingkat-singkatnya tenaga Indonesia itu dapat menduduki djabatan yang bersangkutan.

(b). Dilarang memindahkan djabatan mereka sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar lampiran pertama.

2. Melarang perusahaan-perusahaan Negara tersebut kolom 2 sesudah

(b). Mengalami dilaksanakannya ketentuan no. 1 (a) dan (b).

(c). Sebelum memberikan izin kepada Perusahaan-perusahaan Negara di Daerah Djawa Timur untuk mempekerjakan seseorang asing supaya terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan dari Pegawai Perang Daerah Djawa Timur, ketjuwali yang telah tertantum dalam daftar lampiran pertama.

4. Kepada para Direktur/Pemimpin Perusahaan Negara dalam Wilayah Djawa Timur di-instruksikan:

(a). Selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 1960 melaporkan menurut Urut-urutan daftar terlampir (rangkai tiga) adanya pegawai/buruh dalam perusahaan-perusahaan masing-masing yang diramu-ragikan kewargi-negaraannya, karena tidak dapat memundjutkan surat-surat yang berhubungan dengan kewargi-negaraannya. Mereka yang hanya memiliki surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menunjukkan bahwa nama yang bersangkutan tidak terdapat dalam daftar penolakkan kewargi-negaraan Indonesia dan/atau S.T.K.I. tidak dapat dianggap sebagai Warga-Negara Indonesia.

(b). Mengajukan mereka yang diramu-ragikan kewargi-negaraannya untuk ke-luar-kembali pada akhir bulan Maret 1960 dapat membuktikan bahwa mereka adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri setempat.

(c). Menhentikan dari jabatannya masing-masing mulai tanggal 1 April 1960 dalam hal mereka tidak dapat memenuhi no. 4 (b) diatas.

5. Kepada para Direktur/Pemimpin Perusahaan Negara dalam Wilayah Djawa Timur ketjuwali bekas Perusahaan-perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi:

(a). Melaporkan semua lowongan pekerjaan kepada Kantor Pencampatan Tenaga Daerah setempat.

(b). Memperoleh persetujuan Kantor Pencampatan Tenaga Daerah setempat untuk keperluan pencampatan lowongan pekerjaan yang ada. Persetujuan tersebut no. 5 (b) diberikan setelah memperhatikan lebih dahulu pertimbangan-pertimbangannya dari Pegawai Perang Daerah Djawa Timur.

6. Kepada para Palikaman Rangsang Perang dalam Wilayah Djawa Timur di-instruksikan untuk menegasi dituntunnya Keputusan ini oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

IV. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannya.

K E P A D A :

1. Para Pelaksana Rangsang Perang dalam Wilayah Djawa Timur,

2. Para Direktur/Pemimpin Perusahaan Negara dalam Wilayah Djawa-Timur.

Y E M B U A N :

1. K.A.S.K.D. / Pa Per Pusat

2. Gubernur Djawa Timur

3. Kepala Daerah Swt. I Djatin

4. D.P.D. Swt. I selaku Anggota Pa Per Da Djatin (5 expl.)

5. Kepala Polisi Daerah Djatin

6. Pegawai Kadkasan Djatin

7. Kepala Staf Rangsang Pa Per Da Djatin

8. Kepala P.P.N.-Baru Tjibang Djatin

9. Ketua BAPPET Tjibang Djatin

10. Ketua D.U.D. Tjibang Djatin

11. Ketua BAPPET Tjibang Djatin

12. Ketua Pegawai Perusahaan-perusahaan Switsem Belanda Surabaya

13. Ketua Badan Pegawai Perusahaan-perusahaan Pertanggungjawaban Djawa Belanda Tjibang Djatin

14. Ketua Badan Pegawai Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda Tjibang Djatin

15. Ketua Badan Pusat Pegawai Perusahaan-perusahaan Pemborong Belanda Tjibang

Dikeluarkan di : M A R K A S
Pada tanggal : 14 Desember 1959
JENJUR PENGHUBUNG PERANG DAERAH DJATIM
Dn. PANGLIM T. & T. V/DEWIDAJA
ttd. SOETRACHMAN
KOLONEL M.P. 10168

dan ke
Penje

LAMPIRAN 19

no :	K/031/DANAS/60	Kepada
dit :	SEGERA/PARTINI	Jth. Direksi Badan2/Ketua Panitia
inspirasi :		Penumpang
perihal :	Kelut terhadap nota No. K/031/DANAS/1960 tanggal 28 Januari 1960.	di <u>B J A K A R T A</u>

Menarik nota kami No. K/031/DANAS/1960 tanggal 28 Januari 1960 dan suratnya tanggal 8 Februari 1960 No. Secx/018/DANAS 1960 bersama ini kami dapat memberi penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Untuk memudahkan pelaksanaan supaya dibuat daftar dari tenaga2 keturunan asing (Tionghwa) dengan perintjian sebagai berikut:
 - a. mereka yang telah ada di Indonesia pada waktu 6 bulan sebelum perundangan K.M.B. (1949);
 - b. mereka yang datang di Indonesia sesudah tahun 1949.
2. Terhadap golongan b yang status mereka adalah orang asing, supaya diambil tindakan sesuai dengan Instruksi KASAD No. Inatr/Pe.Per.Pu/089/1959, yaitu jika tidak dibatalkan lagi supaya diberhentikan dari jabatannya.
3. Terhadap golongan a supaya diperintji lagi dalam golongan2:
 1. mereka yang tegas2 menolak kewarganegaraan R.I. (berdasarkan perundangan K.M.B.), supaya dianggap orang asing dan dikenakan Instruksi KASAD/Pe.Per.Pu No. Inatr/089/Pe.Per.Pu/1959.
 2. mereka yang telah berusaha dengan salah satu jalan/tjara untuk menjadi warga negara R.I. berdasarkan ketentuan2 pemerintah yang pernah ada, meskipun sekarang tidak berlaku misalnya dengan jalan naturalisasi. Terhadap mereka supaya dianggap untuk sementara waktu sebagai warga negara R.I., sampai mereka menentukan status mereka berdasarkan perundangan dwikewarganegaraan R.I.-E.R.T. dan/atau ada keputusan tentang status mereka dari Pemerintah.
 3. mereka yang hingga kini masih terus berdiam diri, tidak pernah menentukan sikapnya. Terhadap mereka supaya dimintakan ketegasan, mau menjadi warga negara R.I. atau E.R.T. meskipun didalam perundangan soal dwi kewarganegaraan R.I.-E.R.T. kepada mereka diberi waktu 2 tahun untuk menentukan sikap. Jika mereka belum mau menentukan sikap, sementara waktu mereka harus dianggap sebagai orang asing, dan dikenakan Instruksi KASAD/Pe.Per.Pu No. Inatr/Pe.Per.Pu/089/1959. Jika mereka telah menentukan sikap memilih kewarganegaraan R.I. maka supaya dibantu daftar bagi mereka untuk mendapatkan perlakuan sebagai warga negara R.I. guna tertibnya supaya daftar tersebut dimintakan legalisasi pengadilan negeri setempat, sambil menunggu kemungkinan pelaksanaan setjara technical daripada perundangan soal dwikewarganegaraan R.I. - E.R.T., bagi mereka yang ingin menjadi warga negara R.I.

Dengan sendirinya pelaksanaan segala sesuatu tidak memerlukan biaya2.

Sekian, dan harap menjadi perhatian seperlunya.

DEWAN PIMPINAN DANAS
Wakil Ketua
ttd.

Sumber: Arsip CPV Jember

LAMPIRAN 20

REPERSENTASI PENGUNJAH PEREKONOMIAN
BESAR INDONESIA (DIB) - 1954-1957

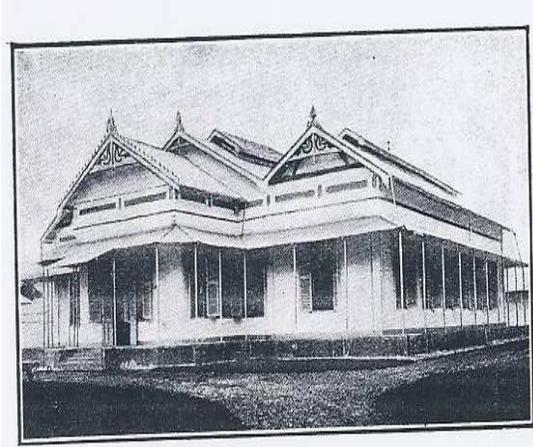
Pemilihan pegawai... 1954-1957

DAFTAR FORMASI dan BESERTING PRGAWAI
BAHAG PERWELIDIKAN PEREKONOMIAN BESAR (B.P.P.B.) DJEMBER 1954

FORMASI				BESERTING		
(Rantjana sebagaimana bila berdiri sendiri/ dilepaskan dari B.P.P.B.-Bogor)				(Sebagaimana keadaannya telah berjalan sekarang yang merupakan bagian Perumahan Djawa Tengah dan Timur dari B.P.P.B.-Bogor)		
Honor urut	D Jabatan	Gol. gadj	Honor urut	Didjabat oleh	Gol. gadj	Keterangan
PINAN	1. PRMIMPIN B.P.P.B. DJEMBER	P-IV	1.	Ir SOEMARJO	P-IV	to... p... p...
	2. Sekretaris	P-...				
BAGIAN KARET	3. AHLI PERTANTIAN	P-II	2.	Ir MOH. SALEH	P-III	
	4. Pengatur Pertjabaan (Proefveldassistent)	D-II	3.	Soeharsone a)	D-II	
	5. -idem-	D-II	4.	Soemarno a)	D-II	
BAGIAN SPOKLAJ	6. AHLI PERTANTIAN	P-II		Yacant	-	Beserting personalis seng, sementara did rangkap oleh Ir Soe
	7. Pengatur Pertjabaan (Proefveldassistent)	D-II	5.	Muhadjir a)	D-II	a) Kepada j (tiga) Proefveldassiste ini untuk sementara tugaskan bersama d gian KARET dan SPOK
BAGIAN KOPI	8. -idem-	D-II				
	9. AHLI PERTANTIAN	P-II	6.	Ir SOEKELWAN TANTO	P-II	
	10. Pengatur Pertjabaan (Proefveldassistent)	D-II	7.	Soerip H prajitno	D-II	
	11. -idem-	D-II	8.	Sidarta budojo	D-II	
	12. Pembantu (Djuru Pertjabaan)	B-II	9.	Edwin K...	B-II	Kepada para pe... (djuru pertjabaan kesesmanja diperb tukan pada bagian KARET, SPOKLAJ da KOPI.
13. -idem-	B-II	10.	Is. G. So...	B-II		
14. -idem-	B-II	11.	Hanny H...	B-II		
15. -idem-	B-II					
BAGIAN PEMBAKAU	16. AHLI PERTANTIAN	P-II	12.	Ir I. HAN...	P-II	
	17. Pengatur Pertjabaan (Proefveldassistent)	D-II	13.	Soewar...	D-II	
	18. -idem-	D-II	14.	Bamban Ajito	D-II	
	19. Pembantu (Pengatur Pertjabaan)	C-II	15.	Soedn...	C-III	
	20. Pembantu (Djuru Pertjabaan)	B-II	16.	Djula...	B-II	
	21. -idem-	B-II	17.	Suka...	B-II	
	22. -idem-	B-II	18.	Soer...	B-II	

	42.	Kerakit Taha Usaha	C-II	3	Hj. H.J. Fungke	-	
	43.	Djuru SIK	B-II	3	Sampson	B-II	
	44.	Kerakit & Perbaikan/ Kondisi Djuru Dilega Perbaikan/ Penjualan	B-II	3		B-III	
	45.	Kopala Urusan Taha Usaha	D-II	3	Boetomo	-	
	46.	Kerakit Taha Usaha th. I	C-III	3		C-III	
	47.	Kerakit Taha Usaha	G-II	3	H.f. Wangke	C-II	Dianjaja, tuganya, di- sebabkan urusan kendaran
	48.	Kerakit Taha Usaha	C-II	3	Hj. Soehlingah	C-II	Merangkap teloromate.
	49.	-Idem-	C-II	3	R. Maharl	B-II	
	50.	Djuru SIK	B-II	3	Atno	B-II	
	51.	Kerakit & Gambar th. I	C-III	3	Atmo	C-III	
	52.	Kerakit & Gambar	C-II	3	Koeharl	C-II	
	53.	Pemaha Perbaikan (M.B.I.O.H.O.E.A.S.) Asisten M.B.I.O.H.O.E.A.S. (Pengantar Perbaikan)	B-II	3	Hoerini	D-I	
	54.	Pemaha Perbaikan (M.B.I.O.H.O.E.A.S.) Asisten M.B.I.O.H.O.E.A.S. (Pengantar Perbaikan)	D-II	3	H. I. Soetimo	D-II	
	55.	Pemaha Keaktifan (Arduaris)	D-II	4	H. Soeharsono	C-II	
	56.	Kerakit & Perbaikan/ Keaktifan	C-II	4	Rechani	B-II	
	57.	Djuru SIK Perbaikan/ Keaktifan	B-II	4		B-II	
	58.	Kerakit Taha Usaha Gubernur Urusan Rumah Tangga/ Kerakit	C-II	4		-	
	59.	Djuru Dilega	A-II	4	P. Koes	A-II	
	60.	-Idem-	A-II	4	Ribon	A-II	
	61.	Djuru penerah	A-II	4	Endin	A-II	
	62.	-Idem-	A-II	4	Hasan	A-II	
	63.	-Idem-	A-II	4	Sopani	A-II	
	64.	-Idem-	A-II	4	Sealin	A-II	
	65.	Djuru Kerya Djuru Kerya Perbaikan	A-II A-II D-II	4 4 4	Ismen	A-II	
	66.	Kerakit & Urusan Kendaran	C-II	5	Arman	B-II	Sementara di perbantukan tangan sdr. H.J. Fungke
	67.	Djuru kendaran bermotor	B-II	5	Ruman	B-II	
	68.	-Idem-	B-II	5	Soenardji	B-II	
	69.	-Idem-	B-II	5		B-II	
	70.	-Idem-	B-II	5	Hendro	B-II	

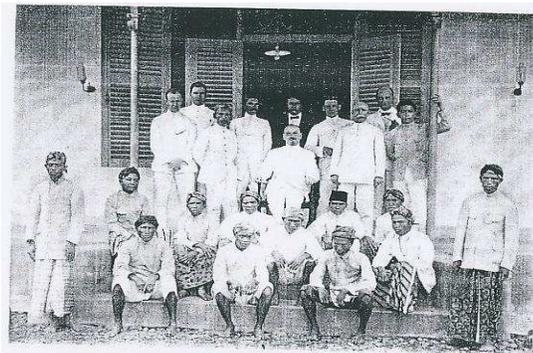
LAMPIRAN 21
FOTO-FOTO



Besoekisch Proefstation Maart 1913

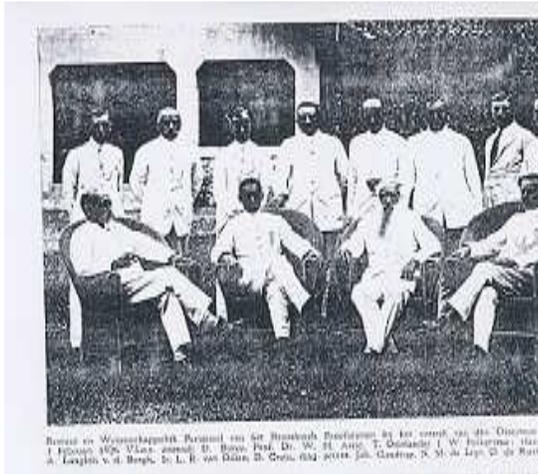
Gedung *Besoekisch Proefstation*

Tahun 1913



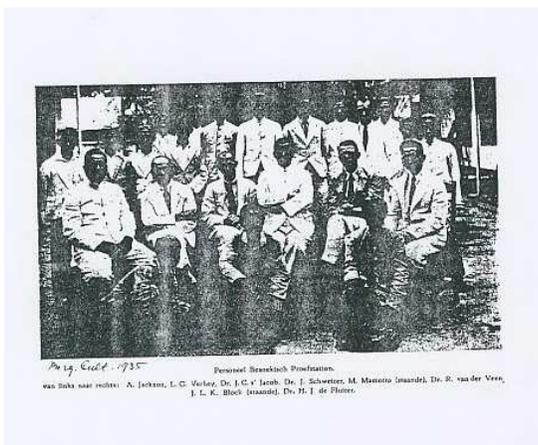
Pengurus *Besoekisch Proefstation*

Tahun 1911



Besoekisch Proefstation Tahun 1911

Pengurus atau para *Bestuur*



Tahun 1935. Dari kiri ke kanan: A. Jackson, L.C. Verbey, Dr. J.C. a' Jacob, Dr. J. Schweizer, M.H. Mamoto (berdiri), Dr. Van Der Veen, J.L.K. Block (berdiri) dan Dr. Fluitzer

Pengurus *Besoekisch Proefstation*

Pendiri Besoekisch Proefstation

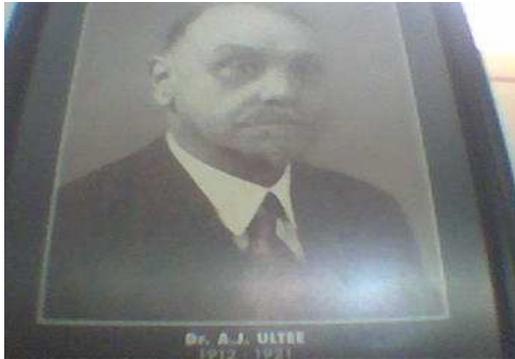


T. Ottolander



D. Birnie

Para Direktur *Besoekisch Proefstation*



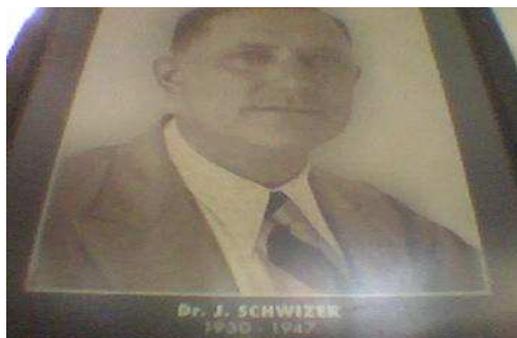
Dr. A.J. Ultee (1912-1921)



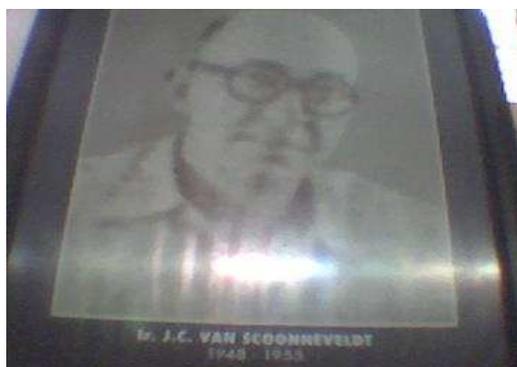
Dr. Willem Hendrik Arisz (1921-1924)



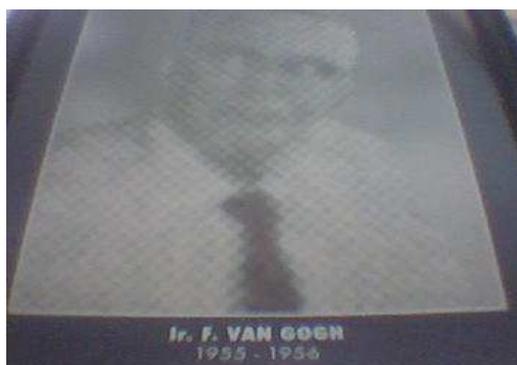
J.J.S. Gandrup (1924-1930)



Dr. J. Schwizer (1930-1947)



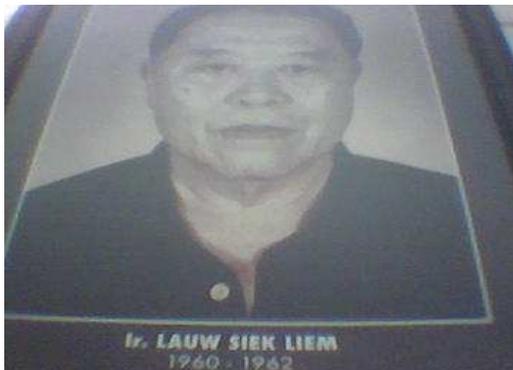
Dr. J.C. Schoonneveldt (1948-1955)



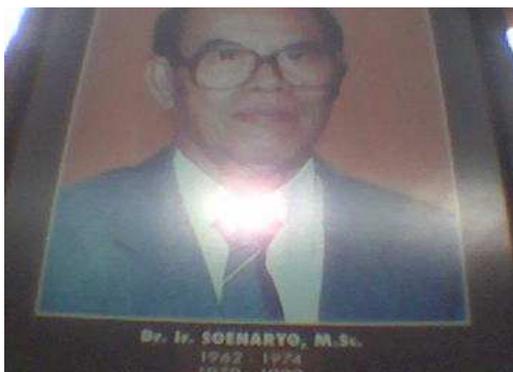
Ir. F. Van Gogh (1955-1956)



Ir. W.P. Van Der Knaap (1956-1958)



Ir. Lauw Siek Liem (1960-1962)



Ir. Soenaryo (Sejak Tahun 1962)

Beberapa orang Belanda yang Pergi Dari CPV Jember Saat Nasionalisasi



Dr. J.C. a' Jacob

Dr. J.C. a' Jacob

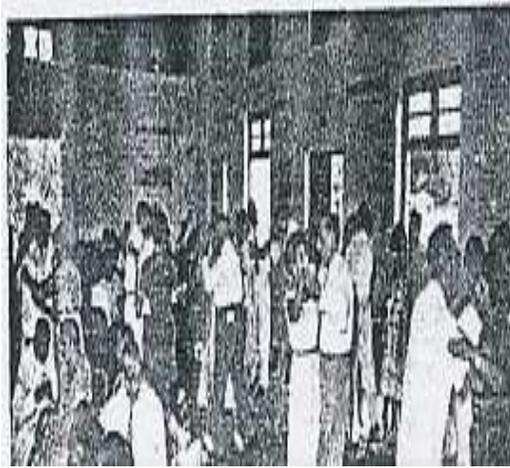


J.C. van der Heide van Sprankhuizen.

Sprankhuizen

J.C. Van Der Heide Van

Lain-lain

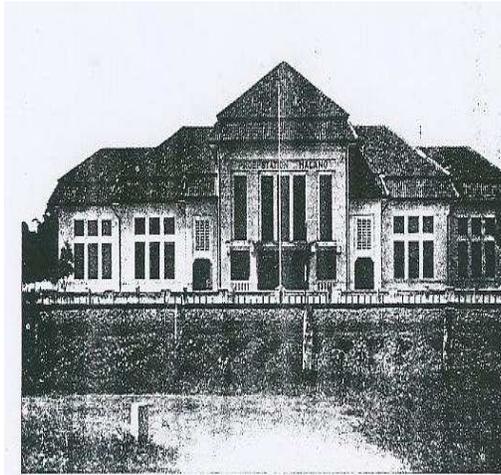


di Gedung *Societeit*

Aktifitas Dansa orang-orang Belanda



Gedung CPV Bogor TAhun 1957



Het proefstationgebouw te Malang

Voor het meer dagelijksche contact met het Proefstation werd tenslotte in 1935 een Dagelijksch Bestuur ingesteld.

4. STAF

Dr. Wurth, die bij de oprichting van het Proefstation met de leiding werd belast, overleed zeer plotseling op 10 November 1922. Hij was een zeer gezien en eminent voorlichter der cultures en zijn nagedachtenis is geeerd door een gedenksteen, die in 1923 in de aula van het gebouw werd aangebracht. Op 1 April 1923 trad Dr. A. J. Ultée, tot dien tusschen Directeur van het Besoekisch Proefstation, te Malang als Directeur op, totdat hij op 1 Januari 1932 repatrieerde en door den tegenwoordigen Directeur, mag. sc. Gandrup werd vervangen.

Een lijst der overige medewerkers aan het Proefstation volgt hieronder:

Assistent-Plantkundige:

Dr. P. Arens	1/7	1911-30/6	1921
Dr. W. Bally	1/9	1921-31/8	1931
Dr. H. R. M. de Haan	1/4	1921-30/4	1923

Landbouwkundige:

M. W. Senstius	15/10	1913-31/7	1917
J. C. Menting	1/7	1917-30/4	1919
Th. G. E. Hoedt	15/10	1923-30/11	1926
C. C. Ament	1/11	1926- tegen eind	1934
G. Björklund	15/10	1926-15/9	1928
Ir. Tj. Raaff	1/11	1926-ult. 1932	
Ir. W. Snoep	1/10	1934-	
Dr. W. H. de Jong	14/6	1935-	

Scheikundige:

Ir. J. C. Hartjous	1/1	1917-10/11	1922
Dr. C. Kraans	1/11	1925-	

Selectionist:

Dr. M. Hille Ris Lambers	1/9	1926-	
--------------------------	-----	-------	--

Entomoloog:

Dr. H. Begemann	1/1	1927-1/5	1929
Dr. J. G. Betrem	15/2	1930-	

Phytopatholoog:

Dr. A. Pfälzer	1/12	1931-	
----------------	------	-------	--



**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN KLAIM
MASYARAKAT MISKIN PT. (Persero) ASURANSI
KESEHATAN INDONESIA CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Diploma III Manajemen Jurusan Administrasi Keuangan
Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh
Uky Dwi Avrianti
NIM 040803102224

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN
JURUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

MOTTO

Sebaik-baiknya orang berbicara adalah melakukannya
(Che Guevara)

*Kalau Anda bisa membayangkannya, Anda pasti bisa mencapainya. Kalau Anda bisa
Memimpikannya, Anda Pasti bisa mewujudkannya*
(William Arthur Worol)

*Kau memperoleh kekuatan, keberanian dan rasa percaya diri setiap pengalaman yang membantu
Berhenti sejenak untuk menghadapi rasa takutmu. Kau dapat berkata pada
Dirimu sendiri, " Aku telah tabah menghadapi ini. Aku pasti mampu
Menghadapi hal yang berikutnya ".*
(Elanor Roosevelt)

*Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah
Akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat.*
(HR Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Saya persembahkan rasa syukur serta bahagia ini atas terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata dan pendidikan Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember ini kepada :

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta petunjukNya kepadaku, dari aku tiada mengerti sampai mengerti akan hakekat hidup ini. Alhamdulillah , segala puji hanya untuk kepadaMu.
2. Nabi Besar Muhammad SAW. Atas sunah-sunah dan ajarannya yang telah menuntunku ke jalan yang benar dan membuatku semakin dekat dengan Tuhanku Allah SWT. Semoga Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepadaNya beserta keluarga dan sahabat.
3. Ayah dan mama yang telah membesarkan, membimbing dan mendidikku sampai aku sebesar ini hingga aku dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Doaku senantiasa untuk kebahagiaan dan keselamatan untukmu dunia dan akhirat.
4. Masku tersayang Tomy Eko Afrianto yang selalu senantiasa memberikan dukungan biar cepet selesai laporanku.
5. Seseorang yang senantiasa ada dalam hati dan pikiranku selama ini, selalu ada saat aku butuh kasih sayangmu kakakku gino, aku sayang kamu kak.....
6. Mas Farid, terimakasih atas doanya, laporanku selesai mas.....
7. Temen-temenku ana rebonding (abon), ninul, dian, ipank, tantrin mbak bunga dan yang tidak mungkin ku sebutkan satu persatu he..he.. :) Suwun – suwun yoo rek.....
8. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberiku banyak belajar dalam proses hidup.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini yang berjudul “Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Klaim Masyarakat Miskin PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Jember” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Serta tak lupa juga pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu membimbing serta dukungan dan bantuannya atas terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini diantaranya yang terhormat,

1. DR. H. Sarwedi, MM , selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan pada penyusun untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
2. Drs. Sriono, MM, selaku Ketua Program Studi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
3. Dra. Susanti, Msi selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing serta memberikan inspirasi pemikiran kepada penyusun.
4. Ibu Endah Herlina, selaku Pimpinan Cabang PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
5. Segenap karyawan PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember yang langsung maupun tidak langsung telah membantu penyusunan selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

Dalam laporan ini, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan penyusun mengharapkan saran-saran yang bersifat membangun guna menambah pengetahuan serta penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata semoga laporan yang telah disajikan penyusun dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Wasalamu'alaikum wr. Wb.

Jember, Desember 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR FORMULIR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.1 Alasan Pemilihan Judul	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3 Obyek Dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.5 Bidang Ilmu yang Mendasari.....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Administrasi	6
2.1.1 Pengertian Administrasi	6
2.1.2 Tujuan Administrasi	7
2.1.3 Fungsi Administrasi.....	7
2.1.4 Pelaksanaan Administrasi Tabungan.....	7
2.2 Bank	8
2.2.1 Pengertian Bank	8

2.2.2 Fungsi Bank	9
2.2.3 Tujuan Bank.....	9
2.2.4 Tugas Bank.....	9
2.2.5 Jenis-jenis Bank.....	9
2.2.6 Tabungan.....	11
2.2.7 Bunga.....	11
2.2.8 Nasabah.....	12
BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	13
3.1 Sejarah Singkat PT. BTPN	13
3.2 Visi dan Misi PT. BTPN.....	16
3.3 Struktur Organisasi.....	18
3.4 Kegiatan Usaha PT. BTPN.....	25
3.4.1 Penghimpunan Dana.....	25
3.4.2 Penyaluran Dana	26
3.5 Ketentuan Umum Tabungan Citra.....	27
3.6 Kegiatan-kegiatan Pada Tabungan Citra.....	29
BAB IV: HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	30
4.1 Pelaksanaan Administrasi Pembukaan Tabungan Citra.....	30
4.1.1 Formulir yang digunakan dalam Pembukaan Rekening Tabungan Citra.....	32
a. Formulir Pembukaan rekening.....	32
b. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Citra.....	38
c. Formulir Kartu Tanda Tangan.....	40
d. Buku Tabungan Citra.....	42
4.2 Pelaksanaan Administrasi Penyetoran Tabungan Citra.....	44
4.2.1 Formulir yang digunakan dalam Penyetoran Tabungan Citra.....	46
4.3 Prosedur Pelaksanaan Administrasi Penarikan Tabungan Citra.....	48

4.3.1	Formulir yang digunakan dalam Penarikan Tabungan Citra.....	50
4.4	Prosedur Pelaksanaan Administrasi Penutupan Tabungan Citra.....	51
4.4.1	Aplikasi Penutupan Tabungan Citra.....	53
4.5	Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata.....	54
4.5.1	Membantu Pembukaan Rekening Tabungan Citra.....	54
4.5.2	Membantu Menerima Setoran Tabungan Cita.....	54
4.5.3	Membantu penarikan Tabungan Citra.....	54
4.5.4	Membantu Penutupan Tabungan Citra.....	54
4.5.5	Membantu Pelaksanaan Administrasi Tabungan Pensiunan.....	55
BAB V : KESIMPULAN.....		56
DAFTAR PUSTAKA.....		59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Buku Register Tabungan Simpedes Penabung Perseorangan.....	42
----------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Struktur Organisasi PT. BRI (Persero) Unit Balung Cabang Jember ... 20
- Gambar 2.** Prosedur Administrasi Tabungan Simpanan Pedesaan (SIMPEDES) ... 49

DAFTAR FORMULIR

Formulir 1.	Formulir Permohonan Pembukaan Rekening SIMPEDES	38
Formulir 2.	Formulir Data Pribadi (<i>Customer Information</i>) Nasabah.....	39
Formulir 3.	Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) Pembukaan Simpedes.....	40
Formulir 4.	Slip Penyetoran Tabungan Simpedes.....	43
Formulir 5.	Buku Tabungan Simpedes	44
Formulir 6.	Slip Penarikan Tabungan Simpedes.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	55
2. Formulir Permohonan pembukaan Tabungan Simpedes.....	58
3. Formulir Data Pribadi (<i>Customer Information</i>) Nasabah.....	59
4. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) Pembukaan Rekening (Depan).....	60
5. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) Pembukaan Rekening (Belakang).....	61
6. Buku Tabungan Simpedes.....	62
7. Slip Penyetoran Tabungan Simpedes.....	63
8. Slip Penarikan Tabungan Simpedes.....	64
9. Surat Ijin Permohonan PKN dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember.....	65
10. Surat ijin PKN Dari Kantor Cabang (kanca) PT. BRI (Persero) Jember.....	66
11. Surat Keterangan Selesai Magang (PKN) dari PT. BRI (Persero) Jember....	67
12. Surat Permohonan Nilai dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember.....	68
13. Surat Keterangan Nilai dari PT. BRI (Persero) Unit Balung Cabang Jember	69
14. Daftar Hadir PKN di. PT. BRI (Persero) Unit Balung Cabang Jember.....	70
15. Kartu Konsultasi.....	71

**LEMBAR PERSETUJUAN PENULISAN LAPORAN
PRAKTEK KERJA NYATA**

Nama : **Uky Dwi Avrianti**
Nim : 040803102224
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Administrasi Keuangan
Judul : Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Klaim
Masyarakat Miskin PT. (Persero) Asuransi
Kesehatan Indonesia Cabang Jember
Dosen Pembimbing : Dra. Susanti, Msi

Jember, Desember 2007

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

Dra. Susanti, Msi
NIP. 132 006 243

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada saat ini telah mengalami kemajuan pesat. Tentunya hal ini membawa dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembangunan di segala bidang, baik di sektor formal maupun informal. Adanya pembangunan tersebut akan sangat berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan dunia usaha yang ditandai dengan semakin banyak berdirinya perusahaan di berbagai bidang usaha, baik jasa, industri ataupun yang bergerak di bidang perdagangan. Apabila perusahaan tersebut mampu secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam mengelola Sumber Daya Manusia yang ada disertai dengan pemanfaatan fasilitas yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal guna mencapai kelangsungan hidup perusahaan dan peningkatan produktivitas.

Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia masih banyak masyarakat miskin yang masih harus dibantu oleh Pemerintah. Pada umumnya ketika orang berbicara mengenai kemiskinan, maka yang dimaksud adalah kemiskinan material dengan pengertian yaitu seseorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu memenuhi standart minimum kebutuhan pokoknya agar dapat hidup secara layak. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar, tetapi juga terkait dengan berbagai dimensi lain kehidupan manusia seperti kesehatan.

Akhir tahun 2004 MenKes dengan SK No. 1241/MenKes/SK/XI/2004, menugaskan PT. ASKES (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah merupakan perubahan pola pendekatan pelayanan dari pendekatan supply ke pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin atau ASKESKIN PT. ASKES (Persro), sebagai perusahaan asuransi kesehatan yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) sampai saat ini menjadi perusahaan

asuransi yang memberikan manfaat pelayanan dari pelayanan RJPT (Rawat Jalan Tingkat Pertama) bahkan sampai pelayanan RITP (Rawat Inap Tingkat Pertama) ataupun bahkan pelayanan-pelayanan yang berdampak biaya tinggi, seperti Hemodialis (gagal ginjal).

Hambatan utama pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Hambatan terhadap akses tersebut dikarenakan faktor pelayanan kesehatan. Banyak faktor yang menyebabkan peningkatan biaya kesehatan. Diantaranya perubahan pola penyakit.

Jumlah sasaran peserta Program ASKESKIN adalah 19,1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) atau 76.400.00 jiwa yang ditetapkan oleh MenKes RI bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) 2006.

Oleh karena itu, Perusahaan Asuransi Kesehatan sebagai perusahaan yang dananya dari Pemerintah, perlu memiliki administrasi yang baik. Administrasi merupakan sumber informasi bagi pimpinan perusahaan di dalam menganalisa dan mengambil kebijakan perusahaan. Dengan adanya Asuransi Kesehatan Indonesia, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan PT. Askes (Persero) sebagai tempat untuk membantu dan meringankan beban pembayaran klaim terutama bagi masyarakat miskin. Semua itu tidak terlepas dari pelaksanaan administrasi yang baik dan benar serta dilakukan secara terus-menerus.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengerti secara langsung pelaksanaan administrasi pembayaran klaim masyarakat miskin pada PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) Cabang Jember.
2. Untuk membantu pelaksanaan administrasi pembayaran klaim masyarakat miskin pada PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) Cabang Jember.

1.3 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk memperoleh pengalaman praktis di bidang administrasi keuangan pembayaran klaim pada PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Jember.

1.4 Lokasi dan Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1.4.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) Cabang Jember yang berlokasi di Jalan Jawa No. 55 Jember.

1.4.2 Waktu Praktek Kerja Nyata

Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) kurang lebih 144 jam efektif yang dilaksanakan mulai tanggal 03 September 2007 sampai dengan tanggal 29 September 2007 di kantor PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) Cabang Jember.

Adapun jam kerja yang dilaksanakan pada PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) Cabang Jember selama 28 hari sebagai berikut :

1. Senin – Kamis : 07.30 – 12.30 WIB
Istirahat : 12.30 – 13.00 WIB
2. Jumat : 07.30 – 11.30 WIB
Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3. Sabtu : PPATRS (07.30– 12.30 WIB)

Dilakukan penambahan jam kerja, yaitu pada tanggal 30 Januari 2008 sampai tanggal 06 Febuari 2008 selama 6 hari.

1. Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 WIB
Istirahat : 12.30 – 13.00 WIB
2. Jumat : 07.30 – 11.30 WIB
Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3. Sabtu : 07.30 – 12.30 WIB

1.5 Bidang Ilmu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.5.1 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Dalam penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata maupun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata diperlukan dasar ilmu yang menjadi pedoman, bidang ilmu yang digunakan :

- a. Pengantar Manajemen
- b. Manajemen Keuangan
- c. Dasar-dasar Akuntansi
- d. Manajemen Sumber Daya Manusia

1.5.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No.	Kegiatan	Minggu Ke				
		I	II	III	IV	V
1.	Pembukaan praktek Kerja Nyata dan Perkenalan dengan pimpinan serta karyawan perusahaan.	x				
2.	Mengenal perusahaan dengan melakukan observasi.	x				
3.	Meminta penjelasan dan pengarahan tentang gambaran umum perusahaan.	x				
4.	Meminta penjelasan yang berhubungan dengan administrasi pembayaran klaim masyarakat miskin.	x	x	x	x	
5.	Menyelesaikan tugas-tugas yang ada di PT. Asuransi Kesehatan (Persero) terutama tentang administrasi pembayaran klaim masyarakat miskin.	x	x	x	x	x
6.	Menyalin catatan-catatan atau data-data penting yang akan digunakan dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata dan konsultasi pada Dosen Pembimbing			x	x	x
7.	Mengakhiri Praktek Kerja Nyata				x	
8.	Menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata				x	x

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi

Menurut asal kata administrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Administration* atau dari bahasa Belanda *Administratis*. Banyak sekali perumusan mengenai administrasi, salah satunya yang paling sederhana adalah administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam bentuk suatu usaha demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie (2000:9) administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Walaupun administrasi merupakan suatu kebutuhan proses penyelenggaraan, namun untuk tata tertib pelaksanaannya dibedakan dalam delapan unsur, yaitu :

1. Pengorganisasian

Rangkaian perbuatan menyusun kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan dari usaha kerjasama bersangkutan.

2. Manajemen

Rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan menggerakkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama itu benar-benar tercapai.

3. Tata Hubungan

Rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari suatu pihak kepada pihak lain dalam satu kerja sama itu.

4. Kepegawaian

Rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga-tenaga yang diperlukan dalam usaha kerja sama itu.

5. Keuangan

Rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerja sama itu.

6. Perbekalan

Rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar dan memelihara segenap perlengkapan dalam usaha kerja sama itu.

7. Tata Usaha

Rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam kerjasama itu.

8. Perwakilan

Rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekeliling terhadap usaha kerja sama itu.

Masing-masing unsur administrasi tersebut di atas mencakup beberapa pola kegiatan dan kedelapan unsur itu berkaitan erat sehingga merupakan kesatuan tak terpisahkan yang menunjang seluruh proses pengerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam usaha kerjasama itu.

Sedangkan menurut (Seokarna K:9) pengertian administrasi dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Administrasi dalam pengertian sempit

Administrasi berarti tata usaha (administrasi) atau *office work* adalah segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan dan lain-lain.

2. Administrasi dalam arti luas

Dalam hal ini pengertian administrasi dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut kepranataan (*intitutio*), yaitu :

- a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari pemikiran, perencanaan, pengaturan, pergerakan, pengawasan atau pengendalian sampai pada proses pencapaian tujuan.
- b. Dari sudut fungsi, administrasi berarti keseluruhan tindak (aktivitas) yang harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang sekelompok orang.
- c. Dari sudut institusi, administrasi adalah kelompok orang yang secara teratur melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Siagian (2002), administrasi didefinisikan sebagai seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan atau yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau dengan kata lain, dalam keadaan bagaimana dan dimana saja ada kegiatan kerja serta tujuan yang hendak dicapai, disitu pasti ada administrasi.

Tujuan dari administrasi itu sendiri adalah :

1. Usaha penerbitan alat-alat perlengkapan yang mungkin terjadi.
2. menghimpun suatu ketentuan di dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan dari segi pengorganisasian perusahaan.
3. mendayagunakan alat-alat tersebut sehingga dapat berjalan dengan sempurna mencapai sasaran.

2.2 Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim berarti permohonan atau tuntutan seseorang pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis (A. Hasyim Ali, 2001:55)

2.3 Asuransi dan Pengelolaan Serta Jenisnya

2.3.1 Pengertian Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang berarti tanggungan. Istilah asuransi ini lebih dikenal dan dipakai dalam praktek perusahaan pertanggungan, orang yang mengasuransikan disebut dalam bahasa aslinya *ge assurarde*.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian asuransi, ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang asuransi :

1. Asuransi adalah perlindungan melalui kompensasi sejumlah uang atau pembayaran ganti rugi, yang disediakan berdasarkan kontrak tertulis antara kedua belah pihak bila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan sesuai salah satu pihak, atas dasar pertanggungan-pertanggungan tertentu, bersepakat untuk mengganti kerugian yang dialami pihak yang lain bila sesuatu yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan terjadi (Drs. Wardana, 2001:161).
2. Menurut KUHD yang tercantum dalam pasal 246 KUHD
Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana satu penanggung mengikat diri kepada satu tanggungan, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan didendanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.
3. Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Pengasuransian asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang dipertanggungan.

2.3.2 Pengelolaan Asuransi dan Jenis-jenisnya

Terdapat beberapa macam penggolongan asuransi, yaitu :

1. Penggolongan secara yuridis, yaitu :
 - 1) Asuransi kerugian, adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bawah penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa pemberian ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir.

- 2) Asuransi jumlah, adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya.

Contoh asuransi jumlah, yaitu :

- a Asuransi jiwa.
- b Asuransi sakit (apabila prestasi penanggung sudah ditentukan sebelumnya).
- c Asuransi kecelakaan (apabila prestasi penanggung berupa pembayaran sejumlah uang, besarnya sudah ditentukan sebelumnya).
- d Asuransi kesehatan, yaitu nama atau sebutan yang telah diterima oleh industri asuransi sebagai istilah yang luas untuk cabang asuransi yang meliputi jenis penghasilan karena tidak mampu lagi bekerja, biaya pengobatan dan santunan kematian karena kecelakaan (Drs. Wardana, 2001:142).

2. Penggolongan berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak, yaitu :

- a Asuransi sukarela (*voluntary insurance*), adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan pada kehendak bebas dari para pihak-pihak yang mengadakannya.

Contohnya :

1. Asuransi perusahaan;
2. Asuransi kendaraan bermotor;
3. Asuransi awak pesawat udara
4. Asuransi kecelakaan, dan sebagainya.

- b Asuransi wajib (*compulsory insurance*), adalah asuransi yang terbentuk karena diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan.

Contohnya :

1. Dan Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Umum (UU No. 33 Tahun 1964 jo PP No. 17 Tahun 1965)
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No. 3 Tahun 1992)

3. Penggolongan berdasarkan tujuan, dapat dibagi atas :

a Asuransi komersial (*commercial insurance*)

Semua jenis asuransi yang diatur dalam KUHD merupakan asuransi komersial dan pada dasarnya asuransi komersial merupakan asuransi sukarela.

b Asuransi sosial (*social insurance*)

Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.

Dari uraian di atas, tampak terdapat kaitan yang erat antar golongan-golongan asuransi, sehingga dapat dibuat sistematika sebagai berikut :

1. Asuransi komersial : dapat merupakan asuransi kerugian atau asuransi jumlah, bersifat sukarela, dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
2. Asuransi sosial : dapat mengandung unsur asuransi kerugian dan asuransi jumlah, bersifat wajib, diselenggarakan oleh pemerintah sebagai asuransi premi.
3. Asuransi saling menanggung : dapat merupakan asuransi kerugian atau asuransi jumlah, bersifat sukarela.

2.4 Manfaat Asuransi

Jasa asuransi sebagai lembaga keuangan non bank yang bernaung di BUMN mempunyai cukup besar, baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan.

Manfaat asuransi adalah sebagai berikut :

1. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dari kegiatan perusahaan, dengan mengalihkan risiko, kepada perusahaan asuransi. Perusahaan dapat mencurahkan perhatian dan pikirannya bagi peningkatan usahanya.
2. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian kredit apabila seorang meminjam kredit di bank, maka bank biasanya meminta debitur untuk asuransi benda jaminan.

3. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian, baik yang disebabkan oleh seseorang ataupun diri sendiri.
4. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan.
5. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul dari perusahaan asuransi dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang bagi usaha-usaha pembangunan.
6. Asuransi memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT. (Persero) Askes Indonesia

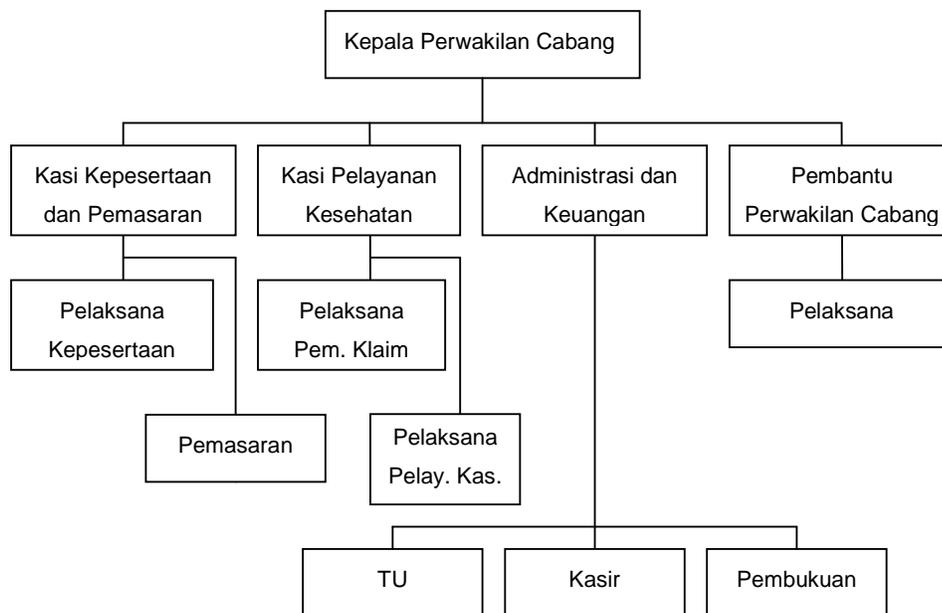
Sejarah Askes di Indonesia, sebenarnya dimulai sejak sebelum Perang Dunia II. Pada tahun 1934, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang dikenal dengan *restitutie regeling* yang mengatur restitusi biaya pelayanan kesehatan bagi pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pegawai Belanda dengan tingkat tertentu diberikan tunjangan biaya pelayanan kesehatan dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh yang bersangkutan. Ketentuan ini ternyata terus berlangsung sampai dengan tahun 1968. Pemerintah menyadari bahwa pemeliharaan kesehatan dengan sistem restitusi tersebut akan menimbulkan beban administratif yang berat dan beban anggaran yang besar. Oleh karena itu pada tahun 1968 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 230/1968 untuk menggantikan ketentuan *restitutie regeling* dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa dalam penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan setiap pegawai negeri dan pensiunan diwajibkan untuk memberikan iuran dalam prosentase tertentu dan penerima pensiun diwajibkan untuk memberikan iuran tertentu setiap bulannya (sekarang 2% dari gaji pokok). Menteri Kesehatan pada waktu itu, Prof. Dr. Siswobesi mencanangkan program ini sebagai embrio dari program asuransi nasional. Untuk menyelenggarakan program tersebut dibutuhkan suatu Badan Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK)

Pada tahun 1984 terjadilah perkembangan baru dengan terbitnya PP No. 22/1984 yang mengatur tentang ketentuan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan menerima pensiun beserta anggota keluarganya dan PP No. 23/1984 mengatur tentang perubahan BPDPK menjadi Perum Husada Bakti (PHB). Pada tahun 1992 terbitlah PP No. 12/1992 yang mengubah PHB menjadi PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia. Di dalam PP No. 69/1991 cakupan peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia diperluas lagi tidak hanya melayani pegawai negeri, penerima pensiun beserta keluarganya, akan tetapi melayani ditambah dengan perintis kemerdekaan, veteran beserta anggota

keluarganya. Sedangkan bagi badan usaha milik negara (BUMN), swasta maupun badan-badan lainnya dimungkinkan ikut bergabung dengan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia sebagai peserta sukarela. Perluasan kepesertaan ini sudah tentu membawa implikasi bentuk dan jenis-jenis satuan yang ditawarkan, agar para peserta sukarela tertarik untuk bergabung dengan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.

3.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi yang ditetapkan di PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember adalah struktur organisasi garis. Dalam struktur ini disajikan gambaran dari pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian guna mencapai tujuan perusahaan. Adapun struktur organisasi PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan 13-10 Jember adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan 13-10 Jember

Sumber : PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan 13-10 Jember

Berdasarkan struktur organisasi yang ada maka, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Kantor Kepala Perwakilan Cabang

Tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas kantor perwakilan cabang.
- b. Mengkoordinasi, membimbing dan membina kepala seksi dan pembantu perwakilan cabang (DPC).
- c. Menyusun rencana kerja anggota KPC.
- d. Melaksanakan program pemeliharaan kesehatan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pemasaran.
- f. Melaksanakan penyuluhan kepada peserta dan anggota keluarganya serta PKK.
- g. Menetapkan pelayanan kesehatan dan pengendalian PKK.
- h. Menanggulangi keluhan peserta dan PKK.
- i. Menyiapkan jaringan pelayanan kesehatan peserta.
- j. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan secara efektif dan efisien.
- k. Melaksanakan kegiatan investasi finansial.
- l. Menyelenggarakan administrasi kepesertaan.
- m. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor perwakilan cabang.
- n. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara prasarana operasional serta sumber daya manusia, kearsipan dan lain-lain.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kantor cabang.
- p. Melaksanakan pengadaan barang-barang dan alat kantor sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Wewenang :

- a. Membuat ikatan kerja sama (IKS) tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan peserta.
- b. Membuat IKS tentang kepesertaan dengan BU/Operasional kemasyarakatan.

- c. Melaksanakan pengadaan obat.
- d. Membuat pengantar rujukan/surat jaminan pelayanan kesehatan.
- e. Menandatangani cek.
- f. Menyetujui pembayaran.
- g. Mengatur penempatan pelaksana-pelaksana KPC.

Tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi di lingkungan unit masing-masing.
- b. Bertanggung jawab atas fasilitas yang berada di lingkungan unit yang bersangkutan.
- c. Bertanggung jawab atas pembinaan disiplin pegawai.
- d. Bertanggung jawab atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap semester/tahunan.

2 Kasi Administrasi dan Keuangan

Tugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi Administrasi dan Keuangan.
- b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran alat-alat keuangan.
- c. Melakukan sistem akuntansi perusahaan.
- d. Melakukan sistem akuntansi finansial.
- e. Menyelenggarakan pengendalian anggaran.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala sesuai peraturan yang berlaku.
- g. Menyiapkan arsip data dan pertanggungjawaban keuangan dan arsip lainnya.
- h. Menyelenggarakan ketatausahaan, tata naskah, dokumentasi, rumah tangga serta urusan lainnya.
- i. Mengatur dan melaksanakan dokumentasi sarana dan prasarana.
- j. Melaksanakan tugas lain dari Kantor Perwakilan Cabang.
- k. Berperan serta dalam laporan manajemen.

Wewenang :

- a Memutuskan penerimaan/penolakan dokumen yang berkaitan dengan penagihan.
- b Menetapkan keamanan dan tata tertib Kantor Perwakilan Cabang.
- c Memberikan keterangan penjelasan sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, sepanjang yang sifatnya diperkenankan.

Tanggung jawab :

- a Bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi di lingkungan unit masing-masing.
- b Bertanggung jawab atas fasilitas yang berada di lingkungan unit yang bersangkutan.
- c Bertanggung jawab atas pembinaan disiplin pegawai.
- d Bertanggung jawab atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap semester/tahunan.

3 Pemegang Kas atau Kasir

Tugas :

- a Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang tunai untuk membayar klaim tagihan yang telah disetujui oleh kasi keuangan dan kepala KPC.
- b Melakukan pencatatan dalam buku tunai, buku bank dan register cek/bilyet giro.
- c Meminta tanda bukti penerimaan dan pengeluaran tiap hari kepada pelaksana pembukuan.
- d Melakukan pemotongan pajak dan pembayaran pajak.
- e Membaya biaya gaji dan tunjangan
- f Melakukan pencatatan dan pengelolaan investasi.
- g Membuat register penutupan kas.

4 Pelaksana Adminisrasi dan Keuangan

Tugas :

- a. Melakukan tata pembukuan dalam buku kas dan banik KPC.
- b. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan KPC.
- c. Melaksanakan penjurnalan dalam buku/slip jurnal.

- d. Meneliti klaim yang diverifikasi oleh bagian pelayanan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kasi Administrasi dan Keuangan.

5 Pelaksanaan Tata Usaha

Tugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan kesehatan.
- b. Merencanakan program pemeliharaan kesehatan.
- c. Menentukan nilai ganti rugi atas tagihan dan PKK.
- d. Melaksanakan verifikasi klaim.
- e. Melakukan penyuluhan terhadap PPK dalam pelayanan kesehatan.
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- g. Menetapkan pelaksana pelayanan dan pengendalian PPK untuk peserta wajib dan non wajib.
- h. Menyelenggarakan administrasi pelayanan kesehatan.
- i. Menetapkan pelaksana pelayanan dan pengendalian PKK.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wewenang :

- a. Menandatangani pengantar surat rujukan atas nama KPC.
- b. Menandatangani surat jaminan pelayanan atas nama KPC.

Tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi di lingkungan unit masing-masing.
- b. Bertanggung jawab atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap semester/tahunan.

6 Pelaksana Pemeriksaan Klaim

Tugas :

- a. Meneliti kelengkapan persyaratan kebenaran klaim.
- b. Menghitung jumlah kasus dan nilai ganti sesuai ketentuan yang berlaku.

- c Mencatat nilai ganti rugi klaim dalam buku register klaim.
- d Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kasie pelayanan kesehatan.
- e Membuat grafik biaya pelayanan kesehatan/*unit cost* masing-masing.
- f Penyajian data-data kasus/biaya untuk laporan bulanan.

7 Pelaksana Pelayanan Kesehatan Askeskin

Tugas :

- a Setiap peserta Askeskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar dari Puskesmas dan jaringannya.
- b Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang.
- c Pada kasus gawat darurat (*emergency*) seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) wajib memberikjan pelayanan walaupun tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia. Penggantian biaya pelayanan kesehatan yang klaim ke PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku untuk peserta Askeskin
- d Pelayanan rawat inap dilaksanakan pada Puskesmas dan ruang inap kelas III (tiga) di RS Pemerintah termasuk RS Khusus TNI/POLRI dan RS swasta yang bekerja sama dengan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan membuat perjanjian dengan RS setempat.
- e Pelayanan obat di Puskesmas beserta jaringannya di Rumah Sakit.

8 Kasi Kepesertaan dan Penerbitan Serta Distribusi Kartu Peserta

Tugas :

- a Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Kepesertaan dan Pemasaran
- b Merencanakan dan melaksanakan program perluasan kepesertaan dan pemasaran serta keadministrasian kepesertaan.
- c Melaksanakan program penyuluhan dan pembinaan peserta.
- d Menyelenggarakan penanggulangan keluhan peserta.

- e Melakukan evaluasi program perluasan kepesertaan.
- f Melakukan tugas lain yang dibebankan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- g Membuat skala prioritas peta pengembangan pemasaran.
- h Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait.

Wewenang :

- a Menandatangani kartu peserta sementara.

Tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi di lingkungan unit masing-masing.
- b. Bertanggung jawab atas fasilitas yang berada di lingkungan unit yang bersangkutan.
- c. Bertanggung jawab atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap semester/tahunan.

9 Pelaksana Pelayanan Kepesertaan Askeskin

Tugas :

- a Registrasi Peserta
- b Data miskin yang telah ditetapkan Pemda melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota dilakukan entry oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kabupaten/Kota setempat.
- c Entry data meliputi antara lain nomor kartu, nama peserta, status peserta, tanggal lahir jenis kelamin dan alamat peserta.

10 Pelaksana Penerbitan dan Distribusi Kartu Peserta

Tugas :

- a Setelah dilakukan entry data, dilakukan pencetakan dan penerbitan kartu peserta Askeskin.
- b PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia bertanggung jawab terhadap ketersediaan blanko kartu askeskin.

- c Pencetakan kartu Askeskin didasarkan kepada tingkat kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat kartu Askeskin pada tahun sebelumnya.
- d Selanjutnya proses pendistribusian kartu Askeskin oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang atau PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kabupaten/Kota bekerja sama dengan tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Tim tersebut melibatkan antara lain PPK, Puskesmas, Karang Taruna dan lain-lain.
- e Penyerahan kartu yang telah diterbitkan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia kepada Tim tersebut dilengkapi dengan berita acara serah terima.
- f Tim tersebut menyerahkan kartu Askeskin kepada yang berhak dengan tanda terima yang ditandatangani/cap jempol peserta dan atau anggota keluarga dan dikembalikan kepada PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia setempat. Bukti penerimaan kartu peserta dikembalikan ke PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia maksimal satu bulan dari penugasan.
- g PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia melaporkan hasil pendistribusian kartu peserta Askeskin ke Bupati, Gubernur, Departemen Kesehatan.

11 Pembantu Perwakilan Cabang (PPC)

Tugas :

- a Melakukan pengamatan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- b Melakukan pengolahan data dan pelayanan kesehatan dan peserta.
- c Menerima dan menyelesaikan keluhan dari peserta dan PPK.
- d Membantu kantor perwakilan dalam pembangunan perluasan kepesertaan dan pemasaran.
- e Membuat skala peta perkembangan pemasaran.
- f Menyiapkan jaringan pelayanan.
- g Melaksanakan pemeliharaan arsip dan inventaris kantor.

Wewenang :

- a. Melegalisir surat pengantar rujukan keluar daerah.
- b. Menyiapkan uang muka kerja.

12 Pelaksanaan Pembantu Perwakilan Cabang

Tugas :

- a. Melakukan administrasi kepesertaan.
- b. Membuat laporan bulanan kepesertaan.
- c. Mencatat seluruh klaim yang masuk di wilayah PPC.
- d. Membayar klaim perorangan.
- e. Melaksanakan pelayanan kesehatan pada peserta.
- f. Menagih premi peserta sukarela.
- g. Merekap dan melaporkan pelayanan kesehatan oleh dokter keluarga.
- h. Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh PPC.

3.3 Aktivitas Kerja PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Jember

PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember merupakan unit organisasi yang bergerak di bidang pelayanan jasa, yang dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan berada di wilayah pengawasan Kantor Cabang. Aktivitas kerja PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dibagi dalam tiga kegiatan, yaitu :

- a. Aktivitas atau kegiatan bagian kepesertaan dan pemasaran.
- b. Aktivitas pelayanan kesehatan.
- c. Aktivitas administrasi dan keuangan.

3.3.1 Aktivitas Bagian Kepesertaan Dan Pemasaran

- a. Memberi kode desa sesuai dengan Daerah TK II Jember.
- b. Mengentri data ke komputer untuk diterbitkan kartu askes peserta dan keluarganya.
- c. Memberi kode instansi sesuai dengan ketentuannya.
- d. Memberi stempel cap sah apabila sudah ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember.
- e. Memberi kode Puskesmas sesuai lingkup Daerah TK II Jember

3.3.2 Aktivitas Pelayanan Kesehatan.

- a. Meregister klaim atau data pengobatan, mengentry data tersebut ke dalam komputer untuk persiapan pembayaran selanjutnya dari data tersebut dikeluarkan voucher sebagai bukti pengeluaran atau biaya pembayaran.
- b. Menerima klaim atau PKK yang meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, obat rawat jalan dan obat rawat inap.
- c. Mengkonfirmasi atau meneliti kebenaran dan kelengkapan serta meneliti (memilah-milah perbulan pelayanan) klaim yang masuk dari PPK.

3.3.3 Aktivitas Administrasi dan Keuangan

- a. Meneliti ulang klaim yang masuk dari pelayuan dan dinyatakan sah atau tidak sah, klaim tersebut harus dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sudah diverifikasi
 2. Sudah ditandatangani kas pelayanan
 3. Ada bukti pendukung yang memenuhi persyaratan yaitu :
 - a Kuitansi
 - b Bukti pelayanan dari pengaju klaim
 - c Paraf dari penderita
 - d Fotocopy kartu askes
 - e Paraf dokter yang merawat
 - f Stempel pengajuan

Setelah ketentuan tersebut di atas dinyatakan lengkap maka kasir membuat kuitansi pembayaran dan diajukan ke kasi administrasi dan keuangan lalu diparaf, setelah diajukan ke Kepala Kantor Perwakilan Cabang sebagai penanggung jawab pengeluaran ketentuan yang berlaku. Maka data klaim

tersebut dientrikan ke data pelaksana pembukuan dan dikeluarkan vouchernya kemudian dibayarkan pada peserta pelaksana pengajuan klaim.

- b. Mengadakan pengolahan data serta pembelian data untuk menjadikan sebuah surat pertanggungjawaban keuangan sebagai penanggung jawab Kantor Perwakilan Cabang 10-30 Jember kepada Kantor Cabang Propinsi Jawa Timur.

3.4 Pembayaran Klaim Masyarakat Miskin

3.4.1 Sumber Dana

Dana untuk program Askeskin ini berasal dari APBN dialokasikan melalui DIPA Ditjen Bina Yanmedik Nomor 1189.0/024.04.0/-/2007 dan DIPA Ditjen Binkesmas Nomor 0674.0/024-03-.0/-/2007 Departemen Kesehatan Tahun 2007, ditambah sisa/luncuran dana tahun 2006.

Pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah masing-masing meliputi antara lain :

1. Penanggungungan selisih tarif di Rumah Sakit.
2. penanggungungan harga di luar obat formularium Rumah Sakit Program JPK-MM-Askeskin Tahun 2007.
3. Pendamping pasien rawat inap 1 (satu) orang.
4. Penanggungungan biaya transportasi pendamping pasien rujukan.
5. Masyarakat miskin yang tidak masuk dalam pertanggungungan kepesertaan Askeskin.

3.4.2 Penyaluran Dana

1. Dana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

Dana untuk pelayanan kesehatan miskin di puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung dari Departemen Kesehatan ke puskesmas melalui PT. Pos Indonesia. Dana itu terdiri dari kegiatan Yunkesdas dan pertolongan persalinan. Dana tersebut digunakan untuk pelayanan, yaitu :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
- c. Persalinan

d. Transportasi rujukan, *emergency*

Dana untuk pelayanan kesehatan untuk miskin di rumah sakit disalurkan oleh Departemen Kesehatan melalui PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Jember.

Dana yang diterima PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia disalurkan ke rumah sakit dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lainnya kecuali Puskesmas dan jaringannya.

2. penyaluran dana *safeguarding* Pusat dibayarkan melalui KPPN-Jakarta V, sedangkan *safeguarding* Propinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan dalam DIPA Kebijakan dana Manajemen Pembangunan Kesehatan Propinsi yang penyalurannya melalui Surat Kusa Pengguna Anggaran (SKPA).

3.4.3 Penagihan Klaim

Penagihan klaim pada rumah sakit adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan
 - a. Rumah Sakit mengajukan klaim ke PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia setempat dilampiri dengan :
 - 1) Surat pengantar pengajuan klaim.
 - 2) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) rangkap 4 (empat).
 - 3) Kuitansi asli bermaterai rangkap 3 (tiga).
 - 4) Bukti pendukung pelayanan yang telah dilakukan rumah sakit.
 - b. Untuk pelayanan rawat inap, hitungan hari rawat adalah tanggal keluar pasien dikurangi tanggal masuk.
 - c. Rumah sakit wajib mengajukan klaim paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya sedangkan pengajuan klaim rawat jalan dapat dilanjutkan setiap minggu.
2. Transportasi
 - a. Rumah sakit mengajukan klaim ke PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia setempat dengan melampirkan :
 - 1) Surat pengantar pengajuan klaim.
 - 2) Formulir pengajuan klaim rangkap 4 (empat)

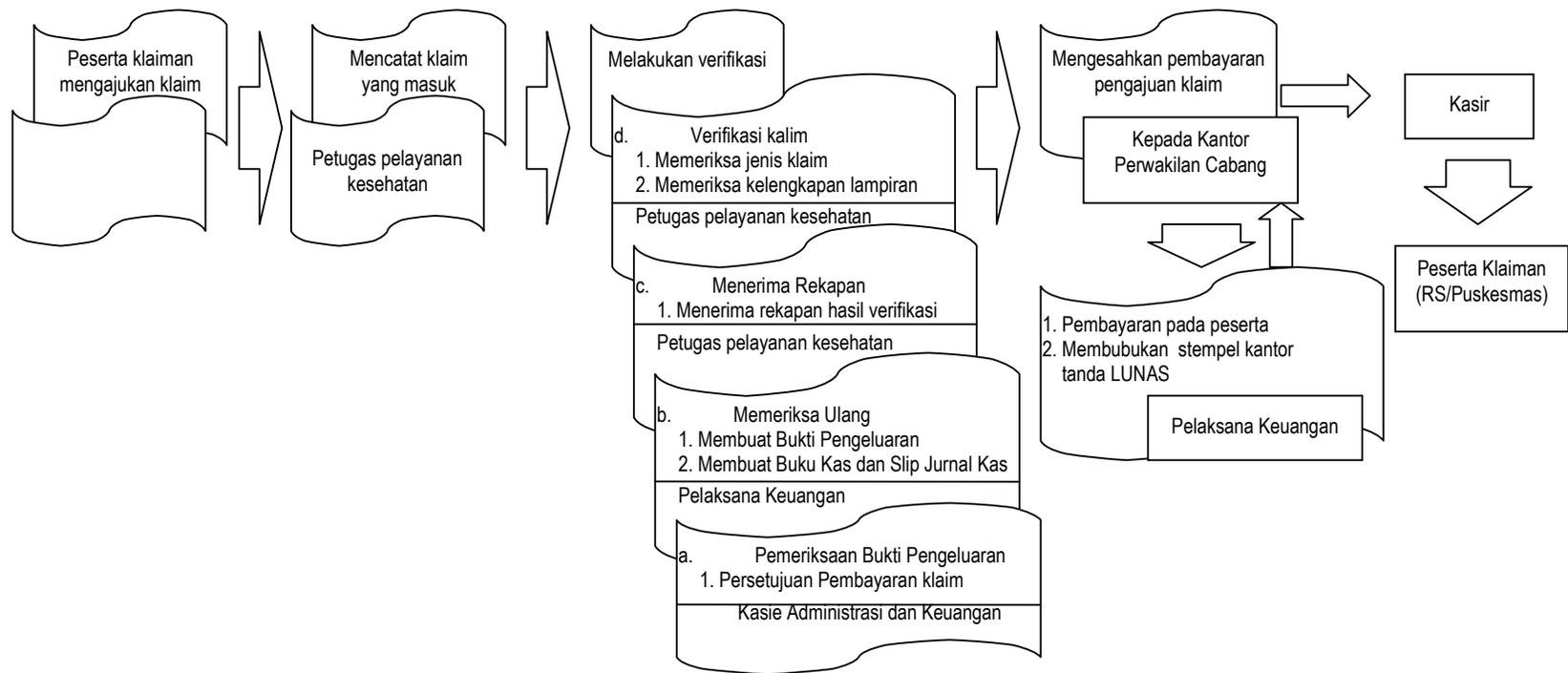
- 3) Kuitansi asli bermaterai rangkap 3 (tiga)
 - b. Surat pengajuan alat transportasi rujukan yang ditandatangani Direkstur RS atau pejabat yang ditunjuk dan peserta atau keluarganya.
 - c. Kuitansi biaya penggunaan alat transportasi rujukan.

BAB IV
HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

**4.1 Prosedur Pengajuan Klaim Masyarakat Miskin PT. (Persero) Askes
Indonesia Cabang Jember**

Dalam suatu perusahaan pelayanan jasa terdapat berbagai sistem yang merupakan kumpulan dari beberapa prosedur. Masing-masing prosedur adalah suatu sistem yang biasanya mempunyai hubungan erat dan saling mempengaruhi seperti halnya dalam prosedur administrasi pembayaran klaim merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan asuransi. Karena hal ini berkaitan dengan tujuan perusahaan yang memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta, khususnya dalam pembayaran klaim.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar prosedur pelaksanaan administrasi pembayaran klaim maskin dibawah ini :



Bagan 4.1 : Prosedur Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Klaim Maskin PT.(Persero) Askes Indonesia Cabang Jember.

Sumber : PT. (Persero) Askes Indonesia

1. Peserta (Rumah sakit/Puskesmas) Mengajukan Klaim

Dalam mengajukan klaim peserta terlebih dahulu mengisi FPK (Formulir Pengajuan Klaim). FPK ini digunakan untuk mengajukan klaim setelah adanya pemeriksaan atau pengoreksian kebenaran atas pengajuan klaim yang diajukan kepada pihak PT. Askes (Persero) Cabang Jember.

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu harus melampirkan :

- a. Kartu Askeskin asli dan foto copy sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Foto copy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa setempat yang dilegalisir.
- c. Pas foto terbaru 3x4 2 (dua) lembar.
- d. Foto copy Kartu Keluarga.
- e. Menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran atau Akte Kelahiran asli dan foto copy (apabila ada persalinan).

2. Mencatat Klaim Yang Masuk

Setelah peserta (Rumah Sakit/Puskesmas) mengajukan klaim dan berkasnya telah lengkap maka berkas tersebut akan dicatat dan diperiksa oleh Petugas Pelayanan Kesehatan (PPK) untuk di *up-date* datanya.

3. Menyerahkan Berkas Klaim pada verifikator untuk di verifikasi

- 1) Dilakukan oleh Petugas Pelayanan Kesehatan (PPK) bagian verifikasi klaim yang tugasnya adalah sebagai berikut :
 - a. Memilah berkas-berkas tadi sesuai dengan jenis klaim yang diajukan, misalnya klaim persalinan, klaim rawat inap, klaim rawat jalan dan lain-lain.
 - b. Memeriksa kembali kelengkapan lampiran, tujuannya adalah apabila terjadi kekurangan persyaratan yang diajukan.
- 2) Dilakukan oleh Petugas Pelayanan Kesehatan (PPK) penerima hasil rekapan verifikasi klaim, yang tugasnya sebagai berikut :
 - a. Mencatat hasil rekapan verifikasi klaim pada buku register sebagai catatan persetujuan atas klaim yang diajukan.

5. Kepala Kantor Perwakilan Cabang kemudian menyerahkan kuitansi tadi pada kasir untuk dibayarkan pada pihak klaiman (Rumah Sakit/Puskesmas).
6. Setelah itu klaim akan diserahkan pada pihak klaiman sesuai dengan jumlah klaim yang tertera pada kuitansi pembayaran klaim.

4.2 Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Klaim Masyarakat Miskin PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember

Berdasarkan gambar bagan pelaksanaan administrasi pembayaran klaim masyarakat miskin pada PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember adalah sebagai berikut :

1. Peserta mengajukan klaim pada PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember dan akan ditangani langsung oleh Petugas Pelayanan kesehatan (PPK). Kemudian PPK memberikan FPK (Formulir Pengajuan Klaim) untuk kemudian diisi oleh PPK secara lengkap dan benar serta sebesar berapakah klaim yang akan diajukan oleh peserta kepada PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember.

Adapun bentuk FPK adalah sebagai berikut:

Format : 10

**FORMULIR PENGAJUAN KLAIM (FPK)
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
PT (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA
CABANG JEMBER**

TANGGAL MASUK : TANGGAL TERIMA YANKES : TANGGAL TERIMA KEU :

NO. REG. MASUK : NO. REG. KLAIM YANKES : NO. REG. KLAIM KEU :

JENIS PENAGIHAN : KOLEKTIF / DOKTER KELUARGA / PERORANGAN*)
SOSIAL / KOMERSIAL*)
..... MANKIN NAMA PPK / BU*)
.....
KODE PPK / BU*) 35090502

JENIS PELAYANAN : PERSALINAN BLN. / THN. PELAYANAN Okt s/d Des 200

NAMA PENGAJU : Puskemas Lojejer KUASA / PESERTA*) :

NAMA PENDERITA : P/I/S/A*) :

NO. KARTU PESERTA :

ALAMAT :

TELPON :

NO.	URAIAN BIAYA	DIAJUKAN (DIISI PENGAJU KLAIM)			D/SETUJUI (DIISI PT ASKES)		
		KASUS	TINDAKAN HR/R/LBR	BIAYA (Rp.)	KODE AKUN	KASUS	TINDAKAN HR/R/LBR
	<u>Persalinan</u>						
1	<u>Oktober</u>	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>1.200.000,-</u>			
2	<u>November</u>	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>800.000,-</u>	<u>6</u>		<u>1.200.000</u>
3	<u>Desember</u>	<u>15</u>	<u>-</u>	<u>3.000.000,-</u>	<u>4</u>		<u>800.000</u>
					<u>15</u>		<u>3.000.000</u>
	JUMLAH			<u>5.000.000</u>	JUMLAH		<u>5.000.000</u>

Kopala Puskemas Lojejer

(Dr. Dwi Sulandari)
No. Telp. 140 364 523

Jember
(INDAH W. Manajer)

Distribusi :
Lembar Asli : BidBukPus / BidKeu / SiAdKeu
Lembar ke-2 : BidYankes / SiYankes
Lembar ke-3 : Pengaju Klaim
Lembar ke-4 : Arsip

Gambar 4.1: Formulir Pengajuan Klaim

Sumber : PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember

Cara pengisian Formulir Pengajuan Klaim yang diisi oleh Petugas Pelayanan Kesehatan adalah :

1. Tanggal Masuk : diisi sesuai dengan tanggal masuk pengajuan klaim.
2. Tanggal Terima Yankes : diisi sesuai dengan tanggal dimana klaim tersebut masuk ke bagian pelayanan kesehatan.
3. Tanggal Terima Keuangan : diisi sesuai dengan tanggal dimana klaim tersebut masuk ke bagian keuangan.
4. No. Reg. Masuk : diisi sesuai dengan nomor register yang masuk pada PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.
5. No. Reg. Yankes : diisi sesuai dengan nomor register yang masuk pada bagian pelayanan kesehatan.
6. Kasus : diisi sesuai dengan kasus yang diakui oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.
7. Tindakan HR/R/LBR : diisi sesuai dengan tindakan yang diberikan oleh pelayanan kesehatan kepada peserta.
8. Kode Akunt : diisi sesuai dengan kasus yang diakui oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.
9. No. Reg. Maim Keuangan : diisi sesuai dengan nomor register pada bagian keuangan.
10. Kode PPK/BU*) : diisi sesuai dengan kode PPK/BU yang mengajukan klaim.
11. Biaya yang Disetujui : diisi sesuai dengan biaya yang diakui oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.
12. Jumlah : diisi sesuai dengan jumlah biaya.
13. Tanda tangan : ditanda tangani oleh pengaju klaim dan managaer PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.

bentuk FPK dapat dilihat pada lampiran 6

2. Petugas Pelayanan Kesehatan mencatat klaim yang masuk pada buku register. Peserta menyerahkan berkas-berkas kelengkapan pengurusan klaim beserta FPK yang telah diisi dengan lengkap dan benar kepada PPK dan selanjutnya PPK akan meneliti kebenaran serta kelengkapan berkas tersebut dan kemudian di *up-date* di komputer dan diberi nomor register.

Jadi setiap ada klaim yang masuk ke bagian pelayanan kesehatan langsung dicatat di buku registrasi klaim sebagai bukti bahwa klaim pelayanan sudah dapat diterima. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1 : Buku Registrasi Klaim Pelayanan Persalinan

No	Tanggal	Nama Pengaju	Bulan Pelayanan	Jenis Pelayanan	Jumlah Kasus	Jumlah Lembar	Jumlah Biaya
1.	27-03-2007	PPK Patrang	Maret	Persalinan	2	1	1.750.000

Sumber : PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember

Keterangan :

- a. No. Urut : Nomor urut klaim yang masuk ke bagian pelayanan kesehatan.
- b. Tanggal : Diisi sesuai dengan tanggal dimana klaim tersebut masuk ke bagian pelayanan.
- c. Nama Pengaju : Diisi sesuai dengan nama PPK yang memasukkan klaim tersebut ke bagian pelayanan.
- d. Bulan Pelayanan : Diisi sesuai dengan waktu atau bulan berapa pelayanan kesehatan dilaksanakan.
- e. Jenis Pelayanan : Jenis pelayanan yang diberikan PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia melalui PPK (pelaksana pelayanan kesehatan).
- f. Jumlah Kasus : Berapa kali peserta berobat atau berkunjung ke Rumah Sakit.
- g. Jumlah Lembar : Merupakan jumlah resep obat yang diterima peserta, diajukan oleh apotek yang ditunjuk.
- h. Jumlah Biaya : Merupakan biaya yang diajukan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.

3. Peserta menyerahkan berkas-berkas kelengkapan pengurusan klaim beserta FPK yang telah diisi dengan lengkap dan benar kepada PPK dan selanjutnya PPK akan meneliti kebenaran serta kelengkapan berkas tersebut dan kemudian di *up-date* di komputer.
4. Setelah datanya di *up-date* oleh PPK, maka PPK melakukan verifikasi. Dalam melakukan verifikasi klaim ada beberapa tahap, yaitu :
 - a. Memeriksa jenis klaim dan memeriksa kelengkapan lampiran yang diajukan.

Dibawah ini adalah contoh klaim jenis klaim persalinan yang diajukan pada pihak PT. Askes Indonesia Cabang Jember.

Tabel 4.2 : Hasil verifikasi klaim persalinan

No	Pelayanan	Kasus	Jumlah Maskin	Hari Rawat	Tindakan	Biaya (Rp)
1.	Persalinan	3	3	8 Hari	Normal dan Penyulit	Rp. 1.150.000
				8 Hari		Rp. 1.150.000

Sumber : PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember

Adapun cara pengisian tabel adalah sebagai berikut :

1. No : diisi sesuai dengan nomor urut verifikasi.
2. Kasus : diisi sesuai dengan jumlah kasus persalinan di Puskesmas setempat
3. Jumlah maskin : diisi sesuai dengan bempa peserta maskin yang di rawat di Puskesmas setempat.
4. Hari Rawat : diisi sesuai dengan jumlah hari pelayanan sampai peserta selesai dirawat.
5. Biaya : diisi sesuai dengan jumlah biaya yang harus diklaimkan.

Tabel 4.3 : Tabel Verifikasi Klaim Kolektif Persalinan

No	Nama Peserta	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Tindakan	Biaya (Rp)
1.	Susiati	02-03-07	05-03-07	Normal	Rp. 350.000,-
2.	Mariyani	09-03-07	11-03-07	Normal	Rp. 300.000,-
3.	Nanik	24-03-07	27-03-07	Penyulit	Rp. 400.000,-
Jumlah					Rp. 1.150.000,-

Sumber : PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember

Cara pengisian verifikasi klaim adalah sebagai berikut:

- a. No. : diisi sesuai dengan nomor urut verifikasi.
- b. Tanggal Masuk : diisi sesuai dengan mulai tanggal berapa peserta dirawat di Puskesmas setempat.
- c. Tanggal Keluar : diisi sesuai dengan tanggal berapa peserta keluar dari Puskesmas dan selesai dirawat.
- d. Tindakan : diisi sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, peserta mengalami persalinan normal atau penyulit.
- e. Biaya : diisi sesuai dengan jumlah hari ditambah harga operasi persalinan normal.

Keterangan :

1. Hari Rawat/hari Rp. 50.000,-
2. Operasi Normal Rp. 200.000,-
3. Operasi Penyulit Rp. 250.000,-

b. Menerima Hasil Rekapitan Verifikasi.

Setelah Petugas Pelayanan Kesehatan melakukan pemeriksaan kelengkapan lampiran-lampiran pengajuan klaim dan dinyatakan lengkap maka rekapitan hasil verifikasi akan diserahkan pada Kasie Pelayanan Kesehatan untuk diperiksa dan disetujui dengan tanda tangan persetujuan yang nantinya akan diserahkan pada petugas pelaksana keuangan. Adapun bentuk dari rekapitan hasil verifikasi serta pengisian sebagai berikut :

NAMA RS/KLAIM KOLEKTIF : Patrang, PKM/Kolektif

TINGKAT PELAYANAN : RITP

NOMOR REGISTER : 072006001

Tabel 4.4: Rekapitan Verifikasi Klaim Persalinan

No	No. SJP	Tanggal Verifikasi	Biaya	
			Diajukan	Disetujui
1.	1329002350012	01 April 2007	1.150.000,-	1.150.000,-
	Total		1.150.000,-	1.150.000,-
Resume			Kasus	Biaya
Total biaya yang diajukan			Klaim Persalinan	1.150.000,-
				1.150.000,-
Selisih				0

Sumber : PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember

Cara pengisian Rekapitan hasil verifikasi adalah sebagai berikut :

1. Nama RS/Klaim : diisi sesuai dengan nama rumah sakit dan jenis klaim.
2. Tingkat pelayanan : diisi sesuai dengan tingkat pelayanan, misalnya klaim. persalinan nama, tingkat pelayanannya RITP.
3. Nomor Register : diisi sesuai dengan nomor register.
4. No : diisi sesuai dengan nomor urut transaksi.
5. No. SJP : diisi sesuai dengan nomor SJP.
6. Tanggal verifikasi : diisi sesuai dengan tanggal verifikasi.

7. Biaya

1. Diajukan oleh : diisi sesuai dengan biaya yang diajukan klaiman.
2. Disetujui oleh : diisi sesuai dengan biaya yang disetujui pihak Askes.

8. Resume

1. Total biaya diajukan : diisi sesuai dengan total biaya yang diajukan.
2. Total biaya yang disetujui : diisi sesuai dengan total biaya yang disetujui

9. Kasus : diisi sesuai dengan kasus yang terjadi.

10. Biaya : diisi sesuai dengan jumlah biaya.

11. Selisih : diisi jika ada selisih biaya.

c. Pelaksana Keuangan bertugas memeriksa kembali lampiran-lampiran yang telah disetujui oleh Kasie Pelayanan Kesehatan, apakah klaim tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dibayar baik itu tanda tangan peserta beserta pendukung klaim lainnya yang diajukan oleh pihak Puskesmas.

Pendukung klaim yang harus diisi ulang adalah :

Klaim Kolektif

Dalam klaim kolektif ini yang perlu diteliti ulang yaitu

- a. Bukti-bukti Formulir Pengajuan Klaim.
- b. Foto copy kartu Askeskin sebagai bukti orang tersebut berkunjung.
- c. Tandatangani Peserta.
- d. Hasil verifikasi tagihan klaim kolektif.
- e. Besarnya tagihan.

Setelah memeriksa ulang kelengkapan klaim, pelaksana. Keuangan membuat bukti pengeluaran. Bukti pengeluaran yaitu tanda bukti terjadinya suatu transaksi yang sah yang telah disetujui oleh Kepala Seksi Keuangan dan Administrasi dan Kepala Perwakilan Cabang, Bukti pengeluaran dibagi menjadi dua yaitu :

1. Bukti Pengeluaran Kas

Yaitu, bukti yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Perwakilan Cabang Jember yang berkaitan dengan pengeluaran klaim kolektif. Bentuk dan cara pengisian dari buku pengeluaran Kas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5: Bukti Pengeluaran Kas oleh PT. (Persero) Askes Indonesia

No. Urut	Kode Akunt	Kode Tambahan	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	30104001	PK 13299999	Dibayar klaim PPK Patrang.	1.150.000,-
Total				1.150.000,-

Sumber : PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember

Cara pengisian bukti pengeluaran kas adalah sebagai berikut :

- a. Nomor Urut : diisi sesuai dengan nomor urut transaksi.
- b. Kode Akuntansi : diisi sesuai dengan kode akuntansi transaksi yang terjadi.
- c. Kode Tambahan : diisi sesuai dengan jenis transaksi kas yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember setelah terjadi klaim yang dilakukan oleh Rumah Sakit atau Bidan. Disertai kartu peserta dan nomor registrasi sebagai bukti bahwa klaim sudah dibayarkan.
- d. Uraian : diisi sesuai dengan jenis transaksi.
- e. Jumlah : diisi sesuai dengan tarif pelayanan persalinan yang sudah ditentukan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia yaitu sebesar 1.150.000,-.

2. Bukti Pengeluaran Bank

Yaitu, bukti yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Perwakilan Cabang Jember yang berkaitan dengan pengeluaran klaim kolektif.

Tabel 4.6: Bukti Pengeluaran Bank oleh PT. Askes Indonesia

No. Urut	Kode Akunt	Kode Tambahan	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	30104001	PK 1329R001	Dibayar pelayanan persalinan maskin pada PPK Patrang	1.150.000
Total				1.150.000

Sumber : PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember

Cara pengisian pengeluaran bank adalah sebagai berikut

- a. No. Urut : diisi sesuai dengan nomor urut transaksi.
- b. Kode akuntansi : diisi sesuai dengan kode akuntansi transaksi yang terjadi.
- c. Kode Tambahan : diisi sesuai dengan kode, Rumah Sakit yang menyatakan kerjasama dengan PT. Askes Indonesia Cabang Jember.
- d. Uraian : diisi sesuai dengan jenis transaksi bank.
- e. Jumlah : diisi sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) Askes Indonesia setelah terjadi klaim.

Setelah membuat bukti pengeluaran, petugas pelaksana keuangan akan membuat serta mengisi buku bank, slip jurnal bank, buku kas dan slip jurnal kas. Berdasarkan bukti pengeluaran terlebih dahulu akan mencatat pengeluaran tersebut kedalam buku bank dan buku kas, yang kemudian dalam setiap akhir minggu akan dibuat slip jurnal bank atau slip jurnal kas.

1. Membuat dan Mengisi Buku Bank.

Buku Bank adalah suatu buku yang digunakan oleh pihak Askes sebagai media untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran bank yang terjadi pada, setiap harinya dari buku pengeluaran bank yang dikeluarkan dan dinyatakan sah atas kebenarannya sesuai dengan kode akunnya. Buku Bank ini digunakan untuk kasus klaim kolektif (persalinan) dan dibuat rangkap dua, dimana lembar pertama, akan diserahkan kepada kantor regional Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya, lembar kedua sebagai arsip untuk PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember. Adapun bentuk dan cara pengisian buku bank adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7: Buku Bank PT (Persero) Askes Indonesia

No. Urut	No. Bukti	Uraian	Kode Akunt.	Mutasi		Saldo (Rp)
				D	K	
		Saldo Awal				5.000.000
1.	001/KK/07/2006	Dibayar klaim pelayanan Operasi Persalinan PPK Patrang	3010401	-	1.150.000 0,-	
Jumlah				-	1.150.000 -,-	4.850.000,-

Sumber : PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember

Cara pengisian buku kas adalah sebagai berikut:

- a. No. Urut : diisi sesuai dengan nomor urut transaksi.
- b. No. Bukti : diisi sesuai dengan nomor dokumen yang menjadi dasar pembukuan yang sudah terprogram dalam file-file computer PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia sehingga setiap transaksi yang dikeluarkan akan tertulis pada kolom nomor bukti. Misalnya untuk pengeluaran kas, disitu ditulis dengan kode KK.
- c. Uraian : diisi sesuai dengan jenis transaksi bank.
- d. Kode Akunt : diisi sesuai dengan akunt lawan yang menjadi sumber penerimaan atau tujuan pengeluaran Bank.
- e. Debet : diisi sesuai dengan jumlah rupiah penerimaan Bank maupun akuntansi setiap transaksi yang terjadi.
- f Kredit : diisi sesuai dengan pengeluaran Bank per akuntansi setiap transaksi.
- g. Saldo : diisi sesuai dengan saldo kas setiap hari dari hasil perhitungan saldo hari lalu penerima dikurangi pengeluaran hari itu.

Setelah membuat dan mengisi Buku Bank Petugas Pelaksana Keuangan membuat dan mengisi slip jurnal Bank, yang mana keterangannya seperti dibawah ini :

a. Membuat dan mengisi Slip Jurnal Bank

Slip Jurnal Bank adalah media yang digunakan untuk mengikhtisarkan transaksi bank yang tedadi dalam satu minggu berdasarkan data dari Buku Bank.

Tabel 4.8 : Slip Jurnal Bank pada PT. (Persero) Askes Indonesia

No. Urut	Kode Akunt.	Debet	Kredit
1.	10002001	6.339.485	5.054.125
2.	20303001	18.000	-
3.	20303011	16.000	-
4.	20303011	120.125	-
5.	40201001	-	100.000
6.	20101001	-	992.000
7.	80102011	-	327.360
8.	80102021	-	20.125
Jumlah	80102041	6.493.610	6.493.610

Sumber: PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember

Cara pengisian Slip Jurnal Bank adalah sebagai berikut:

- a. No. Urut :diisi sesuai dengan nomor urut transaksi.
- b. Kode Akuntansi :diisi sesuai dengan nomor kode akuntansi transaksi bank.
- c. Debet :diisi sesuai dengan jumlah Rupiah setiap nomor akuntansi yang sama yang terdapat dalam Buku Bank sebelah kredit pada minggu yang bersangkutan.
- d. Kredit :diisi sesuai dengan jumlah setiap, nomor akuntansi yang sama yang terdapat dalam Buku Bank sebelah debet pada minggu yang bersangkutan.

b. Mengisi Buku Kas

Buku Kas adalah suatu buku yang digunakan sebagai media untuk mencatat setiap hasil transaksi pengeluaran yang dinyatakan sah atas kebenaran transaksi tersebut sesuai dengan kode akuntansinya, yang dibayar langsung ke kasir atau. transfer PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia. Misalnya klaim persalinan akan dicatat dalam buku kas, berdasarkan bukti-bukti persalinan. Adapun bentuk dan cara, pengisian dari buku kas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 : Buku Kas Pada PT. (Persero) Askes Indonesia

No. Urut	No. Bukti	Uraian	Kode Akunt.	Mutasi		Saldo (Rp)
				D	K	
		Saldo Awal				5.000.000
1.	001/KK/07/2006	Dibayar klaim pelayanan Operasi Persalinan PPK Patrang	30104001	-	1.150.000,-	
Jumlah				-	1.150.000,-	4.850.000,-

Sumber : PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember

Cara pengisian buku kas adalah sebagai berikut:

- a. No. Urut : diisi sesuai dengan nomor urut transaksi.
- b. No. Bukti : diisi sesuai dengan nomor dokumen yang menjadi dasar pembukuan yang sudah terprogram dalam file-file computer PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia sehingga setiap transaksi yang dikeluarkan akan tertulis pada kolom nomor bukti. Misalnya untuk pengeluaran kas, disitu ditulis dengan kode KK.
- c. Uraian : diisi sesuai dengan jenis transaksi bank.
- d. Kode Akunt : diisi sesuai dengan akunt lawan yang menjadi sumber penerimaan atau tujuan pengeluaran Bank.
- e. Debet : diisi sesuai dengan jumlah rupiah penerimaan Bank maupun akuntansi setiap transaksi yang terjadi.
- f. Kredit : diisi sesuai dengan pengeluaran Bank per akuntansi setiap transaksi.

g. Saldo : diisi sesuai dengan saldo kas setiap hari dari hasil perhitungan saldo hari lalu penerima dikurangi pengeluaran hari itu.

c. Pengisian Slip Jurnal Kas

Slip jurnal kas adalah media yang digunakan untuk mengikhtisarkan transaksi kas yang terjadi dalam satu minggu berdasarkan data dari buku kas.

Tabel 4.10 : Slip Jurnal Kas pada PT. (Persero) Askes Indonesia

No. Urut	Kode Akunt.	Debet	Kredit
1.	10001001	565.000	5.010.750
2.	20101001	5.000.000	-
3.	402011001	10.750	-
4.	30104001	-	350.000
5.	30101001	-	215.000
Jumlah		5.575.000	5.575.000

Sumber PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember

Cara pengisian Slip Jurnal Bank adalah sebagai berikut:

- a. No. Urut : diisi sesuai dengan nomor urut transaksi.
- b. Kode Akuntansi : diisi sesuai dengan nomor kode akuntansi transaksi bank.
- c. Debet : diisi sesuai dengan jumlah Rupiah setiap nomor akuntansi yang sama yang terdapat dalam Buku Bank sebelah kredit pada minggu yang bersangkutan.
- d. Kredit : Diisi sesuai dengan jumlah setiap, nomor akuntansi yang sama yang terdapat dalam Buku Bank sebelah debit pada minggu yang bersangkutan.

- d. Pemeriksaan Bukti Pengeluaran oleh Kasie Administrasi dan Keuangan Kasie Administrasi dan Keuangan memeriksa bukti pengeluaran dari bagian pelaksana keuangan serta membubuhkan tanda persetujuan pembayaran klaim yang diajukan. Adapun bentuk dan cara pengisian kwitansi adalah sebagai berikut :

		No. TB : 01/Prs./04/2007
		ASKES : 403.0
KWITANSI		
Sudah terima dari	: PT. (Persero) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA CABANG JEMBER	
Terbilang	: Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah.	
Untul Pembayaran	: Klaim Pelayanan Operasi Kolektif pada PPK Patrang.	
Jumlah Rp. 1.150.000,-		
Setuju dibayar,	Telah dibayar, Tgl. 01 April 2007	Jember, 01 April 2007 Telah diterima
INDAH ERLINA S.	JUANI K.	dr. H. CHOLID BAKHIR

Gambar 4.2 : Kwitansi Pembayaran Klaim Pelayanan Operasi pada PPK Patrang.

Sumber : PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember.

Adapun penjelasan dari lampiran tersebut adalah sebagai berikut

- a. No. TB : diisi sesuai dengan urutan pengeluaran kas.
 - b. Akes : diisi sesuai dengan kode askes pengeluaran kas.
 - c. Sudah diterima dari : diisi oleh pihak yang mengeluarkan dalain haln ini PT Askes Indonesia.
 - d. Setuju Dibayar : ditandatangani oleh Manager PT. (Persero) Askes Indonesia Cabang Jember.
 - e. Telah Dibayar : ditandatangani oleh kasir bahwa uang tersebut telah dibayar.
 - f. Telah terima : diisi bahwa uang tersebut diterima, oleh penerima,
5. Berdasarkan berkas bukti pengeluaran keuangan yang telah disahkan oleh Kasie Administrasi dan Keuangan maka bukti-bukti tersebut akan langsung diserahkan kepada Kepala Kantor Perwakilan Cabang untuk disahkan atau ditandatangani dan membubuhkan stempel tanda, "LUNAS" sebagai bukti bahwa klaim yang ditagihkan telah dibayar.

Bentuk Kuitansi pembayaran sebagai berikut :

ASKES
Health Insurance Specialist
PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN
INDONESIA

KWITANSI

No. TB : /KBPo1Kas/0997
ASKES :

Sudah terima dari : PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN CABANG JEMBER

Terbilang : SATU Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Untuk pembayaran : Biaya Klaim dari pelayanan operasi PPK Patang Maret 2007.

Jumlah Rp. 1.150.000 -

Setuju dibayar,
INDAH ERLINA SUSILOWATI
MANAGER

Telah dibayar,
Tgl. 01-04-2007
JUANI KAMARUDIN
KASIR

Jember, 01 - 04 - 2007
Telah diterima,
6000
[Signature]

Kantor Cabang : Lembar 1 Pembukuan
Lembar 2 Pusat
Lembar 3 Pengaju

Kantor Perwakilan Cabang : Lembar 1 Pembukuan
Lembar 2 Pusat
Lembar 3 Pengaju

Gambar 4.3 : Kuitansi pembayaran klaim persalinan

Sumber : PT.(Persero) Askes Indonesia Cabang Jember

6. Pembayaran Klaim pada Peserta/PPK oleh bagian Pelaksana Keuangan (Kasir)

Berdasarkan dari berkas bukti pengeluaran, pelaksana keuangan (kasir) akan melakukan pembayaran klaim kepada pihak klaiman atas persetujuan Kepala Seksi Administrasi dan Kepala Kantor Perwakilan Cabang. Jadi pihak klaiman (Rumah Sakit/Puskesmas) akan menerima uang serta tanda terima berupa kuitansi.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul **"Pelaksanaan Administrasi Klaim Masyarakat Miskin PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Jember"**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peserta mengajukan klaim pada PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Jember.
2. Petugas pelayanan kesehatan memberikan Formulir Pengajuan Klaim pada peserta untuk diisi kemudian klaim yang masuk dicatat oleh Petugas Pelayanan Kesehatan (PPK).
3. Setelah diisi dan memenuhi persyaratan yang diajukan maka berkas tadi diserahkan pada verifikator untuk kemudian diverifikasi.
4. Setelah itu, bagian administrasi keuangan akan membuat tanda bukti pembayaran yaitu kuitansi. Dan berkas serta kuitansi langsung diberikan pada Kepala Kantor Perwakilan Cabang untuk ditandatangani untuk disetujui dan diberi tanda lunas serta stempel.
5. Klaim akan segera dibayarkan pada pihak klaiman setelah kuitansi diberikan ke kasir.
6. Kemudian Kasir akan membayarkan sebesar nominal yang tertera pada kuitansi pembayaran yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Perwakilan Cabang dan kemudian dibayarkan pada pihak klaiman (Rumah Sakit/Puskesmas).

DAFTAR PUSTAKA

- Gie, The Liang. 2000. **Administrasi Perkantoran Modern**. Yogyakarta: Radya Indra.
- Kantor Pusat Pegadaian. 2002. **Pedoman Asuransi Kesehatan Indonesia atas Keputusan Menkes Indonesia**. Jakarta: Asuransi Kesehatan Indonesia.
- Siagian, P. Sondang. 2002. **Kerangka Dasar Ilmu Administrasi**. Jakarta: PT Rieka Cipta.
- Adikoesoemo, Somita, Raden. 2000. **Studi Tentang Asuransi**. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Sukarna. 2002. **Pengantar Ilmu Administrasi**. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Wardhana. Drs. 2002. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta: Kunika.
- Hasyim, A. Ali. 2001. **Azas-azas Pengajuan Klaim Asuransi**. Jakarta; PT Esa, Malanur Abadi.

